



LAPORAN
EVALUASI
PELAKSANAAN RKPD DAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NTB
TRIWULAN IV TAHUN 2022


BAPPEDA PROVINSI NTB
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB pada Triwulan IV tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan IV merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan IV Tahun 2022. Laporan ini mengacu pada RKPD Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB. Sebanyak 27 indikator atau 72,97% telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2022, sedangkan 10 indikator atau 27,03% belum mencapai target.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataran, 2023
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimana pemerintah provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja perangkat daerah Provinsi NTB Tahun 2022 maupun lima tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023 harus mengetahui progres dan tingkat capaian secara berkala dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan yang ditargetkan.

Laporan evaluasi RKPD Triwulan IV merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan IV Tahun 2022. Evaluasi ini mengacu pada RKPD Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 281 kegiatan dan 861 sub kegiatan. Total program Perangkat Daerah sebanyak 178 dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.670.486.399.401,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.301.816.692.031,34 atau 93,49 persen.

Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan IV tahun 2022 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, rata-rata capaian kinerja sebesar 97,25 persen dengan capaian keuangan sebesar 93,49 persen. Capaian ini meningkat dari capaian pada Triwulan III sebelumnya yaitu sebesar rata-rata capaian kinerja sebesar 74,09 persen dengan capaian keuangan sebesar 73,75 persen.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sebanyak 27 indikator atau 72,97% telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2022, sedangkan 10 indikator atau 27,03% belum mencapai target. Beberapa indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target diantaranya Indeks Kapasitas Daerah, Persentase Kemantapan jalan, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Persentase konektivitas

transportasi publik, Opini BPK, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Nilai SAKIP, Angka Harapan Hidup, Persentase Balita Stunting, Harapan Lama Sekolah, Rata rata Lama Sekolah, Indeks Kualitas Air , Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, Nilai Realisasi Investasi, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Cakupan Air Minum, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) , Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase penurunan konflik sosial, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik , Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD. Terdapat 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2022, dimana sebanyak 69 indikator atau 66,99 persen sudah sesuai target bahkan melampaui, 33 indikator atau 32,04 persen belum memenuhi target dan masih terdapat 1 indikator atau 0,97 persen belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Sasaran	3
1.5 Sistematika Penulisan Laporan	3
BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022	4
2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2022	4
2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2022	5
2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2022	6
BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2022	10
BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022 TRIWULAN IV	30
4.1 Hasil Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan RKPD Triwulan IV Tahun 2022	30
4.2 Capaian RPJMD Provinsi NTB 2019-20223 sampai tahun 2022	132
4.2.1 Indikator Kinerja Utama	132
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah	135
BAB V : PENUTUP	154
5.1 Kesimpulan	154
5.2 Rekomendasi	155

p

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat baik dalam skala nasional maupun regional.

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. RPKD Tahun 2022 merupakan perencanaan tahun keempat penjabaran RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yang diarahkan pada upaya pemulihan sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, peningkatan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, menjaga stabilitas makro ekonomi, serta memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Dengan demikian diharapkan seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam mewujudkan dan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen RKPD maka dilaksanakan pengendalian dan evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan setiap triwulan guna memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada pasal 261 disebutkan bahwa evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD Provinsi untuk mengetahui realisasi antara rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi; serta realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Laporan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah berdasarkan sasaran pembangunan pada Triwulan IV Tahun 2022 mengacu pada RKPD Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor

24 Tahun 2021. Apabila berdasarkan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan baik dari aspek perencanaan dan pelaksanaannya maka BAPPEDA bersama dengan perangkat daerah terkait melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan baik pada pelaksanaan program/ kegiatan pada triwulan berikutnya maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan perubahan RKPD provinsi NTB Tahun 2022 dan RKPD Provinsi NTB tahun berikutnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022;

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja sasaran pembangunan dan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2022;
2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
3. Kinerja sebelumnya yang dapat dicapai dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi RKPD Tahun 2022 ini adalah untuk mengukur capaian Sasaran Pembangunan dan program/kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2022.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, dan sistematika penulisan laporan;
- Bab II : Prioritas, Sasaran dan Target Pembangunan Tahun 2022. Bab ini berisi tentang prioritas sasaran dan target pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022;
- Bab III : Rencana Program Prioritas Tahun 2022. Bab ini berisi tentang rincian program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2022.
- Bab IV : Capaian Target Kinerja Pembangunan Triwulan IV Tahun 2022. Bab ini berisi Capaian Target Kinerja Sasaran Pembangunan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas serta Penyerapan Anggaran Tahun 2022 sampai Triwulan I.
- Bab V : Penutup

BAB II : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022

2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Tahun 2022

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2022 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang", Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 -2023 sebagai berikut:

Misi 1 "NTB TANGGUH DAN MANTAP" melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;

Misi 2 "NTB BERSIH DAN MELAYANI" melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;

Misi 3 "NTB SEHAT DAN CERDAS" melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;

Misi 4 "NTB ASRI DAN LESTARI" melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

Misi 5 "NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI" melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;

Misi 6 "NTB ADIL DAN BERKAH" melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Adapun tujuan pembangunan NTB Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana.
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel.
4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing.
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing.
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan.
7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas.
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan.
9. Terwujudnya perindustrian yang unggul.
10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia).

Berdasarkan tujuan pembangunan, maka sasaran pembangunan NTB Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Meningkatnya Profesionalisme ASN.
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
10. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
11. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
12. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
13. Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
14. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas.
15. Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin .
16. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan.
17. Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin.
18. Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok.
19. Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
20. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
21. Meningkatnya Daya Saing Industri.
22. Menurunnya Pengangguran Terbuka.
23. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat.
24. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
25. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
26. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2022 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode ketiga dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Pembangunan NTB yaitu "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang".

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari periode RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi:

1. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat dalam masa pandemi Covid-19, dengan strategi:
 - a. Penguatan sektor Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19
 - b. Jaringan Pengaman Sosial bagi masyarakat miskin

- c. Penanganan dampak ekonomi Pandemi COVID-19.
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, dengan strategi :
 - a. Mengoptimalkan pertanian/agribisnis dan investasi, serta penyerapan tenaga kerja melalui kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta;
 - b. Pemulihan dan pengembangan sektor/aktivitas pariwisata;
 - c. Mengembangkan industri olahan dan alat-mesin berbasis pertanian, kehutanan, pertambangan dengan pola kemitraan;
 - d. Meningkatkan konektivitas wilayah dan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air dan energi, terutama pada Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
3. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, dengan strategi:
 - a. Mendorong Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah.
 - b. Mendorong Pemerataan Pendapatan Antar Kelompok Masyarakat.
 - c. Memperluas Akses terhadap kesempatan kerja dan peluang berusaha; serta
 - d. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

2.3 Prioritas Pembangunan dan Target Pembangunan Tahun 2022

Tema Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2022 yaitu **"Reformasi Ekonomi dengan Dukungan SDM yang Unggul"**. Adapun Prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD 2022 yaitu :

1. Memperkuat Mitigasi dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana, mendukung Prioritas Nasional 6;
2. Membangun Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Pengembangan Ekonomi, mendukung Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5;
3. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Pelayanan Publik mendukung Prioritas Nasional 7
4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan SDM, mendukung Prioritas Nasional dan Prioritas Nasional 3;
5. Meningkatkan Kualitas Pendidikan SDM, mendukung Prioritas Nasional 3;
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan, mendukung Prioritas Nasional 6;
7. Memperkuat Integrasi Hulu-Hilir Sistem Agribisnis Dalam Mendukung Investasi, mendukung Prioritas Nasional 1;
8. Mengoptimalkan Pengelolaan Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19, mendukung Prioritas Nasional 1;
9. Industrialisasi Produk Unggulan, mendukung Prioritas Nasional 1;
10. Penguatan Stabilitas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, mendukung Prioritas Nasional 4.

Target Pembangunan berdasarkan sasaran pembangunan tahun 2022 disajikan dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 2.1. Target Pembangunan Berdasarkan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022	
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	119.41	
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.63	
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas				Point	79.84
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	85.36	
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	52.17	
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	86.86	
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	BB	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	36.97	
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (76,01 - 80,00)	
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.70	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.53	
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	72.43	
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.08	
					Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	30.99	
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan				Point	62.74
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.73	
					Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.04	
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui	Terwujudnya lingkungan hidup dan	Indeks Kualitas Lingkungan			Point	68.22	
					Indeks Kualitas Air	Point	42.93	

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022	
	pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Point	87.56	
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	70.89	
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	68.70	
			Neraca pengelolaan sampah			%	85.00	
					Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	60.00
						Persentase Pengurangan Sampah	%	25.00
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	74.68	
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	15,428	
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.71	
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100	
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.70	
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	78.45	
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.91	
					Rasio Elektrifikasi	%	99.88	
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	65.80	
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0	
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11,604	
				Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)		%	3.00
						Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2022	
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	7.50	
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	173.02	
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.19	
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	14.05	
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	20.00	
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.72	
				Partisipasi politik masyarakat		%	84.57	
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.90	
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	61.16
			Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	19.27	
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak		%	80

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DAERAH TAHUN 2022

Program pembangunan daerah didasarkan pada program yang mendukung sasaran pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagaimana telah dituangkan dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022. Adapun program pembangunan daerah pada tahun 2022 sebanyak 120 program dari 147 Program perangkat daerah sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penanganan Bencana
3. Program Penyelenggaraan Jalan
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
5. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)
6. Program Pengelolaan Pelayaran
7. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
9. Program Penyelenggaran Pengawasan
10. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
11. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
13. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
14. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Program Penataan Organisasi
16. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
17. Program Kepegawaian Daerah
18. Pengembangan Sumber Daya Manusia
19. Program Pendaftaran Penduduk
20. Program Pencatatan Sipil
21. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
22. Program Peningkatan Kerjasama Desa
23. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
24. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
25. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
26. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
27. Program Perencanaan Tenaga Kerja
28. Program Pembinaan Perpustakaan
29. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno

30. Program Pelayanan Penghubung
31. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
32. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
33. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
34. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
35. Program Pengelolaan Pendidikan
36. Program Pengembangan Kurikulum
37. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
38. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
39. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
40. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
41. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
42. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
43. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
44. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
45. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
46. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
47. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
48. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
49. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
50. Program Pengelolaan Hutan
51. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
52. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
53. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
54. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
55. Program Pengelolaan Persampahan
56. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
57. Program Promosi Penanaman Modal
58. Program Pelayanan Penanaman Modal
59. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
60. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
61. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
62. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
63. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
64. Program Penyuluhan Pertanian
65. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

66. Program Pengelolaan Hutan
67. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
68. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
69. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
70. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
71. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
72. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
73. Program Rehabilitasi Sosial
74. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
75. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
76. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
77. Program Penanganan Kerawanan Pangan
78. Program Pengawasan Keamanan Pangan
79. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
80. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
81. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
82. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
83. Program Pengembangan Perumahan
84. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
85. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
86. Program Pengembangan Ekspor
87. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
88. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
89. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
90. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
91. Program Pemasaran Pariwisata
92. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
93. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
94. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
95. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
96. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
97. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
98. Program Pengembangan Umkm
99. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
100. Program Penempatan Tenaga Kerja
101. Program Hubungan Industrial
102. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
103. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

104. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
105. Program Kesejahteraan Rakyat
106. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
107. Program Pengembangan Kebudayaan
108. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
109. Program Pembinaan Sejarah
110. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
111. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
112. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum
113. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
114. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
115. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
116. Program Perlindungan Perempuan
117. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
118. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
119. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
120. Program Perlindungan Khusus Anak

Pemetaan program Pembangunan Daerah kedalam sasaran pembangunan pada tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Program Pembangunan Daerah Kedalam Sasaran Pembangunan Pada Tahun 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah					
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point	119.41		
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0.63		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%	32.78	4,749,579,691	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	67.34		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	2,524,923,366	Dinas Sosial
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas	Point	79.84		
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan jalan	%	85.36		
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	85.36	424,968,754,650	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	52.17		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	75.37	78,749,039,047	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	86.86		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	80.40	4,694,778,700	Dinas Perhubungan
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	98.59		
	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	35		
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	49.39		
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	61.61	764,484,200	Dinas Perhubungan
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi					
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB		
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	739,588,857,260	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100	1,092,593,901	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	70	1,849,401,028	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	85	1,281,660,820	INSPEKTORAT
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	44.44	2,517,297,403	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	6.55	472,000,744	INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	96	1,865,531,280	
Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	36.97		
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	36.76	554,780,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	52.03	15,363,280,000	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	BB (76,01 - 80,00)		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	4,779,893,285	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	12,519,651,738	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya	%	91.11	981,904,708	INSPEKTORAT

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	22,22	851,362,983	INSPEKTORAT
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%		1,282,219,090	Biro Organisasi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	3,165,190,197	Biro Pemerintahan
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0.70		
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	16	7,150,000,000	Badan Kepegawaian Daerah
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan		80		
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi		88		
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan		132		
	Nilai Aspek Sistem Informasi		16		
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0.09	16,960,960,998	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0.04		
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0.14		
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0.59		
Sasaran 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4.53		
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%	98,80	290,696,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	216,094,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%	100	1,042,092,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkaran hutan dan pesisir	%	20	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	70	5,599,748,172	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	55	2,058,351,845	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	25	505,798,581	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	40	493,138,545	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	85	100,214,713	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	1,135,237,618	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	208,116,607	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang	41,000		Badan Penghubung Daerah
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah					

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan	Point	72.43		
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.08		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	163,526,294,113	Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	97		
	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	%	75		
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100		
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%	90		
	Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	97		
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%	100		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	2.5	1,391,035,404	Dinas Kesehatan
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	90	100,000,000	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	85	54,518,919,382	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	75	10,339,417,902	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	78.00	48,764,835,901	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting	%	30.99		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita Wasting	%	11.41		Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%	70	1,844,102,816	Dinas Kesehatan
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan	Point	62.74		
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.73		
	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7.04		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	99.95	496,806,046,231	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	94.38		
	Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	97.57		
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70		
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1		
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	1:18		
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata- rata untuk SLB,	%	1:12		
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	696,067,714	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	69,288,275,305	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	99.58		
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	100		
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	60		
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		6		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	100	65,788,824	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	35	309,938,698	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	3,711,881,596	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pembinaan Atlet Berprestasi	%	100	10,438,816,493	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan					
Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	68.22		
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	42.93		
	Indeks Kualitas Udara	Point	87.56		
	Indeks Kualitas Air Laut	Point	70.89		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	24.24	337,210,648	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	932,857,745	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi	1	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit	210	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/ kegiatan	25	199,138,369	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%	10	208,086,986	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok	0	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	20	211,009,847	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	68.70		
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	83	20,303,985,721	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10.00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30,503	935,494,875	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	17.70	699,241,612	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	4.00	4,703,740,157	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	89.69	892,236,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Neraca pengelolaan sampah (%)	%	85.00		
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	60.00		
	Persentase Pengurangan Sampah	%	25.00		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	85	5,299,032,825	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi					
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli (Point)	%	74.68		
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	15,428		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perentase Peningkatan Minat Investasi	Persen	5	596,026,769	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen	100.00	863,871,915	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	90	641,960,427	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen	55	888,212,883	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen	100	140,706,575	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23.71		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%	9.5	44,798,298,458	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%	100	564,947,181	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS	%	< 1	2,799,889,261	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	100	423,050,759	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	%	1.99	19,956,291,589	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%	65.56	79,975,449,202	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	2		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96	434,192,818	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	70	6,731,344,000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	10		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	8.74	4,909,615,839	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	249,099	8,708,211,521	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1,219,005	3,795,727,604	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	99.92	1,962,524,606	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	214373	1,352,738,477	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%	100		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	788,655,091	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	3.5	17,873,444,354	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	12,479,741,066	Dinas Sosial
Sasaran 4: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86.70		
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	%	79.62	300,963,367	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100	3,778,523,930	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	5.77	358,435,000	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	85.00	679,047,614	Dinas Ketahanan Pangan
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan	Cakupan Air Minum	%	78.45		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
dasar bagi penduduk miskin					
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	78.45	3,337,898,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80.91		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	97.00		Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	84,488	163,032,669,005	Dinas Perumahan dan Permukiman
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Rasio Elektrifikasi	%	99.88		
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	5.64	643,295,009	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99.88	1,791,333,986	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	65.80		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	2,526,185,090	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Rumah tangga menempati hunian layak	%	98.86		
Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0		
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%	70	289,831,387	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	1,716,733,208	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	5	1,349,224,006	Dinas Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	85	1,297,512,601	Dinas Perdagangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	12,446,324,087	Dinas Perdagangan
Sasaran 7: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp.000	11,604		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	490,000,000	Dinas Perdagangan
Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%	3.00		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Miliar	129.78		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	85.85	5,503,206,408	Dinas Pariwisata
	Persentase Geosite yang tertata	%	50		
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang		2,446,751,761	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%		209,889,754	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%		1,160,576,170	Dinas Pariwisata
Tujuan 3: Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri (%)	%	7.50		
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)	Rp. Miliar	173.02		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	35,280,281,729	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%	3.14	1,040,710,958	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	704,426,525	Dinas Perindustrian

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	6.35	1,597,038,675	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	53.53	2,647,148,104	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	3,711,881,596	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		
Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.19		
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	17	1,232,588,784	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	51.09	1,115,004,981	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	22	337,215,751	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	22	1,139,740,311	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan					
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas	Point	14.05		
Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	20.00		
PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	506,635,309	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	10.53	3,685,524,366	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	97,655,935,112	Biro Kesejahteraan Rakyat

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Adat Aktif	%	65	8,086,485,113	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Bumdes Berprestasi	%	27		
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%	80		
	Persentase Posyantek yang aktif	%	56.41		
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	72.73	2,173,198,075	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	508,873,145	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%	100	272,477,237	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5.72		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100.00	3,932,903,666	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100.00		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	68.96	808,702,907	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	1,911,317,467	Biro Hukum
	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi	%	100		
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%	100		
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100		
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100		
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100		
	Persentase Penangan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%	84.57		
Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0.90		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	90	5,153,432,345	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	%	81.35	541,317,956	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	61.16		
Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	19.27		
	Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	80		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	52.17	2,021,592,521	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	75.52	920,503,730	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	5	434,995,741	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender		1	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kinerja	Rp.	
					Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80.00	512,037,084	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%			
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		727,588,084	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	%			

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022 TRIWULAN IV

4.1 Hasil Capaian Kinerja dan Anggaran Pelaksanaan RKPD Triwulan IV Tahun 2022

Laporan evaluasi RKPD Triwulan IV merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan IV Tahun 2022. Evaluasi ini mengacu pada RKPD Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 281 kegiatan dan 861 sub kegiatan. Total program Perangkat Daerah sebanyak 178 dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.670.486.399.401,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.301.816.692.031,34 atau 93,49 persen.

Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan IV tahun 2022 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, rata-rata capaian kinerja sebesar 97,25 persen dengan capaian keuangan sebesar 93,49 persen. Capaian ini meningkat dari capaian pada Triwulan III sebelumnya yaitu sebesar rata-rata capaian kinerja sebesar 74,09 persen dengan capaian keuangan sebesar 73,75 persen.

Adapun rekapitulasi hasil capaian kinerja dan keuangan menurut pemetaan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- Sasaran Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana** dengan indikator kinerja Indeks Kapasitas Daerah dengan target kinerja 0,63. Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dengan target sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB dan capaian kinerja nya disajikan pada tabel berikut.

No	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kapasitas Daerah	0,59	0,57	0,61	0,63	0,63	0,72

Sumber : BPBD Provinsi NTB 2022

IKD dihitung secara nasional dan terkoneksi ke InaRISK (*on-line*). Sementara IKD tahun 2022 menurut hasil perhitungan secara mandiri sudah mencapai 0,72 atau sudah melampaui target tahun 2022 sebesar 0,63.

IKD dihitung berdasarkan 7 prioritas yaitu :

1. Penguatan Kebijakan dan kelembagaan
2. Pengakajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana

Meskipun IRB belum diterbitkan oleh Pusat, namun dapat diperkirakan menurun karena IKD cukup signifikan peningkatannya. Namun IRB NTB juga dapat menurun jika memperhatikan KRB Provinsi NTB Tahun 2022. Pada KRB NTB Tahun 2022 menunjukkan jumlah jenis bencana yang terjadi di Provinsi NTB mengalami peningkatan dari 11 jenis menjadi 13 jenis dengan tambahan Likuefaksi dan Pandemi Covid 19. Dengan bertambahnya jenis tersebut boleh jadi menambah jumlah ancaman dan kerentanan di Provinsi NTB karena Covid 19 cukup signifikan pengaruhnya terhadap seluruh sektor pembangunan. Penanganan Covid 19 hingga tahun 2022 masih menjadi perhatian utama pemerintah dengan kebijakan pembatasan aktifitas guna mencegah dan memutus mata rantai penyebarannya. Kondisi ini mengakibatkan sejumlah kegiatan lainnya tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam penanganan Covid 19 cukup signifikan dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di wilayah Provinsi NTB. Bahkan upaya ini telah mengantarkan NTB sebagai Nominator Provinsi yang akan mendapatkan Penghargaan Tangguh Adiwirasana oleh Pemerintah Pusat. Dengan keberhasilan ini, ada secercah harapan bahwa IRB NTB tahun 2022 dapat diturunkan. Capaian kinerja indikator Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat diwujudkan melalui penyelenggaraan 1 (satu) program prioritas yang saling bersinergi satu sama lain. Adapun capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan di bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tahun 2022.

BPBD telah melaksanakan Pembangunan tahun 2022 melalui penyelenggaraan urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat melalui program yang berkontribusi pada penanggulangan bencana dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 88,67% di tahun 2022.

Untuk meningkatkan kapasitas dalam penanggulangana bencana, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2022 yaitu meningkatkan pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana, meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta meningkatkan penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Sampai dengan tahun 2022, Persentase perangkat daerah di provinsi NTB yang telah menerapkan kegiatan penanggulangan bencana sudah mencapai 100%, serta tetap meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana di lingkup

perangkat daerah provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kota.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana BPBD provinsi NTB memiliki 1 (satu) program kegiatan yaitu program penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana untuk mendukung penanggulangan bencana melalui beberapa kegiatan yaitu:

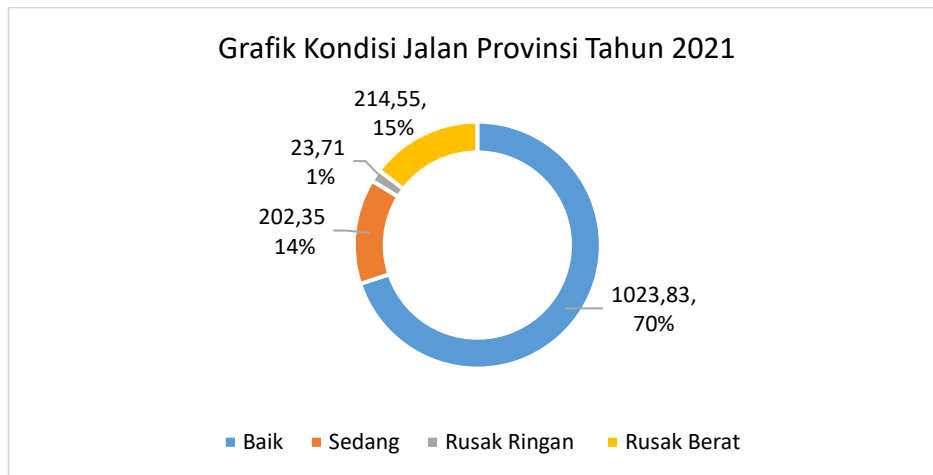
1. Kegiatan pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana, terdiri dari:
 - 1) Sub kegiatan penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Pada sub kegiatan penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan besar:
 - Memfasilitasi Desa Tangguh Bencana
 - Memfasilitasi Sekolah / Madrasah Aman Bencana
 - 2) Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana. Pada sub kegiatan penanganan pascabencana telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan besar:
 - Pelatihan Pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA)
 - Menyusun dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana)
 - 3) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi. Pada Sub kegiatan penyusunan rencana kontijensi telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan besar yaitu menyusun dokumen rencana kontijensi.
2. Kegiatan pelayanan pencegahan dan Evakuasi korban Bencana terdapat kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, terdiri dari:
 - 1) Sub kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
Pada sub kegiatan respon cepat penanganan darurat bencana telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan besar:
 - Menyiapkan sarana dan prasarana beserta data laporan korban bencana
 - Melakukan pemindahan warga/masyarakat dari zona berisiko bencana ke lokasi yang lebih aman
 - 2) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
Pada sub kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan besar:
 - Melakukan pencarian dan evakuasi korban terdampak bencana
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Pada sub kegiatan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana telah dilaksanakan 1(satu) kegiatan besar:
 - Penyediaan dan pendistribusian logistik sesuai dengan kebutuhan korban terdampak bencana

3. Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana, terdiri dari sub kegiatan pengelolaan, pemanfaatan sistem informasi kebencanaan dengan 1 (satu) kegiatan besar :

- Pengelolaan data dan informasi terkait kebencanaan.

2. Sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator kinerja Persentase Kemantapan jalan, dan Persentase Kemantapan Sistem Irigasi. Panjang Jalan di Provinsi NTB sebesar 8.326,75 Km yang dibedakan berdasarkan status Jalan Nasional 934,55 Km, jalan Provinsi 1.484,43 Km dan Jalan Kabupaten/Kota 5.621,81 Km. Penanganan jalan provinsi dilakukan melalui sumber dana dari APBD, dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari sasaran strategis ini ditentukan indikator kinerja adalah Persentase Jalan mantap. Pada tahun 2022 capaian realisasi kemantapan jalan sebesar 85,36* persen (masih menunggu hasil survey perhitungan kemantapan (ruas jalan baik dan jalan sedang) pada ruas-ruas jalan provinsi), telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023 dan Renstra Revisi Dinas PUPR. Tercapainya target kemantapan jalan ini dikarenakan adanya dukungan penanganan jalan melalui Program Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak Tahun 2020 - 2022 (yang dibiayai melalui sumber dana APBD Murni dan dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN) serta penanganan jalan dengan pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jenis pekerjaan penanganan jalan yang dilakukan meliputi kegiatan pembangunan jalan, rehabilitasi jalan, dan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Bidang Binamarga maupun Balai Pemeliharaan Jalan (BPJP) Pulau Lombok dan Balai Pemeliharaan Jalan (BPJP) Pulau Sumbawa.

Pada tahun 2022 ditargetkan kemantapan jalan sebesar 85.36% dengan capaian 85,36%* (masih menunggu hasil survey perhitungan kemantapan (ruas jalan baik dan jalan sedang) pada ruas-ruas jalan provinsi), seperti yang tercantum di dalam RPJMD 2019-2023 dan Renstra Revisi Dinas PUPR. Pencapaian target kemantapan jalan ini diharapkan melalui dukungan penanganan jalan melalui Program Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak Tahun 2020 - 2022 (Perda Percepatan Jalan) dan penanganan jalan dengan pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber pembiayaan tersebut meliputi untuk kegiatan pembangunan jalan, rehabilitasi jalan, dan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh Bidang Binamarga maupun Balai Pemeliharaan Jalan (BPJP) Pulau Lombok dan Balai Pemeliharaan Jalan (BPJP) Pulau Sumbawa.



Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2021* (data sementara)

Indikator kinerja Persentase Kemantapan Sistem Irigasi dengan target 52,17%. Pada Tahun 2022, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 untuk mengelola 35 Daerah Irigasi dengan luasan 1.000 Ha – 3.000 Ha. Secara keseluruhan terdapat 58.105 Ha luasan kewenangan daerah irigasi yang dikelola. Adapun Panjang saluran dari 35 Daerah Irigasi tersebut adalah 721,95 kilometer dengan saluran dalam kondisi baik sepanjang 413,05 Km (57%), sedang 86,05 km (12%), rusak ringan 61,78 km (9%) dan rusak berat 161,03 km (22%). Capaian Persentase Kemantapan Sistem Irigasi Provinsi NTB Pada tahun 2022 dengan target sebesar 77,00% telah melampaui target menjadi 77,60%.

Di Bidang Sumberdaya Air, pada tahun 2022 capaian realisasi Persentase Cakupan Pelayanan Areal Irigasi sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023 mencapai 77,60% melampaui capaian targetnya (77,00%). Secara keseluruhan terdapat 58.105 Ha luasan kewenangan daerah irigasi yang dikelola. Adapun Panjang saluran dari 35 Daerah Irigasi tersebut adalah 721,95 kilometer dengan saluran dalam kondisi baik sepanjang 413,05 Km (57%), sedang 86,05 km (12%), rusak ringan 61,78 km (9%) dan rusak berat 161,03 km (22%). Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2022 sebagaimana yang diharapkan, pembiayaan penanganan Daerah Irigasi (DI) selain bersumber dari dana APBD juga bantuan dari Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber pembiayaan tersebut meliputi kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Operasi serta Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang dilaksanakan oleh Bidang Sumberdaya Air dan Balai Pemeliharaan Sumberdaya Air (PSDA) Pulau Lombok dan PSDA Pulau Sumbawa.



Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2022 sebagaimana yang diharapkan, pembiayaan penanganan Daerah Irigasi (DI) selain bersumber dari dana APBD juga bantuan dari Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber pembiayaan tersebut meliputi kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Operasi serta Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang dilaksanakan oleh Bidang Sumberdaya Air dan Balai Pemeliharaan Sumberdaya Air (PSDA) Pulau Lombok dan PSDA Pulau Sumbawa.

3. Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator kinerja Persentase konektivitas transportasi publik dengan target kinerja sebesar 86,86%. Realisasi untuk sasaran ini sudah melampaui target kinerja sebesar 88,57 persen atau tingkat capaian 101,97 persen. Sasaran strategis 1 didukung oleh 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan. Untuk mengukur keberhasilan program dilihat dari 2 (dua) indikator yakni persentase rute angkutan darat dan persentase rute angkutan laut.

1) Indikator Persentase Rute Angkutan Darat

Indikator presentase rute angkutan darat adalah indikator untuk mengukur jumlah rute angkutan darat yang tersedia di Nusa Tenggara Barat dengan target rute angkutan darat sampai dengan tahun 2023 sejumlah 120 rute angkutan. Pada Tahun 2022, rute angkutan darat di NTB sudah terpenuhi sejumlah 122 (seratus delapan belas) rute dengan penambahan 2 (dua) rute angkutan yakni 1 (satu) rute angkutan perintis yaitu rute Terminal Mandalika – Leweng dan 1 (satu) rute angkutan KSPN dengan rute BIZAM – Epicentrum Mall – Pantai Senggigi – Pelabuhan Bangsal. Secara persentase, pada tahun 2022 capaian rute angkutan darat tercapai hingga 101.67 % .

2) Indikator Rute Persentase Angkutan Laut

Indikator presentase rute angkutan laut adalah indikator untuk mengukur jumlah rute angkutan laut dan penyeberangan yang tersedia di Nusa Tenggara Barat dengan target rute angkutan laut sampai dengan tahun 2023 sejumlah 26 (dua puluh enam) rute angkutan. Pada Tahun 2022, rute angkutan darat di NTB sudah

terpenuhi sejumlah 22 (dua puluh dua) rute dengan penambahan 1 (satu) rute angkutan Bali – Tawun. Secara persentase, pada tahun 2022 capaian rute angkutan laut tercapai 100% dengan realisasi sebesar 84,62 % dari target yang ditetapkan.

Rute angkutan laut yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Jumlah Rute Angkutan Laut Tahun 2021

No	Rute	Keterangan
1	Lembar - Padang Bai	Ferry
2	Lembar - Surabaya	Legundi/Pelni
3	Lembar - Benoa	Pelni
4	Lembar - Waingapu	Pelni
5	Pemenang - 3 Gili	Kapal Cepat/Pelra
6	Pemenang - Bali	Kapal Cepat
7	Senggigi - 3 Gili	Kapal Cepat/Pelra
8	Senggigi - Bali	Kapal Cepat
9	Kayangan - Pototano	Ferry
10	Kayangan - Benete	Kapal Cepat
11	Bima - Labuhan Bajo- Makassar	Pelni
12	Bima - Lembar	Pelni
13	Sape - Waikelo	Ferry
14	Sape - Labuhan Bajo	Ferry
15	Badas - Surabaya	LDF
16	Rute Bima-Rio-Jampea-Makassar-Jampea- Reo-Bima Waikelo-Ende-Pulau Raijua-Sabu/Seba- Pulau Raijua-Ende-Waikelo	Pelra
17	Rute Bima-Carik-Celungan Bawang-Sepekan-Kangean-Kalianget-Surabaya-Kalianget-Kangean-Sepekan-Celukon Bawang-Carik- Bima	Pelra
18	Rute Bima- Calabai-Labuhan Lombok-Sailus- Sapuka- Balobalong Besar-Makassar-Balobalong Besar-Sapuka-Sailus-Labuhan Lombok-Calabai	Pelra
19	Rute Bima-Labuhan Bajo-Bonerate-Selayar-BauBau-Selayar-Bonerate-Labuhan Bajo-Bima	Pelra
20	Kayangan - Pototano (Dermaga F3)	Kapal Cepat
21	Bima - Surabaya - Labuhan Bajo	LDF
22	Bali - Tawun	Kapal Cepat (Baru)

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2023

4. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dengan indikator kinerja Opini BPK dengan target status WTP. Tahun 2022 ini, Pemerintah Provinsi NTB kembali meraih opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan pemeriksa Keuangan (BPK).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah Opini Audit yang diterbitkan jika Laporan Keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika Laporan Keuangan diberikan opini artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, walaupun ada kesalahan dianggap tidak material dan

tidak berpengaruh signifikan terhadap pembalikan keputusan. Di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah memenuhi kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan;
- c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- d. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern, yaitu meliputi Keberadaan Aset, Kelengkapan Bukti dan Nilai Aset.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021, Provinsi NTB telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun 2021. Prestasi tersebut adalah yang ke-11 secara berturut-turut dari tahun 2011-2021. Opini WTP ini menggambarkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan *best practice* dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Opini BPK RI dalam 10 (sepuluh) tahun 2011-2021.

TAHUN	OPINI
2011	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2012	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: BPKAD Provinsi NTB, 2022

Untuk Realisasi Capaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 belum bisa mengemukakan hasil pemeriksaan BPK RI dikarenakan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun berakhir. Dan Penyampaian LKPD Tahun 2022 yang telah diperiksa BPK RI diserahkan ke DPRD dalam jangka waktu 6 Bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir, Sehingga Perolehan Predikat Opini terhadap LKPD Provinsi NTB baru akan diperoleh pada bulan juni 2023.

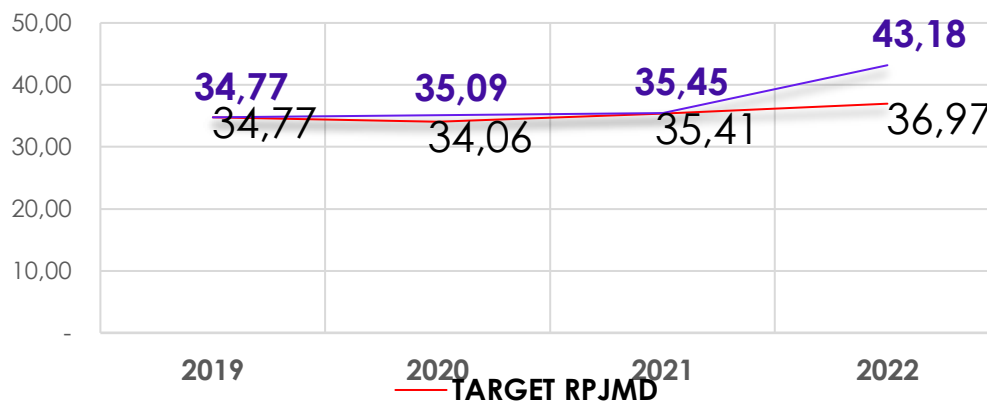
5. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD. Sasaran ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan target 36,97 persen.

Sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah. Penerimaan daerah sendiri yang merupakan wujud partisipasi

masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak dan retribusi daerah, harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya sumber-sumber PAD terdiri dari beberapa unsur yaitu; pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkannya, dan lain-lain pendapatan yang sah. Terkait dengan penetapan sumber-sumber PAD diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bappenda Provinsi NTB dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk terwujud kemandirian fiskal daerah dihadapkan dengan adanya kesenjangan fiskal (*Fiscal Gap*) antara PAD dan penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat, tuntutan kualitas pelayanan yang semakin prima, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tetap diarahkan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Gambaran terkait Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD sebagai indikator kinerja utama Bappenda tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD Provinsi NTB Tahun 2019-2022



Sumber: BAPPENDA Provinsi NTB, 2022

Capaian realisasi persentase kontribusi PAD terhadap APBD dari tahun 2019 sampai 2022 menunjukkan peningkatan dan selalu melampaui target. Pada tahun 2019, capaian realisasi sebesar 34,77 persen dan terus meningkat hingga di tahun 2022 menjadi 43,18 persen.

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara menerapkan pelayanan prima pada unit perangkat daerah pengelola sumber pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah serta berupaya untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber penerimaan daerah.

Dengan meningkatnya penerimaan daerah maka ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat akan lebih kecil, kualitas potensi ekonomi wilayah menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penerimaan daerah juga berdampak pada meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta peningkatan sumber daya manusia yang mempertimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial.

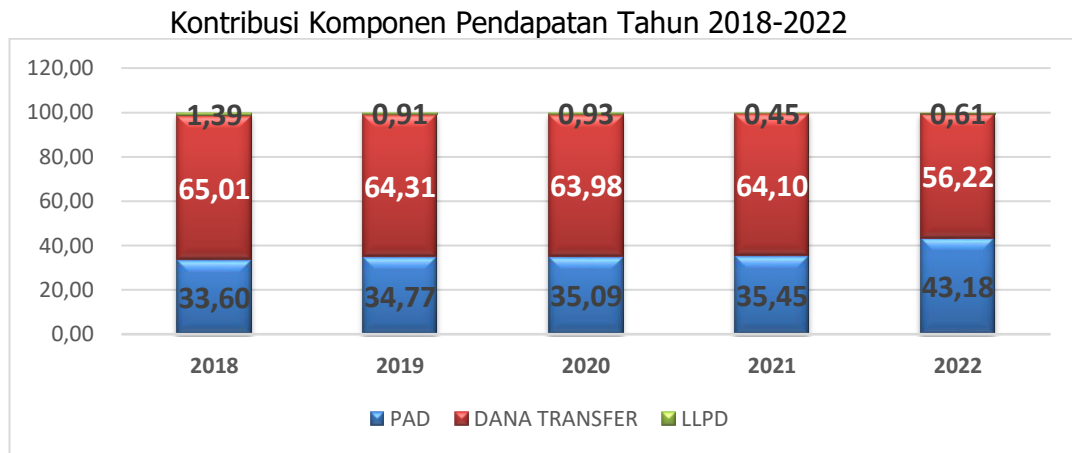
Pendapatan Daerah provinsi NTB dari tahun 2018 s.d 2022 terus menunjukkan peningkatan, dimana Pendapatan Daerah tahun 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp5.298.201.574.678,- berkorelasi 0,54 persen dari realisasi Pendapatan Daerah tahun 2021 sebesar Rp5.326.932.790.704,-. Berikut adalah realisasi per jenis komponen pendapatan daerah tahun 2018 sampai dengan 2022.

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2018 -2022

No	Tahun	Realisasi (Rp)			
		PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah
1	2018	1.660.417.707.373	3.212.386.689.010	68.442.578.246	4.941.246.974.629
2	2019	1.807.482.745.855	3.342.865.637.337	47.379.105.050	5.197.727.488.242
3	2020	1.815.690.092.106	3.310.586.841.031	48.016.288.528	5.174.293.221.665
4	2021	1.888.456.286.096	3.414.313.104.250	24.163.400.358	5.326.932.790.704
5	2022	2.287.653.655.567	2.978.480.323.175	32.067.595.936	5.298.201.574.678
	Jumlah	9.459.818.743.792	16.258.812.594.803	220.068.968.118	25.938.700.306.713

Sumber : BAPPENDA Provinsi NTB, 2022 (unaudited)

Total Pendapatan Daerah sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 telah terealisasi sebesar Rp25.938.700.306.713,- atau 94,05 persen dari total target pendapatan daerah dalam APBD sebesar Rp27.580.104.334.394,-. Realisasi Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer termasuk didalamnya Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kontribusi masing-masing komponen dapat dilihat dalam diagram sesbagai berikut:



Sumber: BAPPENDA Provinsi NTB, 2022

Diagram di atas menggambarkan struktur pendapatan daerah Provinsi NTB tahun 2018 s.d 2021 masih sangat tergantung kepada dana yang bersumber dari Pendapatan Transfer sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dalam kisaran 33% sampai 35%. Namun pada tahun 2022, kontribusi PAD tercatat sebesar 43,18% yakni meningkat 21,80% dibandingkan tahun 2021. Adapun komponen pembentuk pendapatan daerah selama empat tahun periode RPJMD dan Renstra OPD Tahun 2019-2023 yakni tahun 2019 ke 2022 diperoleh kontribusi PAD rata-rata 37,12 persen; Pendapatan Transfer rata-rata 62,15 persen; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 0,72 persen. Berikut gambaran kondisi pos-pos pendapatan daerah Provinsi NTB tahun 2022:

- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Salah satu komponen pendapatan daerah yang digunakan untuk mengukur kemampuan fiskal daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, yang dalam penetapan targetnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat senantiasa memperhatikan estimasi dasar, trend deviasi periode sebelumnya, peningkatan cakupan, pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan riil perkapita, inflasi, perubahan tarif, pembangunan baru dan penyesuaian peraturan.

Target PAD tahun 2022 yang semula sebesar Rp2.571.637.450.300,- bertambah dalam anggaran perubahan menjadi Rp2.735.041.230.300,- dan kemudian direvisi kembali menjadi Rp2.738.892.515.300,-. Target PAD tersebut merupakan 48,30 persen dari keseluruhan target Pendapatan Daerah Provinsi NTB sebesar Rp5.670.486.399.401,-. Sampai akhir tahun anggaran 2022, realisasi penerimaan PAD telah mencapai Rp2.287.653.655.567,- atau 83,52 persen dari target tahun 2022 dan meningkat 21,14 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Peningkatan PAD sebagian besar bersumber dari peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan BLUD.

Penerimaan PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Rincian penerimaan dari masing-masing komponen PAD adalah sebagai berikut:

Target dan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2022

Uraian	Realisasi 2021	Tahun 2022		Capaian (%)	Growth (%)
		Target Perubahan	Realisasi		
Pajak Daerah	1.418.222.758.511	1.766.560.250.000	1.706.111.440.816	96,58	20,30
Retribusi Daerah	10.448.164.349	32.747.649.600	12.499.295.462	38,17	19,63
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	46.263.633.608	60.349.184.000	50.616.995.897	83,87	9,41
Lain-lain PAD yang Sah	413.521.729.628	879.235.431.700	518.425.923.392	58,96	25,37
Jumlah Total	1.888.456.286.096	2.738.892.515.300	2.287.653.655.567	83,52	21,14

Sumber: BAPPEDA Provinsi NTB, 2022 (unrekon;unaudit)

Dari beberapa tabel diatas dapat diberikan penjelasan secara rinci hal-hal sebagai berikut:

1) Pendapatan PKB dan BBNKB

Realisasi PKB dan BBNKB meningkat pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. PKB meningkat sebesar 10,92 persen dan BBNKB sebesar 11,02 persen. Peningkatan penerimaan PKB tahun 2022 lebih besar dari peningkatan PKB tahun sebelumnya yang sebesar 7,06 persen. Kebijakan insentif pajak daerah membawa pengaruh yang positif dalam peningkatan penerimaan PKB. Sementara peningkatan BBNKB juga sebagian besar bersumber dari kendaraan baru. Meskipun kenaikan harga BBM mengakibatkan inflasi bidang transportasi namun tahun 2022 jumlah kendaraan baru meningkat 5,42 persen dibanding sebelumnya. Penerimaan pendapatan BBNKB 98,28 persen bersumber dari BBN Kendaraan Baru, dan 1,17 persen dari BBN II - FAD I (mutasi).

2) Pajak Daerah lainnya.

Realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tahun 2022 adalah sebesar Rp412.839.758.081,- yakni mencapai 102,59 persen dari target tahun 2022 sebesar Rp402.435.000.000,-. PBBKB menjadi primadona tahun ini dengan angka peningkatan penerimaan hingga 45,69 persen dari penerimaan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan beralihnya konsumsi BBM setelah dihapusnya BBM premium, adanya event skala nasional dan internasional di wilayah NTB, perubahan harga BBM, peningkatan kebutuhan BBM PT AMNT dari tahun sebelumnya dan penerapan tarif flat pada objek PBBKB. Sementara realisasi Pajak Rokok tahun 2022 sebesar Rp425.126.352.568,- hanya mencapai 94,34 persen dari target sebesar Rp450.632.000.000,-, meskipun tidak mencapai target, realisasi tersebut meningkat

20,65% dibandingkan tahun 2021 disebabkan kondisi ekonomi yang semakin membaik pasca pandemic mengakibatkan normalnya produksi rokok nasional sehingga permintaan pita cukai meningkat dan menambah penerimaan pajak rokok. Komponen Pajak Daerah Lainnya yang juga mengalami peningkatan adalah Pajak Air Permukaan dengan realisasi sebesar Rp1.557.226.673,- atau 100,06 persen dari target PAP tahun 2022 dan meningkat 3,67 persen dari penerimaan tahun sebelumnya.

3) Penerimaan Retribusi Daerah

Proyeksi penerimaan Retribusi dalam APBD murni TA 2022 adalah sebesar Rp44.103.870.600,- namun dalam revisi ketiga APBDP menjadi Rp32.747.649.600,- dan terealisasi sebesar Rp12.499.295.462 atau 38,17 persen. Meskipun tidak mencapai target, realisasi tersebut meningkat 19,63 persen dari penerimaan tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi pada layanan kesehatan, pemakaian kekayaan daerah, tempat penginapan dan perizinan tertentu. Terdapat juga jenis retribusi yang mengalami penurunan penerimaan yakni retribusi penjualan produksi usaha daerah dan perpanjangan IMTA. Retribusi perpanjangan IMTA tidak terealisasi ditahun 2022 disebabkan tidak adanya TKA (Tenaga Kerja Asing) yang bekerja lintas Kabupaten/kota.

4) Penerimaan LLPAD yang Sah

LLPAD yang Sah merupakan komponen PAD yang juga mengalami peningkatan hingga 25,37 persen. Peningkatan tersebut sebagian besar disumbang dari bagian Pendapatan BLUD. Selain itu bagian lain yang juga mengalami peningkatan adalah Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan, Hasil Kerjasama Daerah, Jasa Giro, Bunga deposito, denda Pajak dan Pendapatan BLUD. Namun terdapat bagian yang mengalami penurunan yakni Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD, Tuntutan Ganti Rugi, Penerimaan Komisi dan Bantu Lainnya, denda retribusi dan keterlambatan pekerjaan. Realisasi LLPAD Yang Sah sebesar Rp518.425.923.392,- hanya mampu mencapai 58,96 persen target yang ditetapkan sebesar Rp879.235.431.700,-.

- **Pendapatan Transfer**

Postur APBD tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Dana Perimbangan tidak lagi berdiri sendiri namun merupakan bagian dari Pendapatan Transfer yang merupakan Pendapatan Pemerintah Daerah yang dialokasikan dari dana APBN ke APBD untuk menunjang program Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang terdiri dari: 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, meliputi a. Dana Perimbangan, terdiri atas (1) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, (2) Dana Transfer Umum –

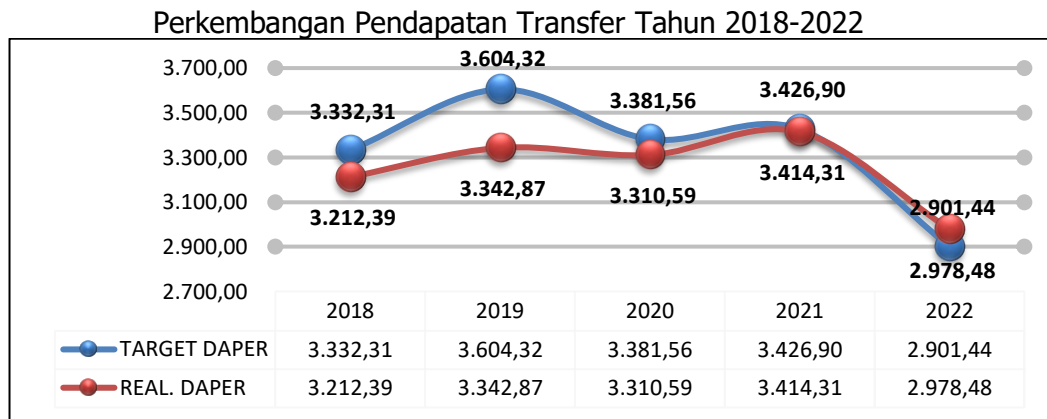
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik, dan (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik; dan b. Dana Insentif Daerah (DID); serta 2) Transfer Antar Daerah. Rincian penerimaan dari masing-masing komponen Bagian Dana Perimbangan sebagai berikut:

Rincian penerimaan dari masing-masing komponen PAD adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	REALISASI 2021	TAHUN 2022		CAPAIAN (%)	GROWTH (%)
			TARGET PERUBAHAN	REALISASI		
	PENDAPATAN TRANSFER	3.414.313.104.250	2.901.439.218.350	2.978.480.323.175	102,66	(12,76)
A.	Transfer Pemerintah Pusat	3.412.475.468.388	2.899.777.132.350	2.976.614.420.050	102,65	(12,77)
a.	Dana Perimbangan	3.343.953.221.388	2.860.613.086.350	2.937.450.374.050	102,69	(12,16)
	1) Dana Transfer Umum	1.752.565.068.058	1.794.094.017.000	1.929.913.988.823	107,57	10,12
	a) Dana Bagi Hasil	276.889.215.058	315.584.944.000	454.633.783.742	144,06	64,19
	b) Dana Alokasi Umum	1.475.675.853.000	1.478.509.073.000	1.475.280.205.081	99,78	(0,03)
	2) Dana Transfer Khusus	1.601.966.487.316	1.066.519.069.350	1.007.536.385.227	94,47	(37,11)
	a) DAK Fisik	346.452.123.817	474.290.250.350	442.204.312.842	93,23	27,64
	b) DAK Non Fisik	1.244.936.029.513	592.228.819.000	565.332.072.385	95,46	(54,59)
b.	Dana Insentif Daerah	68.522.247.000	39.164.046.000	39.164.046.000	100,00	(42,84)
B.	Transfer Antar Daerah	1.837.635.862	1.662.086.000	1.865.903.125	112,26	1,54
	Bantuan Keuangan	1.837.635.862	1.662.086.000	1.865.903.125	112,26	1,54

Sumber: BAPPENDA Provinsi NTB, 2022

Tahun 2022, penerimaan pendapatan transfer tercapai hingga 102,66% meskipun terjadi penurunan pada penerimaan pendapatan transfer secara keseluruhan. Penurunan tersebut disebabkan terjadi penurunan penerimaan pada pos Dana Alokasi Khusus (DAK) yakni DAK Non Fisik dimana Dana Bos tidak lagi disalurkan melalui kas daerah provinsi NTB melainkan langsung kepada kas sekolah. Selain DAK, pos lain yang mengalami penurunan adalah Dana Insentif Daerah (DID) yang berkurang hingga 42,84 persen dari penerimaan tahun sebelumnya. Dari tabel diatas kontribusi paling besar berasal dari pos Dana Alokasi Umum (DAU). Tercatat pada tahun 2021 kontribusi DAU mencapai 44,13 persen namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 50%. Berikut adalah grafik perkembangan penerimaan Pendapatan Transfer, sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 yang mulai diberlakukan sejak tahun 2021.



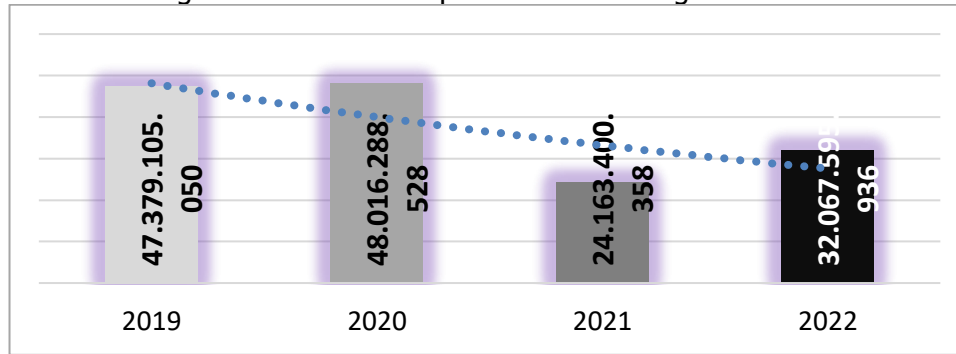
Sumber: BAPPENDA Provinsi NTB, 2022

Selama 4 tahun terakhir, kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan daerah berada dalam kisaran 63 – 65 persen dengan rata-rata sebesar 62,72 persen. Namun tahun 2022 kontribusi Pendapatan transfer menurun menjadi 56,22 persen seiring dengan penurunan penerimaan Pendapatan Transfer dan peningkatan komponen lain yakni Pendapatan Asli Daerah. Sejak tahun 2016, tahun 2022 merupakan kali pertama penerimaan Pendapatan Transfer dapat melampaui target. Capaian tahun 2022 yang melampaui target ini disumbang dari besarnya pelampauan penerimaan Dana Bagi Hasil yang mampu menutupi bagian lain yang tidak mencapai target.

- **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006 yang lalu, komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang memiliki penerimaan terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan namun setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 terjadi pergeseran komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yakni DID dan Bantuan Keuangan yang menjadi bagian dari Pendapatan Transfer sehingga penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejak tahun 2021 hanya bersumber dari Pendapatan Hibah. Pada tahun 2022 realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp32.067.595.936,- yakni meningkat 32,71 persen dari penerimaan tahun 2021 yang sebesar Rp24.163.400.358,-. Pendapatan Hibah yang diterima tahun 2022 merupakan lunsuran dana Hibah *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP). Hibah ini dimulai sejak tahun 2018 dan berakhir tahun 2022.

Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2018-2022



Sumber: BAPPEDA Provinsi NTB, 2022

6. Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dengan indikator kinerja Nilai SAKIP dengan target kinerja BB. Dari tahun ke tahun, nilai SAKIP Provinsi NTB dan kabupaten/kota terus mengalami peningkatan. Untuk meraih kategori BB sebagaimana target tahun ini tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu sinergi untuk merancang program kerja yang baik, terarah dan berdampak bagi masyarakat. Guna mencapai target Nilai SAKIP BB, Pemerintah Provinsi NTB telah menyusun sejumlah program Kegiatan beserta sub kegiatan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Biro Organisasi, dan Biro Pemerintahan sebagai lokomotif utama pencapaian sasaran ini.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. SAKIP juga merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Rekomendasi hasil evaluasi digunakan dalam perbaikan pada periode berikutnya. Dengan memadukan rekomendasi hasil evaluasi dan menerapkan upaya peningkatan capaian evaluasi, diharapkan laporan kinerja yang dihasilkan akan lebih baik dan bermanfaat dalam mewujudkan capaian kinerja instansi yang ditetapkan. Pada tahun 2022 Target nilai SAKIP kategori BB atau skor (73,01 - 76,00) capaian nilai pada tahun 2021 adalah B tingkat capaian 87,24 persen. Capaian nilai sementara pada tahun 2022 adalah BB dengan tingkat capaian 75,00 karena tim evaluator Kemenpan RB belum mengirimkan Laporan Hasil Evaluasi. Skor 75,00 pada Tahun 2022.

Program Penataan Organisasi dijabarkan dalam kegiatan Fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan dengan sub kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi; Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan Penataan Analisis Jabatan. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan sub kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja; Evaluasi

Pelaksanaan Budaya Kerja; Pengelolaan Tata Laksana Pemerintah dan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik.

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitas peningkatan pelayanan publik ditujukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah di mata masyarakat, yaitu Persentase 26 Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan kemenpan; Persentase 6 Perangkat Daerah yang dievaluasi Pelayanan Publik dan Persentase 35 inovasi pelayanan publik yang dievaluasi sesuai dengan ketentuan, capaian 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat akan dapat diwujudkan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui pembenahan berbagai aspek, antara lain kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, akuntabilitas dan pengawasan guna menghasilkan pelayanan prima yaitu pelayanan yang cepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel.

Keberhasilan Indeks Reformasi Birokrasi adalah indikator yang merupakan aspek daya saing daerah menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi sendiri adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen, mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Tahun 2020-2022

Indikator	Satuan	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	%	B	B	100	B	B	100	B	B	100

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2022

Hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 kategori B. Nilai ini sesuai dengan hasil rilis Laporan Hasil Evaluasi dari Kementerian RB Tahun 2021 dan tahun 2021 mencapai B sesuai target, pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari target B hasil capaian BB, ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, bersih dari KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, reformasi birokrasi adalah instrumen hulu untuk menyelesaikan berbagai problem masyarakat, yang dimaknai bukan sekedar persoalan administrasi belaka, tetapi harus membawa dampak pada tingkat kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi NTB meraih predikat B tahun 2020, melalui peran Biro Organisasi yang telah melakukan upaya peningkatan kualitas pada tahun 2021, nilai hasil evaluasi menunjukkan peningkatan mendapat predikat penilaian BB, dengan rincian komponen : Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja;

Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja, semua komponen mengalami peningkatan dengan nilai hasil evaluasi mencapai 70,59 sebagaimana tabel berikut.

Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Pemerintah Provinsi Tahun 2020-2022

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	2020		2021		2022	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
a	Perencanaan Kinerja	30	23,67	30	24,69	30	25,20
b	Pengkuran Kinerja	25	16,99	25	17,67	30	21,64
c	Pelaporan Kinerja	15	11,48	15	11,67	15	11,40
d	Evaluasi Internal	10	6,48	10	6,62	25	14,53
e	Capaian Kinerja	20	9,76	20	9,94	-	-
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,53	100	70,59	100	72,77
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B		BB		BB

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2022

- 7. Sasaran Meningkatnya Profesionalisme ASN** dengan Indikator Kinerja Indeks Profesionalisme ASN dengan target kinerja 0,70 poin baru tercapai 0,48 point, hal ini disebabkan karena belum tercapainya target dari dimensi kompetensi, kinerja, dan disiplin. Indikator nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan dan sistem informasi, perlindungan dan pelayanan dari target 115 poin baru tercapai 109,5 poin, hal ini disebabkan karena perencanaan pegawai belum sesuai kebutuhan, pengadaan pegawai belum tepat waktu, sistem informasi belum terintegrasi meliputi SIASN, E-Kinerja, E-Sensi, selain itu pelayanan kepegawaian berbasis elektronik, perlindungan dan pelayanan ASN belum maksimal terkait pemberian bantuan hukum & JKK/JKM serta KORPRI. nilai aspek promosi dan mutasi dari target 32,5 poin baru tercapai 22,5 poin, hal ini disebabkan karena promosi dan mutasi belum menerapkan rencana suksesi dan talent manajemen. Untuk nilai aspek pengembangan karir, ditargetkan 82,5 poin namun realisasinya 52,5 poin, hal ini disebabkan oleh pengembangan karir pegawai belum menggunakan talent mapping. Sedangkan nilai aspek manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin ditargetkan 117,5 poin, teralisasi 102,5 poin, hal ini disebabkan oleh manajemen kinerja belum terintegrasi secara individu dengan kinerja organisasi.

BKD Provinsi NTB dalam melaksanakan transformasi birokrasi meliputi 8 (delapan) area Perubahan antara lain: (1) Mental Aparatur dan Manajemen Perubahan; (2) Pengawasan; (3) Akuntabilitas; (4) Kelembagaan; (5) Tata Laksana; (6) Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara; (7) Peraturan Perundang-undangan; dan (8) Pelayanan Publik. Dari 8 area tersebut, yang bersinggungan langsung dengan urusan pemerintahan bidang kepegawaian adalah area pertama yakni aspek mental aparatur dan manajemen perubahan serta area keenam yakni sumber daya manusia aparatur sipil negara.

Untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB menetapkan sasaran kinerja Organisasi tahun 2022 yaitu:

1. Mewujudkan Manajemen ASN yang Meritokrasi dengan indikator Nilai Penerapan Sistem Merit;
2. Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN (dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin).

Kedua sasaran diatas bertujuan untuk menciptakan aparatur yang professional dan melayani dengan menerapkan sistem merit dimana setiap kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara senantiasa berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin secara adil dan wajar tanpa membedakan factor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan sehingga mampu melakukan percepatan pencapaian reformasi birokrasi menuju NTB yang Gemilang.

Indeks Profesionalisme ASN mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN dan secara teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN. Empat kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN yaitu dimensi:

1. **Kompetensi**; dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.
2. **Kualifikasi**; dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.
3. **Kinerja**; dimensi kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
4. **Disiplin**; dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Kriteria Indeks Profesionalitas ASN dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu: 1) Sangat Tinggi 0,91-1; 2) Tinggi 0,81-0,9; 3) Sedang 0,71-0,8; 4) Rendah 0,61-0,7; dan 5) Sangat Rendah 0,6 kebawah. Capaian Indeks Profesionalisme ASN Provinsi NTB dari tahun 2019 s.d. 2022 disajikan pada tabel berikut:

Indeks Profesionalisme ASN Provinsi NTB Tahun 2019-2022

NO	Dimensi IPA	Tahun								Target Akhir RPJMD
		2019		2020		2021		2022		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Kualifikasi	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,139	0,14
2	Kompetensi	0,23	0,16	0,24	0,16	0,25	0,255	0,27	0,086	0,28
3	Kinerja	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,21	0,25
4	Disiplin	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05
Nilai IPA		0,65	0,58	0,67	0,59	0,68	0,685	0,7	0,489	0,72

Sumber : Badan Kepegawaian Daeran Provinsi NTB, 2022

Nilai Indeks Profesionalisme ASN Provinsi NTB tahun 2022 berada pada score 0,489 poin dengan kategori sangat rendah. Nilai IPA NTB tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan namun di tahun 2022 menurun menjadi 0,489. Penilaian Indeks Profesionalisme ASN ini mengacu kepada Peraturan Kepala BKN nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan metode penilaian menggunakan database yang berasal dari My SAPK yang merupakan bagian dari Sistem Informasi ASN (SI-ASN). Berdasarkan penilaian Indeks Profesionalisme ASN diatas menunjukkan bahwa Provinsi NTB masuk dalam kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Belum tercapainya target dimensi kompetensi dari 27 persen baru tercapai sebesar 8,61 persen. Hal ini disebabkan belum terlaporkannya pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN secara menyeluruh baik berupa diklat, workshop, seminar serta *mentoring* dan *coaching* di dalam database SI-ASN. Ditambah lagi dengan minimnya anggaran peningkatan kapasitas SDM aparatur lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem elektronik penilaian kinerja (e-kinerja) sehingga pencapaian dimensi kinerja dari target 25 persen baru tercapai sebesar 21,42 persen. Hal ini disebabkan belum optimalnya pelaksanaan penilaian kinerja yang berimbas kepada evaluasi kinerja belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan sistematis.
3. Belum maksimalnya pencapaian dimensi Disiplin dari target 5 persen baru tercapai sebesar 4,97 persen. Hal ini disebabkan penerapan pemantauan disiplin secara elektronik belum disertai evaluasi dan pengawasan secara berkala, serta belum menerapkan reward dan punishment secara adil bagi ASN.

Target Penerapan Sistem Merit pada tahun 2022 berada pada angka 347,5 point dengan realisasi 287,0 point (kategori baik). Penerapan system merit secara bertahap ditargetkan meningkat sampai dengan tahun 2023 menjadi 373 point (kategori III dengan

level baik). Penetapan target penerapan sistem merit ini dilakukan agar tata kelola kepegawaian lingkup Pemerintah Provinsi NTB menjadi lebih baik.

Capaian Indeks Penerapan Sistem Merit Tahun 2019 s.d. 2022
Lingkup Pemerintah Provinsi NTB

NO	ASPEK	2019		2020		2021		2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	capaian
1	Perencanaan Kebutuhan	35	35	35	35	40	37,5	40	37,5
2	Pengadaan	34	34	40	40	40	40	40	40
3	Pengembangan Karir	25	25	37,5	37,5	55	37,5	82,5	52,5
4	Promosi dan Mutasi	20	20	25	25	32,5	25	32,5	22,5
5	Manajemen Kinerja	67,5	67,5	75	75	80	75	80	65
6	Perlindungan dan Pelayanan	14	14	14	14	14	14	16	16
7	Pengajian, Penghargaan dan Disiplin	30	30	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
8	Sistem Informasi	12	12	15	15	16	15	19	16
TOTAL NILAI PENERAPAN SISTEM MERIT		237,5	237,5	279,0	279,0	315,0	281,5	347,5	287,0
PERSENTASE CAPAIAN		100,00		100,00		89,37		82,59	

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, 2022

Hasil penilaian Sistem Merit pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Diawal pelaksanaan RPJMD 2019-2023 nilai penerapan sistem merit NTB berada pada angka 237,5 point atau dengan kategori kurang. Tahun 2022 nilai penerapan sistem merit NTB terus meningkat hingga mencapai angka 287 point atau 82,59 persen dari target yang ditetapkan yaitu 347,5 point. Nilai penerapan system merit tahun 2022 sebesar 287 poin berada pada kategori Baik.

- 8. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat** dengan Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik dengan target 4,53 poin dan realisasi sebesar 3,71 poin atau tingkat capaian 81,90%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :
- a. Program Pendaftaran Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk dengan target 98,8%. Bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk dengan realisasi 214 kg berat dokumen/barang yang dikirim.

- b. Program Pencatatan Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil. Kegiatan untuk mendukung program ini yaitu Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota dengan target 100%. Kegiatan yang dilakukan sebanyak 2 kegiatan dengan 6 sub kegiatan. Kegiatan pertama yaitu Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi dengan indikator kinerja yaitu Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi. Kegiatan selanjutnya yaitu Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan. Kegiatan ini diselenggarakan melalui Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.
- d. Program Peningkatan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan lingkaran hutan dan pesisir. Target untuk Program ini sebesar 20 persen. Kegiatan yang dilakukan yaitu Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi dengan indikator kinerja jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi dengan realisasi sebanyak 1 kali. Kegiatan ini didukung melalui Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota, Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga, dan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- e. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik dengan target 70%. Kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator kinerja persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik yang tersedia. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik; Pengelolaan Media Komunikasi Publik; Pelayanan Informasi Publik; Layanan Hubungan Manusia; Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik; Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah; Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas; dan

- Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi. Jumlah informasi yang diproduksi dan disebar melalui media sebanyak 540 informasi, jumlah sengketa informasi yang terselesaikan sebanyak 9 kasus.
- f. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Persentase Layanan Berbasis TIK dengan target 50%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan meliputi Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi; Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah; Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah; dan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - g. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi dengan target 25%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Provinsi dengan sub kegiatan meliputi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Dieminasi Data Statistik Sektorial; Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi; Membangun Metadata Statistik Sektorial; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektorial; dan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektorial di Daerah).
 - h. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah dengan target 40%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi; Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi; Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik; dan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi); dan Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi (sub kegiatan : Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi).
 - i. Program Perencanaan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator kinerja Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja dengan target 85%. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.

- j. Program Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Pengembangan Minat dan Budaya Baca dengan target kinerja 100%. Realisasi untuk pengembangan minat dan budaya baca sudah mencapai 50 persen sampai Triwulan IV ini. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan realisasi 35 perpustakaan sudah dibina dan dikembangkan dan kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi dengan realisasi 4 kegiatan pengembangan minat dan budaya baca sudah dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Sub kegiatan untuk kegiatan pertama yaitu Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik; Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi; Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan; Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka; dan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi. Sedangkan sub kegiatan untuk kegiatan kedua yaitu Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat; Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi; dan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial.

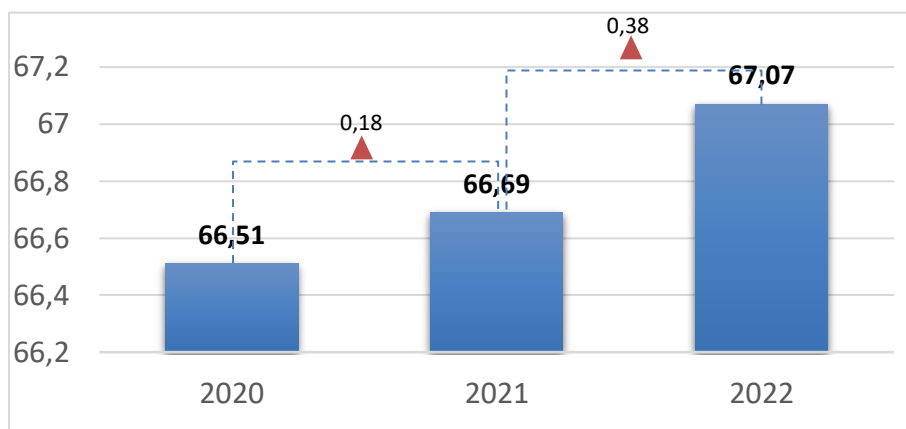
- k. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR Dan Naskah Kuno Milik Daerah. Target untuk program ini sebesar 100% dengan 50%. Bentuk kegiatan yang dilakukan terdiri dari 3 kegiatan dengan 6 sub kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi dengan indikator kinerja jumlah pengelolaan karya cetak karya rekam. Realisasi untuk kegiatan ini sudah sebanyak 250 judul koleksi deposit sudah tersedia. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Kegiatan kedua yaitu Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi. Realisasi untuk kegiatan ini sebesar 350 eksemplar. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah; dan Penerbitan Bibliografi Daerah. Kegiatan ketiga yaitu Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi dengan sub kegiatan : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno; dan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan.

- i. Program pelayanan Penghubung pada Badan Penghubung Daerah dengan indikator kinerja angka kunjungan wisatawan pada anjungan NTB TMII. Target untuk program ini sebesar 41.000 orang Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu Kegiatan Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.

9. Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat dengan Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup dengan target sebesar 67,08 Tahun dan Persentase Balita Stunting dengan Target 16,99 %. Sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, Angka Harapan Hidup di Provinsi NTB dalam tiga tahun terakhir tercatat sebagai berikut yaitu pada tahun 2020 sebesar 66,51 tahun, pada tahun 2021 menjadi 66,69 tahun, dan tahun 2022 menjadi 67,07 tahun. Data tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 yakni sebesar 0,38 tahun, peningkatan tersebut lebih besar dibandingkan peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut.

Angka Harapan Hidup di Provinsi NTB Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2022

Data per wilayah kabupaten dan kota menunjukkan bahwa capaian Angka Harapan Hidup tahun 2022 tertinggi di capai Kota Mataram yakni sebesar 72,20 tahun dan capaian terendah adalah Kabupaten Lombok Timur yakni sebesar 66,55 tahun. Capaian Angka Harapan Hidup per kabupaten dan kota selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Angka Harapan Hidup Per Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022

NO	Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)		
		2020	2021	2022
1.	Mataram	71.76	71.88	72.20
2.	Lombok Barat	66.94	67.19	67.63

3.	Lombok Utara	67.17	67.36	67.75
4.	Lombok Tengah	66.21	66.38	66.75
5.	Lombok Timur	65.90	66.16	66.55
6.	Sumbawa Barat	68.07	68.31	68.74
7.	Sumbawa	67.54	67.73	68.12
8.	Dompu	66.62	66.99	67.36
9.	Bima	66.33	66.50	66.78
10.	Kota Bima	70.38	70.50	70.83
	NTB	66.51	66.69	67.07

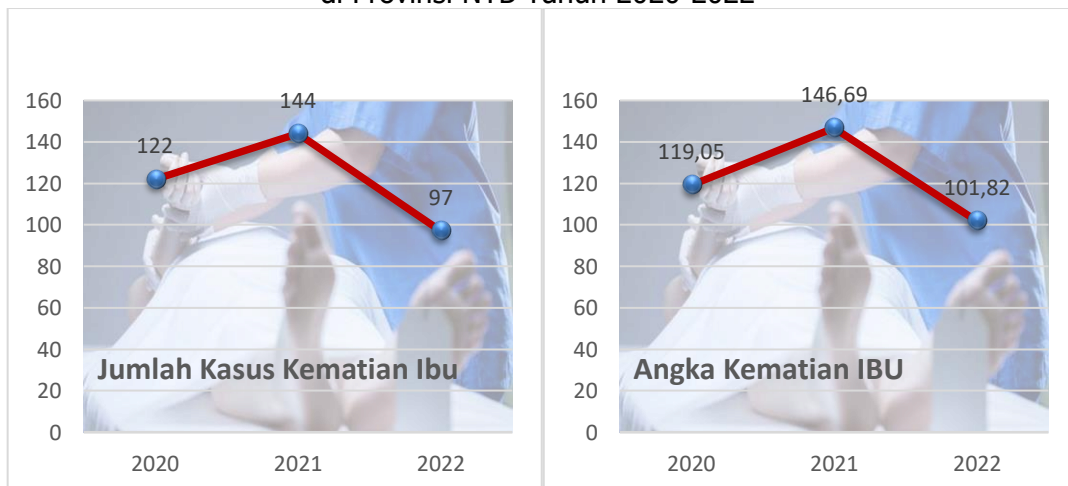
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2022,

• Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan, persalinan, dan nifas. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan. Angka kematian ibu di hitung dengan cara yaitu jumlah kasus kematian ibu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup dikalikan 100.000.

Dalam tiga tahun terakhir, kasus kematian ibu melahirkan berturut dari tahun 2020-2022 adalah 122 kasus, 144 kasus, dan 97 kasus. Jika dikonversi menjadi angka kematian ibu yaitu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup, maka angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup yakni berturut-turut selama 2020-2022 adalah 119,05, 146,69 dan 101,82. Namun pada tahun 2021 jumlah kelahiran hidup tidak mencapai 100.000 kelahiran. Kasus jumlah kematian ibu dan angka kematian ibu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu di Provinsi NTB Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2022

Kasus kematian ibu terbanyak pada tahun 2022 terjadi di Kabupaten Lombok Timur dengan 34 kasus terendah di Kabupaten Sumbawa Barat dan Dompu dengan 2 kasus.

Jumlah kematian ibu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup per kabupaten/kota tahun 2020-2022 menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

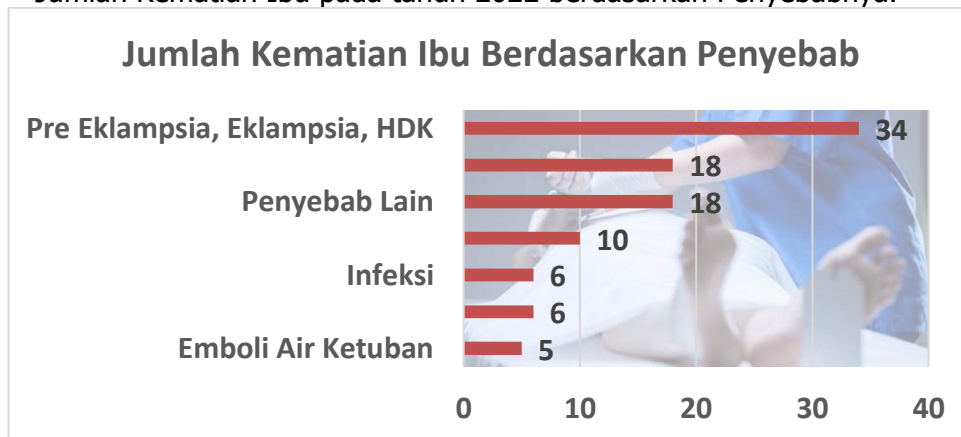
**Jumlah Kematian Ibu Per Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2022**

NO	KABUPATEN/ KOTA	2020			2021			2022		
		KASUS KEMATIA N IBU	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	AKI (per 100.000 KH)	KASUS KEMATIAN IBU	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	AKI (per 100.000 KH)	KASUS KEMATIAN IBU	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	AKI (per 100.000 KH)
1	Mataram	7	8.842	79,17	15	8.564	175,15	6	6,483	92.55
2	Lombok Barat	14	13.663	102,47	12	13.148	91,27	10	12,474	80.17
3	Lombok Utara	3	4.443	67,52	3	4.244	70,69	3	4,236	70.82
4	Lombok Tengah	29	19.145	151,48	33	18.234	180,98	19	18,856	100.76
5	Lombok Timur	43	24.651	174,44	45	23.508	191,42	34	24,600	138.21
6	Sumbawa Barat	1	3.495	28,61	2	3.393	58,94	2	2,459	81.33
7	Sumbawa	11	9.052	121,52	9	8.613	104,49	8	8,112	98.62
8	Dompu	1	5.763	17,35	7	5.571	125,65	2	5,369	37.25
9	Bima	10	10.084	99,17	12	9.655	124,29	10	9,611	104.05
10	Kota Bima	3	3.339	89,85	6	3.235	185,47	3	3,062	97.98
NTB		122	102.477	119,05	144	98.165	146,69	97	95.262	101,82

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2022

Penyebab kematian ibu tertinggi disebabkan oleh Pre-Eklampsia, Eklampsia, Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK). Untuk detailnya Jumlah kematian ibu pada tahun 2022 berdasarkan penyebabnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Jumlah Kematian Ibu pada tahun 2022 berdasarkan Penyebabnya.



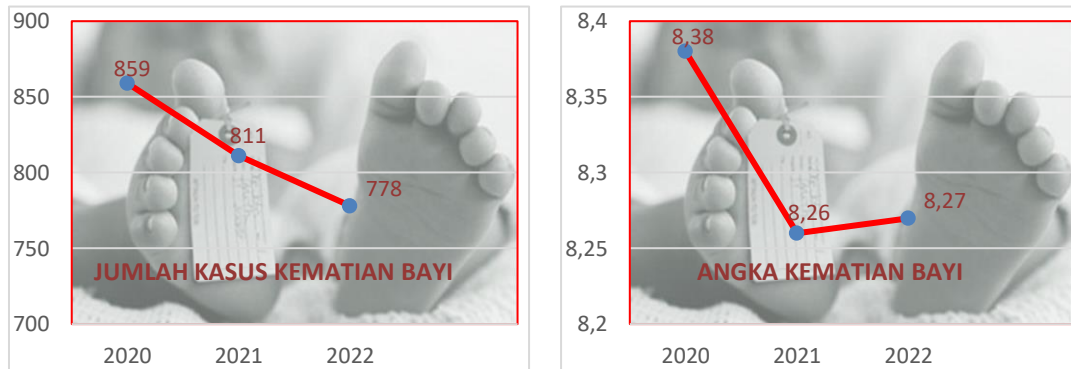
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2022

Penyebab kematian ibu paling tinggi yaitu Pre-Eklampsia, Eklampsia atau keracunan kehamilan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah, kasus ini sebanyak 34 kasus. Faktor pendarahan dan Jantung juga menjadi penyebab kematian ibu sebesar 18 dan 10 kasus kematian. Terdapat beberapa faktor lain yg juga menyebabkan

kematian ibu yaitu infeksi 6 kasus, TBC dan Emboli Air Ketuban dengan 6 dan 5 kasus kematian.

- **Angka Kematian Bayi**

Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi di Provinsi NTB Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2022

Kasus kematian bayi pada tahun 2020 sebanyak 859 kasus, pada tahun 2021 kasus kematian bayi mengalami penurunan menjadi 811 kasus, sedangkan pada tahun 2022 juga mengalami penurunan menjadi 778 kasus. Untuk angka kematian bayi yang merupakan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dari tahun 2020-2022 berturut-turut yaitu 8,38, 8,26 dan 8,27, selengkapnya per kabupaten/kota se-NTB, sebagaimana tabel berikut.

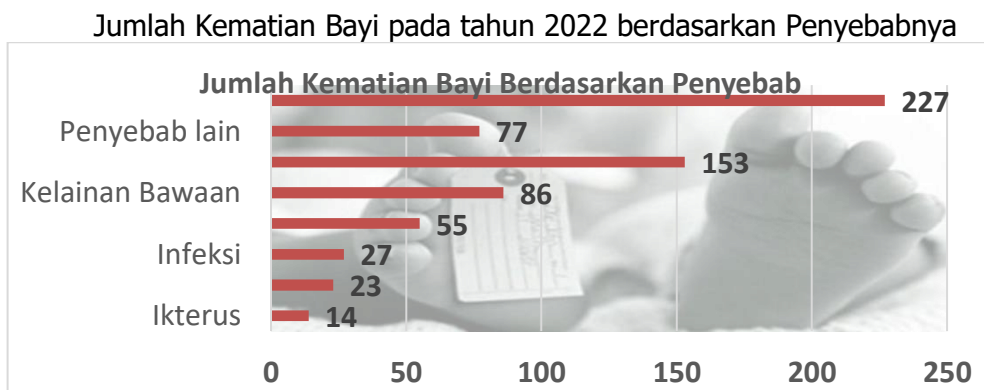
Jumlah Kasus Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB Tahun 2020–2022

NO	Kabupaten/ Kota	2020			2021			2022		
		Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB (per 1000 KH)	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB (per 1000 KH)	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	AKB (per 1000 KH)
1.	Mataram	37	8.842	4,18	56	8.564	6,54	45	6.483	6,94
2.	Lombok Barat	42	13.663	3,07	46	13.148	3,50	43	12.474	3,45
3.	Lombok Utara	69	4.443	15,53	60	4.244	14,14	60	4.236	14,16
4.	Lombok Tengah	194	19.145	10,13	189	18.234	10,37	192	18.856	10,18
5.	Lombok Timur	297	24.651	12,05	237	23.508	10,08	219	24.600	8,90
6.	Sumbawa Barat	13	3.495	3,72	13	3.393	3,83	18	2.459	7,32
7.	Sumbawa	76	9.052	8,40	64	8.613	7,43	59	8.112	7,27
8.	Dompu	36	5.763	6,25	44	5.571	7,90	65	5.369	12,11
9.	Bima	81	10.084	8,03	83	9.655	8,60	71	9.611	7,39
10.	Kota Bima	14	3.339	4,19	19	3.235	5,87	16	3.062	5,23
	NTB	859	102.477	8,38	811	98.165	8,26	788	95.262	8,27

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2022

Berdasarkan tabel di atas Kasus kematian bayi tahun 2020 tertinggi terjadi di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 297 kasus sedangkan Kasus kematian bayi terendah terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 13 kasus. Pada Tahun 2021 kasus kematian bayi tertinggi di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 237 kasus, sedangkan kasus kematian bayi terendah terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 13 kasus. Pada tahun 2022 kasus kematian tertinggi juga terjadi di kabupaten Lombok Timur sebanyak 219 kasus sedangkan kasus kematian bayi terendah juga terjadi di Kota Bima sebanyak 16 kasus.

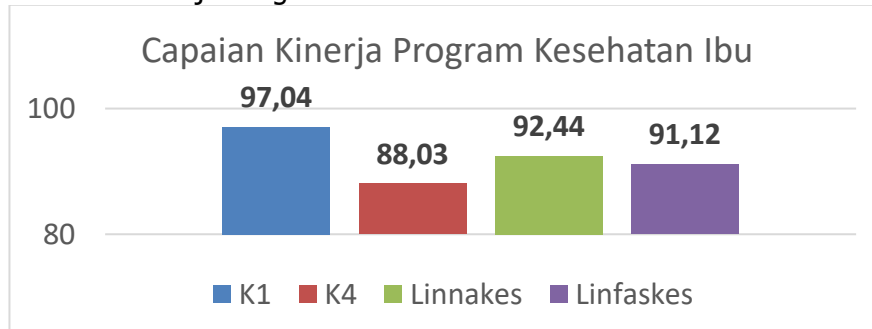
Ada beberapa faktor penyebab kematian bayi yaitu berat bayi lahir rendah (BBLR), asfiksia, Pneumonia, kelainan bawaan, infeksi, Sepsis, Ikterus dan penyebab lainnya. Besarnya jumlah kematian bayi berdasarkan penyebabnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan dalam rangka menurunkan jumlah kasus kematian ibu dan bayi diukur dengan indikator antara lain: Pelayanan Antenatal (ANC) K1 s/d K4, Pertolongan Persalinan, Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas, Pelayanan Kesehatan Neonatus, Deteksi Dini Faktor Risiko dan Komplikasi, Penanganan Komplikasi Kebidanan, Pelayanan Neonatus dengan Komplikasi, Pelayanan Kesehatan Bayi, Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan kualitas KB.

Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Ibu di Provinsi NTB Tahun 2022



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2022

Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Anak di Provinsi NTB Tahun 2022

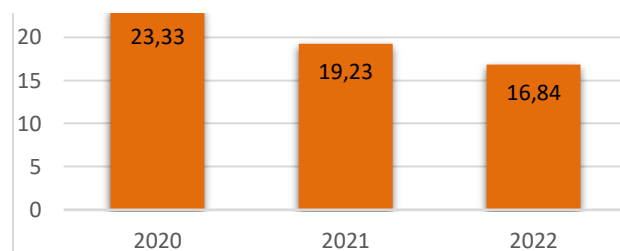


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2022

Grafik diatas menunjukkan bahwa sebagian besar realisasi indikator belum mencapai target yang ditentukan yaitu 100%, untuk program kesehatan ibu dan program kesehatan anak. Belum tercapainya target indikator-indikator diatas menunjukkan bahwa monitoring terhadap ibu hamil masih harus terus ditingkatkan, disamping itu peningkatan kompetensi petugas kesehatan juga harus terus dilakukan.

Balita Stunting di Provinsi NTB terus mengalami penurunan dari 23,33 persen di tahun 2020 menjadi 19,23 persen di tahun 2021 dan 16,84 persen di tahun 2022. Data persentase Balita Stunting diperoleh dari hasil pengukuran di tingkat posyandu dan dilaporkan melalui aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM). Untuk indikator prsentase Stunting dapat dilihat perkembangannya dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada grafik berikut.

Persentase Stunting NTB Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2022

Persentase balita stunting tertinggi pada tahun 2022 terjadi di kabupaten Lombok Utara yaitu 22,94 persen dan persentase balita stunting terendah terjadi di kabupaten Sumbawa yaitu 8,11 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Persentase Stunting Per Kabupaten/Kota Tahun 2020-2022

NO	Kabupaten/ Kota	Persentase Stunting		
		2020	2021	2022
1.	Mataram	25,81	19,64	17,08
2.	Lombok Barat	31,11	22,71	18,98
3.	Lombok Utara	39,98	28,31	22,94
4.	Lombok Tengah	27,90	23,03	20,81
5.	Lombok Timur	22,38	18,13	16,98

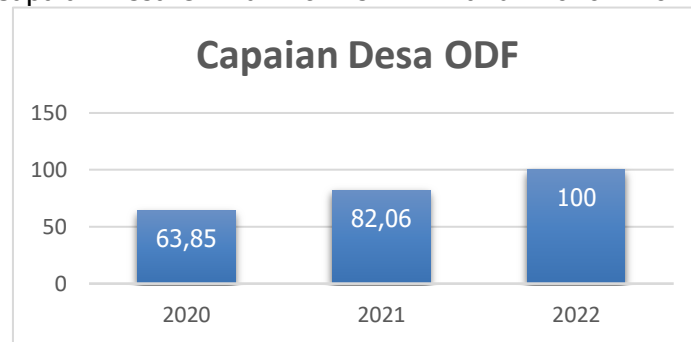
6.	Sumbawa Barat	19,27	14,45	8,78
7.	Sumbawa	11,82	8,39	8,11
8.	Dompu	23,88	14,3	13,00
9.	Bima	22,79	18,2	13,88
10.	Kota Bima	17,06	17,56	13,70
	NTB	23,33	19,23	16,84

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2022

- **Capaian Desa Open Defecation Free (ODF)**

Capaian Desa ODF dalam tiga tahun terakhir meningkat dari 63,85 persen pada tahun 2020 menjadi 82,06 di tahun 2021. Pada tahun 2022 capaian ODF Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 telah mencapai 100%, capaian ini masuk kriteria sangat tinggi karena capainnya telah mencapai 100% dari target 81,79% di tahun 2022.

Capaian Desa ODF di Provinsi NTB Tahun 2020 – 2022



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2022

Capaian Desa ODF (Open Defecation Free) di Provinsi NTB telah mencapai 100 persen. Penjelasan tentang tren yang terjadi dalam 3 tahun terakhir pada 10 Kabupaten/Kota di NTB, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Capaian Desa ODF Per Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB Tahun 2020-2022

NO	KABUPATEN / KOTA	CAKUPAN DESA ODF (%)		
		2020	2021	2022
1.	Kota Mataram	78	100	100
2.	Kab. Lombok Barat	77,05	100	100
3.	Kab. Lombok Tengah	61,87	100	100
4.	Kab. Lombok Timur	46,06	91,34	100
5.	Kab. Lombok Utara	27,27	66,67	100
6.	Kab. Sumbawa Barat	100	100	100
7.	Kab. Sumbawa	55,42	66,87	100
8.	Kab. Dompu	39,24	72,46	100
9.	Kab. Bima	72,25	63,87	100
10.	Kota Bima	39,47	60,61	100
	NTB	63,85	82,06	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2022

Semua Kabupaten/kota sudah mencapai ODF di tahun 2022. Hal ini menunjukkan kenaikan capaian kinerja yang sangat tinggi yaitu 17,94% dari capaian tahun 2021.

- **Program Unggulan di Bidang Kesehatan Revitalisasi Posyandu**

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat. Salah satu program unggulan daerah adalah revitalisasi posyandu atau pengembangan posyandu konvensional menjadi posyandu keluarga.

Secara kuantitas, perkembangan jumlah Posyandu keluarga di NTB cukup signifikan, karena terjadi penambahan jumlah posyandu setiap tahun, pada tahun 2020 sebanyak 2223, pada tahun 2021 sebanyak 7.581 dan pada tahun 2022 sebanyak 7.676.

Jumlah Posyandu Berdasarkan Jenis Posyandu di Provinsi NTB Tahun 2022

NO	Kabupaten / Kota	Jumlah Posyandu Keluarga	Jumlah Posyandu Integrasi Bank Sampah	Jumlah Posyandu Integrasi PAUD
1.	Lombok Barat	950	45	159
2.	Kota Mataram	360	2	98
3.	Lombok Utara	416	60	33
4.	Lombok Tengah	1710	28	10
5.	Lombok Timur	1973	50	312
6.	Sumbawa Barat	229	12	16
7.	Sumbawa	742	3	237
8.	Dompu	443	42	97
9.	Kab.Bima	678	4	49
10.	Kota Bima	175	3	12
	NTB	7.676	249	1.023

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2022

Upaya ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak, baik pemerintah maupun komponen masyarakat. Karena itu, mengingat sumberdaya yang terbatas, maka penyelenggaraan Revitalisasi Posyandu dirancang sebagai suatu kolaborasi dan sinergi yang sistematis antar sektor terkait, para mitra pembangunan (NGO), swasta serta koordinasi yang harmonis antara pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten / Kota bahkan sampai pemerintah Desa.

10.Sasaran Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dengan Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah (Target sebesar 13,73 Tahun) ; dan Rata rata Lama Sekolah (Target sebesar 7,04 Tahun).

Pembangunan bidang pendidikan dipantau secara berkesinambungan berdasarkan data dan indikator yaitu: Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan. Indikator tersebut dapat diturunkan menjadi indicator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) yang digunakan untuk mengukur partisipasi sekolah. Capaian indicator kinerja daerah dan

indicator sesuai perjanjian kinerja perangkat daerah tahun 2022 ditampilkan pada table berikut.

Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020 - 2022

No	Indikator Bidang Urusan (Satuan)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	PENDIDIKAN						
1	Indeks Pendidikan (Point)	62,03	62,42	61,68	63,21	62,74	64,14
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,62	13,70	13,68	13,90	13,73	13,96
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	6,98	7,31	7,01	7,38	7,04	7,61
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/Paket C	98,63	102,21	99,15	106,41	99,95	110,36
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C	92,42	92,53	93,40	96,65	94,38	98,07
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	95,79	95,79	96,68	98,08	97,57	98,50
7	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas / Rombongan Belajar	1:02	1:30	1:1	1:0,92	1:1	1:0,82
8	Persentase APK PK-PLK	69	81,71	69,40	84,19	70	86,83
9	Rasio Guru Terhadap murid pendidikan Menengah (SMA, SMK)	1:20	1:20	1:18	1:11	1:18	1:10
10	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata untuk SLB	1:15	1:7	1:12	1:5	1:10	1:5

Sumber: Dinas Dikbud Provinsi NTB, BPS NTB, 2022

Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa dari sepuluh indikator kinerja yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Tahun 2022, masih ada indikator yang belum mencapai target yaitu: indikator rasio ketersediaan ruang kelas/rombongan belajar. Beberapa hal yang menyebabkan indikator tersebut belum tercapai dan capaian di 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dan 2021 karena jumlah peserta didik yang meningkat sehingga kekurangan ruang kelas, selain itu adanya animo masyarakat yang tinggi terhadap sekolah tertentu sehingga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan ruang kelas.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan tahun 2022 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB beserta UPTD-nya yaitu Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan (BTIDP); UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Lombok Barat-Mataram; UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Lombok Tengah, UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Lombok Timur; UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Lombok Utara; UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Sumbawa Barat; UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Sumbawa; UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Dompu; dan UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK Bima-Kota Bima. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan untuk pencapaian target pembangunan bidang pendidikan tahun 2022.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan bertujuan untuk menjadikan masyarakat memiliki kecakapan hidup (life skills) yang dapat mendorong pelaksanaan pembangunan. Guna pemenuhan hal tersebut, pemerintah berupaya melakukan jumlah

fasilitas pendidikan, peningkatan mutu dan peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Salah satu indikator untuk menilai akses pendidikan adalah partisipasi sekolah. Indikator partisipasi sekolah merupakan gambaran pemerataan akses dan perluasan pelayanan pendidikan terhadap penduduk.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap system pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan menurut kelompok umur sekolah setiap jenjang pendidikan yaitu SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun), dan SMA (16-18 tahun) serta Perguruan Tinggi (19-24 tahun).

Dari data diatas dapat dilihat bahwa angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2022 sebesar 98,50 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,42 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 98,08 persen. Dari data diatas juga tampak bahwa masih ada anak usia 16 sampai 18 tahun yang tidak berada pada jenjang yang seharusnya yaitu jenjang pendidikan menengah sekitar 1.007 anak atau sebesar 0,46 persen dari total jumlah penduduk usia 16 s.d. 18 Tahun.

Angka partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan penduduk di luar usia sekolah pada jenjang yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variable pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan misalnya tamat SD adalah enam tahun, tamat SMP adalah sembilan tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Semakin tinggi angka RLS maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Rata-rata lama sekolah di Provinsi NTB mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2022. Rata-rata lama sekolah tahun 2022 sebesar 7.61 tahun ini artinya penduduk di Provinsi NTB yang berusia 25 tahun ke atas memiliki rata-rata lama sekolah 7,61 tahun, atau rata-rata penduduk 25 tahun keatas di Provinsi NTB telah menamatkan pendidikan minimal kelas VII (atau kelas 2 SMP semester I).

11. Sasaran Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Hidup dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Target masing-masing indikator tersebut adalah sebesar 42,93 poin; 87,56 poin; dan 87,63 poin. Capaian indikator kinerja utama urusan lingkungan hidup diukur melalui pengukuran nilai IKLH (indeks kualitas air, indeks kualitas air laut, dan indeks kualitas udara) serta neraca pengelolaan sampah (persentase penanganan sampah dan persentase pengurangan sampah) dan disajikan pada tabel sebagai berikut.

Capaian Kinerja Dan Indikator Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2022

No	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	LINGKUNGAN HIDUP						
1	INDEKS KUALITAS AIR	42,73	50,98	42,83	45,10	42,93	43,39
2	INDEKS KUALITAS AIR LAUT	69,69	67,49	70,29	80,22	70,89	89,48
3	INDEKS KUALITAS UDARA	87,5	88,63	87,53	88,52	87,59	89,3

Sumber : - 1 s/d 3 Website Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK (ppkl.menlhk.go.id).

Indeks kualitas air, udara, dan air laut pada tahun 2022 melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena sudah dilakukan proses edukasi dan sosialisasi dalam pengelolaan persampahan, adanya reward dan punishment dalam pengelolaan lingkungan dalam bentuk regulasi pengelolaan lingkungan. Indikator lainnya yang belum mencapai target ialah neraca pengelolaan sampah. Hal ini diakibatkan minimnya sarpras pengangkutan sampah, reaktivasi TPS 3R, dan pembangunan serta pengembangan pusat-pusat pengolahan sampah skala desa, belum optimalnya pencatatan data pengurangan sampah di sebagian besar Kab/Kota dan masih banyaknya timbunan sampah ilegal di sungai, pantai, hutan dll akibat rendahnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Capaian indikator kinerja utama pada Dinas LHK Provinsi NTB dirincikan sebagai berikut.

- **Indeks Kualitas Air**

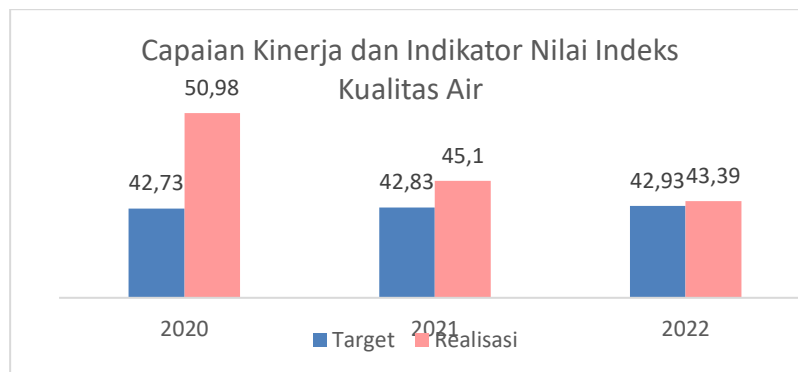
Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2022 dihitung mempertimbangkan segmen hulu, tengah, dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk mendapatkan data IKA, sampel diambil di beberapa sungai di wilayah NTB yaitu Tojang, Sari, Babak, Ancar, Segara, Dodokan, Brang Rea, Brang Biji, Rabalaju, dan Padolo. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap sample air yang diambil. Pada tahun 2022, Kementerian

LHK melalui Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sudah melakukan upaya percepatan rilis data melalui website resminya yaitu sebesar 43,39 poin.

Capaian Kinerja Dan Indikator Nilai IKA Tahun 2020-2022

No	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
LINGKUNGAN HIDUP							
1	INDEKS KUALITAS AIR	42,73	50,98	42,83	45,10	42,93	43,39

Sumber: Website Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK (ppkl.menlhk.go.id)



Grifik Capaian Indikator Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2020

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa target IKA meningkat 0,1 poin setiap tahunnya menyesuaikan target yang ada di RPJMD Provinsi NTB, sehingga terlihat bahwa target 2022 lebih kecil jika dibandingkan capaian IKA Tahun 2021. Untuk perhitungan Indeks Kualitas Air, dilakukan di 60 titik di setiap sungai pada 10 kabupaten/kota di provinsi NTB. Adapun parameter dari perhitungan IKA ini adalah pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃-N, Total Fosfat dan Fecal Coliform. Jika nilai indeks pencemar semakin tinggi maka semakin buruk kualitas airnya. Data kualitas air diambil dari 60 titik yang tersebar di 10 kabupaten/kota pada provinsi Nusa Tenggara Barat. Data ini diambil dari titik hilir hingga ke hulu. Pemantauan dilakukan sebanyak 2 periode yaitu pada saat musim hujan dan kemarau.

Berdasarkan grafik dan tabel di atas bisa dilihat bahwa nilai IKA NTB masih dalam kondisi buruk dan terus mengalami penurunan sejak tahun 2020, hal ini disebabkan sebagian besar sampel memiliki nilai DO yang tidak memenuhi nilai baku mutu dan nilai fecal coliform yang tinggi. Oksigen terlarut atau DO (*dissolved oxygen*) adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorbs atmosfer/udara. Oksigen terlarut di suatu perairan sangat berperan dalam proses penyerapan makanan oleh makhluk hidup dalam air, jika kadar oksigen terlarut yang terlalu rendah akan

menimbulkan bau yang tidak sedap akibat degradasi anaerobik yang mungkin saja terjadi. Sebanyak 117 dari 120 sampel yang diambil dalam pemantauan kualitas air sungai pada tahun 2020 memiliki nilai DO diatas 4 mg/L sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2021.

Hal ini berkaitan juga dengan nilai BOD, dimana jika nilai BOD tinggi maka akan mempengaruhi nilai DO dalam air. Biological Oxygen Demand (BOD) adalah ukuran oksigen yang digunakan oleh mikroorganisme untuk menguraikan sampah. Sungai yang memiliki kadar BOD tinggi merupakan indikasi tingginya pencemaran di sungai karena oksigen terlarut yang tersedia di dalam air digunakan oleh bakteri, dan hal ini mengakibatkan berkurangnya oksigen yang tersedia untuk ikan dan makhluk air lainnya. Pada hasil sampling kualitas air sungai pada tahun 2022, terdapat 10 dari 120 sampel yang nilai BOD nya di atas 3 mg/L sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2021.

Fecal coliform adalah coliform yang berasal dari feses baik manusia maupun binatang, fecal coliform yang tinggi dapat membahayakan lingkungan, dekomposisi aerobiknya dapat menurunkan oksigen terlarut sehingga menimbulkan kematian pada ikan dan organisme akuatik lainnya. Fecal coliform tinggi juga dapat menekan pertumbuhan bakteri menguntungkan sehingga merusak keseimbangan akuatik secara keseluruhan. Berdasarkan hasil uji lab yang telah dilakukan, nilai Fecal coli di 120 sampel pemantauan, terdapat 117 sampel yang melebihi baku mutu dan memiliki nilai fecal coli >1.000 mg/L , dan ada 3 titik pantau yang memiliki nilai fecal coli <1.000 mg/L. Nilai fecal coli tertinggi terdapat di Sungai Sori Jangka Hilir 2 Kabupaten Bima, dengan nilai fecal coli yaitu 920.000 mg/L. Untuk titik pantau yang memiliki nilai fecal coli terendah terdapat di Sungai Tojang Hulu 1, Kabupaten Lombok Timur. Lokasi pantau juga mempengaruhi nilai fecal coli, dimana titik pantau dengan nilai fecal coli tertinggi berada di bagian hilir sungai dimana hilir sungai merupakan bagian terakhir dari sebuah sungai, karena memang letaknya berdekatan dengan muara sungai, sedangkan nilai terendah berada di bagian hulu, dimana bagian hulu merupakan bagian awal yang biasanya berdekatan dengan sumber mata air.

- **Indeks Kualitas Air Laut**

Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut yang meliputi parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, N-NH₃, PO₄-P dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dinas LHK NTB berperan melakukan

pendampingan pemantauan oleh Kementerian LHK sejak Tahun 2021. Di Tahun 2022, pemantauan tidak didampingi oleh Dinas LHK NTB, melainkan dilakukan secara mandiri oleh Kementerian LHK sebanyak 1 (satu) kali pada 23 titik sampling. Hal tersebut dikarenakan anggaran yang mengalami refocussing, sehingga anggaran yang tersedia lebih difokuskan pada upaya pencegahan pencemaran lingkungan lainnya antara lain rapat dan sosialisasi dengan masyarakat/pelaku usaha, pembinaan, penilaian serta evaluasi PROPER, serta pemeriksaan dan penerbitan persetujuan teknis. Adapun lokasi titik pantau yang dimaksud antara lain :

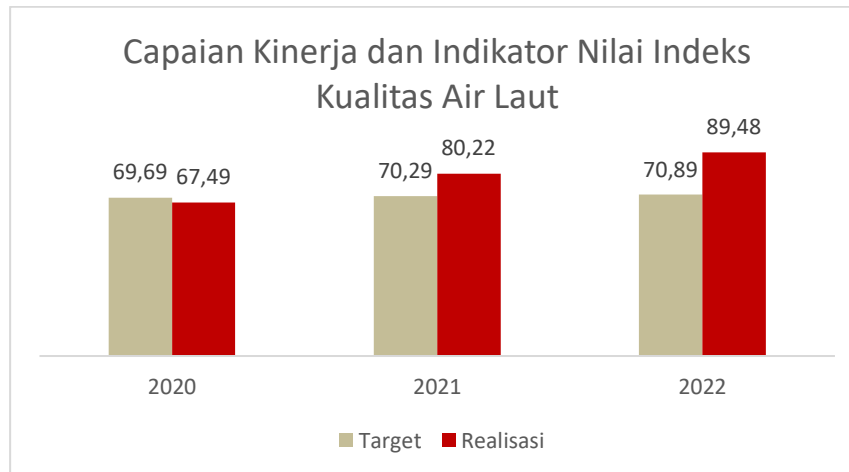
1. Belakang Pelabuhan Ampenan Lama (Belakang Pertamina TBBM Ampenan)
2. Area Sekitar Muara Meninting
3. Area Batu Layar (Belakang Hotel Jayakarta)
4. Area Belakang Pura Batu Bolong
5. Area Belakang Sheraton Hotel - Rejavilla Resort
6. Belakang Hotel Katamaran
7. Pantai Malimbu
8. Pantai Pandanan
9. Pelabuhan Teluk Nare
10. Pelabuhan Bangsal
11. Pelabuhan Kuta
12. Pantai Mandalika
13. Bukit Merese
14. Tanjung Aan
15. Pelabuhan Awang
16. Pemukiman Penduduk Teluk Awang
17. Muara Teluk Awang
18. Tambak Udang Kampung Bali
19. Tambak Udang 2
20. Pelabuhan Tano
21. DAS Sungai Moyo 1.
22. DAS Sungai Moyo 2.
23. DAS Sungai Moyo 3.

Capaian Kinerja Dan Indikator Nilai Indeks Kualitas Air Laut Tahun 2020-2022

No	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	LINGKUNGAN HIDUP						
1	INDEKS KUALITAS AIR LAUT	69,69	67,49	70,29	80,22	70,89	89,48

Sumber: Website Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK (ppkl.menlhk.go.id)



Gambar 2. Grafik Capaian Indikator Nilai Indeks Kualitas Air Laut Tahun 2019-2021

Berdasarkan hasil uji pemantauan kualitas air laut di pada titik pantau di atas, hasil ujinya menunjukkan bahwa hasil uji untuk seluruh parameter masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil uji lab kualitas air laut ini akan digunakan untuk menghitung IKAL (Indeks Kualitas Air Laut) yang selanjutnya juga secara komposit untuk menghitung nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). Capaian nilai IKAL tahun 2022 adalah sebesar 89,48 (Kategori Baik) dari target 70,89, dan menempatkan nilai IKAL Provinsi NTB pada peringkat 1 dari 34 Provinsi se-Indonesia.

Adanya peningkatan kualitas air laut dari tahun ke tahun adalah dampak dari upaya mengintegrasikan pemantauan kualitas air laut ke dalam program pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh KLHK salah satunya dilakukan identifikasi dan kaji masalah lingkungan penting yang berpengaruh terhadap lingkungan pesisir dan laut (yang berdampak pada perikanan, wisata dan penggunaan pesisir lainnya). Langkah solutif lainnya yang dilakukan ialah peningkatan kualitas air laut antara lain penyusunan dan penertiban ruang darat laut sesuai rencana tata ruang, penerapan baku mutu, daya dukung dan daya tampung, perizinan pembuangan limbah cair ke laut, pengelolaan B3 dan limbah B3, pengelolaan sampah, *command and control*, koordinasi para pihak dalam

peningkatan kualitas air laut, sosialisasi dan edukasi, pelebagaan masyarakat local dan sampai kepada *insentive* dan *disinsentive*.

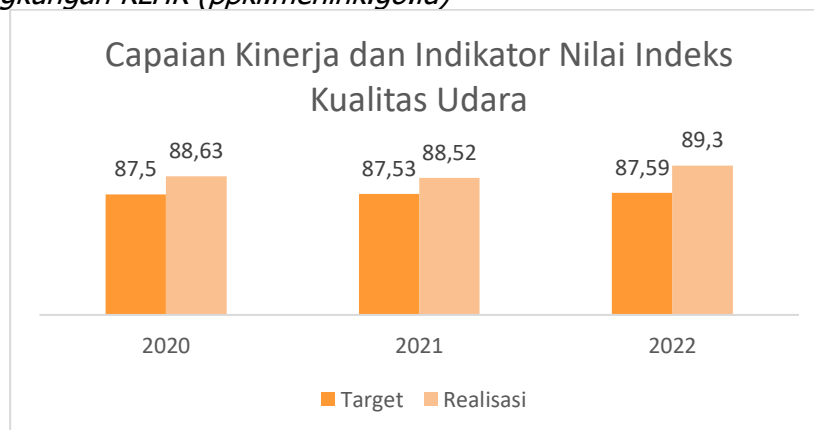
- **Indeks Kualitas Udara**

Indeks Kualitas udara adalah parameter yang menunjukkan kondisi kualitas udara di sebuah tempat. Indeks ini dibuat untuk memudahkan masyarakat mengetahui kondisi kualitas udara dengan cara yang sederhana dan satuan-satuan yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Pemantauan dilaksanakan menggunakan metode passive sampler pada 4 lokasi sampling yaitu Transportasi, Industri, Pemukiman dan Perkantoran dengan parameter yang diuji adalah SO₂ dan NO₂.

Capaian Kinerja Dan Indikator Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2020-2022

No	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	LINGKUNGAN HIDUP						
1	INDEKS KUALITAS UDARA	87,5	88,63	87,53	88,52	87,59	89,3

Sumber: Website Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK (ppkl.menlhk.go.id)



Grafik Capaian Indikator Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2019-2021

Data kualitas udara didapatkan dari 4 wilayah berbeda, yaitu perkantoran, pemukiman, transportasi dan industri. Tempat-tempat tersebut memiliki kriteria berbeda berkaitan dengan sumber polusi yang mempengaruhi kualitas udara. Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa nilai IKU Provinsi NTB dalam kondisi baik. Terdapat 2 parameter penilaian IKU, yaitu NO₂ dan SO₂. NO₂ adalah gas coklat kemerahan yang dipancarkan dari semua mesin pembakaran. aparan jangka pendek dan jangka panjang terhadap NO₂ dikaitkan dengan peningkatan risiko masalah pernapasan. Orang yang memiliki penyakit asma, baik anak kecil maupun orang dewasa memiliki sensitivitas yang meningkat

terhadap efeknya. Polutan sekunder yang disebabkan oleh adanya NO₂ di atmosfer juga memiliki efek buruk tersendiri. Sedangkan SO₂ atau Sulfur dioksida mempunyai karakteristik bau yang tajam dan tidak mudah terbakar diudara. Masalah yang ditimbulkan oleh polutan yang dibuat manusia adalah dalam hal distribusinya yang tidak merata sehingga terkonsentrasi pada daerah tertentu, bukan dari jumlah keseluruhannya, sedangkan polusi dari sumber alam biasanya lebih tersebar merata. Transportasi bukan merupakan sumber utama polutan SO_x tetapi pembakaran bahan bakar pada sumbernya merupakan sumber utama polutan SO_x, misalnya pembakaran batu arang, minyak bakar, gas, kayu dan sebagainya. Pembakaran bahan-bahan yang mengandung sulfur akan menghasilkan kedua bentuk sulfur oksida, tetapi jumlah relative masing-masing tidak dipengaruhi oleh jumlah oksigen yang tersedia. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan tercemarnya kualitas udara adalah aktifitas manusia sehari-hari seperti berkendara, pembakaran dan industri yang menghasilkan emisi gas karbon. Emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Contoh dari emisi karbon ialah CO₂, gas pembuangan dari pembakaran bensin, solar, kayu, daun, gas LPG, dan bahan bakar lainnya yang mengandung hidrokarbon. Proses-proses pembakaran yang dilakukan selama kegiatan dalam insutri ini menghasilkan emisi gas karbon. Selain dari kegiatan industry, kegiatan berkendara yag dilakukan sehari-hari juga menyumbangkan emisi gas karbon diudara. Emisi karbon hasil dari aktivitas berkendara atau yang dikenal juga sebagai emisi gas buang adalah sisa pembakaran yang terjadi di dalam ruang pembakaran pada kendaraan bermotor. Sisa pembakaran ini terdiri dari beberapa zat berbahaya yang dikeluarkan melalui knalpot.

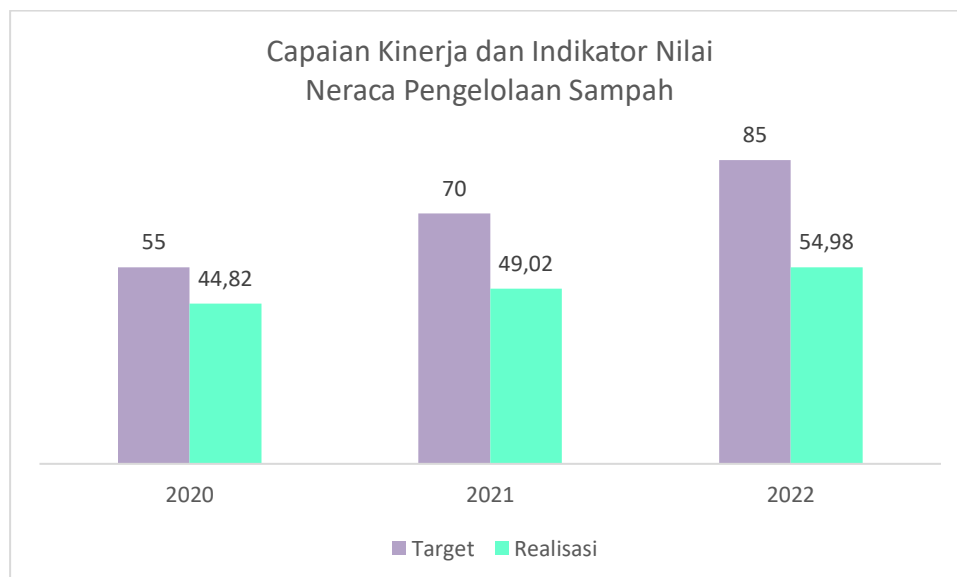
Indeks kualitas udara NTB masuk dalam kategori "Baik" dan mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2022 karena adanya upaya dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap beberapa pelaku usaha melalui kegiatan PROPER. Perusahaan dipastikan untuk tetap melaksanakan kewajibannya dalam pengendalian pencemaran udara, yakni tetap wajib taat terhadap : (1) titik penataan pemantauan, (2) pelaporan, (3) parameter baku mutu emisi sesuai dengan peraturan berlaku, (4) pemenuhan baku mutu emisi sesuai dengan peraturan berlaku, dan (5) ketentuan teknis yang dipersyaratkan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kewajiban lainnya ialah menyampaikan laporan setiap enam bulan tentang pengujian emisi udara manual atau sesuai dengan dokumen pemantauan UKL/UPL kepada Dinas LH kab/kota setempat, Dinas LHK Provinsi, dan Kementerian LHK. Upaya peningkatan indeks kualitas air yang telah disebutkan di

subbab sebelumnya berdampak sekaligus pada penanganan kualitas udara Provinsi NTB. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara dalam evaluasi PROPER, syarat penerbitan rekomendasi KLHS dan AMDAL/UKL-UPL, serta membangun komitmen dengan masyarakat melalui program adiwiyata/kampung iklim, dan membangun kerjasama penanganan dan pengurangan sampah dengan berbagai pihak lainnya.

12.Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dengan Indikator Kinerja Persentase Penanganan Sampah dan Persentase Pengurangan Sampah. Target kinerja masing-masing indikator sebesar 60% dan 25%. Capaian Kinerja Dan Indikator Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2022. Neraca pengelolaan sampah merupakan penjumlahan nilai persentase penanganan sampah dan presentase pengurangan sampah. Capaian per Desember 2022 untuk penanganan sampah adalah sebesar 42,20% dan pengurangan sampah sebesar 12,78%.

No	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	NERACA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	55	44,82	70	49,02	85	54,98
	- Persentase Penanganan Sampah	40	37,63	50	39,68	60	42,2
	- Persentase Pengurangan Sampah	15	7,19	20	9,34	25	12,78

Sumber : Dinas LHK NTB, 2022



Grafik Capaian Indikator Nilai Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2022

Angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD karena adanya beberapa kendala terkait minimnya sarpras pengangkutan sampah, reaktivasi TPS 3R,

dan pembangunan serta pengembangan pusat-pusat pengolahan sampah skala desa, belum optimalnya pencatatan data pengurangan sampah di sebagian besar Kab/Kota dan masih banyaknya timbunan sampah illegal di sungai, pantai, hutan dll akibat rendahnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun dari tahun 2020 hingga 2022, nilai neraca pengelolaan sampah terus mengalami peningkatan karena beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas LHK Provinsi NTB melalui implementasi 8 pilar zero waste, antara lain :

1. Membangun regulasi
2. Penyediaan sarpras
3. Revitalisasi gotong royong
4. Sosialisasi pilah olah sampah dari sumbernya
5. Diversifikasi usaha bank sampah
6. Edukasi dan kampanye
7. Pelibatan para pihak
8. Industrialisasi pengelolaan sampah

Pada tahun 2022 Regulasi yang dikeluarkan dalam mendukung penguatan pelaksanaan pengelolaan sampah adalah :

- a. Instruksi Gubernur Pengelolaan Sampah Nomor No.660/03/Kum/Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan Sekolah
- b. Surat Edaran Gubernur NTB No. 660/06/Kum/Tahun 2022 tentang Pengurangan Potensi Sampah pada Kegiatan Seremonial
- c. Surat Edaran Sekretaris Daerah NTB No. 660/37/PDASRPM/2022 tentang Penggantian Karangan Bunga Menjadi Tanaman Bunga/Buah Dalam Pot

1. Penyediaan Sarana Prasarana

Tabel Penyediaan Sarana Prasarana Tahun 2022

No.	Jenis Sarpras	Jumlah	Keterangan
1.	Tong Komposter	221 buah	Distribusi ke 17 lokasi
2.	Komposter bag	2.000 buah	
3.	Karung	10.000 buah	
4.	Mesin cacah sampah organik	9	Untuk program pembuatan 72ndicat Maggot dan bantuan Dewan
5.	Motor Roda 3	63	Sumber dana APBD dan DBHCHT (7 unit)
6.	Pick up	2 unit	Distribusi ke BSF Sengkol dan TPAR Kebon Kongok
7.	Kandang Maggot	7 unit	Distribusi ke 7 lokasi
8.	Alat Pengolah Sampah Media Cacing	200 unit	Bank Sampah Lotara
9.	Alat Pyrolisis	1 unit	

No.	Jenis Sarpras	Jumlah	Keterangan
10.	Bak Sampah Dorong	40 unit	Distribusi ke 9 lokasi
11.	Kontainer Sampah	1 unit	Kelompok Karang Taruna Cendrawasih Setia
12.	Gudang Sampah	1 unit	Pada Sekolah Alam Rinjani, Sembalun, Lombok Timur

2. Diversifikasi Usaha Bank Sampah

Bank Sampah sudah terbentuk sebanyak 492 unit di NTB dan didorong untuk mengolah sampah 73ndicat. Sampai saat ini sudah ada 53 unit Bank Sampah yang mengelola sampah organik dan 73ndicat dengan Pemkab/Pemkot, terus berusaha mendorong agar pada setiap Desa/Kelurahan bisa terbangun paling tidak 1 unit Bank Sampah/Usaha pengelolaan sampah.

3. Penerapan Teknologi dan Inovasi

Tabel Penerapan Teknologi dan Inovasi Pengelolaan Sampah di NTB

No.	Jenis	Produk	Keterangan
1.	TPST RDF	RDF/SRF	Direncanakan kapasitas sampah input 120 ton/hari. Perkiraan operasional Maret 2023. Sarana penunjang sudah tersedia
2.	GTM	Pyrolysis	Sudah ada prototype kapasitas 1 ton/hari, sedang litbang komposisi, sedang berupaya mencari pendanaan, sudah ada kerjasama dengan Bank Smapah setempat
3.	Block Solution Finlandia	Block Plastic	Rencana kapasitas 2 ton/hari Progress : Sedang proses pembangunan dan PKS dengan BRIDA
4.	Jeranjang Olah Sampah Setempat	Pelet Sampah	Sudah operasional dalam bentuk litbang dengan PLTU Jeranjang, kapasitas 200 kg/hari
5.	Incinerator Limbah Medis	Abu	Sudah beroperasi sejak tahun 2021, dan masih dalam pengurusan ijin 73ndicator73 di KLHK, sudah ada Kerjasama dengan operator, transporter, dan fasyankes.
6.	Incinerator	Pembakaran uang	Kapasitas rata-rata 300 kg/hari
7.	Ekstraksi Gas Metan TPA	Bio Gass	Instalasi dibangun tahun 2019, konsentrasi yang bisa ekstrak baru 60% dan masih digunakan unuk kebutuhan nternal TPA
8.	BSF Lingsar	Maggot, Lindi, Kasgot	Sudah terbangun sejak tahun 2018, kapasitas terpasang 4 ton/hari, opsional 1,2 ton/hari. Sedang penataan untuk jadi pusat belajar.
9.	Pusat Pengelolaan	Maggot, Lindi, Kasgot	Pemprov membangun 14 unit BSF (5 unit pada tahun 2021 dan 9 unit pada tahun 2022), kapasitas terpasang 200 kg/hari.

No.	Jenis	Produk	Keterangan
	Sampah Organik		

4. Kerjasama Pengelolaan Sampah

Kerjasama pengelolaan sampah yang dilakukan tahun 2022 untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah 74ndicat para pihak diantaranya:

1. Kerjasama DLHK NTB dengan PT. CPE Cell terkait Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPAR Kebon Kongok
2. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste dengan 10 Kab/Kota
3. Perjanjian Kerjasama dengan 6 Universitas (UNRAM, UNU, STP Mataram, UNIZAR, Univ. HAMZANWADI, UMMAT), yang sudah ada Kerjasama Universitas 45 dan UIN Mataram
4. Kerjasama Pemerintah Provinsi NTB dengan Universitas Bakrie dalam Memorandum of Understanding yang mengintegrasikan Zero Waste dan Agrowisata Dalam Pertanian Berkelanjutan Melalui Budidaya Larva Black Soldier Fly (BSF)
5. Pelibatan Kementerian dan UPT Kementerian terkait (KLHK dan BPPW NTB)
6. Kerjasama dengan NGO dan Komunitas (GIZ, Mitra SAMIYA, Forest For Life, Kalbe, LCC, LOC, TCC, Komunitas Nol sampah, Ddoro Care, BOFA Denmark)
7. Kerjasama Pengelolaan Incinerator Limbah Medis
8. Kerjasama Litbang RDF dengan PLN
9. Kerjasama Komersialisasi Produk RDF dengan PLN
10. Kolaborasi masyarakat dan pemerintah dalam aksi World Clean Up Day (WCD)

5. Berbagai Program Inisiatif

Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah yang telah dilakukan pada tahun 2022 antara lain :

a. Pelaksanaan Eco Office

Dalam rangka mewujudkan NTB Asri dan Lestari, Pemprov. NTB telah mencanangkan Gerakan NTB Bebas Sampah pada Tahun 2023. Salah satu sasaran prioritasnya adalah kantor-kantor pemerintah yang bersih dan indah. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB mendorong inisiatif penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) sebagai 74ndicat untuk mempercepat terwujudnya NTB Asri dan Lestari. Kegiatan Eco Office telah dilaksanakan selama 2 tahun terakhir yaitu tahun 2021 – 2022. Dalam implementasi Eco Office didukung dengan adanya Surat Edaran Gubernur

NTB Nomor : 660/131/PSPPL-DISLHK/2021 tentang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi NTB. Kegiatan Eco Office terdiri dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim penilai yang berasal dari beberapa perwakilan OPD (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inpektorat, Dinas Kesehatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja) dan satgas *Zero Waste*. Pada tahun 2022 dilakukan pembinaan dan penilaian kepada 47 OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, jumlah ini lebih banyak dibanding tahun 2021 dengan 45 OPD yang melaksanakan Eco Office.

Kegiatan *Eco Office* tahun 2022 memiliki perubahan matriks penilaian beserta bobotnya, jika tahun 2021 bobot penilaian mencakup 30% perencanaan dan 70% pelaksanaan maka pada tahun 2022 bobot perencanaan turun menjadi 10% dan bobot pelaksanaan naik menjadi 90%. Pelaksanaan *eco office* 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan perubahan yang signifikan karena dari hasil evaluasi, OPD yang mendapat peringkat Emas bertambah 19 OPD dari tahun sebelumnya.

b. Gerakan Event Nol Sampah NTB

Gerakan ini diinisiasi oleh Asosiasi Penyelenggara Kegiatan Nusa Tenggara Barat (ASPPEK) NTB yang berkolaborasi dengan beberapa stakeholder terkait untuk mendeklarasikan Gerakan nol sampah di setiap event yang diselenggarakan di NTB, baik skala nasional hingga internasional. Dalam Gerakan ini pula diharapkan penyelenggara acara yang membuat event di NTB dapat mengakomodir secara mandiri sampah yang dihasilkan. Kegiatan ini merupakan salah satu indikator peduli kebersihan dan mendukung Program *Zero Waste*.

c. Penanganan Timbulan Sampah Ilegal

Kegiatan penanganan ini secara rutin dilaksanakan dengan indikator timbulan sampah, terutama di Jalan Nasional, jalur Senggigi – Mandalika oleh tim satgas *Zero Waste* serta berkoordinasi intensif dengan Desa, Kecamatan dan Dinas LH Kab/Kota setempat, dimana waktu penyelesaian timbulannya bisa diselesaikan dalam kurun waktu maksimal 2 hari.

d. Penanganan Sampah Sungai

Pada tahun ini penanganan sampah sungai dilaksanakan pada Sungai Ancar. Kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu sosialisasi, pembinaan, pengawasan/monitoring, evaluasi, gotong royong/*clean up*, pemberian bantuan sarana prasarana pengelolaan sampah seperti bak sampah dorong, karung, *composter bag*, dan kendaraan roda 3 pengangkut sampah.

e. Kegiatan PILSADAR (Pilah Sampah Dari Rumah)

Program Pilah Sampah Dari Rumah merupakan program untuk menangani masalah sampah disumbernya. Pengolahan sampah disumbernya menjadi sangat penting untuk mengurangi beban pengelolaan di hilir. Program ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengelolaan sampah dengan memilah sampah yang ada di rumah. Kegiatan pilah sampah dari rumah terutama sampah akan mengurangi jumlah sampah lingkungan yang berakhir di TPA, disamping itu juga bantuan masyarakat dalam memisahkan sampah di rumah memiliki nilai ekonomi.

Pada tahun 2022, program Pilsadar ini dilaksanakan pada Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NTB. Program melingkupi kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan lomba. Tim satgas Zero Waste juga terus melakukan sosialisasi PILSADAR pada 5 Kelurahan di Kecamatan Sekarbela.

f. Kerjasama Block Solution

Untuk Block Schools dan Block Homes yg sudah diselesaikan oleh Classroom of Hope Indonesia untuk periode Juni 2021 - sekarang sebagai Program Sosial Penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Lombok adalah sebagai berikut:

BLOCK SCHOOLS (Total 6 Sekolah):

1. SDN 4 TAMAN SARI, Lombok Barat (5 kelas + 1 admin room)
2. SDN 4 SIGAR PENJALIN, Lombok Utara (3 kelas)
3. SMPN 2 TANJUNG, Lombok Utara (3 kelas)
4. SDN 1 MEDANA, Lombok Utara (4 Kelas)
5. SDN 1 SOKONG, Lombok Utara (4 Kelas)
6. SDN 6 SOKONG, Lombok Utara (4 Kelas)

BLOCK HOMES (Total 2 Rumah):

1. Rumah keluarga Pak Agus di Lombok Utara, 39.6m²
2. Rumag keluarga Pak Agus Hariadi di Lombok Timur, 27.5m²

Program Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indicator antara lain:

1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi

- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi.
Tahun 2021 penyusunan RPPLH belum dapat dilaksanakan karena Dokumen

materi teknis RPPLH belum diverifikasi oleh KLHK karena tidak ada anggaran untuk proses konsultasi ke Pusat (refocusing anggaran), namun proses verifikasi ke KLHK terus berjalan parallel.

b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi

Dokumen KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan.

Dokumen KLHS wajib disusun dalam penyusunan atau evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah, rencana tata ruang wilayah, rencana zonasi kawasan dan Kebijakan/Rencana/Program lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negative suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Dinas LHK NTB berwenang untuk melakukan validasi terhadap dokumen KLHS yang diajukan oleh Kab/Kota. Pada tahun 2022, Dinas LHK telah memberikan rekomendasi validasi terhadap 14 dokumen KLHS, diantaranya ialah 12 dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan 2 dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan ini mendukung proses pengambilan sampel kualitas air, udara, dan air laut dengan total 200 sampel sebagai data dasar perhitungan IKLH. Selain itu, kegiatan ini mendukung operasional balai laboratorium lingkungan dalam rangka meningkatkan jumlah parameter pengujian kualitas lingkungan yang dapat diuji dan terakreditasi

b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada tahun 2022 yakni berupa Evaluasi Program Penilaian

Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), Pemeriksaan, Penilaian Dokumen Kajian/Standar Teknis dan Penerbitan Persetujuan Teknis.

PROPER difokuskan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria, antara lain perusahaan yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup, perusahaan yang berorientasi ekspor dan/atau produknya bersinggungan langsung dengan masyarakat, serta perusahaan publik. Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat berbagai instrumen lingkungan yang ada, seperti penegakan hukum lingkungan, dan instrumen ekonomi. Disamping itu penerapan PROPER dapat menjawab kebutuhan akses informasi, transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan. Untuk periode penilaian PROPER tahun 2022 di Provinsi NTB, jumlah kegiatan usaha sebagai peserta PROPER adalah sebanyak 18 unit usaha, yang terdiri dari 16 unit usaha yang di evaluasi oleh Tim PROPER Provinsi NTB dan 2 unit usaha yang di evaluasi oleh Tim PROPER Pusat (KLHK). Unit usaha peserta PROPER berasal dari berbagai sektor antara lain sektor pembangkit energi dan migas, pertambangan, AMDK dan sektor pelabuhan. Kondisi ketercapaian peringkat PROPER di tahun 2022 ini ialah 3 (tiga) unit usaha meraih peringkat Hijau, 12 unit usaha meraih peringkat Biru, dan 3 (tiga) unit usaha peringkat Merah.

Terkait pelaksanaan Pemeriksaan, Penilaian Dokumen Kajian/Standar Teknis dan Penerbitan Persetujuan Teknis, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menjalankan amanah peraturan tersebut, Dinas LHK NTB sebagai OPD teknis yang melaksanakan kegiatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan memiliki peran dalam proses penerbitan persetujuan teknis dan SLO (surat kelayakan operasional) sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tahun 2022, Tim Teknis NTB telah melakukan proses pemeriksaan, penilaian dokumen kajian/standar teknis dan penerbitan pertek dari beberapa unit usaha kegiatan.

3. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Pada Tahun 2022, Dinas LHK NTB melakukan pengembangan incinerator pada TPST Lemer, Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat untuk membantu pengelolaan limbah B3 yang telah bekerjasama dengan 3 (tiga) transporter, 94 unit fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit/klinik/apotek) dan 18 perusahaan yang masuk sebagai peserta PROPER. Selain melakukan kerjasama pengolahan limbah B3, Dinas LHK NTB juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 115 mitra kerja yang terdiri dari 3 transporter, 94 RS/klinik/apotek dan 18 perusahaan yang masuk dalam peserta PROPER 2021-2022, agar penghasil limbah B3 bertanggung jawab untuk memastikan bahwa limbah B3 yang dihasilkannya telah iangkut, dimanfaatkan, dimusnahkan, diolah ataupun ditimbun dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Pada tahun 2022, Dinas LHK NTB selaku Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi NTB telah melaksanakan penilaian dan pemeriksaan terhadap 56 dokumen lingkungan, antara lain :

Dokumen Amdal/Addendum Amdal	:	3 dokumen
Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)	:	42 dokumen
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	:	2 dokumen
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	:	1 dokumen
SPPL	:	9 dokumen

Selain proses penilaian dan pemeriksaan terhadap 56 dokumen lingkungan, Dinas LHK melaksanakan evaluasi AMDAL dan UKL-UPL dunia usaha bertujuan untuk melihat kesesuaian deskripsi kegiatan yang ada dalam dokumen dengan kondisi real di lapangan serta mengidentifikasi terhadap perubahan rencana pengelolaan lingkungan/pemantauan lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan pengawasan terhadap pemeriksaan dokumen lingkungan pada 151 unit usaha/kegiatan.

5. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Penyadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan terus dilakukan melalui beberapa upaya antara lain :

a. Partisipasi Masyarakat melalui Program Kampung Iklim

Masalah lingkungan global saat ini berupa perubahan iklim yang merupakan perubahan signifikan pada iklim, suhu udara dan curah hujan. Hal ini disebabkan oleh naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer bumi. Untuk meminimalisir hal tersebut salah satu langkah penanggulangan yang dapat dilakukan melalui kegiatan Program Kampung Iklim (Proklim) untuk mendorong partisipatif aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca dengan penerapan Proklim berdasarkan aksi adaptasi dan mitigasi serta dukungan kelompok masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan 13 kali sosialisasi pada 13 kelompok Proklim di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kelompok Proklim Dusun Punik Jaya, Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur memperoleh predikat Proklim Madya pada tahun 2022 ini.

b. Sosialisasi Program Sekolah Adiwiyata

Dinas LHK NTB melaksanakan sosialisasi sekolah adiwiyata, yaitu salah satu upaya dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif. Pada Tahun 2022, sosialisasi sekolah adiwiyata dilaksanakan di 180 sekolah yang tersebar di seluruh Provinsi NTB.

c. Penghargaan Lingkungan Hidup

Dalam rangka memotivasi kinerja desa/kelurahan yang berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup serta melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, maka pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas LHK NTB memberikan penghargaan kepada 10 desa di NTB yang telah melaksanakan pengelolaan lingkungan terbaik berdasarkan 5 (lima) kategori antara lain 1) peningkatan kegiatan perlindungan hutan dan rehabilitasi lahan, 2) peningkatan kegiatan pengelolaan persampahan, 3) membangun ketahanan bencana, 4) pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan 5) pembangunan rendah karbon.

6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi. Dalam pelaksanaan usaha/kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha, seringkali ditemukan pelanggaran hukum dalam kegiatan pemantauan dan pengawasan lingkungan. Adanya ketidakpatuhan dalam kegiatan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sebagai upaya antisipasi terjadinya hal tersebut, maka diperlukan penegakan hukum yang tegas dari pemerintah daerah terhadap pelaku yang tidak mentaati peraturan yang telah dibuat.

Keterlibatan masyarakat di setiap proses pengambilan keputusan terutama menyangkut alokasi sumber daya alam dan pengendalian dampak lingkungan merupakan faktor penentu good governance, sebagai perwujudan konsep open governance yang mengakui public right to observe, public right to access to information, public right participate dalam pembentukan kebijakan public. Hak masyarakat untuk mengajukan keberatan apabila hak hak partisipasi diabaikan. Dengan menciptakan pemerintahan yang terbuka, masyarakat akan terpacu untuk melakukan kontrol (pengawasan) terhadap penentu kebijakan, termasuk kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 2022, Dinas LHK NTB menerima aduan berupa pelanggaran kasus lingkungan dan melakukan upaya penyelesaian terhadap 12 aduan yang berasal dari masyarakat/instansi. Dinas LHK NTB telah melakukan verifikasi lapangan ke lokasi usaha/ kegiatan yang diduga melakukan pelanggaran sebagai upaya tindak lanjut penyelesaian.

7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Provinsi. Dinas LHK telah melakukan identifikasi calon lokasi taman Kehati di 3 kabupaten/kota yaitu di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa.

8. Program Pengelolaan Persampahan

Penanganan sampah yang berada di bawah kewenangan Dinas LHK NTB dikelola oleh UPTD TPA Sampah Regional Kebon Kongok mulai Januari 2018. TPA ini melayani sampah yang masuk dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Persentase penanganan sampah terhitung sebesar 42,20% dan persentase pengurangan sampah mencapai 12,78%. Upaya pengurangan sampah ini didukung dengan penambahan beberapa sarana prasarana antara lain lubang biopori sumur biopori,

komposter bag, TPS3r, BSF Mandiri, dan pengelolaan sampah skala rumah tangga pada beberapa lokasi.

13.Sasaran Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan dengan Indikator Kinerja Nilai Realisasi Investasi dengan target kinerja sebesar 15.428 Milyar Rupiah.

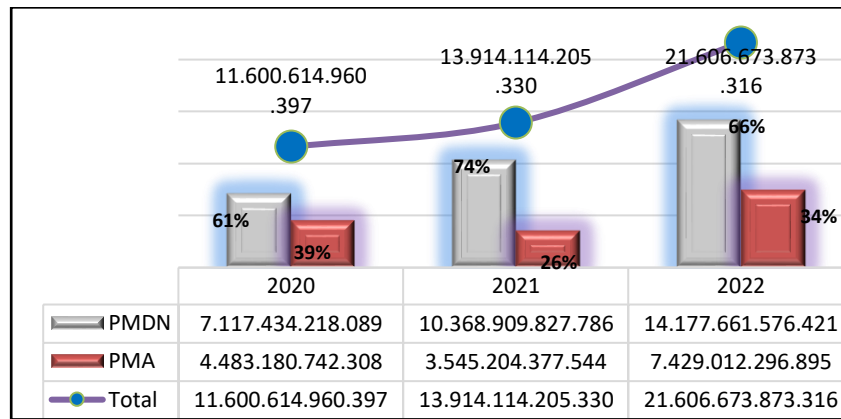
Selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2022, capaian Nilai Realisasi Investasi di Provinsi NTB menunjukkan kinerja yang baik. Tahun 2020, capaian Nilai Realisasi Investasi sebesar 11,60 Triliun rupiah dimana angka tersebut melampaui target RPJMD (11,50 Triliun rupiah) dan target Nasional (6,06 Triliun rupiah), sedangkan pada tahun 2021, target RPJMD yang ditetapkan sebesar 13,30 Triliun rupiah dan target Nasional 12,3 Triliun rupiah dan telah terealisasinya sebesar 13,91 Triliun rupiah. Sementara di tahun 2022, target RPJMD sebesar 15,4 Triliun rupiah dan target nasional sebesar 18,5 Triliun rupiah dan hingga akhir Desember 2022, nilai realisasi telah melampaui dengan besaran 21,6 Triliun rupiah. Realisasi Provinsi NTB berada pada posisi ke-11 secara nasional untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan nilai 14,17 Triliun dan posisi ke-13 secara nasional untuk penanaman modal asing (PMA) dengan nilai 7,42 Triliun Rupiah. Melampauinya capaian Nilai Realisasi Investasi di Provinsi NTB tidak lepas karena pencabutan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah pusat sehingga menarik minat para investor.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa terdapat 2 (dua) status permodalan yaitu;

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri
2. Penanaman Modal Asing (PMA), yang merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya, maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Perkembangan nilai investasi PMDN dan PMA Provinsi NTB tahun 2020-2022 secara umum menunjukkan peningkatan terutama untuk PMDN. Proporsi nilai PMDN juga selalu lebih besar dari PMA. Adapun perkembangan nilai investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB selama tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.

Perkembangan Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA) Provinsi NTB Tahun 2020 – 2022



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2023

Selama kurun waktu tahun 2020-2022, capaian Nilai Realisasi Investasi untuk kategori PMDN selalu lebih besar dibandingkan dengan PMA. Pada tahun 2020, Nilai Realisasi PMDN mencapai 7,1 Triliun rupiah (61%), kemudian meningkat di tahun 2021 sebesar 10,3 Triliun rupiah (74%), dan di tahun 2022 meningkat menjadi 14,1 Triliun rupiah (66%). Sedangkan untuk PMA, Nilai Realisasi Investasi di tahun 2021 menurun dibandingkan 2020, tetapi di tahun 2022 menunjukkan peningkatan menjadi 7,4 Triliun rupiah (34%). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa iklim investasi di Provinsi NTB menunjukkan performa yang baik.

Untuk capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut kabupaten/kota selama periode tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 2020– 2022

No	Kabupaten/ Kota	Realisasi PMDN						Rata-rata
		2020	%	2021	%	2022	%	
1	Kota Mataram	647.135.250.572	9,09	706.535.042.988	6,23	1.195.125.116.786	8,43	8,11
2	Lombok Utara	51.456.450.229	0,72	1.161.749.559.554	10,25	202.009.346.030	1,42	4,45
3	Lombok Barat	1.572.064.286.166	22,09	1.500.268.505.882	13,24	251.985.623.373	1,78	12,78
4	Lombok Tengah	239.399.349.414	3,36	3.372.760.908.265	29,76	360.856.618.894	2,55	12,81
5	Lombok Timur	2.571.308.963.312	36,13	1.441.285.552.380	12,72	78.636.909.746	0,55	16,86
6	Sumbawa Barat	1.628.602.959.377	22,88	1.687.904.651.737	14,89	11.577.027.797.735	81,66	40,27
7	Sumbawa	257.554.253.706	3,62	201.988.977.881	1,78	252.933.672.361	1,78	2,45
8	Dompu	30.285.966.872	0,43	53.214.365.895	0,47	64.681.893.780	0,46	0,47
9	Bima	102.530.377.450	1,44	154.416.195.962	1,36	10.076.103.488	0,07	1,00
10	Kota Bima	17.096.361.000	0,24	88.786.067.242	0,78	180.328.494.228	1,27	0,79
	J u m l a h	7.117.434.218.098	100	10.368.909.827.786	100	14.177.661.576.421	100	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2023

Realisasi investasi PMDN menurut kabupaten/kota selama tahun 2020-2022 tiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Berdasarkan proporsi, daerah yang memiliki rata-

rata kontribusi terbesar di tahun 2020 - 2022 adalah Kabupaten Sumbawa Barat (40,27%) kemudian diikuti Kabupaten Lombok Timur (16,86%) dan Kabupaten Lombok Tengah (12,81%). Untuk yang rata-rata terendah (2020-2022) adalah Kabupaten Dompu (0,47%) dan diikuti Kota Bima (0,79%).

Adapun realisasi investasi PMA menurut kabupaten/kota selama tahun 2020 – 2022 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, daerah yang nilai realisasi investasinya tertinggi adalah Kabupaten Dompu sebesar Rp.2.061.398.739.600 atau 45,98% diikuti Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp.1.448.493.803.855 (32,31%). Selanjutnya di tahun 2021, nilai realisasi investasi PMA tertinggi berada di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp.1.521.475.035.708 (42,92%) dan diikuti oleh Kabupaten Dompu sebesar Rp.1.083.382.076.616 (30,56%). Kemudian di tahun 2022, kembali Kabupaten Dompu menorehkan capaian nilai realisasi PMA tertinggi yaitu sebesar Rp.3.218.212.482.097 (43,32%) dan diikuti oleh Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp.3.042.832.321.780 (40,96%). Untuk capaian nilai realisasi PMA terendah, rata-rata berada di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Sumbawa sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Realisasi Investasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 2020- 2022

NO	Kabupaten/ Kota	Realiasi PMA						Rata- rata
		2020	%	2021	%	2022	%	
1	Kota Mataram	21.027.090.873	0,47	99.950.475.623	2,82	406.345.552.226	5,47	2,92
2	Lombok Utara	166.619.510.182	3,72	221.598.732.590	6,25	19.063.460.385	0,26	3,41
3	Lombok Barat	343.751.660.411	7,67	244.792.935.564	6,9	342.036.723.365	4,6	6,39
4	Lombok Tengah	330.088.229.673	7,36	330.809.588.846	9,33	16.474.289.329	0,22	5,64
5	Lombok Timur	62.979.229.182	1,4	11.713.993.826	0,33	336.127.975.355	4,52	2,08
6	Sumbawa Barat	1.448.493.803.855	32,31	1.521.475.035.708	42,92	3.042.832.321.780	40,96	38,73
7	Sumbawa	45.896.880.438	1,02	30.017.194.987	0,85	17.411.038.217	0,23	0,70
8	Dompu	2.061.398.739.600	45,98	1.083.382.078.616	30,56	3.218.212.482.097	43,32	39,95
9	Bima	2.566.968.858	0,06	168.292.087	0	29.508.454.141	0,4	0,15
10	Kota Bima	358.629.236	0,01	1.296.049.697	0,04	1.000.000.000	0,01	0,02
	J u m l a h	4.483.180.742.308	100	3.545.204.377.544	100	7.429.012.296.895	100	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2023

Berdasarkan sektor, penanaman modal baik kategori PMDN dan PMA untuk seluruh sektor tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Untuk kategori PMDN, sektor ketenagalistrikan merupakan penyumbang terbesar dari capaian nilai realisasi investasi di tahun 2020 dengan besaran Rp.2.550.285.364.959 (35,83%). Kemudian di tahun 2021, penyumbang terbesar dari sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan nilai sebesar Rp. 3.874.448.990.676 (37,37%). Sedangkan di tahun 2022, sektor Pertambangan, Energi (ESDM) memberikan kontribusi terbesar dengan besaran

Rp.10.336.530.634.918 (72,91%), diikuti oleh sektor Industri/Perindustrian dengan besaran Rp. 1.309.342.587.322 (9,24%) dan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp. 1.265.742.863.001 (8,93%). Meningkatnya PMDN pada sektor Pertambangan, Energi (ESDM) dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengindikasikan bahwa potensi pertambangan energi (ESDM) dan pariwisata ekonomi kreatif menjadi sektor yang masih menjadi potensi dan unggulan di Provinsi NTB.

Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor Periode Tahun 2020 – 2022

NO	Sektor	Realisasi PMDN					
		2020	%	2021	%	2022	%
1	Pariwisata & ekonomi kreatif	694.145.315.315	9,75	3.874.448.990.676	37,37	1.265.742.863.001	8,93
2	Perhubungan Transportasi	1.486.915.009.167	20,89	2.263.446.554.370	21,83	290.799.027.478	2,05
3	Perdagangan	248.356.777.217	3,49	702.687.757.693	6,78	618.002.124.865	4,36
4	Pertanian/perkebunan dan peternakan	2.860.309.150	0,04	134.164.106.288	1,29	48.756.835.797	0,34
5	Perkebunan	-	-	-	-	-	-
6	Kehutanan dan Ling. Hidup	-	-	895.000.000	0,01	-	-
7	Perikanan	85.169.482.914	1,20	160.121.623.460	1,54	125.149.198.758	0,88
8	Peternakan	36.237.161.722	0,51	-	-	-	-
9	Ketenagalistrikan	2.550.285.364.959	35,83	-	-	-	-
10	PUPR	46.909.694.246	0,66	124.210.795.925	1,20	73.107.528.605	0,52
11	Kesehatan, Obat & Makanan	43.824.159.039	0,62	48.244.587.322	0,47	-	-
12	Pertambangan, Energi (ESDM)	1.348.596.392.901	18,95	2.851.273.829.390	27,50	10.336.530.634.918	72,91
13	Industri/Perindustrian	544.776.583.769	7,65	189.096.308.958	1,82	1.309.342.587.322	9,24
14	Jasa Lainnya	29.087.967.699	0,41	-	-	-	-
15	Ketenagakerjaan	-	-	14.814.950.922	0,14	71.526.044.440	0,50
16	Pos Telekomunikasi, sistem dan transaksi elektronik	-	-	4.493.320.762	0,04	2.198.579.102	0,02
17	Pendidikan	-	-	962.002.020	0,01	-	-
18	Keuangan/ koperasi	270.000.000	0,00	50.000.000	0,00	31.680.000	0,00
	Jumlah	7.117.434.218.098	100	10.368.909.827.786	100	14.177.661.576.421	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2023

Pada kategori PMA sektor yang menjadi penyumbang terbesar selama tahun 2020-2022 adalah pertambangan/ESDM dengan besaran 6.151.978.369.559, kemudian diikuti oleh sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar 738.393.638.403 dan sektor Pos Telekomunikasi dan Transaksi Elektronik sebesar 398.355.977.648. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan perkembangan nilai realisasi investasi PMA menurut sektor selama tahun 2020-2022.

Tabel Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Periode Tahun 2020 – 2022

NO	SEKTOR	Realisasi PMA					
		2020	%	2021	%	2022	%
1	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	769.024.365.885	17,15	652.896.873.144	18,42	738.393.638.403	9,94
2	Perhubungan Transportasi	60.571.335.000	1,35	-	0,00	-	0,00
3	Perdagangan	6.486.775.216	0,14	4.487.505.844	0,13	107.345.605.496	1,44
4	Pertanian/Perkebunan & peternakan	-	0,00	1.333.600.000	0,04	-	0,00
5	Perkebunan	-	0,00	-	0,00	-	0,00
6	Ketenagalistrikan	10.171.996.063	0,23	-	0,00	-	0,00
7	PUPR	90.563.822.100	2,02	231.271.777.967	6,52	10.479.091.432	0,14
8	Kesehatan, Obat dan Makanan	335.165.517	0,01	2.962.733.347	0,08	7.655.000	0,00
9	Lingk. Hidup & Kehutanan	-	0,00	1.208.523.999	0,03	-	0,00
10	Perikanan	20.201.006.000	0,45	2.572.568.666	0,07	17.300.775.765	0,23
11	Peternakan	-	0,00	-	0,00	-	0,00
12	Pertambangan, Energi (ESDM)	3.475.551.047.647	77,52	2.574.011.901.192	72,61	6.151.978.369.559	82,81
13	Industri/Perindustrian	4.662.096.377	0,10	1.474.000.000	0,04	5.151.183.592	0,07
14	Pos Telekomunikasi sistem dan transaksi elektronik	-	0,00	72.984.893.385	2,06	398.355.977.648	5,36
15	Ketenagakerjaan	-	0,00	-	0,00	-	0,00
16	Jasa Lainnya	45.047.798.696	1,00	-	0,00	-	0,00
17	Pendidikan	-	0,00	-	0,00	-	0,00
18	Keuangan	-	0,00	-	0,00	-	0,00
	Jumlah	4.483.180.742.308	100	3.545.204.377.544	100	7.429.012.296.895	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2023

Perkembangan positif dari Nilai Realisasi Investasi tidak lepas dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk terus melakukan berbagai terobosan diantaranya penetapan NTB sebagai daerah Ramah Investasi sebagai salah satu program unggulan dalam RPJMD NTB tahun 2019-2023. Program ini diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif dan berbagai kemudahan penanaman modal dan fasilitas investasi hingga pemasaran. Dimulai regulasi terkait insentif/kemudahan penanaman modal sampai kebijakan penyederhanaan prosedur dan regulasi perizinan, kemudahan persyaratan, waktu pemberian izin hingga penyediaan fasilitas lainnya.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB khususnya di Layanan Perizinan, sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 telah menggunakan aplikasi dan terus dikembangkan baik yang merupakan produk dari OPD daerah maupun dari pusat, dimana saat ini aplikasi yang digunakan adalah OSS (*online single Submission*). Aplikasi ini lebih memberikan kemudahan kepada pengusaha/investor untuk membuat izin usaha investasinya di daerah. Dengan sistem tersebut pengusaha diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (registrasi) perusahaannya pada aplikasi OSS dengan membuat NIB (Nomor Induk Berusaha). Kelebihan aplikasi ini adalah mampu

memberikan kepastian waktu proses penyelesaian setiap jenis perizinan yang ada pada OSS yang dilaksanakan sesuai dengan standar perizinan. Jenis perizinan dan waktu penyelesaiannya yang diberikan pada tahun 2020, setelah NIB dikeluarkan namun belum berlaku efektif jika belum memenuhi komitmen artinya bahwa perusahaan diharuskan untuk mengurus izin dan izin operasional/komersial yang dilaksanakan di kabupaten/kota. Pada tahun 2022 terjadi perubahan proses perizinan dengan menggunakan aplikasi OSS RBA yang pada prinsipnya pelaksanaan perizinan melalui aplikasi OSS RBA ini sama tetapi ada perbedaan dalam penentuan tingkat resiko izin usaha yang diajukan oleh pelaku usaha.

14.Sasaran Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas dengan Indikator Kinerja Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan dengan target sebesar 23,71%. Realisasi untuk sasaran ini sebesar 23,45% atau 98,90% dari target, Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Pertumbuhan Populasi Ternak dengan target kinerja 9,5%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor dengan realisasi 10 toko/depo distributor obat hewan yang diawasi (sub kegiatan : Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan; dan Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan); Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (sub kegiatan : Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain; dan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain); Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi; dan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi); Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak; Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan; dan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak); Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan).
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan dengan target kinerja sebesar 9,5%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penataan Prasarana Pertanian (sub kegiatan : Pembangunan dan

- Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan; dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya); Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak; dan Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak).
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS dengan target kinerja <1%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi dengan realisasi 5 PHMS yang dikendalikan (sub kegiatan : Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis; Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; dan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular); Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi dengan realisasi 73 unit usaha produk peternakan/RPH/RPU/TPH diawasi (sub kegiatan : Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan; Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan; dan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi); Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan dengan realisasi 5 RPH dan kelompok pengolah hasil peternakan yang tersertifikasi (sub kegiatan : Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit; Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan; dan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner); Kesejahteraan Hewan (sub kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya).
- d. Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian); dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan (sub kegiatan : Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna; Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani; Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani; dan Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani).
- e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian

- dengan target kinerja sebesar 1,99%. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (sub kegiatan : Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian); dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman (sub kegiatan : Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih; dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura; Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan; dan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan).
- f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian dengan target kinerja sebesar 65,56% serta indikator dan Pengembangan Fasilitas Industrialisasi Pertanian dengan target dan capaian 2 unit/paket. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penataan Prasarana Pertanian dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya; dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya.
 - g. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI dengan target kinerja sebesar 96%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsid dengan sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
 - h. Program Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan indikator Kinerja Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok dengan target kinerja sebesar 70%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN; dan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta); dan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (sub kegiatan : Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani).
 - i. Program Pengelolaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator Kinerja Peningkatan presentase kawasan hutan yang dikelola dengan target kinerja sebesar 10%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (sub kegiatan : Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan); Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan

- Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi; Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi; Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung; dan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan); Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (sub kegiatan : Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL); Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara; Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara; dan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan); Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (sub kegiatan : Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan; Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan; Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan; dan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (sub kegiatan : Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati; dan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya); Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun (sub kegiatan : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < m/Tahun).
- j. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Cakupan wilayah laut, pesisir dan PPK yang terkelola secara berkelanjutan dengan target dan capaian kinerja sebesar 4,51%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi dengan realisasi 126.311 Ha luas ruang laut dan pesisir yang terkelola (sub kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat; Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil); Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi (Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi; dan Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi).
- k. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi Perikanan Tangkap dengan target kinerja sebesar 249.099 Ton dan realisasi sebesar 234.423 Ton produksi perikanan tangkap. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan Mil (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan; Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap; Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap); Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal

Perikanan Berukuran di atas GT Sampai Dengan GT (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT; Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT; Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas GT sampai dengan GT); Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil; dan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT yang Bukan dimiliki oleh nelayan kecil); Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan GT; dan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT); Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (sub kegiatan : Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan; Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan); Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas GT sampai dengan GT (sub kegiatan : Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT); Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas GT Sampai Dengan GT (sub kegiatan : Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas GT Sampai Dengan GT; Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas GT sampai dengan GT; Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan GT).

- i. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi Perikanan Budidaya dengan target kinerja sebesar 1.219.005 Ton. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan); Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut (sub kegiatan : Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di laut; Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut; Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya

- lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi).
- m. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan (Target kinerja : 99,92%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan Mil dengan sub kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan Mil; Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan Mil; Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 mil)
 - n. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan indikator Kinerja Produksi olahan hasil perikanan dengan target kinerja sebesar 214.373 Ton. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam (satu) daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi; Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (sub kegiatan : Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing); Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi (sub kegiatan : Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (Satu) Daerah Provinsi; dan Pemberian insentif bagi pelaku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah).

15.Sasaran Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin

dengan Indikator Kinerja Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan dengan target dan realisasi kinerja sebesar 100%.

Indikator Cakupan Penduduk Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial diintervensi melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Rastra, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB) telah mencapai target yang telah ditetapkan, dimana pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin pada tahun 2022 telah direalisasikan secara keseluruhan. Sementara untuk indikator Prosentase PMKS yang tertangani Dinas Sosial Provinsi NTB melaksanakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Program Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial juga telah melampaui target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022.

Penanganan PMKS dilakukan melalui 2 (dua) system yaitu sistem dalam panti dan sistem luar panti. Sistem dalam panti dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu Panti Sosial, dimana UPTD Dinas Sosial ada 8 (delapan) Panti Sosial milik pemerintah daerah yang menangani permasalahan anak, permasalahan lansia dan permasalahan penyakit sosial lainnya seperti tuna sosial, gelandangan pengemis dan eks psikotik. System dalam panti ini didukung oleh anggaran APBD Provinsi. Selain itu ada juga yang dilaksanakan oleh panti milik masyarakat yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang ikut bekerjasama didalam menangani permasalahan sosial di Nusa Tenggara Barat.

Penanganan PMKS melalui sistem luar panti, Dinas Sosial Provinsi NTB melaksanakan program dan kegiatan pelatihan keterampilan, bimbingan teknis manajemen usaha dan pemberian bantuan sosial. Sistem luar panti ini didukung oleh anggaran Dekonsentrasi, APBN Pusat dan Tugas Perbantuan. Dalam pelaksanaannya, penanganan PMKS ini, Dinas Sosial Provinsi NTB tidak bergerak sendiri tapi bekerjasama dan didukung oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Lembaga mitra seperti Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Data Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Jaminan Sosial
Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022

NO	JENIS PMKS	JUMLAH	YANG SDH DIBERIKAN PELAYANAN	%
1	Keluarga Fakir Miskin	901,725 KK	901,725 KK	100
	JUMLAH	901.725 KK	901.725 KK	100

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2022

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dalam menangani permasalahan sosial, baik yang bersumber dari APBD, APBN Pusat, Tugas Perbantuan dan Lembaga Mitra (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial) adalah sebagai berikut.

1. Program Rehabilitasi Sosial.

Beberapa kegiatan pada program rehabilitasi sosial yang mendukung pencapaian target kinerja prosentase PMKS yang tertangani, antara lain :

- a. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Bantuan aksesibilitas).

NO	LOKASI	JUMLAH PENERIMA BANTUAN
1	Kota Mataram	17 Orang
2	Kab. Lombok Barat	62 Orang
3	Kab. Lombok Tengah	54 Orang
4	Kab. Lombok Timur	14 Orang
5	Kab. Lombok Utara	121 Utara
6	Kab. Sumbawa Barat	3 Orang
7	Kab. Sumbawa	22 Orang
8	Kab. Dompu	6 Orang
9	Kab. Bima	25 Orang
10	Kota Bima	22 Orang
	J U M L A H	346 Orang

Dinas Sosial Provinsi NTB dalam rangka melaksanakan program rehabilitasi sosial melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dengan memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas berupa bantuan aksesibilitas berupa kursi roda dewasa, kursi roda anak, tongkat ketiak dan tongkat tuna netra, dengan harapan agar para penyandang disabilitas penerima bantuan dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar ditengah tengah keluarga dan lingkungan sekitarnya.

b. Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar

NO	LOKASI	JUMLAH PENERIMA BANTUAN
1	Kota Mataram	535 Orang
2	Kab. Lombok Barat	1.909 Orang
3	Kab. Lombok Tengah	4.200 Orang
4	Kab. Lombok Timur	5.246 Orang
5	Kab. Lombok Utara	282 Orang
6	Kab. Sumbawa Barat	252 Orang
7	Kab. Sumbawa	200 Orang
8	Kab. Dompu	881 Orang
9	Kab. Bima	698 Orang
10	Kota Bima	1.039 Orang
	J U M L A H	15.242 Orang

Dinas Sosial Provinsi NTB dalam rangka melaksanakan program rehabilitasi sosial melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial anak terlantar dengan memberikan bantuan uang kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LSKA) yang melaksanakan pembinaan, pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi kepada anak terlantar. Pada tahun 2022 terdapat 280 LKSA se Prov NTB yang mendapatkan bantuan uang, dengan harapan agar anak terlantar yang berada di LKSA dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari.

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Pantii Sosial Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Lingkup Dinas Sosial Provinsi NTB

1) Pembinaan Anak Terlantar di PSAA "GENERASI HARAPAN" Mataram

NO	ASAL KELAYAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT
1	Kota Mataram	5 Orang
2	Kab. Lombok Barat	8 Orang
3	Kab. Lombok Tengah	19 Orang
4	Kab. Lombok Timur	6 Orang
5	Kab. Lombok Utara	9 Orang
6	Kab. Sumbawa Barat	9 Orang
7	Kab. Sumbawa	10 Orang
8	Kab. Dompu	5 Orang
9	Kab. Bima	6 Orang
10	Kota Bima	3 Orang
	J U M L A H	80 Orang

Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Generasi Harapan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu yang

masih sekolah ditingkat SD, SLTP, SLTA, dengan penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 80 Orang.

2) Pembinaan Anak Terlantar di PSBR "KARYA MANDIRI" Mataram

NO	KAB/KOTA	JUMLAH PENERIMA MANFAAT
1	Kota Mataram	7 Orang
2	Kab. Lombok Barat	11 Orang
3	Kab. Lombok Tengah	5 Orang
4	Kab. Lombok Timur	6 Orang
5	Kab. Lombok Utara	9 Orang
6	Kab. Sumbawa	2 Orang
7	Kab. Sumbawa Barat	1 Orang
8	Kab. Dompu	4 Orang
9	Kab. Bima	2 Orang
10	Kota Bima	5 Orang
J U M L A H		52 Orang

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Karya Mandiri memberikan pembinaan keterampilan, pelayanan bagi anak remaja putus sekolah melalui berbagai jurusan keterampilan dengan penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 52 orang dan 1 angkatan.

2) Pembinaan Anak Terlantar di PPSA "SASAMBO MATUPA" Selat

Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak (PSPSA) Sasambo Matupa memberikan pelayanan petirahan anak yang mengalami permasalahan belajar dengan penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 90 orang. Sedangkan untuk pelayanan perlindungan sebanyak 32 orang.

3) Pembinaan bagi Lanjut Usia di PSLU "Mandalika" Mataram

Panti Sosial Lanjut Usia (PSLU) Mandalika memberikan perlindungan, pelayanan dan bimbingan bagi lanjut usia dengan penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 80 orang.

4) Pembinaan bagi Lanjut Usia di PSLU "Meci Angi" Bima

Panti Sosial Lanjut Usia (PSTW) Meci Angi memberikan perlindungan, pelayanan dan bimbingan bagi lanjut usia dengan dengan penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 50 orang per tahun.

5) Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di PSKW "MIRAH ADI" Mataram

Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mirah Adi memberikan pembinaan, pelayanan, bimbingan bagi Wanita Tuna Susila, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Wanita Korban Tindak Kekerasan dengan penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 35 orang.

6) Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di PSBL "MUTHMAINAH" Selebung

Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Mutmainah memberikan pelayanan, rehabilitasi bagi eks psikotik dengan dengan penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 100 orang.

7) Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di PSBK "MADANI" Aikmal Lotim

Panti Sosial Bina Karya (PSBK) Madani memberikan pelayanan, pembinaan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis dengan dengan penanganan bagi penerima manfaat sebanyak 75 orang dalam 1 angkatan.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Beberapa kegiatan pada program perlindungan dan jaminan sosial yang mendukung pencapaian target kinerja cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial, antara lain :

a. Pengelolaan fakir miskin lintas daerah kabupaten kota

Bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat / kelompok masyarakat miskin

NO	LOKASI	JUMLAH PENERIMA BANTUAN
1	Kota Mataram	6 KUBE
2	Kab. Lombok Barat	20 KUBE
3	Kab. Lombok Tengah	31 KUBE
4	Kab. Lombok Timur	72 KUBE
5	Kab. Lombok Utara	28 KUBE
6	Kab. Sumbawa Barat	7 KUBE
7	Kab. Sumbawa	14 KUBE
8	Kab. Dompu	2 KUBE
J U M L A H		178 KUBE

Dinas Sosial Provinsi NTB dalam rangka melaksanakan program perlindungan dan jaminan sosial melaksanakan kegiatan pengelolaan fakir miskin lintas daerah kabupaten kota dengan memberikan bantuan barang bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) keluarga fakir miskin, dimana masing-masing kelompok mendapatkan bantuan peralatan untuk berusaha seperti alat pertukangan, perbengkelan, menjahit, Peralatan cukur rambut, peralatan salon dan lain-lain dengan maksud agar kelompok fakir miskin mendapatkan bantuan usaha untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat meningkatkan taraf kehidupannya.

b. Pengelolaan fakir miskin lintas daerah kabupaten kota

Dinas Sosial Provinsi NTB dalam rangka melaksanakan program perlindungan dan jaminan sosial melaksanakan kegiatan pengelolaan fakir miskin lintas daerah

kabupaten kota dengan memberikan bantuan Uang bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) keluarga fakir miskin, dimana masing-masing kelompok mendapatkan bantuan hibah uang dengan maksud agar kelompok fakir miskin mendapatkan bantuan modal usaha untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat meningkatkan taraf kehidupannya.

c. Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat

Bantuan sarana dan prasarana berusaha bagi kelompok usaha Bersama fakir miskin

NO	LOKASI	JUMLAH PENERIMA BANTUAN
1	Kota Mataram	29 KUBE
2	Kab. Lombok Tengah	11 KUBE
3	Kab. Lombok Timur	34 KUBE
4	Kab. Lombok Utara	30 KUBE
5	Kab. Sumbawa Barat	4 KUBE
6	Kab. Sumbawa	20 KUBE
7	Kab. Dompu	17 KUBE
8	Kab. Bima	3 KUBE
9	Kota Bima	11 KUBE
J U M L A H		145 KUBE

4. Program penanganan warga negara migran dan korban tidak kekerasan

Kegiatan pada program penanganan warga negara migran dan korban tindak kekerasan yang mendukung pencapaian target kinerja prosentase PMKS yang ditangani, yaitu melalui Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah asal. Dinas Sosial Provinsi NTB dalam rangka melaksanakan program rehabilitasi sosial melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial orang terlantar dan korban perdagangan orang dengan memberikan bantuan pelayanan, perlindungan dan pemulangan ke daerah asal bagi para korban orang terlantar, pekerja migran bermasalah, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang.

5. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan pada program pemberdayaan sosial yang mendukung pencapaian target kinerja prosentase PMKS yang ditangani, yaitu melalui kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi, Dinas Sosial Provinsi NTB memberikan bantuan hibah barang kepada Lembaga mitra dalam hal ini Lembaga yang ikut berperan serta didalam menangani permasalahan sosial, dengan harapan agar peran serta Lembaga mitra didalam membantu menangani permasalahan sosial dapat lebih meningkat dan professional melalui Bantuan Uang bagi Lembaga Kesejahteraan

Sosial (LKS). Melalui kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi, Dinas Sosial Provinsi NTB memberikan bantuan uang kepada Lembaga mitra dalam hal ini Lembaga yang ikut berperan serta didalam menangani permasalahan sosial, dengan harapan agar peran serta Lembaga mitra didalam membantu menangani permasalahan sosial dapat lebih meningkat dan professional.

6. Program Penangan Bencana

Kegiatan pada program penanganan bencana yang mendukung pencapaian target kinerja prosentase PMKS yang tertangani, yaitu :

a. Penanganan Bencana Alam

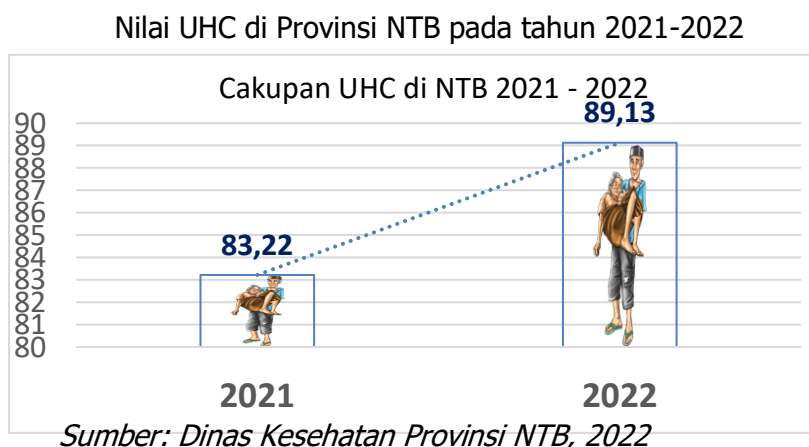
Dinas Sosial Provinsi NTB dalam rangka melaksanakan program penanganan korban bencana alam telah menyalurkan bantuan terpal dan tenda untuk menampung korban bencana alam di 4 (empat) Kabupaten dengan realisasi 230 terpal dan tenda dan jumlah yang dapat ditampung sebanyak 662 Jiwa.

b. Penanganan Korban Bencana Sosial

Pada tahun 2022 Dinas sosial telah memberikan penanganan bagi korban kebakaran dan konflik sosial dengan jumlah total 330 Jiwa. Dinas Sosial Provinsi NTB memberikan Layanan Dasar Psikososial (LDP) / trauma healing bagi korban kebakaran dan konflik sosial.

• Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2021 yaitu 83,22 persen. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,91 persen menjadi 89,13 persen atau 4.878.629 orang. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah.



Nilai Cakupan UHC pada tahun 2021 tertinggi yaitu Sumbawa Barat dan nilai Cakupan UHC terendah yaitu Lombok Tengah. Kemudian pada tahun 2022, nilai cakupan UHC tertinggi di Kota Bima dan yang terendah di kabupaten Lombok Tengah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Gambaran Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN
Provinsi NTB Tahun 2022**

No.	Kabupaten/Kota	PBI APBN	PBI NTB	PBI Kab/Kota	Total
1.	Kab. Lombok Utara	194.865	3.086	26.330	224.281
2.	Kota Mataram	164.620	5.539	57.070	227.229
3.	Kab. Dompu	136.157	2.054	55.682	193.893
4.	Kab. Sumbawa Barat	75.008	1.655	28.245	104.908
5.	Kota Bima	66.779	15.974	15.117	97.870
6.	Kab. Lombok Barat	441.760	5.877	33.139	480.776
7.	Kab. Lombok Tengah	605.027	15.805	70.690	691.522
8.	Kab. Lombok Timur	880.720	0	90.017	970.737
9.	Kab. Bima	340.051	4.978	34.481	379.510
10.	Kab. Sumbawa	281.879	2.857	47.967	332.703
	TOTAL PROV NTB	3.186.816	57.825	458.738	3.703.429

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2022

Rincian peserta Jaminan Kesehatan Nasional secara keseluruhan di Provinsi NTB baik PBI, Non PBI maupun Non JKN sampai 31 Desember 2022 sebagai berikut.

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi NTB Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	NON PBI	PBI
1.	Kab. Lombok Utara	257,369	30,897	224,281
2.	Kota Mataram	444,974	204,188	227,229
3.	Kab. Dompu	254,190	55,717	193,893
4.	Kab. Sumbawa Barat	145,009	38,848	104,908
5.	Kota Bima	156,067	57,766	97,870
6.	Kab. Lombok Barat	726,228	163,703	480,776
7.	Kab. Lombok Tengah	1,066,915	189,913	691,522
8.	Kab. Lombok Timur	1,369,917	213,031	970,737
9.	Kab. Bima	533,274	97,087	379,510
10.	Kab. Sumbawa	519,564	124,050	332,703
	PROVINSI NTB	5.473.507	1,175,200	3,703,429

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk NTB yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 4.878.629 jiwa atau 89.13% dari jumlah penduduk NTB (Non PBI + PBI).

Dana Sharing Jamkesmas Provinsi Tahun 2022

NO	KABUPATEN / KOTA	SHARING AWAL PBPU/BP DAN KONTRIBUSI JK	REALISASI SHARING PBPU/BP DAN KONTRIBUSI JK	PEMBAYARAN KE BPJS KESEHATAN	KET
1.	Kota Mataram	1.686.258.000	1.437.042.600	1.437.042.600	
2.	Lombok Barat	3.780.982.800	2.745.659.700	2.745.659.700	
3.	Lombok Utara	4.999.806.000	2.915.268.300	2.915.268.300	
4.	Lombok Tengah	4.383.136.800	4.086.161.100	4.086.161.100	
5.	Lombok Timur	0	0	0	Tidak ada kerja sama
6.	Sumbawa Barat	544.773.600	418.257.000	418.257.000	
7.	Sumbawa	772.254.000			
8.	Dompu	518.691.600	489.302.100	489.302.100	

NO	KABUPATEN / KOTA	SHARING AWAL PBPU/BP DAN KONTRIBUSI JK	REALISASI SHARING PBPU/BP DAN KONTRIBUSI JK	PEMBAYARAN KE BPJS KESEHATAN	KET
9.	Bima	1.341.975.600	1.253.996.100	1.253.996.100	
10.	Kota Bima	3.818.404.800	3.737.115.900	3.737.115.900	
11.	Provinsi				
	-PBPU/BP	21.846.283.200	17.796.447.900	17.796.447.900	
	-Reschedule Kontribusi 2021	37.155.030.369	37.155.030.369	37.155.030.369	
	-Kontribusi 2022	34.395.439.778	34.395.439.778	34.395.439.778	
	JUMLAH	115.243.036.547	106.429.720.847	106.429.720.847	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2022

Realisasi dana sharing provinsi dan kabupaten/kota yang sudah ditransfer ke BKSPJK adalah Rp.106.429.720.847,- dari sharing awal sebesar Rp.115.243.036.547,-. Kabupaten Lombok Timur tidak memberikan dana sharing karena kabupaten tersebut tidak ada kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

16.Sasaran Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan dengan Indikator Kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dengan target kinerja sebesar 86,70 poin dengan realisasi 106,99%.

Penilaian konsumsi pangan secara nasional ditinjau berdasarkan aspek kuantitatif dan kualitatif, melalui penghitungan konsumsi energi dan protein berdasarkan Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan bagi penduduk Indonesia merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas fisik dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Dalam laporan ini, AKG yang digunakan merupakan asupan rata-rata sehari yang dikonsumsi oleh populasi dan bukan merupakan kecukupan gizi perorangan/individu. Di Indonesia AKG dirumuskan dalam Forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) yang telah diselenggarakan sejak tahun 1987. Dalam melakukan analisis konsumsi menggunakan 2 pendekatan, yaitu berdasarkan AKG hasil WNPG Tahun 2004 (anjaran energi sebesar 2.000 kkal dan protein 52 gram) dan AKG hasil WNPG Tahun 2012 (anjaran energi sebesar 2.150 kkal dan protein 57 gram). Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai tahun 2019 melakukan analisis konsumsi menggunakan AKG hasil WNPG tahun 2012 (anjaran energi sebesar 2.150 kkal dan protein 57 gram).

Penilaian terhadap konsumsi pangan penduduk secara kuantitas dapat ditunjukkan melalui volume konsumsi pangan penduduk (gram/kap/hari dan kilogram/kap/tahun), konsumsi energi penduduk (kkal/kap/hari) dan konsumsi protein penduduk (gram/kap/hari). Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kualitas konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

PPH Konsumsi merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Adapun kelompok pangan tersebut mencakup (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, serta (9) lain-lain.

Situasi konsumsi pangan penduduk diukur dari kondisi kecukupan konsumsi energi dan kecukupan konsumsi protein. Situasi Kecukupan Konsumsi Pangan Penduduk Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Situasi Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein Penduduk NTB Tahun 2022

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan (gram/kap/hari)	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)						
			Energi (kkal/kap/hari)	% AKE	Protein (Gram)	% AKP	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Riil
1.	Padi-padian	392,2	1,593.7	74,1	36,3	63,7	31,3	37,1	25,0
2.	Umbi-umbian	40,4	49.0	2,3	0,4	0,7	1,0	1,1	1,1
3.	Pangan Hewani	153,3	306.8	14,3	26,1	45,7	24,1	28,5	24,0
4.	Minyak dan Lemak	25,9	232.4	10,8	0,0	0,0	4,6	5,4	5,0
5.	Buah/biji Berminyak	3,7	20.0	0,9	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5
6.	Kacang-Kacangan	23,9	66.7	3,1	6,2	10,9	5,2	6,2	6,2
7.	G u l a	17,5	65.5	3,0	0,1	0,1	1,3	1,5	1,5
8.	Sayur dan buah	298,2	135.4	6,3	5,7	10,0	26,6	31,5	30,0
9.	Lain-Lain	139,4	73.5	3,4	2,2	3,9	-	-	-
	J u m l a h		2.543,0	118,3	77,2	135,5	94,5	111,8	93,3
	Standar Konsumsi		2.150	100					
	Proporsi (%) protein				57	100			

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2022

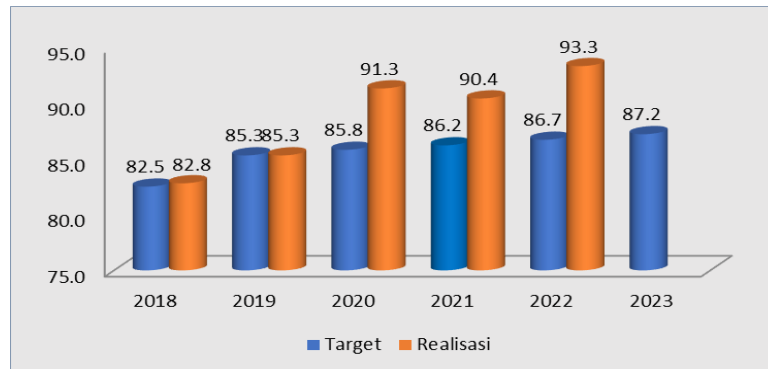
Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa Konsumsi energi penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 adalah sebesar 2.543,0 kkal/kap/hari atau 118,28% lebih tinggi dari Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan sebesar 2.150 kkal/kap/hari. Sedangkan Jika dibandingkan Angka Ketersediaan Energi berdasarkan analisis NBM tahun 2022 sebesar 5.104,52 kkal/kap/tahun, maka ketersediaan energi untuk dikonsumsi penduduk NTB tahun 2022 lebih besar 2.561,52 kkal/kap/tahun dari total energi yang tersedia.

Konsumsi protein penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 adalah sebesar 77,20 gram/kap/hari atau 135,44% lebih tinggi dari Angka Kecukupan Protein (AKP) yang dianjurkan yaitu sebesar 57 gram/kap/hari. Jika dibandingkan antara protein yang tersedia dari analisis NBM tahun 2022 yaitu 127,09 gram/kap/hari, maka

ketersediaan protein untuk dikonsumsi penduduk Provinsi NTB tahun 2022 lebih besar 49,89 gram/kap/hari (64,62%) dari total protein yang tersedia.

Perkembangan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Penduduk NTB dari tahun 2019 s.d 2022 dapat dilihat pada Grafik dan tabel berikut:

Target dan Capaian Skor PPH Konsumsi Tahun 2019-2023



Sedangkan perkembangan kualitas konsumsi pangan penduduk Nusa Tenggara Barat berdasarkan kelompok bahan pangan dari tahun 2019 s.d 2021 dapat dilihat pada Grafik dan tabel berikut:

Perkembangan Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB Tahun 2019 s.d 2021 berdasarkan Kelompok Bahan Pangan

No.	Kelompok Pangan	Konsumsi Ideal (gr/kap/hari)	Konsumsi Aktual (gr/kap/hari)				Skor PPH			
			2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Padi-padian	275	387.7	397.6	392,2	31,3	25.0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	100	29.5	31.2	34,7	1.0	0.8	0,9	1,0	1,1
3	Pangan Hewani	150	110.4	124.9	127,7	24,1	18.7	23,8	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	20	22.2	22.9	23,3	4,6	4.6	4,8	4,9	5,0
5	Buah/biji berminyak	10	3.2	3.4	3,7	0,4	0.4	0,4	0,5	0,5
6	Kacang-kacangan	35	26.5	22.6	22,9	5,2	7.0	5,9	5,9	6,2
7	Gula	30	16.8	15.9	17,0	1,3	1.5	1,4	1,5	1,5
8	Sayuran dan buah	250	275.5	280.4	276,9	26,6	27.4	29,1	27,7	30,0
9	Lain-lain	0	120.3	149.7	149,3	0	0.0	-	-	-
Jumlah							85.3	91,3	90,4	93,3

Berdasarkan grafik dan tabel di atas terlihat bahwa skor PPH Konsumsi Penduduk NTB Tahun 2023 sebesar 93,3 point mengalami peningkatan sebesar 2,9 Point (3,21%) dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 90,4 point. Hal ini disebabkan karena peningkatan konsumsi kelompok pangan: umbi-umbian, minyak dan lemak, kacang-kacangan serta sayur dan buah.

Capaian Skor PPH Konsumsi Tahun 2022 sudah melebihi target yang ditetapkan bahkan sudah melampaui target akhir RPJMD pada tahun 2023 sebesar 87,20 Point.

Namun capaian ini masih lebih rendah dari skor ideal yang dipersyaratkan sebesar 100 point.

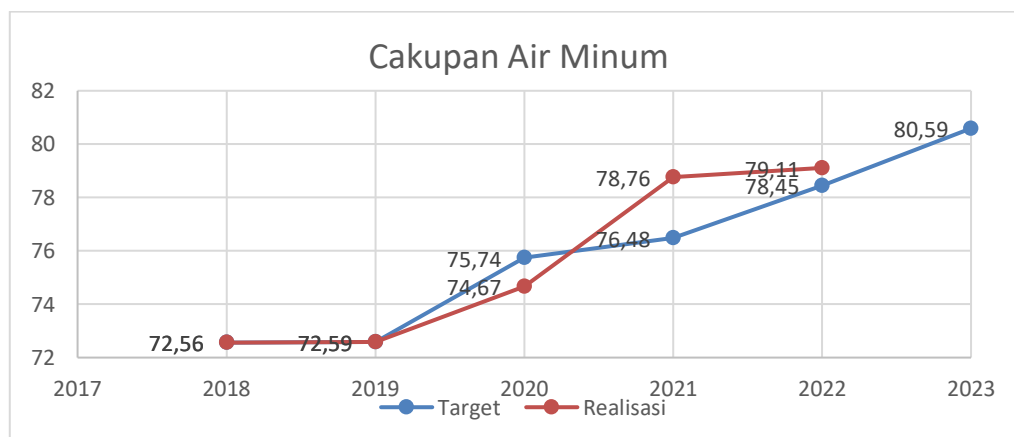
Permasalahan yang masih dihadapi adalah tingginya konsumsi padi-padian khususnya beras yang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain : a) perilaku masyarakat yang merasa belum makan jika belum makan nasi; b) masih rendahnya daya beli masyarakat; c) rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang dan masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan; d) kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu.

Tingkat konsumsi beras penduduk NTB Tahun 2022 sebesar 118,8 Kg/Kap/Tahun. Capaian ini masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan standar ideal yang dipersyaratkan sebesar 100,4 Kg/Kap/Tahun. Namun capaian tahun 2022 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan konsumsi beras tahun 2021 sebesar 119,1 Kg/Kap/Tahun.

17.Sasaran Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan Indikator Kinerja Cakupan Air Minum dengan target kinerja sebesar 78,45%, Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi layak dengan target 80,91 %, Rasio Elektrifikasi dengan target 99,88%, dan cakupan rumah layak huni dengan target 65,8%.

Indikator cakupan air minum merupakan salah satu indikator strategis bidang PUPR. Berdasarkan data, Cakupan Air Minum di Provinsi NTB Pada Tahun 2022 mencapai 79,11% telah melampaui target RPJMD.

Tercapainya target cakupan air minum ini dikarenakan adanya dukungan penanganan dan pembiayaan secara bersinergi yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sumber pembiayaan tersebut meliputi program/kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten.



Gambar 3. Realisasi Cakupan Air Minum Tahun 2018-2022 dan Rencana Target Tahun 2023

Di bidang Tata Ruang dengan Indikator Sasaran strategis Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR) capaian realisasinya pada tahun 2022 mencapai 14,54% tidak tercapai dengan targetnya (18,18%) yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023.

Indikator Kinerja Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak dengan target kinerja sebesar 80,91% dengan realisasi 83,12 yang dilaksanakan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan indikator Kinerja Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar dan target sebesar 97%. Kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Serta Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) pada Dinas Perumahan dan Permukiman dengan indikator Kinerja Luas kawasan permukiman yang berkualitas dan target 84.488 Ha. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dengan sub kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman; dan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.

Indikator Kinerja Rasio Elektrifikasi dengan target sebesar 99,88% dan realisasi sebesar 99,88%. Sasaran ini dilaksanakan melalui :

- a. Program Pengelolaan Energi Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator Kinerja Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik dengan target kinerja sebesar 5,64%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penatausahaan Izin, Pembinaan, Dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun; Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan (sepuluh ribu) Ton Per Tahun); Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi (sub kegiatan : Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi; Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi ; Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi).
- b. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dengan target

kinerja sebesar 99,88%. Indikator kedua yaitu Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan listrik (Rumah Tangga) dengan indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi); dan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi); Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi (sub kegiatan : Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi); dan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi); Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Pedesaan (sub kegiatan : Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu; dan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan).

Indikator Kinerja Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) dengan target kinerja sebesar 65,80%. Persentase rumah layak huni pada tahun 2022 tidak dapat melampaui target yang telah ditentukan dengan capaian 62,3 %. Hal ini disebabkan karena :

- Rumah dikatakan sebagai rumah layak huni jika memenuhi 4 indikator yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas min 7,2 m²/kapita, akses sanitasi layak dan akses air minum layak. Salah satu indikator tidak terpenuhi maka rumah tersebut dinyatakan tidak layak huni.
- Dari data hasil Susenas Maret 2022 terlihat bahwa terdapat penurunan persentase rumah yang memiliki kecukupan luas 7,2 m²/kapita yaitu dari 91,18% di tahun 2021 menjadi 89,25% di tahun 2022, hal ini berpengaruh terhadap syarat pemenuhan indikator rumah layak huni sehingga persentase rumah yang menempati rumah yang layak huni menjadi turun.
- Pesentase rumah yang memenuhi kecukupan luas 7,2 m²/kapita menurun dari tahun sebelumnya disebabkan karena tingginya pertumbuhan penduduk yaitu 5.389.998 jiwa di tahun 2021 menjadi 5.473.671 jiwa di tahun 2022.

- Terbatasnya anggaran pusat dan daerah dalam penanganan rumah tidak layak huni sebagai dampak penanganan Covid 19 di tahun sebelumnya.

Dinas Perumahan dan Permukiman telah melaksanakan penyelenggaraan urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui program yang berkontribusi pada pengelolaan perumahan, pembangunan rumah layak huni dan terjangkau, serta lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) permukiman yang memadai. Program tersebut yaitu: (1) Program Pengembangan Perumahan (2) Program Kawasan Permukiman (3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) .

Untuk mendukung ketiga program tersebut, telah dilakukan beberapa kegiatan pada tahun 2022 yaitu 5 (lima) Kegiatan dengan sub kegiatan 8 (delapan) sub kegiatan.

1) Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

Kegiatan 02.1.01 sebagai upaya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada kegiatan ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan 02.1.01.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana dan sub kegiatan 02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi. Perbaikan rumah bagi para korban bencana dapat melalui bantuan hibah/sosial yang diperuntukan untuk memperbaiki rumah. Pelaksanaan kegiatan tersebut didasari oleh hasil survey dan verifikasi data rumah korban terdampak bencana dengan skala provinsi sesuai dengan SK Gubernur mengenai penetapan kejadian bencana di Provinsi NTB. Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal diamanatkan target Penerapan Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat untuk 2 (dua) jenis layanan yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi masing-masing 100%.

Dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Perumahan & Permukiman Tahun 2019 – 2023 capaian indikator kinerja terhadap sub kegiatan 02.1.01.04 dan 02.1.01.05

adalah tersedianya dokumen perndataan rumah terdampak bencana dan dokumen penerima bantuan rumah terdampak bencana yang terverifikasi. Dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 186.270.600,-,- difokuskan untuk kegiatan koordinasi dan rapat-rapat dalam upaya pendataan rumah rusak akibat bencana dan verifikasi rumah korban bencana. Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 171.151.500,-. Adapun bentuk kegiatan 02.1.01 yang dihasilkan pada tahun ini adalah :

NO	KEGIATAN	VOLUME	ALOKASI	REALISASI
1	Data rumah rusak akibat bencana TA. 2022	1 Dok	53.508.000	47.681.000
2	Data Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam	1 Dok	132.762.600	123.470.500

Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi. Kegiatan 02.1.02 merupakan bagian dalam proses pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat sebagai upaya mensosialisasikan standar teknis dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah akibat bencana dan sebagai upaya agar masyarakat yang berada pada daerah rawan bencana dapat mencari alternatif kepemilikan rumah yang layak huni pada lokasi yang aman melalui pendanaan KPR-FLPP. Kegiatan 02.1.02 ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan 02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana dan sub kegiatan 02.1.02.02 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP. Dalam DPA APBD Perubahan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.472.300,- dengan rincian masing-masing sub kegiatan 02.1.02.01 dan sub kegiatan 02.1.02.02 berturut-turut Rp. 25.472.300,- dan Rp. 0,-. Realisasi anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 23.582.600,- atau terdiri dari sub kegiatan 02.1.02.01 sebesar Rp. 23.582.600,- dan sub kegiatan 02.1.02.02 sebesar Rp. 0,-. Anggaran ini digunakan untuk honor tenaga pendukung 2 (dua) orang, rapat-rapat, ATK dan perjalanan dinas. Adapun pelaksanaan kegiatan sosialisasi baik itu Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana maupun Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP tidak dilaksanakan disebabkan karena adanya kekhawatiran anggaran yang sudah tertuang dalam DPA APBD Perubahan tidak dapat direalisasikan mengingat kondisi anggaran daerah yang sangat terbatas.

Adapun anggaran dan realisasi pada kegiatan 02.1.02 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	VOLUME	ALOKASI	REALISASI
1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana	70 ok	25.472.300	23.582.600
2	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	80 ok	0	0

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi. Kegiatan 02.1.03 bagian dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat yaitu pemenuhan layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kegiatan ini hanya ada 1 (satu) sub kegiatan yaitu sub kegiatan 02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 247.917.400,- dengan target rehabilitasi rumah korban bencana 10 unit rumah rusak ringan. Dalam DPA APBD Perubahan tertuang :

"Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Lainnya Spesifikasi : Rehabilitasi rumah terdampak bencana (rusak ringan)" sebanyak 10 unit senilai Rp. 100.000.000,-"

Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung ditugaskan untuk membantu dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah korban bencana di kedua tempat tersebut. Adapun pendanaan kegiatan rehabilitasi rumah korban bencana di Desa Naru Barat dan Kelurahan Montabaru merupakan dana sharing antara pemerintah provinsi (APBD I) dengan pemerintah kabupaten/kota (APBD II) melalui dana BTT BPKAD.

NO	KEGIATAN	VOLUME	ALOKASI	REALISASI
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	10 unit	247.917.400	240.264.400

2) Program Kawasan Permukiman

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha. Pada DPA Tahun 2022 untuk kegiatan 03.1.02 dengan sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha, target perbaikan RTLH pada DPA APBD Perubahan hanya

sebanyak 132 unit. Anggaran untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha sebesar Rp. 3.131.876.564,-. Realisasi kegiatan 03.1.02 sebesar Rp. 3.092.189.460,-.

Adapun bentuk kegiatan 03.1.02 pada tahun ini adalah :

NO	KEGIATAN	VOLUME	ALOKASI	REALISASI	Ket
1	Nilai Fisik Perbaikan RTLH	132	2.625.000.000	2.618.173.000	
2	Honor Tenaga Ahli, Tenaga Pendukung, Rapat-rapat, ATK, Perjalanan Dinas dan lain-lain	1 paket	506.876.564	474.016.460	
TOTAL					

Kegiatan regular yang dilaksanakan tahun 2022 berupa stimulant pembangunan baru dengan besar anggaran per unit sebesar Rp. 35 juta, pola yang digunakan adalah dengan menggunakan pihak ketiga secara keseluruhan. Sedangkan untuk peningkatan kualitas besar anggaran sebesar Rp. 17,5 juta per unit terdiri dari Rp. 15 juta untuk biaya bahan dan Rp. 2,5 juta untuk biaya upah. Pengadaan bahan diadakan oleh pihak ketiga atau supplier. Disamping penanganan rumah tidak layak huni terdapat juga penanganan homestay pada desa wisata guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Pada tahun ini dilakukan rehabilitasi homestay sebanyak 1 unit, yang berada di Kabupaten Sumbawa dengan anggaran per unit sebesar Rp. 35 juta,- pola yang digunakan sama dengan pembangunan baru.

18.Sasaran Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok dengan Indikator Kinerja Inflasi dengan target kinerja sebesar 3-4%. Pada Bulan Desember 2022, inflasi year on year (y-on-y) Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) sebesar 6,23 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,97 pada Bulan Desember 2021 menjadi 112,57 pada Bulan Desember 2022. Angka inflasi ini lebih tinggi dibanding angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 5,51 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Desember 2022, antara lain Bensin, Angkutan Udara, Rokok Kretek Filter, Beras, dan Telur Ayam Ras. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain Minyak Goreng, Cabai Rawit, Ikan Layang/Ikan Benggol, Telepon Seluler, dan Televisi Berwarna. Sementara beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m Desember 2022, antara lain Tomat, Telur Ayam Ras, Emas Perhiasan, Bawang Merah, dan Beras. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain Ikan Layang/Ikan Benggol, Tongkol

Diawetkan, Ikan Bandeng/Ikan Bolu, Ikan Kembung, Angkutan Udara, dan Parfum. Komoditas yang dominan menjadi andil inflasi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Komoditas Yang Dominan Memberikan Sumbangan Inflasi Dan Deflasi Year On Year (Y-On-Y) Gabungan Bulan Desember 2022

No	Jenis Barang	Sumbangan Inflasi (%)	No	Jenis Barang	Sumbangan Deflasi (%)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Bensin	1,1305	1	Minyak Goreng	-0,1032
2	Angkutan Udara	1,0441	2	Cabai Rawit	-0,0981
3	Rokok Kretek Filter	0,3096	3	Ikan Layang/ Ikan Benggol	-0,0811
4	Beras	0,2014	4	Telepon Seluler	-0,0475
5	Telur Ayam Ras	0,1986	5	Televisi Berwarna	-0,0140

Sumber Data : BPS BRS No. 01/01/52/Th. XVII, 2 Januari 2023

Dalam menentukan komoditi berdasarkan kepentingan konsumen Setidaknya ada 4 (empat) hal yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu andil inflasi, koefisien variasi harga di tingkat konsumen, pangsa pengeluaran rumah tangga serta histori kebijakan. Andil inflasi dan pangsa pengeluaran rumah tangga sebagai kombinasi yang sangat eksplisit sebagai faktor untuk menggambarkan tingkat daya beli masyarakat. Semakin tinggi hasil perkalian nilai kedua variabel tersebut, maka urgensi komoditi tersebut bagi kepentingan masyarakat juga semakin besar. Sedangkan koefisien variasi harga di tingkat konsumen sebagai indikator untuk menunjukkan peran pemerintah (intervensi) dalam menstabilkan harga komoditi tertentu.

Capaian Indikator Kinerja Inflasi Tahun 2022

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALSASI	PERSENTASE
Inflasi	%	3-4%	6,23%	155,75%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2022

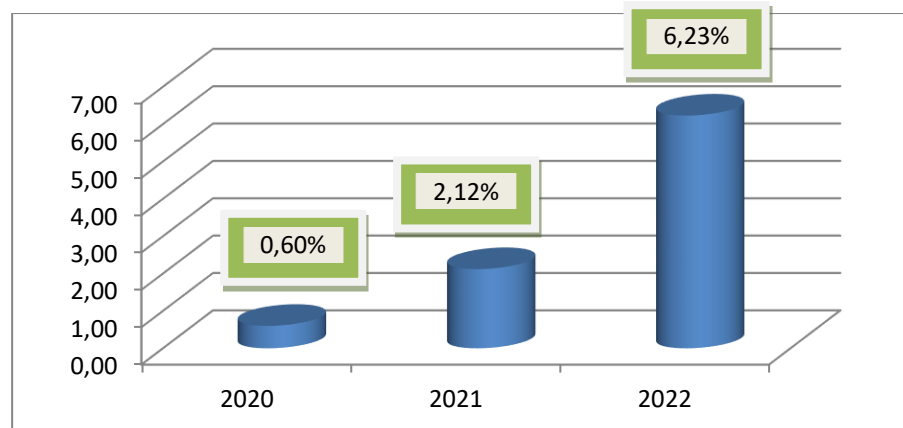
Dilihat dari tabel diatas maka dapat diambil analisis bahwa Laju inflasi di Nusa Tenggara Barat Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) tahun kalender Desember 2022 sebesar 0,26 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Desember 2021 sebesar 0,66 persen. Sedangkan laju inflasi "tahun ke tahun" Desember 2022 sebesar 6,23 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi "tahun ke tahun" di bulan Desember 2021 sebesar 2,21 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Transportasi sebesar 22,36 persen; Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 6,62 persen;

Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 3,92 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 3,81 persen; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 3,66 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 3,13 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 2,94 persen; Kelompok Pendidikan sebesar 2,47 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 1,89 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,89 persen. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,76 persen.

Jika diambil perbandingan capaian tahun 2021 dengan capaian tahun 2022 maka akan terlihat terjadi peningkatan nilai atau dengan kata lain lebih sebesar 4,11% dari inflasi yang terjadi pada tahun 2021, hal ini menunjukkan bahwa inflasi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2022 mengalami kontraksi dari inflasi yang terjadi di tahun 2021 dan melebihi target fluktuasi yang ditargetkan di tahun 2022, namun kendati demikian tidak menyurutkan daya beli masyarakat serta tidak mempengaruhi ketersediaan stok kebutuhan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Selanjutnya jika dibandingkan dengan angka inflasi nasional yang terjadi di tahun 2022, inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat melebihi angka inflasi nasional, inflasi nasional ditahun 2022 sebesar 5,51 persen, nilai inflasi nasional ini dibawah nilai inflasi yang terjadi di NTB dengan selisih 0,72 persen. Adapun Inflasi Nusa Tenggara barat Selama 3 (Tiga) Tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

grafik. 5.1.2A

Inflasi di NTB selama 3 (tiga) Tahun terakhir 2020-2022



Sumber Data : BPS Provinsi dan BPS Pusat tahun 2022 diolah

Dari grafik diatas dapat diuraikan bahwa inflasi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Inflasi yang terjadi di tahun 2020 sebesar 0,60% lebih rendah dibanding tahun 2021, kemudian ditahun 2021 terjadi inflasi sebesar 2,12% kemudian ditahun 2022

kembali meningkat tajam sebesar 6,23%, namun kendati demikian inflasi tinggi yang terjadi di NTB masih cukup aman ditandai dengan masih tercukupinya stok barang kebutuhan pokok maupun barang penting lainnya berdasarkan hasil pantauan pada pasar-pasar, retail maupun pusat distributor di NTB.

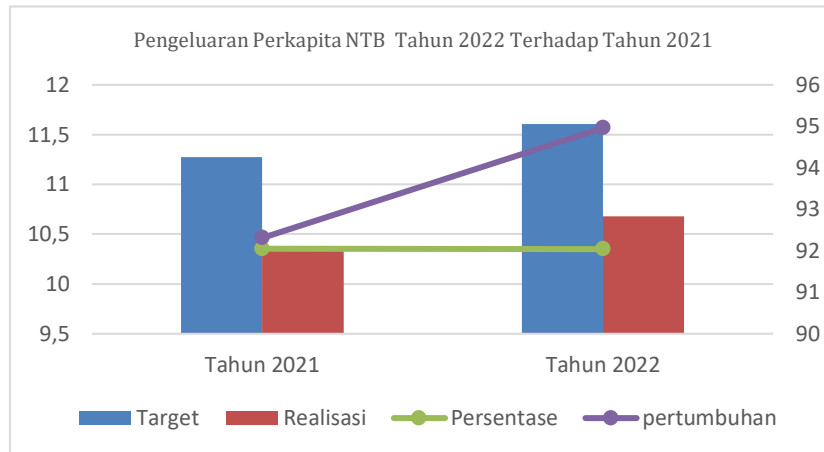
19.Sasaran Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan Indikator Kinerja Pengeluaran per Kapita dengan target kinerja sebesar 11.604 ribu rupiah dengan realisasi sebesar 10.681 ribu Rupiah.

Tingkat Pengeluaran Perkapita yang terjaga menjamin penduduk mampu untuk memenuhi kebutuhannya meskipun masih dalam tingkat minimum. Peningkatan nilai tambah dari berbagai sektor usaha yang dilakukan masyarakat juga dapat memicu meningkatnya pengeluaran per kapita. Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Akhir tahun 2022, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat NTB mencapai Rp.10,681 juta per tahun, meningkat 2,92 persen dibandingkan tahun 2021. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Provinsi NTB tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,72 persen dibanding tahun 2019 dan merupakan kali pertama sejak IPM dihitung dengan metode baru.

Inflasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap aktivitas ekonomi lainnya, terutama terhadap pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita yang terjaga menjamin penduduk mampu untuk memenuhi kebutuhannya meskipun standar minimum dan dimungkinkan untuk meningkat bila nilai tambah dari berbagai usaha yang dilakukan masyarakat juga meningkat.

Badan Pusat Statistik Provinsi NTB menghitung dan mempublikasikan Pengeluaran Perkapita NTB secara rutin setiap tahunnya. Pengeluaran Perkapita NTB sampai pada bulan Nopember tahun 2022 tercatat Rp. 10,681 juta/tahun meningkat dibandingkan Realisasi Pengeluaran Perkapita tahun 2021 dengan nilai Rp.10,377 juta/tahun atau meningkat sebesar 304.000 rupiah atau meningkat sebesar 2,72 persen. Resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 menyebabkan pendapatan masyarakat NTB menurun. Dilihat dari target pengeluaran perkapita tahun 2022 sebesar Rp. 11,604 Juta/pertahun dan terealisasi sebesar Rp.10,681 juta/tahun atau dengan kata lain dibawah target yang ditetapkan tahun 2022, dan jika dipersentasekan menjadi 92,05 % dari target 100 % atau kurang dari target sekitar Rp. 923.000,- atau sekitar 7,95%. Capaian Pengeluaran Perkapita tahun 2022 ini masih dibawah harapan mengingat sesuai proyeksi Pengeluaran PerKapita NTB diharapkan sebesar Rp.11,604 juta/tahun. Untuk lebih jelasnya

Pengeluaran Perkapita Masyarakat Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 terhadap 2021 dan capaian tahun 2022 terhadap target 2022 dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut ini :



Sumber : Dinas Perdagangan

Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2022

INDIKATOR	SATUAN	2022	TARGET	REALISASI
Pengeluaran Perkapita	Rp. (000)	10,681	11,604	92,04%

Sumber : BPS Provinsi NTB 2022

Komoditas acuan dalam menentukan Pengeluaran Perkapita merupakan hasil Survei Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD-1995) antara lain: beras lokal, tepung terigu, ketela pohon, ikan tongkol/tuna/cakalang, ikan teri, daging sapi, daging ayam kampung, telur ayam, susu kental manis, bayam, kacang panjang, kacang tanah, tempe, jeruk, papaya, kelapa, gula pasir, kopi bubuk, garam, merica/lada, mi instant, rokok kretek/filter, listrik, air minum, bensin, minyak tanah dan sewa rumah, yang bertujuan mengetahui komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan kalori per kapita sebanyak 2.100 kalori/hari.

20.Sasaran Meningkatnya daya saing pariwisata dengan Indikator Kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar) dengan target kinerja sebesar 129,78 Miliar Rupiah. Realisasi untuk sasaran ini masih sedikit sejumlah Rp. 9 Miliar.

Sasaran utama Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat "Meningkatnya Daya Saing Pariwisata" dengan Indikator Pertambahan Nilai PDRB Sektor terkait Kepariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 282,70% dari target 129,78%.

Capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi NTB pada tahun 2022 untuk pertambahan nilai PDRB sektor terkait kepariwisataan sebesar 282,70 M dengan target sebesar 129,78 M

melebihi target sebesar 152,92 M. Realisasi pertambahan Nilai PDRB ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang realisasinya sebesar 15,20 M dengan target 122,71 M, sedangkan pada tahun 2020 realisasi minus sebesar -444,6 M dengan target 116.04 M. Pencapaian pertambahan nilai PDRB sektor kepariwisataan sebagai indikator sasaran meningkatnya daya saing pariwisata pada tahun 2020 sampai dengan 2021 tidak memenuhi target sedangkan Pada tahun 2022 realisasi petambahan nilai PDRB melampaui target yang telah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pergerakan pertambahan nilai realisasi PDRB sektor kepariwisataan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tidak memenuhi target dikarenakan sebagai dampak dari adanya bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tahun 2018 dan pandemic covid-19 dengan pemberlakuan pembatasan yang masih berlangsung sampai dengan akhir tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 pertambahan nilai PDRB sektor terkait kepariwisataan mengalami peningkatan yang sangat pesat, hal ini disebabkan oleh perkembangan kasus covid-19 di Indonesia yang mengalami tren penurunan sehingga pemberlakuan PPKM oleh pemerintah pusat mulai dicabut. Selain itu, sektor pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menggeliat dengan dilaksanakannya beberapa event nasional dan internasional seperti MotoGP dan WSBK di Mandalika International Circuit dan MXGP di Sumbawa dan beberapa kegiatan MICE yang dipusatkan pelaksanaannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pemulihan pariwisata Nusa Tenggara Barat.

Capaian kinerja di urusan bidang Pariwisata didukung oleh optimalisasi dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan melalui 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi dan 4 (empat) program prioritas di bidang pariwisata yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan termasuk program bidang pariwisata yang menjadi tanggung jawab UPTD Destinasi Wisata Unggulan Daerah (Islamic Center) yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adapun capaian kinerja pada tahun 2022 adalah :

1. Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata merupakan program untuk mencapai sasaran kinerja Dinas Pariwisata dengan sasaran strategis meningkatkan pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata rintisan menjadi destinasi pariwisata minimal berkembang dan meningkatnya pembangunan industri pariwisata yang kredibel. Program ini memiliki indikator persentase destinasi pariwisata yang minimal berkembang dengan target 85.86% dengan realisasi 91.92%. Program ini memiliki 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- a. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi dengan indikator kinerja jumlah kawasan pariwisata yang minimal berkembang dengan sub kegiatan pengembangan kawasan strategis pariwisata provinsi memiliki target 1 kawasan dan realisasinya mencapai 1 kawasan yang telah dikembangkan, yaitu kawasan pengembangan daya tarik kawasan pariwisata daerah (KSPD) Samota (Tambora) berupa dukungan amenities dan atraksi dalam pelaksanaan Pesona Tambora.
- b. Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi dengan indikator daya tarik destinasi pariwisata rintisan menjadi berkembang memiliki sub kegiatan pengembangan destinasi pariwisata yang targetnya pada tahun 2022 sebanyak 20 destinasi. Realisasi yang dicapai pada tahun ini adalah sebanyak 17 destinasi yang telah dikembangkan melalui penataan amenities, yaitu : Bale pertunjukan Banjar Karang Babakan-Abiantubuh Baru-Kota Mataram, Bale pertunjukan Pura Pemaksan Sweta-Mayura-Kota Mataram, Bale Pertunjukan/Balai Serbaguna Desa Jl. Wisata Bengkaung-Kabupaten Lombok Barat, Bale Pertunjukan Pura Dalem Moksatma Prenawa-Lingkungan Cemara-Kota Mataram, Bale Pertunjukan Pura Pemaksan Banjar Mantri-Karang Sidemen-Kota Mataram, Bale Pertunjukan Pura Dalem Banjar Kapitan-Ampenan, Bale Pertunjukan Pura Pemaksana Saren-Pagesangan Barat-Kota Mataram, Pembangunan Spot Swafoto Selojan Desa Mas-mas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, Gapura Identitas, Bual Desa Aikbual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, Bale Pertunjukan Dusun Kelagak Desa Embung Raja-Terara-Kabupaten Lombok Timur, Bale Pertunjukan Pura Cempaka Harum-Karang Sampalan Cakranegara- Kota Mataram, Bale Pertunjukan Pura Pemaksan Angentelu-Lingk. Abian Tubuh Selatan-Kota Mataram, Bale Pertunjukan Pura Pasupati Gebang-Cakranegara-Kota Mataram, Bale Pertunjukan Pura Dalem Siwa Prasta Lingk Karang Madain Barat-Kota Mataram, Bale Pertunjukan Banjar Yasa Kerhti Lingk. Karang Taliwang-Kota Mataram, Pengadaan Tenda dan Perlengkapan/Camping Ground PPLH Lombok Dusun Mentagi Desa Sembalun-Kabupaten Lombok Timur dan Pengadaan Sarpras Wisata Alam-Berugak Desa Pulau Kaung-Kabupaten Sumbawa. Terkait dengan pengembangan destinasi pariwisata khususnya pengembangan 99 desa wisata, di tahun 2022 telah mencapai 76 desa wisata dengan klasifikasi berkembang, 13 desa wisata dengan klasifikasi maju dan 2 desa wisata dengan klasifikasi mandiri serta masih terdapat sekitar 8 desa wisata yang harus dimaksimalkan intervensinya untuk mendorong peningkatan klasifikasi menjadi berkembang.

- c. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi dengan indikator kinerja jumlah daya tarik destinasi pariwisata yang minimal berkembang memiliki sub kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata dengan indikator usaha pariwisata yang terbina. Sub kegiatan ini untuk memenuhi sasaran strategis meningkatnya pembangunan industri pariwisata yang kredibel dengan target pencapaian pada tahun 2022 sebesar 20% dan realisasi yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 12.50%, dengan jumlah industri pariwisata yang berkualitas sebanyak 4.917 industri pariwisata Tabel 8 Data Industri Pariwisata Tahun 2022.

No	Kabupaten/Kota	BPW/CBPW dan APW	Hotel Bintang	Hotel Melati/Pondok Wisata	Rumah Makan/Restoran	BAR	SPA	Wisata Selam (Diving)	Sarhunta (Sarana Hunian Pariwisata)	Jumlah Industri Pariwisata
1	Mataram	253	28	104	338	0	196	0	0	919
2	Lombok Barat	241	37	154	271	0	46	7	0	756
3	Lombok Utara	23	5	716	342	138	57	46	0	1327
4	Lombok Tengah	57	4	105	126	0	0	0	398	690
5	Lombok Timur	59	1	136	238	0	33	6	0	473
6	Sumbawa Barat	0	2	50	42	9	0	0	0	103
7	Sumbawa	1	6	45	202	0	0	4	0	258
8	Dompu	1	0	35	38	0	0	0	0	74
9	Bima	10	2	15	29	0	0	0	0	56
10	Kota Bima	7	1	30	210	10	3	0	0	261
	Jumlah	652	86	1390	1836	157	335	63	398	4917

Sumber : Dinas Pariwisata Prov. NTB Tahun 2022

Pengembangan industri pariwisata yang berkualitas melalui pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata dengan indikator kinerja jumlah usaha pariwisata yang terbina, pencapaiannya memenuhi aspek standarisasi industri pariwisata. Pembinaan industri pariwisata salah satunya dilakukan melalui fasilitasi CHSE dan pemberian rekomendasi tanda daftar industri atau usaha (TDI) pada industri pariwisata yang sedang melakukan pengurusan perizinan usaha. Pada tahun 2022 Dinas Pariwisata Provinsi NTB telah menerbitkan rekomendasi untuk 60 industri pariwisata.

a. Pemasaran Pariwisata

Pemasaran pariwisata dengan upaya strategis meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien dengan indikator jumlah kunjungan wisatawan dimana untuk tahun 2022 ditargetkan 2 juta orang dan terealisasi 1,376,295 orang (wisatawan nusantara sebesar 1,249,756 orang dan wisatawan mancanegara sebesar 126,539 orang). Realisasi kunjungan wisatawan di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 42.76 % dari tahun 2021. Hal ini sebagai dampak dari perkembangan kasus Covid 19 di

Indonesia telah mengalami tren penurunan, sehingga Pemerintah resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta adanya beberapa event yang diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan hal ini tentunya memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan pariwisata.

b. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak kekayaan Intelektual merupakan program yang bertujuan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif. Pencapaian kinerja dapat dilihat dari persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan ekonomi kreatif pada tahun 2022 adalah sebesar 41.27% dari seluruh pelaku ekonomi kreatif yang terdaftar. Pencapaian target ini diwujudkan melalui program kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif. Adapun pencapaian sertifikasi HaKI bagi pelaku ekonomi kreatif terdiri dari 160 Hak Merek, 6 HaKI komunal, 41 HaKI hak cipta dan 1 HaKI indikasi geografis.

c. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjut merupakan strategi untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata dan ekonomi Kreatif yang berkompeten dengan target 70% dari jumlah SDM Pariwisata yang terdaftar. Jumlah SDM pariwisata yang berkompeten ditandai dengan SDM Pariwisata yang telah tersertifikasi di bidang pariwisata sebesar 70.08%.

21. Sasaran Meningkatnya daya saing industri dengan Indikator Kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar) dengan target kinerja sebesar 173,02 Milyar Rupiah dan realisasi sebesar 87,90 Milyar Rupiah. Realisasi indikator persentase pertambahan SDM yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun 2022 ini sebesar 61,46% dan ini sudah melebihi target sebesar 30%. Pada indikator nilai investasi pelaku industri mengalami kenaikan sebesar 173,9 Milyar. Pertumbuhan industri pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 7,40% atau setara dengan 7.623 IKM yang terdiri dari IKM formal dan non formal, sehingga data keseluruhan IKM pada tahun 2022 adalah 110.606 IKM.

Program industrialisasi adalah program yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada produk unggulan yang ada di NTB yang pada akhirnya dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Saat ini program industrialisasi dan produk unggulan terus dikembangkan, penguatan dan peningkatan kapasitas IKM, serta melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),

Balai Latihan Kerja (BLK), perguruan tinggi dan asosiasi yang ada dalam rangka memperkuat industrialisasi. Penguatan berupa amati, tiru dan modifikasi mesin-mesin yang mampu diproduksi oleh anak NTB, harapannya dapat dimanfaatkan guna mendukung pencapaian produksi hulu. Program industrialisasi diharapkan dapat memanfaatkan sumberdaya potensial terlatih yang dihasilkan oleh SMK maupun BLK sehingga dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan mengurangi pengangguran. UPTD Balai Kemasan Produk Daerah pada Dinas Perindustrian Provinsi NTB berfungsi sebagai pendukung industrialisasi dalam penguatan desain dan mutu kemasan produk olahan yang dihasilkan IKM baik berupa desain kemasan maupun desain produk. Keberadaan Balai Kemasan dihajatkan menjadi penggerak industri kecil dan menengah (IKM) dalam mendapatkan kemasan dengan harga murah dan berkualitas. Pendampingan-pendampingan telah dilakukan secara intensif oleh Dinas Perindustrian dan terus menggali potensi-potensi teknologi dan industri yang dikembangkan oleh para pelaku IKM, sehingga pada tahun 2022 telah diresmikan rumah produksi di Balai Kemasan Produk Daerah dan UD. Goyang Lidah, selanjutnya produk kuliner legend dalam kemasan steril antara lain ; Sate Rembiga Goyang Lidah, Ayam Taliwang Beca Bero, Ayam Rarang, Sate Tanjung serta rumah produksi kosmetik. Sedangkan dalam pendampingan teknologi permesinan yaitu adanya pengembangan kendaraan listrik seperti cidomo listrik, e boat listrik, mobil listrik dan sepeda listrik.

Terkait pemasaran produk industrialisasi yang telah dihasilkan, Dinas Perindustrian Provinsi NTB melakukan kegiatan pameran pada event-event yang berskala local dan nasional, bekerjasama dengan Dekranasda Provinsi NTB dan Asosiasi IKM yang ada di NTB. Sedangkan untuk akses permodalan, Dinas Perindustrian Provinsi NTB mendorong IKM memiliki ijin usaha yang merupakan syarat dalam memperoleh permodalan dari perbankan. Pada beberapa kegiatan, Dinas Perindustrian selalu menggandeng Perbankan untuk ikut andil dalam pengembangan industrialisasi di NTB.

Sasaran ini dilaksanakan melalui:

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi (Target kinerja 100%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dengan realisasi 20 IKM yang sudah mendapatkan pembinaan. Sub kegiatan untuk mendorong kegiatan ini yaitu melalui Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan

Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri. Kegiatan kedua yaitu Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi dengan realisasi 20 IKM yang sudah mendapatkan pembinaan. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri; dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Persentase IKM yang Meningkatkan dari Kecil ke Menengah (Target kinerja : 140% dengan realisasi 1,42%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi. Realisasi untuk kegiatan ini yaitu sejumlah 20 perizinan dan perluasan usaha NTB yang terfasilitasi. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada Dinas Perindustrian dengan indikator Kinerja Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional (Target kinerja 1% dengan realisasi 0,11%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan realisasi 11,23% database IKM se-NTB sudah tercakup di dalam Sistem Informasi Industri Nasional. Kegiatan ini didukung melalui sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas; Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas.
- d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator Kinerja Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha (Target kinerja : 6,35%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui

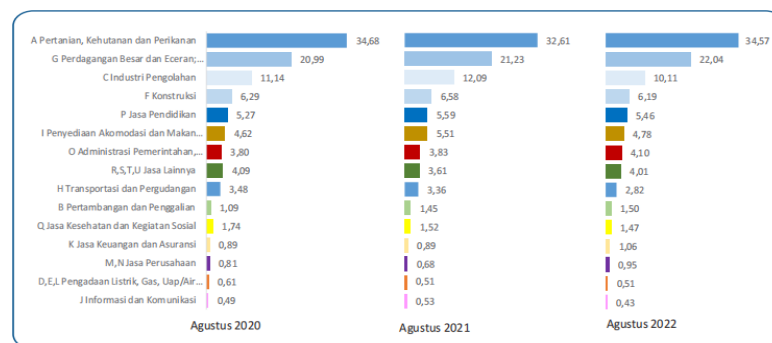
Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan dengan sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan.

- e. Program Pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator Kinerja Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya (Target kinerja : 53,53%). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah dengan sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.
- f. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan 2 indikator Kinerja yaitu Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi (Target kinerja 100%) dan Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat (Target kinerja 100%) Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi; Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera; Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi; Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi; Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.

22.Sasaran Menurunnya pengangguran terbuka dengan Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target kinerja sebesar 3,19%. Realisasi untuk sasaran ini sebesar 2,89 persen sehingga tingkat capaiannya sebesar 110,38 persen. Pembangunan ketenagakerjaan diukur dengan Indicator Kinerja Daerah (IKD) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan indikator sesuai perjanjian kinerja tahun 2022 yaitu persentase penyerapan Angkatan kerja dan persentase perusahaan yang harmonis/kondusif. Untuk indikator tingkat pengangguran terbuka, persentase penyerapan Angkatan kerja, persentase perusahaan yang harmonis/kondusif tahun 2022 sudah melampaui target. Pembangunan ketenagakerjaan tahun 2022 bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dengan sasaran meningkatnya kesempatan kerja masyarakat dan mewujudkan hubungan industrial yang harmonis/kondusif. Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2022 capaiannya yaitu 2,89 persen, capaian ini telah melampaui target

2022 (3,19 persen) bahkan target 2023 (3,17 persen). Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu mendapat atensi kedepan, antara lain:

- a. Pertumbuhan Angkatan kerja menunjukkan trend yang meningkat tahun 2020-2022 (Angkatan kerja 2020: 2.689,39 ribu orang; Angkatan kerja 2022: 2.799,18 ribu orang). Hal ini perlu disikapi dengan pertumbuhan kesempatan kerja agar angkatan kerja dapat terserap dalam pasar kerja. Selain itu, skill angkatan kerja yang match dengan kebutuhan pasar kerja juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Seringkali yang menjadi kendala Angkatan kerja tidak terserap dalam pasar kerja adalah karena mismatch skill yang dimiliki Angkatan kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk itu, dimulai dari jenis kejuruan yang ditawarkan di sekolah menengah kejuruan (SMK) maupun di balai Latihan kerja (BLK), Lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) harus memperhatikan skill yang dibutuhkan pasar kerja sehingga keluaran sekolah kejuruan ataupun Lembaga pelatihan dapat terserap di pasar kerja. Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) menjadi penting menjadi acuan dalam menentukan jenis kejuruan yang akan dilatih.
- b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 2020 ke 2022 (TPAK 2020: 70,45; TPAK 2022: 70,93) , namun masih ada gap antara TPAK laki dan TPAK perempuan. TPAK laki 2022: 83,27 sementara TPAK perempuan: 59,16. Gap ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam mengakses kesempatan kerja antara laki dan perempuan. Perlu dicari akar permasalahan sehingga gap ini muncul apakah karena stereotipe, budaya, ataukah karena rata-rata lama sekolah perempuan yang masih dibawah laki-laki sehingga dianggap tidak berkualitas atau ada penyebab lainnya.

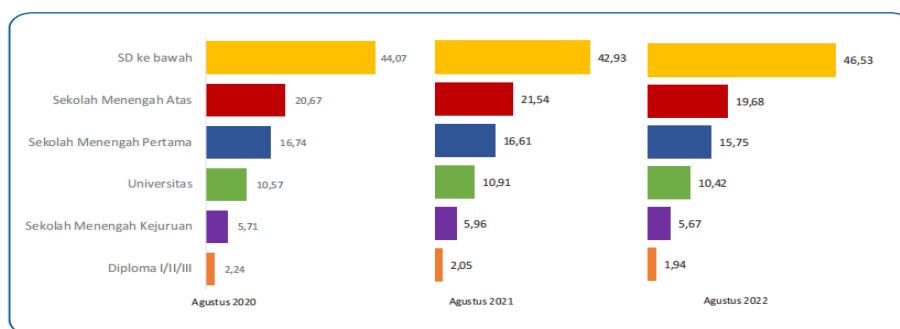


Gambar 1 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2020–Agustus 2022

Sumber: BRS: Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2022, BPS NTB, 2022

- c. Lapangan kerja yang paling banyak menyerap tenaga kerja di tahun 2022 adalah sector pertanian, kehutanan dan perikanan (2022: 34,57 persen) disusul oleh sector perdagangan besar dan eceran (22,04 persen). Jika melihat status pekerjaan utama penduduk yang bekerja tahun 2022 ternyata lebih didominasi oleh kegiatan informal

(75,36 persen) dibandingkan kegiatan formal (24,64 persen). Tingkat pendidikan penduduk yang bekerja tahun 2022 didominasi oleh tamatan SD kebawah sebesar 46,53 persen, yang jumlahnya terus meningkat sejak tahun 2020 (44,07 persen), 2021 (42,93 persen) sampai 2022 (46,53 persen). Data diatas menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja NTB dilihat dari tingkat pendidikannya masih rendah. Kualitas tenaga kerja yang rendah itu hanya mampu terserap pada sector pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kegiatan yang mendominasi adalah kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Tingkat pendidikan tenaga kerja yang rendah ini membawa tenaga kerja hanya mampu melakukan kegiatan informal yang berdampak pada produktivitas dan upah yang rendah yang diterima oleh tenaga kerja tersebut. Meskipun menurut jam kerja, sebagian besar penduduk yang bekerja, jumlah jam kerja lebih dari 35 jam per minggu (termasuk pekerja penuh) namun jika tenaga kerja tersebut hanya lulusan SD kebawah maka berdampak pada produktivitas dan tingkat upah tenaga kerja tersebut. Fenomena ini agak anomaly karena satu sisi tingkat pengangguran terbuka turun signifikan (2020: 4,22 persen; 2022: 2,89 persen) namun disisi lain tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi (2020: 14,23 persen; 2022: 13,82 persen). Kemungkinan fenomena ini terjadi karena meskipun penduduk NTB banyak yang bekerja namun karena produktivitasnya rendah sehingga upah yang diperoleh juga rendah. Upah tersebut belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak untuk sebuah keluarga/rumah tangga.

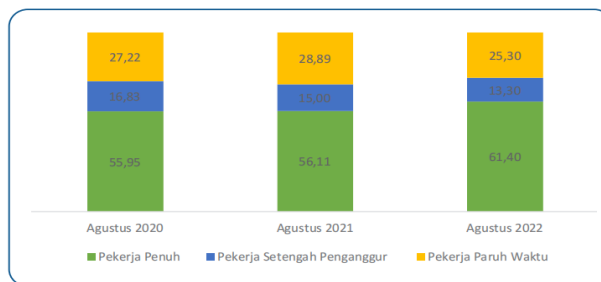


Gambar 3 Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2020–Agustus 2022

Sumber: BRS: Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2022, BPS NTB, 2022

- d. Penduduk yang bekerja dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu (pekerja penuh) tahun 2022 sebesar 61,40 persen, kondisi ini terus meningkat sejak 2020. Kondisi ini sangat menguntungkan apabila tenaga kerja tersebut memiliki level pendidikan dan skill/kompetensi tinggi dalam bekerja sehingga dapat memperoleh

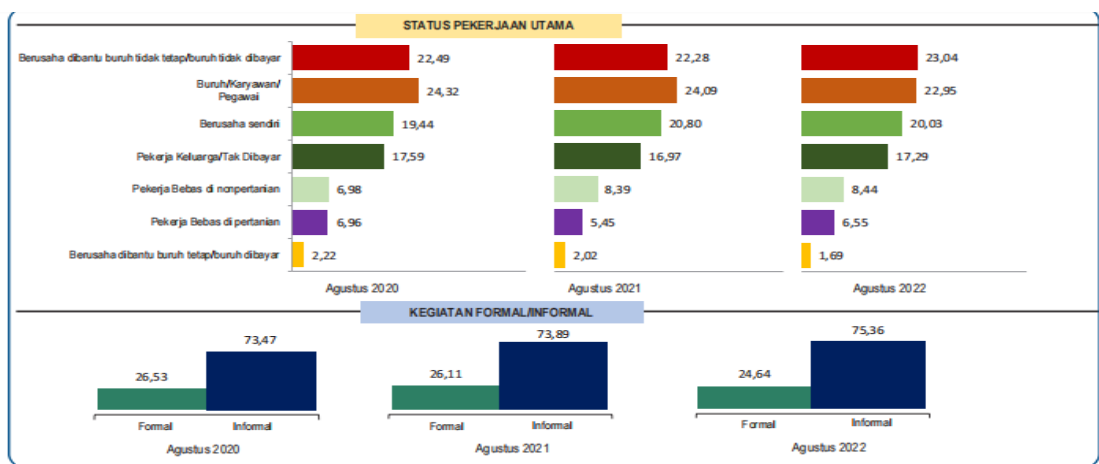
upah yang tinggi pula. Masih ada 38,60 persen tenaga kerja yang tergolong pekerja tidak penuh di tahun 2022 (yaitu pekerja yang jumlah jam kerjanya selama seminggu kurang dari 35 jam). Pekerja tidak penuh terdiri dari setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja dibawah 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain, sementara pekerja paruh waktu adalah pekerja yang bekerja dibawah 35 jam per minggu tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Pekerja paruh waktu tahun 2022 lebih didominasi oleh pekerja perempuan, hal ini disebabkan karena umumnya laki-laki adalah pencari nafkah sementara perempuan mengurus urusan domestic, walaupun perempuan ikut berkontribusi untuk mencari pendapatan, tetap saja waktu untuk pekerjaan domestic lebih banyak daripada untuk bekerja sehingga perempuan umumnya memilih menjadi pekerja paruh waktu.



Gambar 4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja, Agustus 2020–Agustus 2022

Sumber: Keadaan Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Barat Agustus 2022

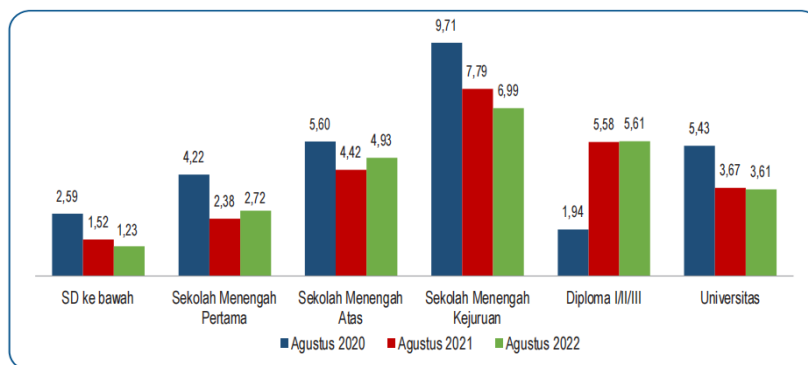
- e. Masih tingginya pekerja informal dibandingkan pekerja formal, maka selanjutnya yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana memberikan perlindungan bagi pekerja informal.



Gambar 2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2020–Agustus 2022

Sumber: BRS: Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2022, BPS NTB, 2022

- f. Jika melihat dari jenis kelamin, pengangguran terbuka lebih banyak didominasi oleh laki-laki, kebanyakan di daerah perkotaan dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SMK dan diploma. Meskipun TPT sudah menurun signifikan namun tetap saja masih perlu pengujian-pengujian atas data yang ada. Perlu digali permasalahan atas masih tingginya pengangguran pada laki-laki, pengangguran banyak terjadi di daerah perkotaan, penganggur dengan tingkat pendidikan dominan SMK dan diploma. Kedepan perlu ada kolaborasi dan koordinasi lintas sector dan lintas program, lebih mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk terlibat dalam skilling dan penyediaan lapangan kerja. Selain itu mendorong Dinas Dikbud untuk dapat menekan putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan sekolah, menawarkan pelatihan pada Lembaga pelatihan maupun pendidikan vokasi skill yang dibutuhkan pasar kerja.



Gambar 9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2020–Agustus 2022

Sumber: BRS: Keadaan Ketenagakerjaan Agustus 2022, BPS NTB, 2022

Indikator persentase penyerapan angkatan kerja tahun 2022 ditargetkan 96,81 persen dan realisasi sebesar 97,11 persen. Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama tahun 2022 untuk meningkatkan penyerapan angkatan kerja adalah melalui: Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi; Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja; Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja; Job Fair/Bursa Kerja; Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran; Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal); Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka penyerapan tenaga kerja, Disnakertrans Provinsi NTB melakukan inovasi dalam bentuk program yang disebut "PePADu Plus" akronim dari Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus. Program ini merupakan pengembangan dari program Revitalisasi BLK yaitu dengan

melengkapi instrumen yang dibutuhkan mulai dari hulu ke hilir. Dimulai dari proses penyiapan kompetensi calon tenaga kerja di lembaga pelatihan kerja, baik di BLK/LLK maupun LPKS secara terpadu bersama dunia industri hingga fasilitasi dan pendampingan pasca pelatihan bersama stakeholder terkait. Salah satu tujuan dari program "PePaDu Plus" adalah terciptanya *link and match* antara supply and demand skill tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, pembinaan dan pendampingan bagi peserta pelatihan untuk penciptaan wirausaha baru dan penciptaan kesempatan kerja baru.

Program PePaDu Plus melaksanakan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi. Pelatihan keterampilan berdasarkan klaster kompetensi tahun 2022 dilaksanakan di BLK Lombok Timur, BLKDLN, dan BLK/LLK kabupaten/kota. Total jumlah peserta pelatihan keterampilan berbasis tahun 2022 adalah sebanyak 1.760 orang terdiri dari: BLK Lombok Timur 720 orang; BLKDLN 304 orang; dan BLK/LLK kabupaten/kota 736 orang. Peserta pelatihan keterampilan sebagian besar berpendidikan S1/Diploma (25,41 persen); SMK dan SMA (50,27 persen) sisanya lulusan SMP kebawah. Kejuruan yang dilatih tahun 2022 adalah: Otomotif Tek. Kendaraan Ringan (R4), Teknik Pendingin, Otomotif Sepeda Motor, Perhotelan, Bisnis dan Manajemen, Las, Menjahit, Pengolahan hasil pertanian, Elektronika, Bangunan

Pada tahun 2022, Disnakertrans menetapkan target kinerja untuk indicator persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi sebesar 17 persen dengan realisasi sebesar 17,49 persen (tingkat capaian 102,87 persen). Tahun 2022, jumlah pencari kerja bersertifikat kompetensi melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BLK/LLK, LPKS dan pemagangan dalam negeri sebanyak 14.427 orang dari total pencari kerja terdaftar sebanyak 82.495 orang.

23.Sasaran Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat dengan

Indikator Kinerja Persentase penurunan konflik social dengan target kinerja sebesar 20%. Pada tahun 2022 diperkirakan akan timbul konflik sosial di Prov NTB sebanyak 4 kasus, ternyata dilapangan dapat ditekan dengan deteksi dini hingga 6 kasus. Secara umum kondisi keamanan di Provinsi NTB semakin terkendali dan konflik sosial dapat di tekan setiap tahunnya, untuk menjamin rasa aman dan nyaman dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Berdasarkan program yang telah dilaksanakan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, indikator Cakupan mediasi potensi konflik sosial. Pada tahun 2022 diperkirakan akan timbul konflik sosial di Prov NTB sebanyak 4 kasus dapat ditekan dengan deteksi dini jadi 6 kasus, hal ini disebabkan karena, meningkatnya kesigapan dan kerjasama antara Pimpinan Daerah baik di tingkat Provinsi (Forkopimda NTB) maupun

pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota (Forkopimda Kab/Kota se NTB) dalam mengatasi dan menindaklanjuti berbagai isu konflik sosial. Terjalannya sinergitas dengan mitra Bakesbangpoldagri NTB seperti FKDM, Jejaring Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) NTB, FPK, FKUB, Bale Mediasi, dan PPWK dan kesigapan lintas OPD yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) baik instansi vertikal maupun daerah.

24.Sasaran Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah dengan target kinerja sebesar 5,72%. Rata-rata persentase capaian indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah dari Tahun 2019 s.d Tahun 2022 sangat tinggi yaitu 766.43%. Hal ini menunjukkan jumlah kasus pelanggaran terhadap produk hukum daerah tiap tahunnya berhasil ditekan dari jumlah kasus yang diprediksi. Pada Tahun 2022, terjadi kasus gangguan tibumtranmas sejumlah 9 kasus dari target 17 kasus dan kasus pelanggaran perda/pergub sejumlah 9 kasus dari target 18 kasus. Setelah dihitung persentase selisih antara target jumlah kasus dan realisasi jumlah kasus sesuai dengan formula/rumus indikator, dihasilkan capaian indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah Tahun 2022 sebesar 22.53%. Persentase capaian yang tinggi diakibatkan oleh objek indikator yaitu "kasus" yang bersifat unpredictable dimana hampir tidak dapat diprediksi untuk menjadi target. Kinerja Perangkat Daerah Satpol PP Provinsi NTB yang baik dapat menekan jumlah kasus yg diprediksi akan terjadi. Pengertian kasus dalam pelanggaran perda/pergub dan kasus gangguan tibumtranmas dibatasi dengan mengacu pada perda/pergub yang dilanggar, sehingga 1 (satu) kasus yang terjadi dapat berisi banyak pelanggar.

25.Sasaran Meningkatnya kesadaran politik masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik dengan target kinerja sebesar 90%. Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Politik menunjukkan capaian sebesar 0,80 persen. Persentase masyarakat yang terlibat secara langsung dalam berorganisasi (pengurus), menunjukkan bahwa berdasarkan data yang dihimpun dari 12 (dua belas) Parpol. Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas/LSM) baik yang melaporkan keberadaannya ataupun yang mendapat fasilitasi dari Bakesbangpoldagri dalam pengurusan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Kementerian Dalam Negeri maupun yang berstatus Badan Hukum yang proses penerbitannya melalui Kementerian Hukum dan HAM. Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kepengurusan Parpol 9.749 orang, jumlah masyarakat yang terlibat dalam kepengurusan Ormas 8.208 orang, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perhitungan persentase keterlibatan masyarakat

dalam politik yaitu (jumlah masyarakat yang terlibat dalam kepengurusan Parpol + Ormas / jumlah masyarakat usia 25 – 59 tahun sebanyak 2.250.759 orang) * 100 sama dengan 9.749 orang. Dari hal tersebut diperoleh data bahwa terdapat 17.957 orang masyarakat NTB yang terlibat langsung dalam Kepengurusan Organisasi atau sebesar 0,80 persen dari penduduk NTB usia 21 – 59 tahun.

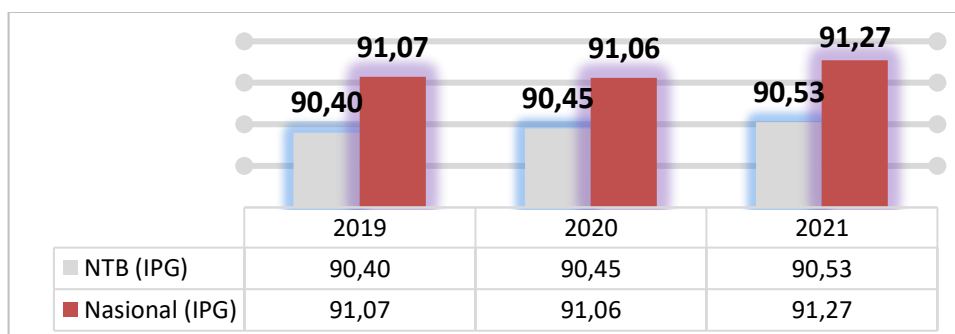
26. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dengan Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan (target kinerja sebesar 19,27% dan realisasi 27,13%) dan Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak (target kinerja sebesar 80% dan realisasi 70%).

Upaya pemerintah provinsi NTB melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB untuk terus meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dan menjamin adanya kesetaraan gender pada tahun 2022 terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat Indeks pembangunan Gender (IPG) NTB yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dimensi pendidikan menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Pada tahun 2020, angka IPG NTB mencapai 90,45, meningkat menjadi 90,53 pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022, capaiannya belum tersedia dari BPS, namun diprediksi meningkat. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa pembangunan perempuan hampir sama pembangunan laki-laki di Provinsi NTB.

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi NTB

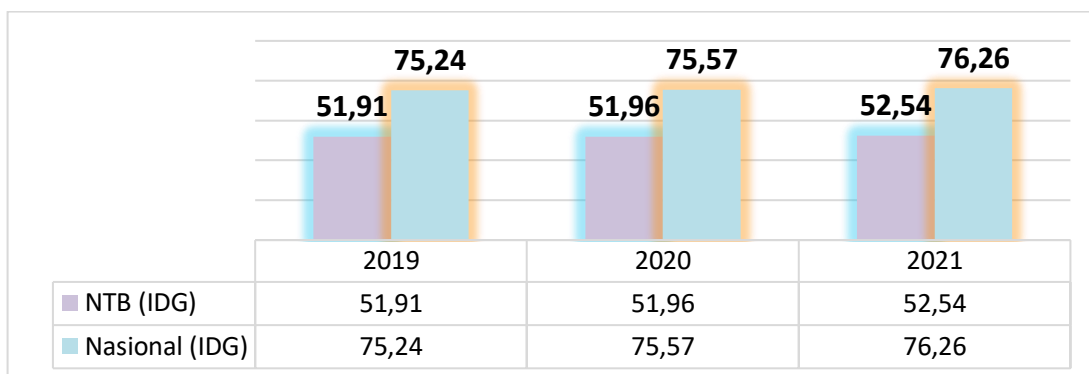


Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2023

Dilihat dari kesetaraan gender, sebagai gambaran yang menunjukkan kesamaan kondisi terhadap laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Keberhasilan dalam membangun kesetaraan gender terdeskripsi melalui Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG. IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga professional dan sumbangan pendapatan perempuan.

Angka IDG Provinsi NTB pada tahun 2020 sebesar 51,96 dan meningkat menjadi 52,54 pada tahun 2021 dan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2022 walaupun pada saat ini belum tersedia data rilis dari BPS. Bila dibandingkan dengan Nilai IDG nasional yang telah mencapai 76,26 di tahun 2021, maka pemberdayaan gender di Provinsi NTB jauh dibawah rata-rata nasional. Rendahnya IDG Provinsi NTB dipengaruhi oleh rendahnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang mencakup keterlibatan perempuan diparlemen yang hanya sebesar 1,59% tahun 2021, perempuan sebagai tenaga professional sebesar 46,72% tahun 2021, serta sumbangan pendapatan perempuan dalam perekonomian keluarga sebesar 33,09% tahun 2021 (2022: N/A).

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi NTB



Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2023

Sementara itu, Capaian indikator cakupan kabupaten/kota yang mendapatkan predikat kabupaten/kota layak anak sampai dengan tahun 2022 mencapai 70 persen (7 Kabupaten/Kota), sedangkan cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan tahun 2022 sebesar 100 persen, melampaui target 2022 (75,52%), hal ini disebabkan karena jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak melampaui target dan semua laporan tersebut telah tertangani.

DP3AP2KB telah melaksanakan penyelenggaraan urusan Bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak melalui program yang berkontribusi pada pembangunan gender, pemberdayaan gender, partisipasi perempuan dalam pembangunan, pencapaian predikat kabupaten/kota layak anak dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program tersebut antara lain: program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, program pengelolaan sistem data gender dan anak, program pemenuhan hak anak (PHA), dan program perlindungan khusus anak dengan rata-rata capaian kinerja.

Untuk mendorong kesetaraan gender dan peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu mendorong penerapan Pengarusutamaan gender (PUG) yang mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan pembangunan. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penggaran yang responsif gender (PPRG). Sampai dengan tahun 2022, persentase perangkat daerah di provinsi NTB yang telah menerapkan PPRG mencapai 100 persen atau melampaui target sebesar 52,27 persen serta mendorong tersedianya rencana PPRG di setiap perangkat daerah Provinsi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kabupaten/Kota.

Salah satu isu lain terkait kesetaraan gender yang cukup menarik perhatian adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ketenagakerjaan. Pada umumnya terjadi ketimpangan pada berbagai aspek ketenagakerjaan yang menempatkan pekerja perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Misalnya rendahnya kesempatan kerja, kurangnya kompetensi, maupun upah/gaji yang rendah. Kondisi-kondisi tersebut masih umum dijumpai di berbagai daerah termasuk di Nusa Tenggara Barat. Mengingat pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan di Nusa Tenggara Barat, maka dituntut peranan perempuan khususnya perempuan yang bekerja untuk mengambil peran lebih besar dalam menciptakan kesetaraan gender, khususnya dalam hal ketenagakerjaan.

Dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan, DP3AP2KB Provinsi NTB melaksanakan program peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan indikator persentase perempuan sasaran yang bekerja. Program ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan untuk mendukung ketahanan keluarga melalui Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi, terdiri dari:

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Provinsi dengan kegiatan pendampingan kader motivator ketahanan keluarga.
- 2) Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi, dengan kegiatan:
 - a. Monitoring kepada peserta Pelatihan Manajemen Wirausaha bagi Perempuan yang Berperspektif Gender ke Desa Lenek Duren, Desa Lenek Kali Bambang Kabupaten Lombok Timur dan Desa Kelungkung Kabupaten Sumbawa.
 - b. Pelatihan Manajemen Wirausaha bagi Perempuan yang Berperspektif Gender di Desa Tepas sepakat Kabupaten Sumbawa Barat dengan peserta sebanyak 25 orang yang terdiri dari mantan PMI perempuan, korban perkawinan anak dan perempuan pra sejahtera.

Dalam upaya mendorong peningkatan perlindungan perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB memberikan advokasi dan memfasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota se provinsi NTB untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), dimana sampai tahun 2022 telah terbentuk 7 Kabupaten/Kota layak anak di NTB.

Pencapaian ini didukung oleh berbagai bentuk kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Bimbingan teknis percepatan KLA oleh kementerian PPPA RI;
- b. Melakukan pembinaan kepada 10 Kab/Kota se-NTB terutama bagi kabupaten yang belum mendapatkan predikat KLA;
- c. Advokasi percepatan Kab/Kota Layak Anak bagi OPD/Lembaga yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA;
- d. Mendorong Kab/Kota untuk menyusun draft Perda, Perbub tentang Kabupaten Kota Layak Anak;
- e. Mengadakan webinar sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) bagi satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Dikbud Provinsi NTB, Kemenag, Provinsi dan Kab/Kota;

- f. Melakukan kegiatan temu forum anak tingkat Provinsi NTB untuk menyusun suara anak NTB Tahun 2022;
- g. Menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi NTB untuk menyampaikan aspirasi atau suara anak kepada pemerintah daerah;
- h. Menerbitkan Surat Gubernur NTB No. 463/658/DP3AP2KB/X/2022 kepada Bupati/Walikota se-NTB tentang Pelaksanaan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2022;
- i. Melakukan Pendampingan kepada operator penilaian KLA kepada dua Kab/Kota (KSB dan Kabupaten Sumbawa).

Sementara itu, berdasarkan data Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTB, korban kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dewasa dan Anak Tahun 2020 s.d. 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	Kabupaten Bima	31	81	93
2	Kabupaten Dompu	68	68	176
3	Kabupaten Lombok Barat	101	140	136
4	Kabupaten Lombok Tengah	50	38	105
5	Kabupaten Lombok Timur	177	390	248
6	Kabupaten Lombok Utara	114	124	119
7	Kabupaten Sumbawa	63	79	71
8	Kabupaten Sumbawa Barat	35	21	62
9	Kota Bima	100	65	69
10	Kota Mataram	106	54	75
	Jumlah	845	1060	1154

Sumber: Simfoni Kementerian PPPA RI, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa korban kekerasan terhadap perempuan dan anak selama tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 tercatat sejumlah 845 korban, meningkat sebesar 25,44% di tahun 2021 menjadi 1.060 korban. Pada tahun 2022 jumlah korban kembali mengalami peningkatan sebesar 8,87% atau sejumlah 1.154 korban. Data kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak menurut bentuknya dapat dilihat pada tabel berikut.

Data Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan Dewasa Tahun 2022

No	Unit / Instansi	Kasus	Jumlah Korban	Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan						
				Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
1	Bima	44	54	32	1	13	0	0	7	1
2	Dompu	67	89	27	22	13	2	8	10	7
3	Kota Bima	20	34	16	14	1	0	0	2	1
4	Kota Mataram	26	31	5	14	2	2	0	6	2
5	Lombok Barat	53	57	22	4	15	1	2	7	6

No	Unit / Instansi	Kasus	Jumlah Korban	Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan						
				Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
6	Lombok Tengah	35	35	7	6	17	0	0	3	2
7	Lombok Timur	51	59	14	15	4	0	9	5	12
8	Lombok Utara	14	15	2	3	2	0	0	0	8
9	Sumbawa	19	20	13	2	3	0	0	0	2
10	Sumbawa Barat	15	22	7	8	3	1	0	3	0
	Total	344	416	145	89	73	6	19	43	41

Sumber: Simfoni Kementerian PPPA RI, 2023

Korban kekerasan terhadap perempuan dewasa didominasi oleh kekerasan fisik yang terjadi akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selanjutnya diikuti oleh kekerasan dalam bentuk psikis sejumlah 89 orang, seksual sebanyak 73 orang, penelantaran 43 orang, dan bentuk lainnya sejumlah 41 orang. Jumlah korban terkecil adalah kekerasan dalam bentuk eksploitasi dengan korban 6 orang.

4.2 Capaian RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sampai tahun 2022

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan, telah ditetapkan sebanyak 103 Indikator Kinerja Daerah (IKD) tersebut sampai dengan tahun 2022 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan RPJMD 2019-2023, IKU yang ditetapkan sebanyak 37 Indikator dengan target dan Realisasi Tahun 2022 sebagai berikut:

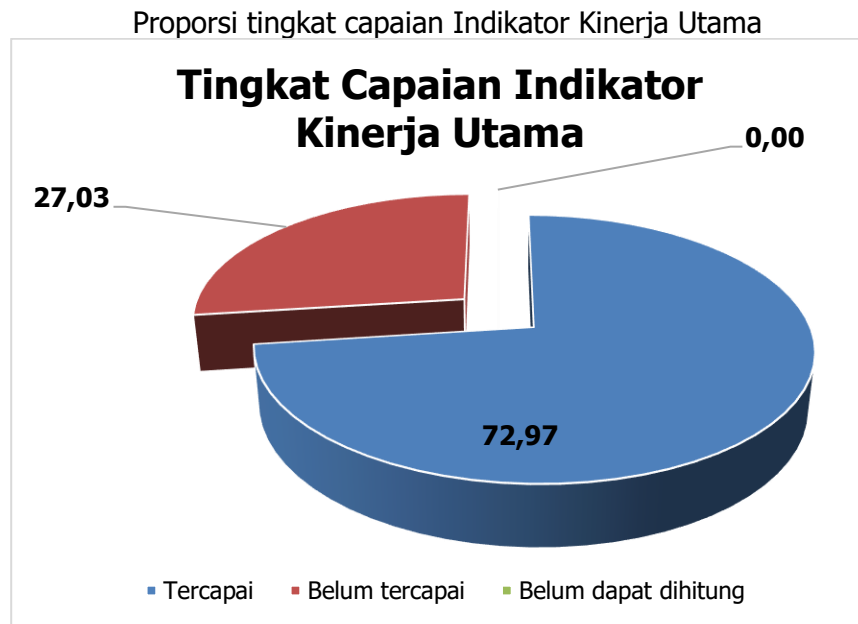
No	Indikator	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAN melalui Nenguatan mitigasi bencana dan Nengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah					
1	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,63	0,72	114,29
2	Persentase Kemantapan jalan	%	85,36	85,36	100,00
3	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	52,17	54,50	104,47
4	Persentase konektivitas transportasi publik	%	86,86	92,00	105,92

No	Indikator	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi					
5	Opini BPK	Status	WTP	WTP	100,00
6	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	36,97	43,18	116,80
7	Nilai SAKIP	Kategori	BB (76,01 - 80,00)	BB	100,00
8	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,70	0,64	91,29
9	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,53	3,71	81,90
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah					
10	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,08	67,07	100,00
11	Persentase Balita Stunting	%	30,99	16,84	145,66
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,73	13,96	101,68
13	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7,04	7,61	108,10
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan					
14	Indeks Kualitas Air	Point	42,93	43,39	101,07
15	Indeks Kualitas Udara	Point	87,56	89,30	101,99
16	Indeks Kualitas Air Laut	Point	70,89	89,48	102,11
17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	68,70	65,61	64,68
18	Persentase Penanganan Sampah	Point	60,00	42,20	70,33
19	Persentase Pengurangan Sampah	Point	25,00	12,78	51,12
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi					
20	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	15.428	21.607	140,05
21	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,71	26,14	110,25
22	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100,00	100,00	100,00
23	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86,70	93,30	107,61
24	Cakupan Air Minum	%	78,45	79,11	100,84
25	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80,91	81,83	101,14
26	Rasio Elektrifikasi	%	99,88	99,98	100,10
27	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	65,80	62,30	94,68
28	Inflasi	%	3,0 - 4,0	6,23	44,25
29	Pengeluaran per kapita		11.603,52	10.681,00	92,05

No	Indikator	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
30	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	129,78	282,70	217,83
31	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	173,02	87,99	50,86
32	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,19	2,89	109,40
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan					
33	Persentase penurunan konflik sosial	%	20,00	50,00	150,00
34	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5,72	22,53	393,88
35	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,90	1,26	140,00
36	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	19,27	27,39	142,14
37	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80,00	70,00	87,50

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja pada tahun 2022, diketahui bahwa sebanyak 27 indikator atau 72,97% telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2022, sedangkan 10 indikator atau 27,03% belum mencapai target. Beberapa indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target diantaranya Indeks Kapasitas Daerah, Persentase Kemantapan jalan, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Persentase konektivitas transportasi publik, Opini BPK, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Nilai SAKIP, Angka Harapan Hidup, Persentase Balita Stunting, Harapan Lama Sekolah, Rata rata Lama Sekolah, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, Nilai Realisasi Investasi, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Cakupan Air Minum, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase penurunan konflik sosial, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan.



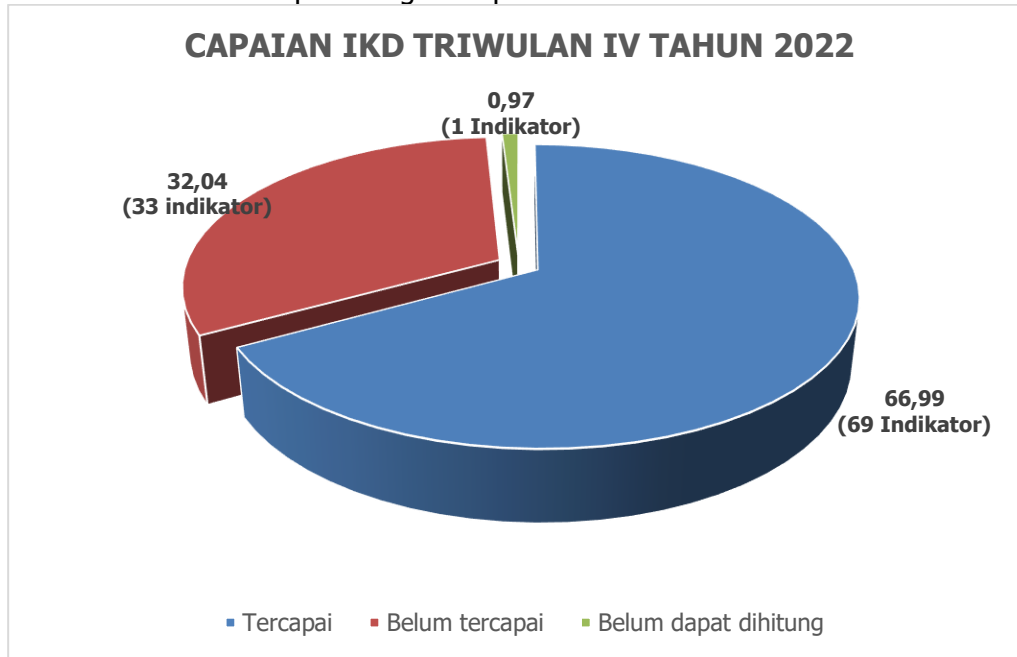
Sumber: data diolah

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Salah satu parameter keberhasilan pembangunan yang menunjukkan gambaran pencapaian pembangunan Daerah dan sebagai tolok ukur sejauh mana program-program yang digulirkan Pemerintah dapat mencapai sasaran-sasaran atau tujuan pembangunan, dapat diukur melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKD juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Capaian terhadap 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2022, dimana sebanyak 69 indikator atau 66,99 persen sudah sesuai target bahkan melampaui, 33 indikator atau 32,04 persen belum memenuhi target dan masih terdapat 1 indikator atau 0,97 persen belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

Proporsi tingkat capaian IKD Provinsi NTB



Sumber: Perangkat Daerah, data diolah

Indikator Kinerja Daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah. Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 103 indikator untuk mendeskripsikan ukuran kinerja daerah yang telah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek kinerja yaitu :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan 5 indikator kinerja meliputi indikator Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah diukur dengan 7 indikator kinerja meliputi indikator Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesibilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik.

3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum diukur dengan 91 indikator kinerja yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator yang tersebar pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 32 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 20 indikator yang tersebar pada

8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 18 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan.

Deskripsi capaian indikator kinerja daerah berdasarkan aspek dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Adapun capaian indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

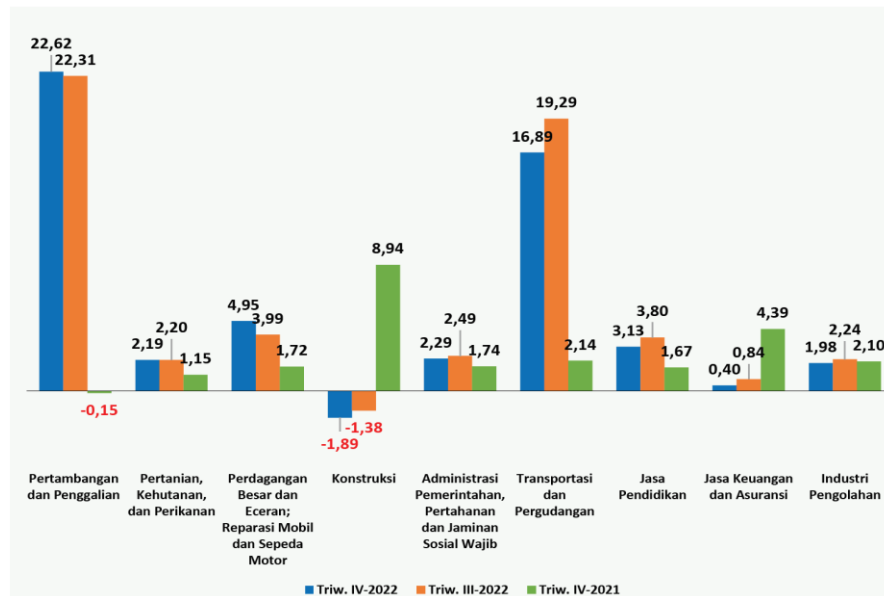
Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	3,5-4,5	3,42	94,05
2	Inflasi	%	3,0 - 4,0	6,23	44,25
3	Tingkat Kemiskinan	%	12,77	13,82	91,78
4	Gini Ratio	Point	0,329	0,374	86,36
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	69,39	69,46	100,10

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2022

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2022 terhadap tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 6,95% (termasuk pertambangan bijih logam), jika dibandingkan dengan tahun 2021 hanya sebesar 2,30%, hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada tahun 2022. Hal yang sama pada pertumbuhan ekonomi tanpa pertambangan bijih logam dari 2,86% pada tahun 2021 meningkat menjadi 3,42% pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi NTB lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,31%. Dari sisi produksi, Pertumbuhan terjadi pada 16 (enam belas) lapangan usaha dan terdapat 1 (satu) lapangan usaha berkontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 24,68%; Pertambangan dan Penggalian sebesar 22,62%; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,89%. Selanjutnya, lapangan usaha Jasa lainnya tumbuh 10,54%; Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh 9,46%; Jasa Perusahaan tumbuh 8,39%; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 4,95%. Sementara itu, 1 (satu) lapangan usaha lainnya yang berkontraksi yaitu Konstruksi sebesar -1,89%, yang disebabkan oleh penyelesaian sejumlah proyek strategis pada tahun 2021.

Gambar Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)



Pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 24,68 persen serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,89 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 45,52 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 5,86 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 3,98 persen. Sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 22,29 persen.

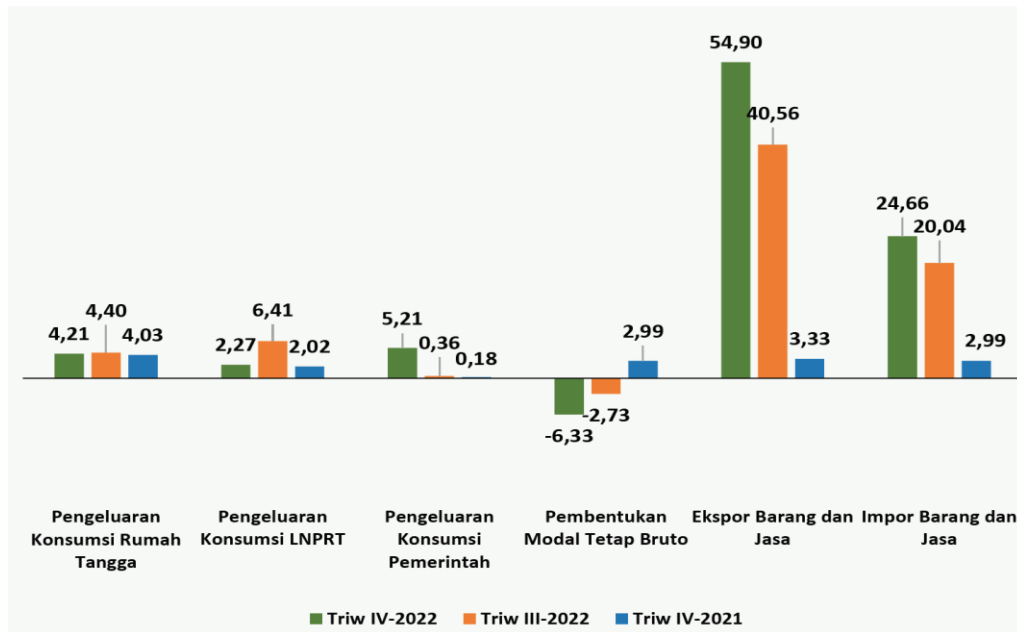
Tingganya pertumbuhan tersebut terjadi dampak dari semakin membaiknya sektor pariwisata. Hal ini ditandai dengan jumlah tamu menginap di hotel yang meningkat sebesar 85,42 persen dan rata-rata tingkat penghunian kamar meningkat 19,64 persen., dengan jumlah tamu menginap hotel bintang sebanyak 754.053 orang pada tahun 2022, meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 446.661 orang. Adapun jumlah tamu menginap hotel non bintang sebanyak 622.242 orang pada tahun 2022, meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 525.178 orang. Peningkatan jumlah kunjungan ke NTB yang meningkat sangat signifikan ini juga disebabkan banyaknya event internasional yang diselenggarakan di Provinsi NTB diantaranya MXGP, WSBK, dan MotoGP yang sukses diselenggarakan dengan lancar dan aman. Selain itu pertumbuhan tersebut sebagai dampak longgarnya pembatasan masyarakat yang meningkatkan aktivitas dan permintaan terhadap penyediaan makan dan minum serta semakin lancarnya transportasi.

Perkembangan Jumlah Tamu Menginap Hotel Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2022

Bulan	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	42.001	64.964	30.886	48.233
Februari	44.654	60.675	25.063	40.893
Maret	51.051	41.966	39.610	65.426
April	52.405	2.790	35.145	27.498
Mei	42.100	2.610	31.495	63.097
Juni	58.437	9.085	34.965	68.205
Juli	65.858	18.681	21.653	68.069
Agustus	67.561	29.932	26.456	69.868
September	68.139	27.933	36.702	66.864
Oktober	75.572	40.490	48.939	69.642
November	68.871	45.050	57.277	74.083
Desember	78.718	53.539	58.470	92.175
Jumlah	715.367	397.715	446.661	754.053

Berbagai terobosan juga telah dilakukan pemerintah provinsi NTB untuk pemulihan ekonomi ditengah pandemi covid-19, diantaranya dengan mendorong optimalisasi pengembangan komoditas/produk/jenis usaha unggulan daerah melalui industrialisasi produk unggulan daerah serta mendorong IKM dan UMKM menjadi sektor lokomotif ekonomi daerah melalui pengembangan produk, pengembangan SDM, pengembangan IKM dan UMKM, dan pengembangan Kawasan. Mengembangkan industri pariwisata melalui dengan terus mengembangkan desa wisata. Disamping itu, juga dilakukan peningkatan infrastruktur strategis untuk membangkitkan perekonomian di NTB, diantaranya infrastruktur untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB sebagai sentral rumah sakit rujukan kesehatan bagi masyarakat NTB serta mampu menghadirkan rumah sakit yang memiliki pelayanan standar internasional serta pembangunan infrastruktur jalan yang memiliki potensial terhadap sentral produksi pangan, kawasan industri smelter, kawasan menuju geopark Tambora, kawasan terisolir, potensial ketahanan pangan seperti komoditas kopi dan lain-lain serta kawasan menuju destinasi pariwisata.

Gambar Pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran (persen)



Pada indikator Inflasi, ada kenaikan cukup signifikan inflasi year on year (y-on-y) Gabungan Dua Kota (Kota Mataram dan Kota Bima) sebesar 6,23% pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 2,23%, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,97 pada Bulan Desember 2021 menjadi 112,57 pada Bulan Desember 2022. Angka inflasi ini lebih tinggi dibanding angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 5,51 persen.



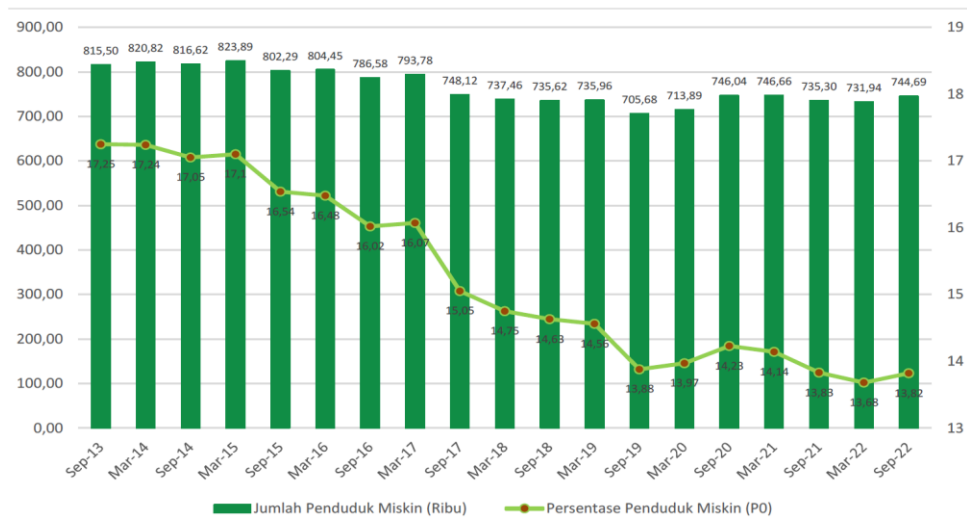
Terjadinya inflasi ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan beberapa kelompok pengeluaran mengalami kenaikan yang signifikan antara lain adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Transportasi sebesar 22,36%; Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 6,62%; Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 3,92%; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 3,81%; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

sebesar 3,66%; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 3,13%; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 2,94%; Kelompok Pendidikan sebesar 2,47%; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 1,89%; Kelompok Kesehatan sebesar 0,89%. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,76%. Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi antara lain Bensin, Angkutan Udara, Rokok Kretek Filter, Beras, dan Telur Ayam Ras. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain Minyak Goreng, Cabai Rawit, Ikan Layang/Ikan Benggol, Telepon Seluler, dan Televisi Berwarna.

Dampak inflasi yang terjadi pada tahun 2022 yang dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak, menyebabkan adanya kenaikan nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi yang diukur dari garis kemiskinan. Garis Kemiskinan pada September 2022 adalah sebesar Rp489.954,- per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,55%. Sementara jika dibandingkan September 2021, terjadi kenaikan sebesar 10,92%. Naiknya garis kemiskinan ini menyebabkan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022. Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada September 2022 mencapai 744,69 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin bertambah 12,8 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 10,61 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 13,82 persen, meningkat 0,14 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun 0,05 persen poin terhadap September 2021.

Secara umum, pada periode September 2013 – September 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada beberapa periode yaitu Maret 2017, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 merupakan akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2022 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2013-September 2022



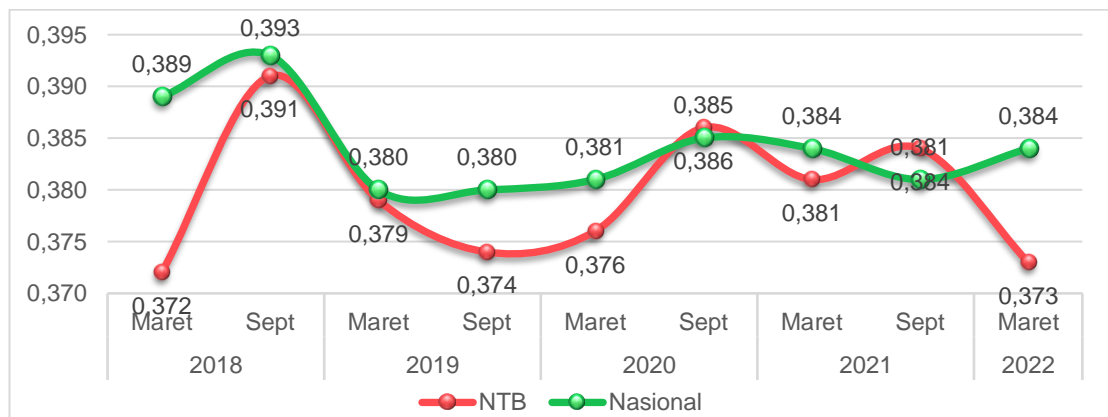
Penurunan angka kemiskinan NTB dalam tiga tahun terakhir memang cukup berat, dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk miskin selama Pandemi Covid-19 dan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Namun demikian, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk terus berikhtiar menurunkan angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari alokasi belanja daerah terutama untuk memenuhi pelayanan dasar mencapai Rp.4.022.664.940.311 atau mencapai 63,70% dari total belanja daerah, mendorong Gerakan multipihak dalam penanggulangan kemiskinan dengan membangun komitmen multi pihak; mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa dengan kolaborasi masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh adat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Kemiskinan serta mendorong percepatan penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada September 2022, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 21,22 persen di perkotaan dan 24,97 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (8,75 persen di perkotaan dan 7,30 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (3,72 persen di perkotaan dan 3,08 persen di perdesaan), daging ayam ras (2,94 persen di perkotaan dan 3,00 persen di perdesaan), kue basah (2,91 persen di perkotaan dan 2,72 di perdesaan), cabe rawit (2,63 persen di perkotaan dan 2,90 persen di perdesaan), Tongkol/tuna/cakalang (2,48 persen di perkotaan dan 2,82 di perdesaan), mie instan (2,17 persen di perkotaan dan 2,31 persen di perdesaan), dan seterusnya. Komoditi

bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, pendidikan, listrik, perlengkapan mandi, pakaian jadi perempuan dewasa, sabun cuci, angkutan umum, dan pakaian jadi anak-anak.

Pada sisi tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh Gini Ratio, gini rasio penduduk NTB pada September tahun 2022 tercatat sebesar 0,373 atau mengalami penurunan sebesar 0,011 poin jika dibandingkan dengan gini rasio September 2021 sebesar 0,384. Dalam sepuluh tahun terakhir, secara umum nilai Gini Ratio provinsi NTB terus mengalami penurunan dari 0,391 pada September 2018 menjadi 0,373 tahun 2022, dan lebih rendah dibandingkan angka ketimpangan nasional sebesar 0,384.

Tren dan Perbandingan Gini Ratio NTB dan Nasional

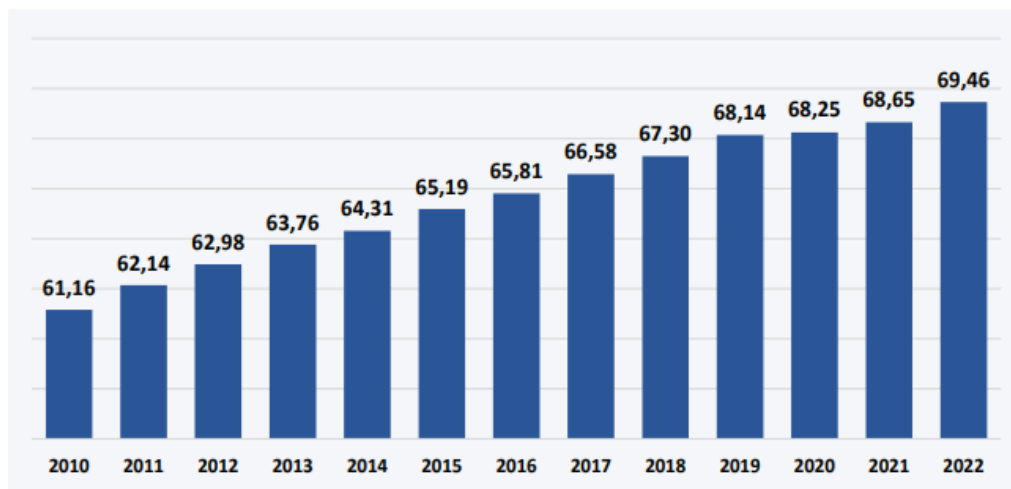


Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia yang membagi tingkat ketimpangan menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2022, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,30 persen, yang berarti provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada kategori ketimpangan rendah.

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2022, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,30 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan Maret 2022 yang sebesar 18,60 persen dan meningkat

dibandingkan September 2021 yang sebesar 17,59 persen. Jika dibedakan menurut daerah, pada September 2022 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 17,47 persen. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 19,69 persen. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia daerah perkotaan maupun daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah.

Pada dimensi pembangunan manusia, dalam satu dekade pembangunan manusia di Provinsi NTB antara tahun 2010 sampai dengan 2019 terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan rata-rata pertumbuhan IPM sebesar 1,21 persen per tahun. Namun, pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia Provinsi NTB, yang menyebabkan pertumbuhan IPM Provinsi NTB mengalami perlambatan dengan rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2010-2021 menjadi sebesar 1,06 persen per tahun, sedangkan tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan mencapai 1,18%. Peningkatan seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 yang berjalan dengan baik. IPM Provinsi NTB mencapai 69,46 pada tahun 2022, meningkat hingga 1,18 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 68,65. Dengan pencapaian ini, IPM NTB optimis akan masuk kategori tinggi pada tahun 2023 atau diatas 70.



Peningkatan capaian IPM Provinsi NTB Tahun 2022 disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan seluruh komponen pembentuk IPM, terutama rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita. Seluruh komponen pembentuk IPM Provinsi NTB mengalami percepatan pertumbuhan, kecuali komponen harapan lama sekolah pada dimensi pengetahuan yang pertumbuhannya melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya dapat dideskripsikan sebagai berikut: Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan terjadinya pandemi

COVID-19, UHH Provinsi NTB tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami perlambatan, tumbuh 0,35 persen dan 0,27, melambat dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2019 yang mencapai 0,62 persen. Sedangkan tahun 2022 tumbuh sebesar 0,38 dari 66,51 tahun pada tahun 2020 naik menjadi 67,07 tahun pada tahun 2022. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi NTB telah dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. HLS Provinsi NTB rata-rata meningkat 1,52 persen per tahun dengan capaian pada tahun 2022 mencapai 13,96 tahun dan RLS Provinsi NTB rata-rata meningkat 2,40 persen per tahun dan mencapai 7,61 tahun pada tahun 2022.

Pada komponen lain yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran riil per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan masyarakat NTB mencapai Rp10,68 juta per tahun. Capaian ini meningkat sebesar 2,93 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 10,38 juta per tahun. Adanya peningkatan standar hidup layak ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut

Berbagai terobosan telah dilakukan pemerintah provinsi NTB untuk menekan kematian bayi dan kematian ibu, yang salah satunya melalui revitalisasi posyandu. Secara kuantitas, perkembangan jumlah Posyandu keluarga di NTB cukup signifikan, karena terjadi penambahan jumlah posyandu setiap tahun, pada tahun 2020 sebanyak 2223, pada tahun 2021 sebanyak 7.581 dan pada tahun 2022 sebanyak 7.676., dan yang menjadi Posyandu Keluarga sebanyak 7.676 Posyandu (100%). Secara kuantitas telah meningkat dan telah mencapai target yang diharapkan (100%), namun secara kualitas masih harus ditingkatkan lagi khususnya integrasi kegiatan/pelayanan, masih banyak yang belum terintegrasi, baik kegiatan Kesehatan maupun kegiatan dengan sector lain (PAUD, Bank Sampah, BKB, BUMDES, UMKM). Disamping itu, juga dilakukan determinasi terutama pada pernikahan dini, Adanya anggota keluarga yang merokok, pola asuh keluarga balita/Pemberian Makan bayi balita yang tidak tepat, Jaminan Pelayanan Kesehatan, Akses sanitasi dan air bersih dan ibu hamil serta remaja putri tidak mengkonsumsi gizi seimbang dan tablet tambah darah.

4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing Provinsi NTB diukur menggunakan pendekatan 8 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 1.
Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Indeks Kriminalitas	Point	14,05	8,77	137,58
2	Indeks Aksesibilitas	Point	79,84	81,31	101,84
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	68,00	70,56	103,76
4	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana	%	89,69	80,00	89,20
5	Indeks Risiko Bencana	Point	119,41	119,83	99,65
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB	B	95,67
7	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,53	3,71	81,90

Sumber: Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2022

Terdapat 7 indikator untuk mengukur aspek daya saing daerah, yaitu Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesibilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) , Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, Indeks Resiko Bencana dan Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Pelayanan Publik. Seluruh indikator pada Aspek Daya Saing Daerah capaiannya belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan mewujudkan kondusifitas daerah, menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menyiapkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mewujudkan pelayanan publik yang paripurna.

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan mewujudkan kondusifitas daerah, menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menyiapkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mewujudkan pelayanan publik yang paripurna.

Dalam mewujudkan kondusifitas daerah, kondisi keamanan di NTB semakin kondusif, hal ini ditandai dengan semakin menurunnya kasus kriminalitas dari 7.015 kasus pada tahun 2020 menurun menjadi 5.635 kasus pada tahun 2021 dan 4.798 kasus pada tahun 2022, sehingga indeks kriminalitas di NTB terus turun secara signifikan dari 13,08 pada tahun 2020

menjadi 8,77 pada tahun 2022. Menurunnya indeks kriminalitas ini mengindikasikan bahwa NTB semakin kondusif dan menjadi tolok ukur keberhasilan masyarakat bersama aparat yang bergotong-royong menjaga wilayah. Adanya sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (HARKAMTIBMAS) yang mantap. Sebagai wujud keberhasilan itu, bahkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menerima Promoter Reward. Penghargaan diberikan atas peran aktif Gubernur NTB dan bersinergi dengan TNI bersama Polda NTB dalam memberikan rasa aman, yang merupakan implementasi penguatan program kapolri dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (HARKAMTIBMAS) yang mantap.

Dalam menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai, pemerintah provinsi NTB terus mendorong untuk meningkatkan kemantapan jalan terutama yang memiliki potensial terhadap sentral produksi pangan, kawasan industri smelter, kawasan menuju geopark Tambora, kawasan terisolir, potensial ketahanan pangan seperti komoditas kopi dan lain-lain serta kawasan menuju destinasi pariwisata, mewujudkan konektivitas transportasi publik, mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, membangun perumahan yang layak dan aman, menguatkan sistem irigasi yang mantap untuk meningkatkan produksi pangan, serta meningkatkan aksesibilitas terhadap air minum bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Keberhasilan dalam mewujudkan infrastruktur daerah yang memadai ditandai dengan terus meningkatnya indeks aksesibilitas di NTB sebesar 78,81 poin pada tahun 2021 meningkat menjadi 81,31 poin pada tahun 2022.

Aspek daya saing daerah yang lain adalah kualitas lingkungan hidup yang diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks kualitas lingkungan hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan suatu wilayah yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, udara, lahan dan air laut. Berdasarkan metode perhitungan yang baru dengan menambah komponen kualitas air laut, IKLH Provinsi NTB pada tahun 2021 mencapai 69,89 poin dan meningkat menjadi 70,56 poin pada tahun 2022 atau melampaui target sebesar 68,00 poin. Tingginya angka ILKH Provinsi NTB menunjukkan semakin baiknya kualitas kualitas air, udara, lahan dan air laut di Provinsi NTB.

Untuk meningkatkan daya saing daerah, juga perlu didukung oleh birokrasi lebih adaptif, cepat melayani, dan cepat mengambil keputusan dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Peningkatan kualitas birokrasi dilakukan dengan dua cara, yakni penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi

birokrasi. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya juga perlu didukung oleh peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai SDM pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di NTB terus mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai indeks reformasi birokrasi Provinsi NTB berdasarkan hasil penilaian KemenPAN RB dari 65,76 pada tahun 2021 menjadi 67,02 pada tahun 2022. Peningkatan nilai indeks ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangandari 7,08 tahun 2021 menjadi 8,09 pada tahun 2022. Adanya peningkatan kualitas pelayanan publik, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dari 7,47 poin pada tahun 2021 menjadi 8,11 poin pada tahun 2022, serta meningkatnya kinerja organisasi dari 5,12 menjadi 6,25 pada tahun 2022.

5. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum diukur dengan 91 indikator kinerja yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 32 indikator, urusan pilihan sebanyak 20 indikator, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 18 indikator. Adapun capaian indikator-indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
C	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1.01	Pendidikan				
1	Indeks Pendidikan	Point	62,74	64,14	102,24
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,73	13,96	101,68
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,04	7,61	108,10
1.02	Kesehatan				
4	Indeks Kesehatan	Point	72,43	72,42	99,99
5	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	80,00	89,13	111,41
6	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	80,91	81,83	101,14
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,08	67,07	100,00
8	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	30,99	16,84	145,66
9	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	%	100	100	100,00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
10	Persentase Kemantapan jalan	%	85,36	85,36	100,00
11	Cakupan Air Minum	%	78,45	79,11	100,84
12	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	52,17	54,50	104,47
13	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	18,18	14,54	79,98

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
14	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	65,80	62,30	94,68
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
15	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	5,72	22,53	393,88
15	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100,00	100,00	100,00
16	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	100,00	100,00
17	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	25,58	69,35	271,15
18	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,63	0,72	114,29
1.06	Sosial				
19	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	100,00	100,00	100,00
20	Persentase PMKS yang tertangani	%	5,12	25,74	502,73
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
2.01	Tenaga Kerja				
21	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,19	2,89	109,40
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
22	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	61,16	53,12	86,85
23	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90,49	90,54	100,06
24	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20,90	20,43	97,75
25	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	19,27	27,39	142,14
26	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	80,00	70,00	87,50
2.03	Pangan				
27	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86,70	93,30	107,61
2.04	Lingkungan Hidup				
28	Indeks Kualitas Air	Point	42,93	43,39	101,07
29	Indeks Kualitas Udara	Point	87,56	89,30	101,99
30	Indeks Kualitas Air Laut	Point	87,63	89,48	102,11
31	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	85,00	54,98	64,68
32	Persentase Penanganan Sampah	%	60,00	42,20	70,33
33	Persentase Pengurangan Sampah	%	25,00	12,78	51,12
2.05	Pertanahan				
34	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
35	Rasio Penduduk BerkTP Persatuan Penduduk	rasio	0,86	0,98	113,60
35	Pemberdayaan Masyarakat Desa				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
36	Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan	%	31,28	36,26	115,91
37	Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri	%	88,00	94,53	107,42
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
38	Pertumbuhan Penduduk	%	1,00	1,55	45,00
2.09	Perhubungan				
39	Persentase konektivitas transportasi publik	%	86,86	92	105,92
2.10	Komunikasi dan Informatika				
40	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kualifikasi	Transaksi	Kolaborasi	110,00
41	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	65	68,20	104,92
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
42	Persentase Koperasi Aktif	%	67,00	69,58	103,85
2.12	Penanaman Modal				
43	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	15.428	Rp 21.607	140,05
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				
44	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	40	87	217,50
45	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	21	140,00
46	Proporsi wirausaha muda	%	68,28	68,35	100,10
2.14	Statistik				
47	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	50,00	100,00	200,00
2.15	Persandian				
48	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	III	II	58,62
2.16	Kebudayaan				
49	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	28,70	33,24	115,82
2.17	Perpustakaan				
50	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	89,47	90,00	100,59
51	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	35,87	36,49	101,73
2.18	Kearsipan				
52	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	83,33	85,26	102,31
3	URUSAN PILIHAN				
3.01	Kelautan dan Perikanan				
53	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,75	4,96	104,52
54	Produksi Perikanan	Ton	1.468.104	1.201.455	81,84
55	Nilai Tukar Nelayan	%	>110	106,06	100,00
3.02	Pariwisata				
56	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	3,00	24,68	822,67
57	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	80,00	91,92	114,90
58	Rata-rata Lama Menginap	hari	3,25	2,31	71,08
59	Angka kunjungan wisatawan	orang	4.850.000	1.376.295	28,38
60	Persentase Geosites yang Tertata	%	37,50	100,00	266,67

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
61	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	129,78	282,70	217,83
3.03	Pertanian				
62	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,71	26,14	110,25
63	Nilai Tukar Petani	Point	>105	107,98	102,84
3.04	Kehutanan				
64	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	68,70	65,61	95,50
65	Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya	%	15,08	9,22	61,14
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral				
66	Rasio Elektrifikasi	%	99,88	99,98	100,10
3.06	Perdagangan				
67	Indeks Daya Beli	Point	74,68	72,15	96,61
68	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.604	10.681	92,05
3.07	Perindustrian				
69	Pertumbuhan Industri	%	7,50	7,40	98,67
70	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	173,02	87,99	50,86
71	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	3,14	3,33	106,05
3.08	Transmigrasi				
72	Cakupan Penempatan Transmigran	%	95	84,63	89,08
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	Administrasi Pemerintahan				
73	Ranking Nasional LPPD	Ranking	5	NA	
74	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	%	100,00	100,00	100,00
75	Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	%	100,00	100,00	100,00
76	Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	%	34,00	34,00	100,00
77	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	3	3,00	100,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	Perencanaan				
78	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100,00
5.02	Keuangan				
79	Opini BPK	Status	WTP	WTP	100,00
80	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Point	0,52	0,53	102,50
81	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	36,97	43,18	116,80
5.03	Kepegawaian				
82	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,70	0,64	91,29
5.04	Pendidikan dan Pelatihan				
83	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Point	0,27	0,25	92,59
5.05	Penelitian dan Pengembangan				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022		
			Target	Realisasi	% Tingkat Capaian
84	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	27,00	89,00	329,63
5.06	Penghubung				
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	Pengawasan				
86	Nilai SAKIP	Kategori	BB (76,01 - 80,00)	BB	100
7	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
7.01	Kesatuan Bangsa dan Politik				
87	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	4,67	3,63	77,73
88	Partisipasi Politik Masyarakat	%	84,57	80,00	94,60
89	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	40,00	10,00	100
90	Persentase penurunan konflik sosial	%	20,00	50,00	150
91	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,90	1,26	140,00

Sumber: BPS Provinsi NTB, OPD Penanggungjawab Indikator, 2022

Ket. NA= Not Available

Dari 91 indikator untuk mengukur aspek pelayanan umum, terdapat 65 indikator tercapai atau memenuhi target bahkan melampaui target, sedangkan 25 indikator belum memenuhi target, namun 10 indikator diantaranya dengan tingkat capaiannya sangat tinggi mencapai diatas 90%. Dan masih terdapat 1 indikator belum tersedia (Not Available) karena belum dapat dihitung atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Beberapa indikator yang tercapai yaitu Indeks Pendidikan, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Angka Harapan Hidup, Persentase Balita Stunting, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan, Persentase Kemantapan jalan, Cakupan Air Minum, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas, Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana), Indeks Kapasitas Daerah, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial, Persentase PMKS yang tertangani, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi, Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk, Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan, Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri, ersentase konektivitas transportasi publik, Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah, Persentase Perangkat Daerah yang Informatif, Persentase

Koperasi Aktif, Nilai Realisasi Investasi , Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional, Proporsi wirausaha muda, Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas, Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi, Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas), Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul), Persentase Arsip yang Terselamatkan, Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB, ilai Tukar Nelayan, Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Persentase Desa Wisata yang dikembangkan, Persentase Geosites yang Tertata, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Nilai Tukar Petani, Rasio Elektrifikasi, Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah, Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan, Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan, Opini BPK, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB), Nilai SAKIP, Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter, Persentase penurunan konflik sosial, dan Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik.

S

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam RKPD Tahun 2022 telah ditetapkan Prioritas Daerah, Program Prioritas dan Program Unggulan tetapi belum dijabarkan kedalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan. Disamping itu juga tidak tersedia target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan;
2. Laporan evaluasi RKPD Triwulan IV merupakan Laporan evaluasi pelaksanaan program prioritas berdasarkan sasaran pembangunan sampai Triwulan IV Tahun 2022. Evaluasi ini mengacu pada RKPD Tahun 2022 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022. Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2022, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 120 program pembangunan daerah dengan 281 kegiatan dan 861 sub kegiatan. Total program Perangkat Daerah sebanyak 178 dengan 557 kegiatan dan 2021 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.670.486.399.401,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.301.816.692.031,34 atau 93,49 persen.
3. Hasil capaian kinerja dan anggaran sampai Triwulan IV tahun 2022 dapat dideskripsikan bahwa dari 120 program prioritas pembangunan daerah tersebut, rata-rata capaian kinerja sebesar 97,25 persen dengan capaian keuangan sebesar 93,49 persen. Capaian ini meningkat dari capaian pada Triwulan III sebelumnya yaitu sebesar rata-rata capaian kinerja sebesar 74,09 persen dengan capaian keuangan sebesar 73,75 persen.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023, terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Sebanyak 27 indikator atau 72,97% telah sesuai bahkan melampaui target tahun 2022, sedangkan 10 indikator atau 27,03% belum mencapai target. Beberapa indikator yang sudah sesuai bahkan melampaui target diantaranya Indeks Kapasitas Daerah, Persentase Kemantapan jalan, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Persentase konektivitas transportasi publik, Opini BPK, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Nilai SAKIP, Angka Harapan Hidup, Persentase Balita Stunting, Harapan Lama Sekolah, Rata rata Lama Sekolah, Indeks Kualitas Air , Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, Nilai Realisasi Investasi, Kontribusi PDRB

sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Cakupan Air Minum, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) , Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase penurunan konflik sosial, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik , Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan.

5. Indikator Kinerja Daerah (IKD) juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD. Terdapat 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2022, dimana sebanyak 69 indikator atau 66,99 persen sudah sesuai target bahkan melampaui, 33 indikator atau 32,04 persen belum memenuhi target dan masih terdapat 1 indikator atau 0,97 persen belum tersedia (Not Available/NA) karena belum dapat dihitung dan atau menunggu Rilis Resmi dari lembaga terkait.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi umum yang diberikan terhadap hasil evaluasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Perlu dijabarkan program Prioritas dan Program Unggulan kedalam kegiatan dan sub kegiatan prioritas serta kegiatan dan sub kegiatan unggulan serta menetapkan besaran target yang akan dicapai pada setiap prioritas daerah serta program prioritas dan program unggulan. Penjabaran ini perlu dilakukan pada saat dilakukan perubahan RKPD Tahun 2022;
2. Perlu dilakukan pemetaan program prioritas dan program unggulan dengan program perangkat daerah untuk memudahkan dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program prioritas dan program unggulan, karena program prioritas dan program unggulan secara nomenklatur berbeda dengan program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
3. Perlu dilakukan penyesuaian indikator dan target baik indikator dan target di Program maupun indikator kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
4. Perlu peningkatan Konsolidasi internal dan koordinasi antar stakeholders agar capaian kinerja dapat terus ditingkatkan, karena beberapa indikator tidak hanya dapat dicapai dengan dukungan APBD Provinsi;

5. Terhadap target-target yang belum tercapai agar dilakukan pengawalan dan memfokuskan penganggaran sehingga pencapaian target kinerja di tahun depan dapat diakselerasi;
6. Perlu mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan secara lebih intensif dan berkala sehingga dapat mengefektifkan pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditargetkan.

CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah														
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana		Indeks Risiko Bencana	Point	128,05										
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana		Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,65		0,63		0,63	4.723.854.000	0,72	4.485.302.978	114,29	94,95	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase terbentuknya DESTANA & SMAB	%	40,09	14.445.499.395	32,78	4.749.579.691,40	32,78	3.912.254.000	34,67	3.779.979.228	105,8	96,62	Pelaksana BPBD
		Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	92,50		67,43		67,43		-				
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Dokumen Perencanaan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang ditanggulangi	Dokumen	420	3.524.792.112	38	1.267.338.022,70	38	431.764.500	100	424.342.211	263,16	98,28	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Dokumen Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Fasilitas DESTANA & SMAB	Dokumen	30	853.307.397	2	710.561.912,90	2	347.897.700	1	347.035.992	50,00	99,75	
	Penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah Dokumen Jitupasna yang disusun	Dokumen	4	354.723.830	30	282.852.955,80	30	32.082.000	0	31.404.200	-	97,89	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen Renkon penanggulangan bencana yang disusun	Dokumen	5	319.414.293	2	273.923.154,00	2	51.784.800	1	45.902.019	50,00	88,64	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Kejadian Bencana Yang Tertangani	%	100	4.179.305.283	100	3.380.796.372,70	100	3.480.489.500	100	3.355.637.017	100,00	96,41	
	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Persentase Penanganan Darurat Bencana	%	100	124.207.684	100	85.105.121,80	90	774.625.400	16	752.703.330	17,78	97,17	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	1.586.446.729	100	1.339.484.083,60	80	1.857.810.200	50	1.807.724.450	62,50	97,30	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pendistribusian Logistik	%	100	2.468.650.870	25	1.956.207.167,30	25	848.053.900	12	795.209.237	48,00	93,77	
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dapat dikelola	%	100	129.970.171		101.445.296,00		-		-			
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah kerjasama yang dikelola	Kegiatan	2	70.000.000	-	50.000.000,00	0	-	0	-			
	Pengelolaan, Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan yang dikelola	Aplikasi	1	59.970.171	-	51.445.296,00	0	-	0	-			
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	7.543.347.993	100	1.120.350.000	100	811.600.000	53,05	705.323.750	53,05	86,91	Dinas Sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi														
	Penyediaan Permakanan	Jumlah korban bencana alam yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan	Jiwa			16000		16000	811.600.000	0	705.323.750	-	86,91	
	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang	KK			4000		4000	-	0	-	-		
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah korban bencana yang tertampung di tempat pengungsian	Jiwa			600		600	90.000.000	600	82.334.250	100,00	91,48	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang tertangani secara khusus	Jiwa			30900		30900	317.000.000	16129	242.399.500	52,20	76,47	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah LDP (Layanan Dukungan Psikososial) yang tingkatkan	Jiwa			900		900	404.600.000	460	380.590.000	51,11	94,07	
												63,57	92,98	
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan		Indeks Aksesibilitas	Point	76,02										
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar		Persentase Kemantapan jalan	%	86,60		85,36		85,36	259.149.407.251	85,36	167.786.454.459	100,00	64,75	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Jalan Mantap	%	86,60	931.804.007.968	85,36	424.968.754.650	85,36	259.149.407.251	85,36	167.786.454.459	100	64,75	Dinas PUPR

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Penyelenggaraan Jalan Provinsi		Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara	km			541	259.149.407.251	540,56	259.149.407.251		137.291.093.121	-	52,98	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan yang tersusun	kegiatan Lokasi km unit			2 ; 12 ; 20 ; 6	151.046.800	49	3.942.161	47,7	3.437.505	97,35	87,20	
	Pengelolaan Leger Jalan	Panjang leger jalan provinsi yang dikelola	km			0	-	0	-	0	-			
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survey kondisi jalan / jembatan yang dilaksanakan	km unit			1484,43 ; 784	384.248.800	1484,43 ; 784	349.993.60	1484,43 ; 784	171,87	100	49,11	
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan	km			541	181.235.297.072	541	416428260,6	540,56	332874578	100	79,94	
	Pelebaran Jalan Menambah Lajur						20.984.253.000		20984253	0	20850365		99,36	
	Rekonstruksi Jalan						6.567.500.000		6567500	0	6566096		99,98	
	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	km			0	4.423.955.454	0	5173955,45	0	4423954		85,50	
	Penggantian Jembatan						20.577.067.000		20977067	0	18805866		89,65	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	Km			1484,43 ; 784	-	148443 ; 784	-	48443 ; 784	-			
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan provinsi yang dipelihara secara rutin	Km			79	24.372.659.607	79	22541673,51	79,3333	21863309	100	96,99	
	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi	m			70	403.631.318	70	11250349,5	70	-	100		
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	m				-	-	-	0	-			
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen evaluasi penyelenggaraan jalan/dan jembatan	Dok			2	49.748.200	2	27075,9	2	20003	100	73,88	
												87,22	79,94	
Sasaran 1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur layanan dasar		Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	54,50		52,17		52,17	109.692.517	54,50	78.361.475	104,47	71,44	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Cakupan Pelayanan Areal Irigasi	%	76,28	342.401.082.017	75,37	78.749.039.047	77	109.692.517	77,6	78.361.475	100,8	71,44	Dinas PUPR
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan SDA pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Unit			10	80.464.436.834	10	58.596.604	10	44.943.619	100,00	76,70	
	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang tersusun	Dok			1	-	1	-	1	-	100,00		
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampungan Air Lainnya							-		0				
	Pembangunan sumur air tanah untuk air baku	Jumlah Sumur Air Tanah yang dibangun	Lokasi			10	9.516.618.364	10	5.565.649	10	5.547.260	100,00	99,67	
	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang di rehab	Buah			10	19.703.986.972	10	15.809.862	10	14.944.221	100,00	94,52	
	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Peralatan hidrologi dan kualitas air yang dikelola dan disediakan	Set			3	73.808.280	3	276.809	3	46.415	100,00	16,77	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Orang			100	630.550.900	100	609.551	100	557.725	100,00	91,50	
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	Lokasi			10	7.472.447.793	10	5.689.748	10	5.567.207	100,00	97,85	
	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang dipelihara	Buah			200	34.409.024.525	200	27.290.735	200	14.930.838	100,00	54,71	
	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Tanggul dan Tebing sungai yang dibangun dan dipelihara	Lokasi			95	8.658.000.000	95	3.354.250	95	3.349.953	100,00	99,87	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Luas areal layanan irigasi fungsional kewenangan provinsi yang dikelola	Ha			1006	53.006.012.516	1006,11	51.095.913	1006,11	33.417.856	100,00	65,40	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen rencana teknis dan lingkungan hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun	Dok			5	622.926.000	5	882.935	5	83.752	100,00	9,49	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang ditingkatkan	DI			7	15.500.206.200	7	14.902.856	7	14.683.971	100,00	98,53	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang direhab	DI			1	36.572.570.316	1	35.214.312	1	17.803.832	100,00	50,56	
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	Ha			1000		1000		1000		100,00		
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya O dan P Jaringan Irigasi Permukaan	DI			7	231.510.000	7		7		100,00		
	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang dipelihara	Ha			0	-	0	-	0	-			
	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang beroperasi	DI			19	78.800.000	19	95.810	19	92.533	100,00	96,58	
												100,05	73,11	
Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah		Persentase konektivitas transportasi publik	%	89,14		86,86		86,86	7.643.416.818	92,00	7.578.021.830	105,92	99,14	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	81.63	14.665.159.820	80.40	8.041.109.500	80,4	7.322.641.097	0,15011	7.261.841.175	0,19	99,17	Dinas Perhubungan
		Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	100		98.59		98.59		97,5		98,89		
		Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	40		35		35		0		-		
		Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	52.58		49.39		49.39		48,84		98,89		
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Trayek tersedianya angkutan subsidi	Trayek	8		5	Rp 233.799.800	2	216.210.910	2	199.636.110	25,00	92,33	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Trayek tersedianya angkutan subsidi	Trayek	8		2	Rp 207.680.800	2	207.370.880	2	195.256.110	25,00	94,16	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Kab/ Kota terkendalinya angkutan umum Disabilitas	Kab/ Kota	10		2	Rp 26.119.000	2	8.840.030	2	4.380.000	20,00	49,55	
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Unit	542		350	Rp 170.534.780	195	171.091.607	195	162.336.595	20,00	94,88	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	Unit	542		350	Rp 170.534.780	195	171.091.607	195	162.336.595	20,00	94,88	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen evaluasi Angkutan Umum Orang	Dokumen											
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Unit Kendaraan	881		156	Rp 40.663.900	3	171.091.607	3	162.336.595	100,00	94,88	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	Dokumen	881		156	Rp 40.663.900	3	171.091.607	3	162.336.595	100,00	94,88	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		Jumlah penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jenis	3		1	Rp 6.861.000.000	1	5.304.000.000	1	5.294.906.660	100,00	99,83	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Fasilitas yang terpasang	Jenis	2		1	Rp 6.861.000.000	1	5.304.000.000	1	5.294.906.660	100,00	99,83	
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		Jumlah Fasilitas yang terpasang	Dokumen	19		5	Rp 695.852.000	5	704.900.000	3	703.215.000	60,00	99,76	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Dokumen Fasilitas Terminal	Dokumen	3		0	Rp 43.666.000	0	36.600.000	0	35.612.000		97,30	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Dokumen	12		3	Rp 652.186.000	3	525.800.000	3	525.800.000	100,00	100,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas terminal type B yang terpelihara	Paket	3		0		0	142.500.000	0	141.803.000		99,51	
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		Jumlah Dokumen manajemen rekayasa Lalu lintas dan pelanggaran angkutan	Dokumen	60		20	Rp 791.834.300	20	803.335.017	2	782.127.586	10,00	97,36	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen MRL dan DRK	Dokumen	56		18	Rp 309.080.100	18	248.372.122	2	230.137.915	11,11	92,66	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas kebijakan jalan provinsi	Jumlah Dokumen kasus pelanggaran angkutan umum berkurang	Dokumen	4		2	Rp 482.754.200	2	554.962.895		551.989.671	-	99,46	
Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	Unit	90		66	Rp 149.151.950	66	112.101.908	64	108.817.790	96,97	97,07	
		Jumlah UPUBKB yang terbina	Unit	9		9		9		1				
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit Pelaksana Penguji Kendaraan Bermotor Yang Dibina	Unit	9		6	Rp 46.400.950	6	13.101.908	1	11.827.790	16,67	90,28	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah kendaraan Angkutan Umum yang laik jalan	Unit Kendaraan	90		66	Rp 102.751.000	66	99.000.000	64	96.990.000	96,97	97,97	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	66,06	2.260.753.150	61,61	764.484.200	61,61	320.775.721		316.180.655		98,57	Dinas Perhubungan
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Fasilitas Perizinan Angkutan Laut	Dokumen	40		35	Rp 16.812.000	1	15.001.812	1	14.931.812	100,00	99,53	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitas Perizinan Angkutan Laut	Dokumen	40		35	Rp 16.812.000	1	15.001.812	1	14.931.812	100,00	99,53	
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional		Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	Unit	25		21	Rp 21.825.100	8	19.001.825	8	18.110.555	100,00	95,31	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	Unit	25		21	Rp 21.825.100	8	19.001.825	8	18.110.555	100,00	95,31	
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi	Dokumen	122		110	Rp 38.268.700	50	35.796.260	50	35.455.360	100,00	99,05	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Dokumen Badan usaha dipelabuhan yang diawasi	Dokumen	122		110	Rp 38.268.700	50	35.796.260	50	35.455.360	100,00	99,05	
Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional		Jumlah data pelabuhan	Dokumen	3		1	Rp 109.934.000		102.802.738		102.217.311		99,43	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah data pelabuhan	Dokumen	3		1	Rp 109.934.000		102.802.738		102.217.311		99,43	
Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit	22		22	Rp 149.457.900	22	148173086	26	145465617	118,18	98,17	
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	Unit	22		22	Rp 149.457.900	22	148173086	26	145465617	118,18	98,17	
												66,76	95,72	
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi														
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Point	8										
Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Opini BPK	Status	WTP		WTP		WTP	930.634.586.693.800	WTP	876.243.178.766	100,00	94,16	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	2.275.817.467.798,74	100	739.588.857.260	100	926.388.054.175	100	873.138.306.028	100,00	94,25	BPKAD
		Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100		100	1.092.593.901	100		100		100,00		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang Tersusun	Dokumen			6	2.294.621.000	6	2.775.271.953	6	2.676.477.422	100,00	96,44	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Tersusun	Dokumen			1	77.086.000	1	96.081.000	1	94.812.000	100,00	98,68	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang Tersusun	Dokumen			1	92.534.000	1	87.045.000	1	87.034.000	100,00	99,99	
	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang di Verifikasi	Dokumen			136	26.305.000	136	48.740.962	136	47.013.962	100,00	96,46	
	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang di Verifikasi	Dokumen			136	40.332.900	136	37.264.564	136	37.069.564	100,00	99,48	
	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun dan diverifikasi	Dokumen			268	20.429.800	268	19.880.350	268	19.880.350	100,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun dan diverifikasi	Dokumen			136	18.412.800	136	17.588.625	136	17.588.625	100,00	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub tentang Penjabaran APBD	Dokumen			2	488.617.400	2	836.383.305	2	813.501.604	100,00	97,26	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub tentang Perubahan Penjabaran APBD	Dokumen			2	621.477.000	2	749.440.595	2	747.542.595	100,00	99,75	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi Bidang Anggaran yang Tersusun	Regulasi			1	795.453.000	1	793.284.500	1	736.011.700	100,00	92,78	
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Rapat Terselenggara	Kegiatan			2	113.973.100	2	89.563.052	2	76.023.022	100,00	84,88	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Evaluasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten /Kota	Dokumen			31	575.036.500	31	575.036.500	15	110.034.700	48,39	19,14	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	Dokumen			10	104.518.200	10	104.518.200,00	10	144.906.200	100,00	138,64	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Perubahan APBD Kab/Kota	Dokumen			10	116.259.100	10	116.259.100,00	10	156.983.500	100,00	135,03	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Dokumen			10	117.540.600	10	117.540.600,00	10	117.280.600	100,00	99,78	
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil asistensi	Dokumen			10	65.514.100	10	65.514.100,00	10	65.414.100	100,00	99,85	
	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Regulasi Keuangan yang terlaksana	Kali			1	78.282.400	1	78.282.400,00	1	76.474.180	100,00	97,69	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di	Kali			11	92.922.100	11	92.922.100	11	111.882.100	100,00	120,40	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			Dokumen	12		12	791.568.500	12	806.666.400,00	12	885.916.000	100,00	109,82	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Persen	85		85	528.639.200	85	528.639.200,00	85	589.430.000	100,00	111,50	
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Dokumen	1		1	556.200	1	556.200,00	1	461.400	100,00	82,96	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Dokumen	3.000		3000	70.504.500	3000	70.504.500,00	3000	69.986.500	100,00	99,27	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Dokumen	136		136	123.990.100	9	123.990.100,00	9	123.255.100	100,00	99,41	
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		Dokumen	11		11	2.000.000	11	2.000.000,00	11	1.989.000	100,00	99,45	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		kali	10		10	35.298.000	10	35.298.000,00	10	65.223.000	100,00	184,78	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Dokumen	132		132	17.041.100	2	2.000.000,00	2	16.996.600	100,00	849,83	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas		Dokumen	3		3	5.159.000	3	35.298.000,00	3	10.474.000	100,00	29,67	
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SPD dengan Instansi Terkait		Dokumen	3		3	765.000	3	765.000,00	3	765.000	100,00	100,00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Dokumen	1		1	7.615.400	1	7.615.400,00	1	7.335.400	100,00	96,32	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersusun tepat	Dokumen	12	2.688.788.091,44	4	568.218.340,00	4	568.218.340,00	4	597.579.826	100,00	105,17	
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Dokumen	6	338.652.174,39	2	-	2	-	2	-			
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen BA Rekonsiliasi	Dokumen	3	443.109.267,18	1	82.969.200,00	1	82.969.200,00	1	79.960.906	100,00	96,37	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, Semesteran	Dokumen	51	165.414.695,44	17	17.707.600,00	17	17.707.600,00	17	17.617.600	100,00	99,49	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di Konsolidasikan	Dokumen	408	631.787.149,54	136	199.800.400,00	136	199.800.400,00	136	258.174.400	100,00	129,22	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Dokumen	6	632.972.041,50	2	151.395.800,00	2	151.395.800,00	2	149.969.620	100,00	99,06	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	Dokumen	3	74.315.643,52	1	-	1	-	1	-	100,00		
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Regulasi terkait Juknit Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	3	119.114.609,72	1	60.760.700,00	1	60.760.700,00	1	5.774.600	100,00	9,50	
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pengeluaran Pembiayaan	Dokumen	3	76.772.805,73	1	21.070.240,00	1	21.070.240,00	1	5.774.600	100,00	27,41	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang		60	110.161.986,31	20	34.514.400,00	20	34.514.400,00	20	33.375.600	100,00	96,70	
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah Peserta Pembinaan daeri BLUD Provinsi		60	96.487.718,11	20	-	20	-	20	-	100,00		
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Laporan Dana Bagi Hasil dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi	Dokumen	12	2.384.549.488.691,74	4	908.663.844.904,00	4	908.663.844.904	4	894.935.675.745	100,00	98,49	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	dokumen	3	1.146.123.723,21	1	5.705.587.500,00	1	5.705.587.500	1	5.150.353.000	100,00	90,27	
	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah dokumen laporan penggunaan dana darurat dan mendesak	dokumen	3	32.006.806.247,35	1	4.855.500.000,00	1	4.855.500.000	1	466.511.668	100,00	9,61	
	Analisis Perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	dokumen	3	122.290.612.947,00	1	848.884.894.540,00	1	848.884.894.540	1	853.165.811.077	100,00	100,50	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	dokumen	3	2.229.105.945.774,18	1	49.217.862.864,00	1	49.217.862.864	1	36.153.000.000	100,00	73,46	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan yang tersusun	Dokumen	6	822.946.519,38	2	820.514.200,00	2	820.514.200	2	513.852.700	100,00	62,63	
	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	6	183.906.307,48	2	95.797.900,00	2	95.797.900,00	2	244.946.800	100,00	255,69	
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah pemeliharaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah	Kali	6	364.738.681,68	2	125.984.000,00	2	125.984.000,00	2	61.000.000	100,00	48,42	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah pembinaan SIPD Bidang Keuangan Daerah yang dilaksanakan	kali	12	274.301.530,22	5	598.732.300,00	5	598.732.300,00	6	207.905.900	120,00	34,72	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	75	5.688.570.834	70	1.849.401.028	70	2.130.621.400	40	1.017.548.960	57,14	47,76	BPKAD
Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD Perangkat yang tersusun	laporan	93	5.688.699.828,22	31	2.130.621.400	31	2.130.621.400	31	2.226.260.863	100,00	104,49	
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga	Dokumen	3	105.286.389,15	1	115.540.900	1	115.540.900	1	61.935.000	100,00	53,60	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	6	118.041.101,44	2	15.988.800	2	15.988.800	2	21.980.000	100,00	137,47	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	3	344.962.956,37	1	55.712.600	1	55.712.600	1	60.224.000	100,00	108,10	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	9	77.011.576,51	1	8.375.000	1	8.375.000	1	5.670.900	100,00	67,71	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan BMD	Dokumen	90	1.562.140.189,11	160	382.285.000	160	382.285.000	16	431.124.200	10,00	112,78	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Inventarisasi yang dilaksanakan	kegiatan	36	171.335.634,52	12	166.091.000	12	166.091.000	12	19.986.395	100,00	12,03	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah penanganan sengketa aset daerah	Kegiatan	15	1.192.234.207,54	5	734.785.000	5	734.785.000	2	952.524.866	40,00	129,63	
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen	15	156.017.177,05	1	106.249.000	1	106.249.000	5	23.159.000	500,00	21,80	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Status Aset	laporan	3	162.195.457,67	1	31.035.000	1	31.035.000	1	35.653.735	100,00	114,88	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK Penetapan Penggunaan BMD, dan Penghapusan BMD,	surat keputusan, dokumen	30	206.251.859,47	10	105.616.500	10	105.616.500	10	107.850.367	100,00	102,12	
		Jumlah Persetujuan Gubernur Pemindahtanganan	Dokumen	36		12		12		12		100,00		
		Jumlah SK Penghapusan BMD	Dokumen	36		12		12		14		116,67		
		Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan secara optimal	Dokumen	1449	975.587.938,78	474	306.824.000,00	474	306.824.000,00	474	333.967.400	100,00	108,85	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi		396	312.796.116,54	132	76.923.000	132	76.923.000	132	112.295.000	100,00	145,98	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		144	237.058.410,47	48	19.075.000	48	19.075.000	48	55.795.000	100,00	292,50	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan ke Kabupaten/Kota		30	67.780.813,60	10	6.120.600	10	6.120.600	6	4.095.000	60,00	66,91	
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	90	3.807.331.659	85	1.281.660.820	85	2.044.806.119	84	2.016.688.778	98,82	98,62	INSPEKTORAT
		Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	48,89		44,44	2.517.297.403	44,44						
Penyelenggaraan Pengawasan Internal				148	2.399.067.769	72	2.497.495.000	16	949.964.300	17	927.812.540	106,25	97,67	
	a. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Melakukan Audit Kinerja, Prohibity Audit, Monev Dana Desa dan BOS Pendidikan Menengah, serta Pemantauan Bansos/ Hibah)			88	1.500.347.625			9	827.604.800	10	808.870.940	111,11	97,74	
	b. Reviu Laporan Keuangan (Melakukan Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ serta Reviu HPS)			6	157.566.277	36	1.354.202.500	6	55.619.500	6	53.241.600	100,00	95,72	
	c. Kerjasama Pengawasan Internal (Joint Audit)			13	539.076.821			1	65.870.000	1	64.890.000	100,00	98,51	
	d. Pengawasan Kab/Kota (Melakukan Pengawasan Kab/ Kota dan Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan KDH)			1	202.077.047	16	486.659.500	0	870.000	0	810.000		93,10	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				17	432.386.126	25	1.254.980.200	10	188.528.000	10	187.238.130	100,00	99,32	
	Pengawasan Dengan Tujuan tertentu (Pemeriksaan Tujuan Tertentu/Khusus, Audit Investigasi, Audit PKN, dan Audit Dana BOS Pendidikan Menengah)			17	432.386.126	4	750.638.200	10	188.528.000	10	187.238.130	100,00	99,32	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Terintegrasi	%	70	225.468.766	6,55	472.000.744	65	71.105.000	108,33	70.635.000	166,66	99,34	INSPEKTORAT
Kegiatan 1 : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				10	225.468.766	16	419.823.000	10	71.105.000	36	70.635.000	360,00	99,34	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			10	225.468.766	3	Rp 37.333.000	10	71.105.000	36	70.635.000	360,00	99,34	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			100	22.185.177.455	13	419.823.000	95	20.141.131.359	100	19.297.893.116	105,26	95,81	
Kegiatan 2 : Pendampingan dan Asistensi				33	5.541.790.927	11	1.805.509.500	16	948.892.005	6	946.765.783	37,50	99,78	
	Sub Kegiatan : Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah							8	490.000.585	2	489.406.915	25,00	99,88	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								47.200.835		47.080.000		99,74	
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			33	5.541.790.927	11	Rp 1.805.509.500	8	386.690.000	4	385.438.700	50,00	99,68	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								25.000.585		24.840.168		99,36	
												105,70	105,95	
Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	38,65		36,97	106.029.503.746	36,97	11.991.160.000	43,18	11.308.180.000	116,80	94,30	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Derajat Desentralisasi Fiskal	%	38,44	1.667.730.000	36,76	554.780.000	39,34	428.810.000	43,18	312.530.000	109,76	72,88	Bappenda
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Daerah	%			1,35	80.925.000	7,63	91.960.000	2,95	87.860.000	38,66	95,54	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Target Pendapatan Daerah (Dokumen)	Dokumen			2.571,64	80.925.000	2	91.960.000	2	87.860.000	100,00	95,54	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	Persen			52,22	428.847.700	59,7	336.850.000	64,09	224.680.000	107,35	66,70	
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Penerimaan Dana Perimbangan	Milyar Rp			2.819,43	428.847.700	3356,63	336.850.000	3343,95	224.680.000	99,62	66,70	
		Jumlah Penerimaan dana Transfer Lainnya	Milyar Rp			8,01		125,05	-	94,52	0	75,59		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	54,03	46.183.810.000	52,03	15.363.280.000	55	11.562.350.000	50,56	10.995.650.000	91,93	95,10	Bappenda
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%			31,66	11.372.169.560	14,1	11.562.350.000	4,02	10.995.650.000	28,51	95,10	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Target pendapatan pajak daerah yang ditetapkan	Milyar Rp			1.726,24	1.480.070.000	1601,35	414.000.000	1418,22	404.010.000	88,56	97,59	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Perjanjian Kerjasama (PKS) pengembangan layanan kesamsatan yang ditindaklanjuti	MoU			5	810.844.100	5	886.120.000	5	850.550.000	100,00	95,99	
		Rancangan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Lainnya	Draft			63,64	276.330.000	13		13		100,00		
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perorangan dan badan	Persen			98,75	428.154.560	61,33	287.350.000	54,21	277.590.000	88,39	96,60	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tingkat gangguan perangkat keras dan sistem jaringan komunikasi yang direduksi	Persen			914.382	204.964.000	1,20	549.160.000	0,66	524.640.000	55,00	95,53	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data Obyek Pajak Daerah (DU & TMDU PKB) yang menyelesaikan kewajiban pajaknya	Obyek			1.700.000	159.255.000	1008427	192.580.000	891425	177.820.000	88,40	92,34	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah record data yang disinkronkan dalam database	Obyek			98.581	1.113.057.000	1600000	159.260.000	983105	152.090.000	61,44	95,50	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor	Obyek			64,20	370.014.000	121924	1.344.920.000	91703	1.275.250.000	75,21	94,82	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Angka partisipasi Wajib Pajak yang menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan bermotornya	Persen			178.229	21.450.000	20,89	436.510.000	14,95	417.570.000	71,57	95,66	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Dokumen)	Dokumen			1.650	555.939.000	10		7		70,00		
		Jumlah WP Penunggak Pajak yang menyelesaikan kewajiban pajaknya	Obyek			1.650	555.939.000	255379	21.450.000	26885	16.190.000	10,53	75,48	
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah WP penerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2T) yang menyelesaikan kewajiban PKBnya	Obyek			64.200		179357	733.050.000	19058	725.620.000	10,63	98,99	
		Jumlah WP penerima Surat Teguran PKB dan Penagihan Pajak Daerah yang melunasi tunggakan PKBnya	Obyek			3	22.955.000	76022		7827		10,30		
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah kasus keberatan pajak daerah yang ditindak lanjuti	Kasus			27.169	5.746.044.000	3	2.960.000	0		-		
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	WP Terjaring Operasi Sadar PKB yang menyelesaikan kewajiban/ tunggakan PKBnya	Obyek			490,10	183.092.900	27169	6.327.150.000	13954	5.974.350.000	51,36	94,42	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah penerimaan Dana Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, dan penerimaan Pendapatan Lain-lain	Milyar Rp					664,49	207.840.000	484,1	199.960.000	72,85	96,21	
												66,90	90,03	
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP	Kategori	A (80,01 - 90,00)		BB (76,01 - 80,00)		BB (76,01 - 80,00)	13.713.169.450	BB	12.233.793.575	100,00	89,21	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	14.444.339.884	100	4.779.893.285	100	1.988.664.600	100	1.876.712.758	100	94,37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Jumlah dokumen perencanaan & pendanaan pembangunan daerah	Dokumen			10	2.884.502.945	14	1.425.343.000	14	1.404.339.951	100,00	98,53	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	dokumen			3	169.232.066	3	70.096.800	3	58.981.200	100,00	84,14	
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	dokumen			2	1.317.960.224	2	230.590.050	2	227.667.690	100,00	98,73	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara			1	77.242.013	1	14.530.000	1	14.330.000	100,00	98,62	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara			1	169.355.018	1	120.200.250	1	119.800.250	100,00	99,67	
	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang	Berita Acara			1	699.279.911	1	772.707.600	1	772.287.240	100,00	99,95	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen			2	451.433.713	4	217.218.300	4	211.273.571	100,00	97,26	
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Analisis Hasil Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen			5	998.464.752	8	335.120.800	8	279.823.200	100,00	83,50	
	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dok			3	476.419.653	4	95.890.000	4	73.103.300	100,00	76,24	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Dok			50	215.794.185	3	79.730.900	3	71.980.000	100,00	90,28	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	laporan			400	306.250.915	1	159.499.900	1	134.739.900	100,00	84,48	
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen			19	896.925.588	21	228.200.800	21	192.549.607	100,00	84,38	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan			2	241.451.953	2	43.700.000	2	31.397.800	100,00	71,85	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	kerja sama			1	90.322.917	1	16.600.200	1	8.190.200	100,00	49,34	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan			14	361.924.493	14	133.860.400	14	127.091.947	100,00	94,94	
	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	dokumen			2	203.226.225	4	34.040.200	4	25.869.660	100,00	76,00	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	37.833.084.161	100	12.519.651.738	100	9.170.095.300	100	8.319.899.545	100,00	90,73	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	dokumen			3	2.063.190.506	2	1.514.466.500	2	1.487.208.009	100,00	98,20	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			2	73.069.546	2	31.791.000	2	31.608.224	100,00	99,43	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan			2	23.941.783	2	9.310.800	2	9.274.800	100,00	99,61	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan			2	68.475.949	2	77.567.200	2	77.329.988	100,00	99,69	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	laporan			1	27.198.488	1	15.058.500	1	14.857.600	100,00	98,67	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			4	1.274.821.603	2	956.536.000	2	943.818.200	100,00	98,67	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	laporan			4	93.810.059	2	16.510.300	2	16.502.300	100,00	99,95	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	laporan			4	267.553.980	2	142.662.900	2	142.632.297	100,00	99,98	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	dokumen			2	234.319.098	2	265.029.800	2	251.184.600	100,00	94,78	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	dokumen			3	6.569.718.285	2	5.967.707.432	2	5.645.719.141	100,00	94,60	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			5	505.176.335	3	47.564.000	3	45.530.160	100,00	95,72	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	laporan			4	246.613.673	2	43.203.900	2	39.936.900	100,00	92,44	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	laporan			4	371.576.174	2	296.656.716	2	288.876.430	100,00	97,38	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	laporan			3	1.113.909.855	3	1.050.584.516		896.529.764	-	85,34	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			2	494.348.615	2	106.075.300	1	85.861.884	50,00	80,94	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laporan			2	141.129.558	2	23.200.000	1	6.670.000	50,00	28,75	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	laporan			2	1.129.036.463	2	1.369.644.400	1	1.293.210.858	50,00	94,42	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	laporan			2	2.567.927.612	2	3.030.778.600		2.989.103.145	-	98,62	
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	dokumen			3	3.886.742.947	2	1.687.921.368	2	1.186.972.395	100,00	70,32	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			4	1.663.810.023	2	426.802.258	2	386.706.807	100,00	90,61	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	laporan			4	285.548.568	2	30.560.400	2	9.000.000	100,00	29,45	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	laporan			4	359.838.933	2	168.320.400	2	164.333.084	100,00	97,63	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	laporan			2	331.613.021	2	11.600.750	2	-	100,00	-	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen			2	462.713.352	2	489.710.460	2	324.345.493	100,00	66,23	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	laporan			2	231.102.586	2	24.263.100	2	9.680.000	100,00	39,90	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	laporan			2	242.439.580	2	125.463.700	2	96.425.611	100,00	76,86	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah	laporan			1	309.676.884	1	411.200.300	1	196.481.400	100,00	47,78	
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN		Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya	%	100	333.276.875	91,11	981.904.708	94,44	145.471.000	100	140.770.000	106	96,77	INSPEKTORAT
		Indikator Program 2 : Persentase Kehandalan IKK Perangkat Daerah Dalam LPPD		100	210.041.440			100	25.000.000	100	24.840.000	100	99,36	
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal				70	543.318.315	90	956.954.500	51	170.471.000	41	165.610.000	80,39	97,15	
	a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Melakukan Evaluasi SAKIP PD)			52	173.049.767	62	176.281.000	46	45.000.000	36	44.550.000	78,26	99,00	
	b. Reviu Laporan Kinerja (Melakukan Review LkjiP Pemda, Review Renja Provinsi, Review RKPD, revoew Renstra, dan Review LPPD)			8	333.841.504	8	295.771.500	5	125.471.000	5	121.060.000	100,00	96,48	
	Sub Kegiatan 3 : Pengawasan Umum dan teknis Kabupaten/Kota			70	Rp 1.514.577.648	20	Rp 484.902.000	0		0	Rp -			
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	70	95.465.459	22,22	851.362.983	50	25.585.000	50	25.007.500	100	97,74	INSPEKTORAT
Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi				39	287.873.947	121	888.225.400	38	108.620.000	38	106.917.500	100,00	98,43	
	Sub Kegiatan 1 : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah			36	67.898.467	118	Rp 553.621.700	36	35.000.000	36	34.830.000	100,00	99,51	
	Sub Kegiatan 2 : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi			2	124.510.021	1	Rp 109.362.000	1	48.035.000	1	47.080.000	100,00	98,01	
	Sub Kegiatan 3 : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas			1	95.465.459	2	225.241.700	1	25.585.000	1	25.007.500	100,00	97,74	
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkatkan	%	100	3.842.393.557		1.282.219.090	100	1.565.674.550	100	1.055.858.833	100	67,44	Biro Organisasi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	9.485.045.504	100	3.165.190.197	100	817.679.000	100	815.544.939	100	99,74	Biro Pemerintahan
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas pemerintahan	dok	9	2.778.249.878			3	112.733.900	3	112.368.900	100,00	99,68	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	dok	3	794.553.356			1	24.900.000	1	24.895.000	100,00	99,98	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	dok	3	720.804.546			1	61.304.700	1	60.964.700	100,00	99,45	
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	dok	3	1.262.891.976			1	26.529.200	1	26.509.200	100,00	99,92	
Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah		jumlah dokumen laporan pelaksanaan otonomi daerah	dok	12	4.928.610.306			4	349.022.800	4	347.439.098	100,00	99,55	
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	dok	3	1.933.929.071			1	58.100.000	1	58.087.998	100,00	99,98	
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	dok	3	652.721.357			1	40.313.000	1	40.253.000	100,00	99,85	
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	dok	6	2.341.959.878			2	250.609.800	2	249.098.100	100,00	99,40	
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah		jumlah dokumen laporan fasilitasi kerjasama daerah	dok	3	1.778.175.320			1	355.922.300	1	355.736.941	100,00	99,95	
	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	kerjasama	40	763.762.649			10	297.584.100	15	297.583.571	150,00	100,00	
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	kerjasama	40	473.361.562			10	31.494.300	15	31.313.800	150,00	99,43	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	kerjasama	40	541.051.109			10	26.843.900	15	26.839.570	150,00	99,98	
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN		Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,72		0,70		0,70	5.230.354.360	0,72	4.773.076.545	91,29	91,26	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Nilai Penerapan Sistem Merit	point	373	7.425.595.246	347,5	7.150.000.000	347,5	1.385.355.900	287	573.866.770	82,59	41,42	BKD
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informasi	point	102	2.947.141.919,00	115	714.157.100,00	115	714.157.100,00	93,5	713.408.370,00	81,30	99,90	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS/P3K terseleksi	orang	1200	1.904.365.497,00	400	471.510.100,00	400	471.510.100,00	2557	471.311.370,00	639,25	99,96	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT	SK	735	264.809.478,00	245	24.450.000,00	245	24.450.000,00	509	24.450.000,00	207,76	100,00	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan Fasilitasi KORPRI	Kegiatan	12	-	4	103.002.000,00	4	103.002.000,00	4	102.612.000,00	100,00	99,62	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang tersedia didalam SIMPEG/SIMADU	Pgawai	14143	777.966.944,00	14143	115.195.000,00	14143	115.195.000,00	15632	115.035.000,00	110,53	99,86	
Mutasi dan Promosi ASN		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	Point	32,5	3.492.141.693,00	31,5	540.015.000,00	31,5	540.015.000,00	22,5	538.528.250,00	71,43	99,72	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT	SK	690	365.757.994,00	230	37.535.000,00	230	37.535.000,00	525	37.450.000,00	228,26	99,77	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah keputusan kenaikan pangkat / gaji berkala	SK	9000	1.037.953.669,00	3000	104.100.000,00	3000	104.100.000,00	300	103.860.000,00	10,00	99,77	
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam Jab. Struktural	SK	990	2.088.430.033,00	330	398.380.000,00	330	398.380.000,00	381	397.218.250,00	115,45	99,71	
Pengembangan Kompetensi ASN		Nilai Aspek Pengembangan karir, Perlindungan dan pelayanan	point	118,5	479.038.537,00	82,5	187.425.000,00	82,5	187.425.000,00	52,5	186.997.000,00	63,64	99,77	
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah SPT, Surat Rekomendasi, Surat Ijin Mengikuti Diklat dan Sertifikasi	pegawai	300	16.465.825,00	100	30.970.000,00	100	30.970.000,00	186	30.895.000,00	186,00	99,76	
	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Jafung dan Uji Kompetensi	orang	60	92.884.590,00	20	23.840.000,00	20	23.840.000,00	20	23.830.000,00	100,00	99,96	
	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	jumlah kegiatan sosialisasi jabatan fungsional	Kegiatan	3	47.781.226,00	1	22.980.000,00	1	22.980.000,00	1	22.797.000,00	100,00	99,20	
	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan / pemberhentian dalam Jab. Fungsional	SK	1320	200.189.778,00	440	51.310.000,00	440	51.310.000,00	650	51.294.000,00	147,73	99,97	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	jumlah dokumen penilaian DUPAK/PAK	DUPAK/PAK	120	121.717.118,00	40	58.325.000,00	40	58.325.000,00	50	58.181.000,00	125,00	99,75	
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	point	120	507.273.097,00	117,5	209.078.800,00	117,5	209.078.800,00	102,5	208.923.000,00	87,23	99,93	
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah dokumen evaluasi kinerja Aparatur	Dokumen	12	166.530.163,00	12	129.201.800,00	12	129.201.800,00	12	129.200.000,00	100,00	100,00	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Penghargaan Pegawai teladan	Orang	72	97.070.376,00	24	23.482.000,00	24	23.482.000,00	294	23.420.000,00	1.225,00	99,74	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembinaan disiplin ASN	OPD	46	243.672.558,00	46	56.395.000,00	46	56.395.000,00	48	56.303.000,00	104,35	99,84	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0,10	51.655.240.040	0,09	16.960.960.998	0,0866337	3.844.998.460	0	4.199.209.775	0	109,21	Badan Pengembang an Sumber Daya Manusia
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0,04		0,04		0,0334158				0		
		Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0,15		0,14		0,1299505				5		
		Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0,62		0,59		0,55				0		
Pengembangan Kompetensi Tekhnis		Jumlah Kompetensi Tekhnis ASN	orang	630	3.017.260.627	90	353.666.460	90	364.217.360	137	239.363.570	152,22	65,72	
		Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis	dok	9		3		3				-		
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dok	3	248.451.557	1	90.278.700	1	90.278.700	1	78.415.510	100,00	86,86	
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	dok	3	188.076.443	1	17.028.600	1	17.028.600	1	15.822.600	100,00	92,92	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	orang	630	2.178.461.048	90	217.832.400	90	217.832.400	137	116.928.700	152,22	53,68	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	dok	3	402.271.578	1	28.526.760	1	39.077.660	0	28.196.760	-	72,16	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Jumlah Kompetensi Manajerial dan Fungsional ASN	orang	3,464	48.637.979.414	358	3.480.781.100	238	2.504.250.803	236	1.024.341.078	99,16	40,90	
		Jumlah Sertifikasi Kompetensi ASN	orang	560		120		120		0		-		
		Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Manajerial fungsional dan Sertifikasi Kompetensi ASN	dok	72		24		21		17		80,95		
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	dok	3	132.057.743	1	25.000.000	1	25.000.000	1	1.740.000	100,00	6,96	
	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	dok	6	392.098.238	2	46.055.100	2	46.055.100	2	29.136.500	100,00	63,26	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	orang	560	671.037.778	120	90.789.800	120	90.789.800	30	60.083.649	25,00	66,18	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	.Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	laporan	9	1.542.322.946	3	505.154.900	2	505.154.900	2	358.335.585	100,00	70,94	
	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	dok	30	164.865.900	10	62.431.400	10	62.431.400	24	42.447.538	240,00	67,99	
	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	dok	12	188.076.443	4	25.000.000	1	25.000.000	1	4.090.000	100,00	16,36	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	orang	3.864	45.427.613.780	358	2.671.673.600	627	2.671.673.600	590	3.424.091.333	94,10	128,16	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	dok	12	119.906.585	4	54.676.300	4	54.676.300	4	39.921.600	100,00	73,01	
												133,79	85,60	
Sasaran 5: Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Indeks Pelayanan Publik	Point	4,55		4,53		4,53	27.057.546.748	4,55	26.304.661.923	81,90	97,22	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%	98,90	880.122.000	98,80	290.696.000	98,7	91.108.300		74.302.250	-	81,55	DPMDes Dukcapil
Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Persentase penyelenggaraan pendaftaran kependudukan	%	100		100	23.917.510	2	91.108.300	2	74.302.250	100,00	81,55	
	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Berat Dokumen/barang yang dikirim	Kg	500	28.496.111	500	23.917.510	438	91.108.300	438	74.302.250	100,00	81,55	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	654.257.000	100	216.094.000	100	22.444.700		22.324.700	-	99,47	DPMDes Dukcapil
Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Jenis Dokumen Catatan Sipil dan pendukungnya	Dokumen	1	85.820.600	1	72.031.408	1	22.444.700	1	22.324.700	100,00	99,47	
	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Rakor di bidang pencatatan sipi	Orang	40	85.820.600	40	72.031.408	40	22.444.700	40	22.324.700	100,00	99,47	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase pengelolaan informasi data administrasi kependudukan yang baik di tingkat kab/kota	%	100	3.155.081.000	100	64.764.300	100	214.764.300		63.076.890	-	29,37	DPMDes Dukcapil
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	kali	4	182.010.364	10	13.975.400	4	163.975.400		12.375.400	-	7,55	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Berat Dokumen/Barang yang dikirim	Kg	1.250	12.562.083			1250	150.000.000			-	-	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jenis Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jenis	3	169.448.281	3	13.975.400	3	13.975.400	3	12.375.400	100,00	88,55	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	%	100	195.198.365	100	163.834.944	100	50.788.900		50.701.490	-	99,83	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Frekuensi perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tahun	1	195.198.365	1	163.834.944	10	50.788.900	10	50.701.490	100,00	99,83	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkaran hutan dan pesisir	%	25	266.644.000	20	100.000.000	15	250.000.000	15	242.812.003	100,00	97,12	DPMDes Dukcapil
Facilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		Jumlah Facilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi	Kali	3	119.143.303	3	56.804.086	1	250.000.000	1	242.812.003	100,00	97,12	
	Facilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	FGD Pengembangan Kerjasama Potensi Unggulan Desa	Kabupaten	4	31.689.519	4	5.000.000	4	84.164.300	0	83.726.574	-	99,48	
	Facilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	BIMTEK Kerjasama Desa Provinsi NTB	Orang	40	31.689.519	40	5.000.000	2	65.835.700	2	59.105.700	100,00	89,78	
	Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	FGD Pengembangan Kawasan Perdesaan	Kabupaten	4	55.764.265	4	46.804.086	70	100.000.000	70	99.979.729	100,00	99,98	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik Sesuai Standart KIP (%)	%	80	16.947.033.421	70	5.599.748.172	70	7.855.696.565	100	7.407.958.569	142,9	94,30	Diskominfotik
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik (%)	%	85	6.702.957.548	80	5.599.748.172	80	7.855.696.565	88,06	7.407.958.569	110,08	94,30	
	Monitoring Opini dan opini Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Opini dan Aspirasi	Dokumen	2	361.052.338	2	301.628.372	2	311.111.000	2	226.462.575	100,00	72,79	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi yang diproduksi dan disebar melalui media publik	Informasi	806	1.587.444.652	701	1.326.174.338	701	3.751.173.750	1162	3.401.691.348	165,76	90,68	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh perangkat Daerah	Informasi	690	114.738.050	690	95.853.835	690	-	1613	-	233,77		
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Lembaga dan Pers yang Terlibat dalam penyebarluasan Informasi	Lembaga	5	36.081.131	5	30.142.701	5	-	5	-	100,00		
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Aparatur yang Terlatih dan terfasilitasi	Orang	40	109.720.279	40	91.661.916	40	-	0	-	-		
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Sengketa Informasi yang terselesaikan	Kasus	2	1.551.207.649	4	1.295.901.419	4	1.106.556.815	11	1.105.011.650	275,00	99,86	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitaan Komunitas	Jumlah Kelompok/Komunitas yang diberdayakan dalam Penyebarluasan Informasi	Komunitas	15	2.509.787.788	15	2.096.713.201	15	2.686.855.000	15	2.674.792.996	100,00	99,55	
	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik	Unit	10	432.925.661	10	361.672.390	10	-	0	-	-		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase Layanan Berbasis TIK	%	65	6.229.379.686	55	2.058.351.845	55	923.315.005	62,21	860.050.103	113,11	93,15	Diskominfotik
Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		Kualifikasi/Level Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (Kualifikasi/Level)	%	Terintegrasi	2.463.868.840	Terstandarisasi	2.058.351.844	Terstandarisasi	923.315.005	Terstandarisasi	860.050.103	100,00	93,15	
	Penatalaksanaan dan pengawasan e-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan e-Government	Dokumen	2	634.750.115	2	530.279.473	2	10.000.000		9.989.000	-	99,89	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pusat Data	OPD	46	1.185.635.464	43	990.497.101	46	849.315.005	46	786.061.103	100,00	92,55	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Simpul Jaringan Perangkat Daerah yang Terkoneksi	OPD	30	539.633.718	23	450.817.852	23	64.000.000	23	64.000.000	100,00	100,00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Oemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Aplikasi	3	103.849.543	2	86.757.418	2	-	0	-	-		
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	30	1.530.744.809	25	505.798.581	25	119.193.050	94,06	118.844.150	376,24	99,71	Diskominfotik
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Persentase Data yang Tervalidasi	%	65	605.446.229	50	505.798.580	50	119.193.050	94,06	118.844.150	188,12	99,71	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Penolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Jenis Data yang tervalidasi	Jenis	550	54.019.082	530	45.128.326	530	15.746.100	886	15.497.200	167,17	98,42	
	Peningkatan Kapasitas SDM Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang Meningkatkan Pemahaman	Orang	55	377.189.970	55	315.109.984	55	9.850.450	60	9.800.450	109,09	99,49	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata yang terbangun	Jenis	20	26.548.709	15	22.179.176	15	10.440.600	16	10.440.600	106,67	100,00	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam Penyusunan	OPD	46	31.506.296	46	26.320.818	46	31.640.510	44	31.590.510	95,65	99,84	
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi Statistik	OPD	7	116.182.172	6	97.060.276	6	51.515.390	42	51.515.390	700,00	100,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	50	1.492.430.577	40	493.138.545	40	166.715.980	75	165.983.310	187,50	99,56	Diskominfotik
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Daerah Provinsi		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	%	50	387.276.530	40	387.276.530	40	74.420.480	75	74.025.756	187,50	99,47	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	Dokumen	1	47.577.621	1	47.577.621	1	56.370.000	1	56.334.676	100,00	99,94	
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber	Orang	6	219.127.137	6	219.127.137	6	9.650.000	5	9.290.750	83,33	96,28	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	Insiden	14	93.443.123	16	93.443.123	16	2.000.000	1	2.000.000	6,25	100,00	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	OPD	46	27.128.649	30	27.128.649	30	6.400.480	38	6.400.330	126,67	100,00	
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi		Persentase Pemanfaatan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah (%)	%	100	105.862.015	65	105.862.015	65	92.295.500	100	91.957.554	153,85	99,63	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan komunikasi sandi	OPD	46	105.862.015	65	105.862.015	65	92.295.500	46	91.957.554	70,77	99,63	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	90	300.351.716	85	100.214.713	85	36.487.278		36.249.178	-	99,35	Dsinakertrans
Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang di hasilkan	Dokumen	2	300.351.716	2	100.214.713	1	36.487.278	0	36.249.178	-	99,35	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen PTKD Makro yang di hasilkan	Dokumen	1	244.705.400	1	75.000.000	1	36.487.278	0	36.249.178	-	99,35	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro yang di hasilkan	Dokumen	1	55.646.316	1	25.214.713	0	-	0	-	-	-	
		Persentase Penyerapan Angkatan Kerja	%	96,83		96,81	2.447.808.479	96,81	2.163.989.620	96,08	303.415.700	99,25	14,02	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	1.293.706.035	100	1.135.237.618	100	16.004.223.850	99,62	15.942.682.550	99,62	99,62	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Perpustakaan	100	1.102.657.588			75	236.533.650	75	235.289.850	100,00	99,47	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service	Kunjungan	80000	169.517.257			75000	75.301.300	75000	74.599.800	100,00	99,07	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan	10	751.639.358			10	765.000	10	765.000	100,00	100,00	
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	Orang	-	-			-	-	-	-			
	Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Orang	150	89.274.888			150	1.404.000	150	1.404.000	100,00	100,00	
	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Kab/ Kota	-	-			-	-	-	-			
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan	-	-			-	-	-	-			
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Orang	-	-			-	-	-	-			
	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	Gedung	-	-			-	-	2000	-			
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	2000	40.758.058			2000	157.876.250	2000	157.333.950	100,00	99,66	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	10	Dokumen	51.468.024			10	1.187.100	10	1.187.100	100,00	100,00	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	10	Kegiatan	191.048.447			8	15.767.690.200	8	15.707.392.700	100,00	99,62	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus	10	90.836.709			10	205.955.700	10	204.955.700	100,00	99,51	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di TempatTempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		-	-			1	15.533.592.000	1	15.474.294.500	100,00	99,62	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang	6	-			-	-	-	-			
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan	12	100.211.738			12	28.142.500	12	28.142.500	100,00	100,00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi yang Dipilih dan Didukung Keegiatannya	Orang	2	-			-	-	-				
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100	100	237.167.713	100	208116606,9	100	63807000	94,95	60587500	94,95	94,95	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam	Eksemplar	550	64.936.077			500	4.463.600	500	3.956.100	100,00	88,63	
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar	550	64.936.077			500	4.463.600	500	3.956.100	100,00	88,63	
	Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah		Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi	Eksemplar	600	85.225.042			550	5.233.100	550	4.960.600	100,00	94,79	
	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Entry	600	48.192.201			550	1.435.100	550	1.435.100	100,00	100,00	
	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah	10	37.032.840			10	3.798.000	10	3.525.500	100,00	92,83	
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi		Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah	Eksemplar	10	87.006.593			10	54.110.300	10	51.670.800	100,00	95,49	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	10	38.929.620			10	12.789.900	10	12.788.900	100,00	99,99	
	Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Eksemplar	10	48.076.972			10	41.320.400	10	38.881.900	100,00	94,10	
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Daerah Provinsi yang Tersedia	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang	43.000	-	41.000	-	41000	1.309.790.720	17103	1.309.790.720	41,71	100,00	Badan Penghubung Daerah
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			Event					8	1.309.790.720	10	1.309.790.720	125,00	100,00	
	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Terlaksananya pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya					25.000.000				375.000.000		100,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung					531.750.000				934.790.720		100,00	
												102,16	91,99	
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah														

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing		Indeks Kesehatan	Point	71,20										
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat		Angka Harapan Hidup	Tahun	67,48		67,08		67,08	659.227.926.501	67,48	631.656.623.852	100,00	95,82	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi	%	85	490.192.636.948	85	163.526.294.113	80	118.684.507.592	100	114.132.887.681	125	96,16	Dinas Kesehatan
		Persentase balita Wasting	%	85		11,41		11,41		6,78		59,42		
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	80		97		97		100		103,1		
		Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	%	100		75		75		76,19		101,6		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB (%)	%	100		100		100		100		100,0		
		Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80 %	%	100		90		100		100		100,0		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%	100		100								
		Persentase Penyelesaian Data dan Informasi Kesehatan Daerah	%	3	3.651.104.864	100	1.391.035.404	100	24.670.153.700	100	13.361.634.900	100,0	54,16	
		Persentase Puskesmas Yang di Bina Mampu melaksanakan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Keluarga (KIA, PKPR, PKRET, Lansia) sesuai Standar	%	92,9	-	87		80		40		50,00		
		Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	%	40	-	30		65		70		107,7		
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	%	100	-	100		100		100		100,0		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100	-	100		100		100		100,0		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar (Persen)	%	4	4.187.371.186	80	9.902.224.743	80	10002224743	100	9292828198	125,00	92,91	
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah lokal Pengembangan Rumah Sakit	Lokal	3	3.600.000.000		597.969.743		597969743		592049250		99,01	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi yang di distribusikan ke Kab / Kota	Jenis	120	95.840.033		171.624.000		271624000		220192300		81,07	
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Jenis Obat dan perbekalan kesehatan buffer stock provinsi yang diadakan	Jenis	20	491.531.153		9.132.631.000		9132631000		8480586648		92,86	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Kab / Kota yang mendapat pembinaan, pendampingan dan Movev / investigasi kegiatan UKP Rujukan,UKM danUKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kab/Kota	10	75.626.672.761	10	131.621.931.045		1,08504E+11	10	1,04666E+11	100	96,46	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	27707	258.312.957	27707	6.117.261.412		4041853832		2460394749		60,87	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah orang yang mendapat pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Orang	4200	218.638.724	4200	1.059.008.000		1059008000		560063732		52,89	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Puskesmas	50	741.853.974	40	557.980.000		706163718,1	10	544598653,5	25,00	77,12	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan PKPR dan PKRET	Puskesmas	50	982.254.586	40	54.000.000		54000000	10	53800000	25,00	99,63	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Puskesmas Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pendampingan Teknis Pelayanan Santun Lansia	Puskesmas	40	1.187.775.766	35	35.000.000		35000000		0	0,00	-	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Surveilans Gizi Terstandar (kab/kota)	Kab/Kota	10	10.098.612.892	10	16.291.570.588		1943086252		1729959024	0,00	89,03	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	Kab/Kota	4	612.401.193	3	246.406.000		246016390		244306390	0,00	99,30	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	KK Dengan Akses Jamban Sehat	%	97	3.956.744.171	94	5.717.276.000		6737000276		6380400276		94,71	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Posyandu yang diaktifkan	Posyandu	383	643.702.954	377	574.537.324		1256528524		1117310900	0,00	88,92	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	Kab/Kota	10	912.043.506	9	43.040.000		43040000	6	42170000	66,67	97,98	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	4996	46.687.447	4996	-		0	2043	0	40,89		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa	Puskesmas	171	242.040.536	151	-		0	123	0	81,46		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan NAPZA	Puskesmas	129	144.117.959	109	-		0	70	0	64,22		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Kelompok Penerima Hibah	Kelompok	11	3.501.558.504	11	1.800.000.000		2350418350		1817511000	0	77,33	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota yang dibina dalam rangka program jaminan kesehatan nasional	Kab/Kota	10	46.614.847.827	10	98.745.239.721		89617594994		89489015544		99,86	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Analisis Faktor Resiko KLB yang dihasilkan	Analisis	10	248.408.703	10	21.000.000		21000000		20600000		98,10	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan SPM Kab/Kota	Dokumen	10	107.068.430	10	101.612.000	10	101000612	7	34960000	70	34,61	
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	Dokumen	10	373.293.715	10	73.000.000		73000000		69310000	0	94,95	
	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	1	64.059.520	1	35.000.000		35000000		27020000	0	77,20	
	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	investigasi	10	347.319.534	10	80.000.000		79700300		0	0	-	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Layanan Rumah Sakit	Layanan	1	4.000.000.000	1	-		0		0			
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kab./Kota yang mempunyai PSC	Kab/Kota	10	98.425.389	10	35.000.000		35000000	7	34810000	70	99,46	
	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah RS yang melaksanakan SISRU	RS	45	93.716.689	43	35.000.000		35000000	21	34810000	48,84	99,46	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan/Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Lab Rujukan/nasional	Pengambilan	20	9.011.763	20 Kali	-		0		0			
	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Tim Gerak Cepat (TGC) yang dibina	Tim	10	123.776.022	10			35000000		4840000	0		
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah (Dokumen)	Dokumen	1	409.886.957	1	350.287.289	1	89576089	1	86531220	100	96,60	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah (Dokumen)	Dokumen	1	370.687.096	1	316.787.289		51576089	1	48531220	100	94,10	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan (Paket)	Paket	1	39.199.861	1	33.500.000		38000000	1	38000000	100	100,00	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit (RS)	RS	45	256.153.891	45	218.907.800		88295512,16		87647994,55	0	99,27	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit (RS)	RS	45	111.439.939	45	95.236.000		53295512,16		52647994,55	0	98,79	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Kabupaten / Kota yang di bina rangka akreditasi / reakreditasi FKTP dan FKTL (Kab/Kota)	Kab/Kota	10	144.713.952	10	123.671.800		35000000		35000000	0	100,00	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	3	3.651.104.864	2,5	1.391.035.404	2,5	109.389.365	0,27	106.046.967	10,80	96,94	Dinas Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah dokumen rencana pemenuhan minimal 9 Tenaga Kesehatan di puskesmas Provinsi NTB (dokumen)	Dokumen	11	199.772.218	11	49.143.700	-	48.679.365	11	45.796.967		94,08	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen rencana pemenuhan minimal 9 Tenaga Kesehatan di puskesmas Provinsi NTB (dokumen)	Dokumen	11	49.337.098	11	29.983.700	-	29.519.365	11	26.880.167		91,06	
	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen rencana distribusi dan pemerataan minimal 9 Tenaga Kesehatan di Pusk Provinsi NTB (Dokumen)	Dokumen	11	150.435.120	11	19.160.000	-	19.160.000	11	18.916.800		98,73	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	Orang	500	1.191.609.218	500	60.710.000	-	60.710.000	104	60.250.000	20,8	99,24	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	Orang	500	1.072.747.376	500	25.710.000	-	25.710.000	104	25.710.000	20,8	100,00	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia (Dokumen)	Dokumen	1	118.861.842	1	35.000.000	-	35.000.000	-	34.540.000	0	98,69	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	95	239.953.724	90	100.000.000	90	30.500.000		24.450.990		80,17	Dinas Kesehatan
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyelur Alat Kesehatan (PAK)		Jumlah Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK yang dibina dan diawasi	Sarana	18	90.816.566	18	27.118.100	-	27.000.000	-	21.960.000	0	81,33	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK yang dibina dan diawasi (Sarana)	Sarana	18	90.816.566	18	27.118.100	-	27.000.000	-	21.960.000	0	81,33	
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dibina dan diawasi (Sarana)	Sarana	3	16.955.958	3	5.063.100	-	3.500.000	-	2.490.990	0	71,17	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dibina dan diawasi (Sarana)	Sarana	3	16.955.958	3	5.063.100	-	3.500.000	-	2.490.990	0	71,17	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase SPM yang mencapai target	%	90	163.139.610.602	85	54.518.919.382	85	5,24846E+11	73,39	5,10297E+11	86,34	97,23	Rumah Sakit Umum Daerah
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								90	5,24639E+11	92,13	5,1013E+11	102,37	97,23	
	Pengembangan Rumah Sakit								3,57E+11		3,43247E+11		96,15	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan								1,67639E+11		1,66883E+11		99,55	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								90	206664200	88	167660522	97,78	81,13	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								206664200		167660522		81,13	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus								0		0			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase SPM yang mencapai target	%	76,19	29.809.896.151	75	10.339.417.902	75	5869042396	78,41	5869042396	104,5	100,0	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
		Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80	-	80	-	80		80		100,0		
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan	%	93	10.267.241.647	91	5.402.537.684	91	4591785581	91	4591785581	100,00	100,00	
	Pengembangan Rumah Sakit								0		0			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit								0		0			
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah unit alkes		96	1.616.215.772	36	1.400.937.684	36	1297583261	36	1297583261	100,00	100,00	
	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan								0		0			
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit								0		0			
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jenis		13	5.610.281.704	13	4.001.600.000	13	3294202320	13	3294202320	100,00	100,00	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase masyarakat yang terlayani	%	100	1.259.522.597	100	420.366.700	100	1100255345	163,72	1100255345	163,72	100,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Berpotensi Bencana	Jumlah orang yang terlayani		4363	161.031.598	540	50.429.200	540	74761772,1	700	74761772,1	129,63	100,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani		36020	292.606.158	35460	86.575.000	35460	221617510	59068	221617510	166,58	100,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah orang yang terlayani		350	114.887.422	310	27.375.000	310	26780264	132	26780264	42,58	100,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah orang yang terlayani		80	670.243.441	50	248.675.000	139	770255500	157	770255500	112,95	100,00	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah orang yang terlayani		550	20.753.975	540	7.312.500	540	6840299	558	6840299	103,33	100,00	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		persentase capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80	465.001.430	80	97.462.300	80	177001470	80	177001470	100,00	100,00	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen elemenakreditasi yang terpenuhi		2	465.001.430	2	97.462.300	2	177001470	2	177001470	100,00	100,00	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase SPM yang mencapai target	%	80,00	144.479.341.067	78,00	48.764.835.901	78	9.688.668.868		1.226.798.514		12,66	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/kedokteran yang tersedia	unit	200	84.197.172.000	54	4.003.083.990	54	5.003.083.990	42	4.890.430.571	78,00	97,75	
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis obat dan BMHP yang tersedia	jenis	12	5.013.649.000	12	3.784.479.878	12	3.920.959.878	12	3.541.169.244	100,00	90,31	
	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah gedung yang terpelihara	unit	5	700.000.000	5	648.305.000	5	648.305.000	2	642.047.576	40,00	99,03	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah masyarakat miskin, terlarant dan masalah sosial lainnya yang tertangani	Orang	105	209.410.000	40	172.800.000	40	272.320.000	0	94.442.612	0,00	34,68	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat		Persentase Balita Stunting	%	30,49		30,99		30,99	118.684.507.592	30,49	114.132.887.681	62,22	86,47	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase balita Wasting	%	10,41	-	11,41	163.526.294.113	11,41	118.684.507.592	6,78	114.132.887.681	59,42	96,16	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas	%	80	5.059.563.209	70	1.844.102.816	70	348.685.915		333.081.723		95,52	Dinas Kesehatan
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi									348.685.915		333.081.723		95,52	
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi								348.685.915		333.081.723		95,52	
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi									-		-			
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								-		-			
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi									-		-			
	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM								-		-			
												59,42	96,16	
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing		Indeks Pendidikan	Point	61,68										
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79		13,73		13,73	628.905.465.525	13,79	294.834.428.297	101,68	46,88	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7,07		7,04		7,04		7,07		108,10		
		Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	100	1.486.214.496.782	99,95	496.806.046.231	99,95	534.726.001.163	110,36	173.613.183.396	110,4	32,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	95,28		94,38		94,38				98,07		
		Persen Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	98,02		97,57		97,57				98,50		
		Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70,6		70		70				86,83		
		Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1		1		1				NA		
		Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	18		1:18		1:18				NA		
		Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB,	%	1:10		1:12		1:12				NA		
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									271.321.058.686		74.088.887.765		27,31	
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)								-		-			
	Penambahan Ruang Kelas Baru								20.542.791.883		17.016.731.183		82,84	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								1.341.046.000		1.107.680.000		82,60	
	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi								6.221.644.000		4.373.362.000		70,29	
	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika								9.487.220.000		6.974.507.000		73,51	
	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia								11.017.560.000		7.636.456.000		69,31	
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer								868.324.000		565.395.000		65,11	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa									-	-			
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah									870.427.000	678.098.000		77,90	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah									1.403.163.000	1.104.643.000		78,73	
	Pembangunan Asrama Sekolah									472.314.000	358.172.000		75,83	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									6.773.763.148	4.399.412.148		64,95	
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah									322.311.000	236.109.000		73,26	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									15.071.950.430	9.359.576.230		62,10	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU									2.274.770.000	854.269.000		37,55	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi									2.277.182.000	1.698.154.000		74,57	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika									849.195.000	517.188.000		60,90	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia									842.124.000	618.459.000		73,44	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer									386.428.000	286.754.000		74,21	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa									133.332.000	-		-	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah									583.759.000	92.232.000		15,80	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah									1.334.992.000	636.198.000		47,66	
	Rehabilitasi Asrama Sekolah									852.243.000	-		-	
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									4.818.677.000	2.411.795.000		50,05	
	Pengadaan Mebel Sekolah									7.445.498.300	7.445.019.700		99,99	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									-	-		-	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									371.696.800	368.709.600		99,20	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas									-	-		-	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa									4.658.177.855	4.525.288.355		97,15	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik									-	-		-	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas									617.260.165	615.691.098		99,75	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									-	-		-	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									210.681.554	208.988.451		99,20	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas									-	-		-	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas									169.272.527.552	-		-	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas									-	-		-	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									240.575.081.039	93.049.916.402		38,68	
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah									28.513.104.000	24.167.388.290		84,76	
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa									24.464.628.000	21.362.038.430		87,32	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									-	-		-	
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah									4.703.294.290	4.199.938.500		89,30	
	Pengadaan Mebel Sekolah									10.200.000.000	10.196.976.000		99,97	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									-	-		-	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									-	-		-	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									-	-		-	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan									-	-		-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa								32.492.752.510		32.225.365.289		99,18	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik								-		-			
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan								518.288.613		517.609.613		99,87	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								-		-			
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								-		-			
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								58.470.280		58.270.280		99,66	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan								341.800.000		322.330.000		94,30	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan								139.282.743.346		-		-	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan								-		-			
Pengelolaan Pendidikan Khusus									22.829.861.438		6.474.379.229		28,36	
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah								2.202.274.700		1.374.646.300		62,42	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								-		-			
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah								143.280.800		121.477.500		84,78	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								-		-			
	Pembangunan Kantin Sekolah								1.648.529.600		1.237.079.700		75,04	
	Pembangunan Ruang Laboratorium								-		-			
	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)								154.140.000		110.866.600		71,93	
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah								-		-			
	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU								-		-			
	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah								-		-			
	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah								-		-			
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								123.517.900		54.150.300		43,84	
	Rehabilitasi Ruang Laboratorium								-		-			
	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)								-		-			
	Pengadaan Mebel Sekolah								651.162.000		651.162.000		100,00	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik								-		-			
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik								2.803.873.600		2.806.388.037		100,09	
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah								-		-			
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus								-		-			
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa								-		-			
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik								-		-			
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus								85.501.236		84.971.190		99,38	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa								-		-			
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus								1.078		1.078		100,00	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus								-		-			

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus								14.983.904.000		-		-	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus								33.676.525		33.636.525		99,88	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	1.986.884.736	100	696.067.714	100	114.290.006	100	108.405.006	100,0	94,85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		Persentase sekolah yang melakukan penetapan kurikulum	%	-	-	100		20	114.290.006	100	108.405.006	500,00	94,85	
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah peserta bimtek penyusunan silabus muatan lokal SMK	Orang	-	-			100	74.839.510		72.254.510	-	96,55	
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah peserta workshop kurikulum SMK	Orang	-	-			100	39.450.496	100	36.150.496	100,00	91,64	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus									-		-			
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus								-		-			
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	208.215.004.195	100	69.288.275.305	100	83.191.979.938		85.311.438.680	-	102,5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100		99,58		99,58				-		
		Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	100		100		100				-		
		Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	100		60		60				-		
		Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		80		6		6				-		
Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi		Persentase ketersediaan data hasil pemetaan pendidik	%	100		100		100	83.191.979.938	50	85.311.438.680	50,00	102,55	
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah data analisis	Dokumen					6	85.021.807.500	3	82.950.061.698	50,00	97,56	
		Jumlah data analisis	Dokumen					1		1		100,00		
		JJM	OJ					1580178				-		
		Jumlah Guru Non PNS Yayasan	Orang					5000		NA				
		Jumlah operator dapodik yang mengikuti Bimtek Opertaor Dapodik	Orang					280		245		87,50		
		Jumlah Tenaga Administrasi (TU) non PNS SMA,	Orang					3150				-		
		Jumlah DUPAK yang diterbitkan	DUPAK					150		120		80,00		
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Kespsek dan TU yang dievakin							241.918.240		289.631.180		119,72	
		Jumlah SK Mutasi yang diterbitkan												
		Jumlah peserta peningkatan kompetensi guru pembina GAB	Orang					160		120		75,00		
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	6,5	194.889.101	100	65.788.824	100	47.565.267		46.104.824		96,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									47.565.267		46.104.824		96,93	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								47.564.200		46.104.200		96,93	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat								1.067		624		58,50	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu				
Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat										-		-			
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									-		-			
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat									-		-			
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	100	831.855.187	35	309.938.698	35		-		-			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi										-		-			
	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi									-		-			
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Program 1: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1. Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%		100	100	867.786.710	100	867.786.710	100		100,0		-	Dinas Pemuda dan Olahraga
		2. Persentase pemuda peserta pelatihan yang bersertifikat	%		100	100		100		100		100,0			
Kegiatan 1 : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan KewenanganProvinsi		Terlaksananya Pelatihan Kecakapan Pemuda	Orang		160	160	867.786.710	160	867.786.710			-		-	
	Sub kegiatan 1 : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tk. Provinsi yang terseleksi	Orang		15	21	79.715.200	21	79.715.200	21		79.325.960	100,0	99,51	
	Sub kegiatan 2 : Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang		18	100	184.904.910	100	184.904.910	100		184.162.910	100,0	99,60	
	Sub kegiatan 3 :Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan	Unit		-	0	40.000.000	0	40.000.000	0		40.000.000		100,0	
	Sub kegiatan 4 : Koordinasi,Sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Wirusaha Muda Provinsi	Jumlah Pemuda yang dilatih	orang		100	100	43.257.300	100	43.257.300	100		43.257.300	100,0	100,0	
	Sub kegiatan 5 : Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda	Orang		60	20	519.909.300	20	519.909.300	20		500.336.549	100,0	96,24	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Program 2 : PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pembinaan Altlet Berprestasi	%		100	100		100	9.957.842.440	100		35.755.296.390	100,0	359,1	Dinas Pemuda dan Olahraga
Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadikewenangan Daerah Provinsi		Presentase Sarana Prasarana Olahraga yang Terstandar	%		40	40	40.000.000	40	6.602.645.500	40		5.731.345.658	100,00	86,8	
	Sub Kegiatan 1 : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang Dibangun	Unit		2	2	40.000.000	2	6.602.645.500	2		5.731.345.658	100,00	86,8	
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		Jumlah Medali Yang Diperoleh	Medali		40	40	332.924.000	40	3.640.626.547	78		3.627.999.047	195,00	100	
	Sub Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Event Pemasalan Olahraga	Event		5	5	12.924.000	5	12.424.500	0		12.288.100	-	98,90	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu				Realisasi Kinerja	Realisasi Keu
	Sub Kegiatan 2 : Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan SingleEvent	Jumlah Peserta Kejuaraan Tk. Nasional dan Internasional	Orang		150	26	320.000.000	26	3.628.202.047	26	3.615.710.947	100,00	99,66	
Kegiatan 3 : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		Jumlah Cabor Yang Dibina	Cabor		3	3	64.918.440	3	62.645.275	3	37.230.975	100,00	59,43	
	Sub Kegiatan 1 : Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Atlit yang Dibina	Orang		12	12	64.918.440	12	62.645.275	0	37.230.975	-	59,43	
Kegiatan 4 : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Dibina	Lembaga		10	3	9.530.000.000	16	9.530.000.000	3	9.520.000.000	18,75	99,9	
	Sub Kegiatan 1 : Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Keolahragaan Penerima yang Difasilitasi	Lembaga		10	3	9.530.000.000	16	9.530.000.000	3	9.520.000.000	18,75	99,9	
											75,50	78,01		
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan														
Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point		64,56									
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air	Point		43,03			42,93	2.987.564.100	43,03	2.767.731.190	101,07	92,64	
		Indeks Kualitas Udara	Point		87,59			87,56		87,59		101,99		
		Indeks Kualitas Air Laut	Point		87,66			87,63		70,89	71,48	102,11		
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan	%	100	1.024.902.302,60	100,00	337.210.647,80	100	176.719.188	100	161.121.188	100	91,17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Dokumen RPPLH, IKPLHD, dan IKLH yang disusun	Dokumen	7	602.571.166,34	2	198.256.373,15	2	83.100.492	2	79.810.492	100,00	96,04	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun	Dokumen	1	445.639.676,49	1	146.623.188,98	1	48.540.000	0	45.250.000	-	93,22	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH yang tersusun	Dokumen	6	156.931.489,85	2	51.633.184,18	2	34.560.492	2	34.560.492	100,00	100,00	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah KLHS yang disusun dan divalidasi	Dokumen	29	422.331.136,26	7	138.954.274,65	7	93.618.696	14	81.310.696	200,00	86,85	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Kawasan Strategis dan dokumen KLHS kab/kota yang divalidasi	Dokumen	18	218.812.769,16	6	71.993.199,21	6	63.410.000	12	51.160.000	200,00	80,68	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun/divalidasi	Dokumen	24	133.665.362,66	8	43.978.224,48	8	30.208.000	2	30.150.000	25,00	99,81	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun/dilaksanakan	Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun/dilaksanakan	Dokumen	3	69.853.004,43	8	22.982.850,97	8	696	0	696	-	100,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase usaha/kegiatan yang melakukan pengendalian pencemaran	%	100	2.835.284.286	100	932.857.745	100	1.032.144.846	83,33	927.037.477	83,33	89,82	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	2.181.040.532,41	10	717.600.193,65	10		10		100,0		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel	846	1.257.588.598,00	282	1.329.483.501,53	282	951.692.026	200	846.820.477	70,92	88,98	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel	846	2.181.040.532,41	282	717.600.193,65	282	153.963.544	200	152.958.466	70,92	99,35	
		Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	unit usaha	30	437.488.380,00	30	208.327.800	30		18		60,00		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kelompok masyarakat yang memenuhi syarat program kampung iklim	kelompok	20	200.000.000,00	10	100.000.000	10	121.543.400	13	121.455.800	130,00	99,93	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Parameter yang mampu diuji di Balai Laboratorium Lingkungan	parameter	25	1.859.729.564,48	10	611.883.307,88	10	676.185.082	91	572.406.211	910,00	84,65	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	lokasi	3,00	922.203.753,58	3	342.857.551,29	3	80.452.820	3	80.217.000	100,00	99,71	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah dokumen publikasi hasil pemantauan kualitas lingkungan (air sungai, air laut, udara)	dokumen	3,00	454.243.753,58	1	115.257.551	1	80.452.820	1	80.217.000	100,00	99,71	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase taman kehati yang terkelola	%	100,00	232.926.464	100	100.000.000	100	77.054.700	0	76.966.000	-	99,88	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah lokasi pengelolaan taman kehati	lokasi	1,00	128.583.400,00	1	50.000.000,00	1	77.054.700	0	76.966.000	-	99,88	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	jumlah dokumen siteplan kehati yang ditetapkan	dokumen	1,00	128.583.400,00	1	50.000.000,00	1	77.054.700	0	76.966.000	-	99,88	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase Unit Usaha Penghasil Limbah B3 yang tertib aturan	%	100	232.426.464	90	100.000.000	90	11.160.214	83,33	11.160.210	92,59	100,0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3	unit usaha	30	232.426.464,11		100.000.000,00	30	11.160.214	115	11.160.210	383,33	100,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3	unit usaha	30	232.426.464,11		100.000.000,00	30	11.160.214	115	11.160.210	383,33	100,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil pengawasan ketaatan ijin lingkungan	%	100	605.251.864	100	199.138.369	100	1.089.208.197	41,05	996.658.861	41,05	91,50	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan pemegang izin lingkungan yang dibina dan diawasi	unit usaha	60	605.251.863,75	50	199.138.369,13	25	1.089.208.197	151	996.658.861	604,00	91,50	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha/ kegiatan yang difasilitasi perijinan lingkungannya	usaha/kegiatan	30	304.909.970,89	25	100.320.673,05	25	1.063.791.697	56	971.315.361	224,00	91,31	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diawasi	usaha/kegiatan	30	300.341.892,86	25	98.817.696,08	25	25.416.500	151	25.343.500	604,00	99,71	
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwijaya tingkat nasional	%	30	632.449.873	10	208.086.986	10	567.585.100	0	567.204.500	-	99,93	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sekolah yg mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	sekolah	30	632.449.873,25	10	208.086.986,36	10	567.585.100	0	567.204.500	-	99,93	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yg mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	sekolah	30	632.449.873,25	10	208.086.986,36	10	567.585.100	0	567.204.500	-	99,93	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok											Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pengaduan yang terselesaikan	%	100	641.333.479	100	211.009.847	100	33.691.854	100	27.582.954	100,0	81,87	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	Pengaduan	60	641.333.478,89	20	211.009.846,82	20	33.691.854	12	27.582.954	60,00	81,87	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang tertangani	Pengaduan	45	319.536.688,77	15	105.133.117,12	15	23.116.100	12	21.481.950	80,00	92,93	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup yang difasilitasi	pengaduan/ kasus	15	321.796.790,12	5	105.876.729,70	5	10.575.754	0	6.101.004	-	57,69	
												144,78	93,68	
Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	69,70		69		68,70	61.423.675.244	69,70	58.767.334.840	64,68	95,68	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	41	61.710.986.449	41	20.303.985.721	41	45.118.588.357	41	43.459.462.388	100,0	96,32	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Peningkatan persentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	-	10	-	10		8,93709		89,37		
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	103,82	1.238.270.457,41	34,00	407.412.474,38	34	158.690.500	25,76	158.073.600	75,76	99,61	
	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	103,82	1.238.270.457,41	34,00	407.412.474,38	34	158.690.500	25,76	158.073.600	75,76	99,61	
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang disusun	%	100	925.545.561,16	100	304.520.555,23	100	87.255.902	100	62.539.804	100,00	71,67	
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJpd yang disusun	dokumen	27	925.545.561,16	10	304.520.555,23	10	87.255.902	10	62.539.804	100,00	71,67	
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen	3	4.616.641.548,59	1	1.599.952.787,26	1	5.960.611.499	1	5.836.923.272	100,00	97,92	
	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan produksi yang disusun	Dokumen	3	548.256.117,70	1	180.385.779,35	1	99.371.125	1	98.941.185	100,00	99,57	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Pemegang Izin Usaha dan Kerjasama di HP yang dinilai	Unit	5	219.652.367,17	5	83.053.595,91	5	16.858.123	5	16.506.936	100,00	97,92	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung yang dilaksanakan	kegiatan	6	105.800.954,21	2	34.810.350,43	2	3.702.144	2	3.602.144	100,00	97,30	
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja KPHP yang dilaksanakan	kegiatan	3	159.370.240,10	1	52.435.575,34	1	49.465.025	1	49.138.525	100,00	99,34	
	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja KPHL yang dilaksanakan	kegiatan	3	138.485.027,18	1	45.563.977,76	0	-	0	-			
	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan	unit	15	2.967.996.322,23	5	976.522.308,47	5	5.791.215.082	5	5.668.734.482	100,00	97,89	
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	41	17.207.045.793,56	41	5.661.416.745,85	41	3.583.336.019	41	3.446.765.866	100,00	96,19	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	112.500	4.624.324.801,33	112.500	1.521.483.128,63	112500	849.240.471	112500	828.518.002	100,00	97,56	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	211.500	6.947.952.881,86	211.500	2.285.997.100,64	211500	1.714.638.732	211500	1.649.764.614	100,00	96,22	
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah kasus Tipihut yang ditangani	kasus	33	1.375.552.817,64	11	452.580.753,84	11	240.812.532	4	228.820.962	36,36	95,02	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan	kegiatan	3	1.823.717.677,03	5	600.034.771,82	5	605.703.919	5	571.902.779	100,00	94,42	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani	titik	417	2.435.497.615,71	139	801.320.990,92	30	172.940.365	44	167.759.509	146,67	97,00	
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	Unit	24	6.991.212.643,40	12	2.313.291.363,37	12	342.555.907	11	330.800.720	91,67	96,57	
	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	Unit	12	5.933.545.861,44	12	1.952.239.582,86	12	155.221.841	11	143.951.565	91,67	92,74	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah IUIPHBK yang difasilitasi	ijin usaha	10	88.746.168,00	5	42.260.080,00	5	36.621.836	0	36.614.427	-	99,98	
	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luasan HHBK yang dibudidayakan	ha	102,80	968.920.613,96	33,0	318.791.700,51	33	150.712.230	27,92	150.234.728	84,61	99,68	
Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	Industri	11	458.873.190,02	11	150.977.244,63	11	147.181.585	24	146.102.953	218,18	99,27	
	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	industri	11	458.873.190,02	11	150.977.244,63	11	148.804.960	24	146.102.953	218,18	98,18	
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	8.607	30.912.499.242,85	2.869	10.170.748.829,83	2869	34.838.956.945	13949,6	33.478.256.173	486,22	96,09	
	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen RTnRL yang disusun	dokumen	3	206.346.546,23	1	67.891.595,47	0	-	0	-			
	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	3.268,50	25.035.362.413,64	1.090	8.237.068.797,72	1090	31.434.177.217	4541,44	30.489.563.894	416,65	96,99	
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	821.835	5.186.703.821,32	274.000	1.706.515.587,98	274000	3.326.297.072	80000	2.911.659.623	29,20	87,53	
	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Lokasi RHL yang dibina dan dimonitoring	KPH/Tahura	16	484.086.461,67	16	159.272.848,66	16	78.482.656	16	77.032.656	100,00	98,15	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30.503	2.843.299.456	30.503,30	935.494.875	30503,3	215.562.498	30503,3	213.238.198	100,0	98,92	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		Jumlah Taman Hutan Raya yang dikelola	unit	1	1.927.987.905,79	1	634.341.487,00	1	107.125.000	1	104.820.000	100,00	97,85	
	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	luas kawasan TAHURA yang diamankan	ha	3155	585.814.156,74	3155	192.743.026,13	3155	92.125.000	3155	89.820.000	100,00	97,50	
	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Jumlah TSL endemik yang terfasilitasi pengawetannya	jenis	1	321.310.967,94	1	105.716.885,76	1	5.800.000	1	5.800.000	100,00	100,00	
	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Jumlah kawasan ekosistem wilayah TAHURA yang dipulihkan	ha	366	128.524.387,17	122	42.286.754,31	122	9.200.000	122	9.200.000	100,00	100,00	
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Sarpras objek wisata yang dibangun	unit	3	715.617.361,57	1	235.450.533,64	1	-	1	-	100,00		
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah KTH mitra konservasi Tahura yang terbentuk	kelompok	6	144.589.935,57	2	47.572.598,59	2	-	2	-	100,00		
	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah dokumen rencana pengelolaan TAHURA yang tersusun	Dokumen	12	32.131.096,79	4	10.571.688,58	4	-	4	-	100,00		
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	penangkar	24,00	345.259.559,62	24	113.596.388,13	24	-	24	-	100,00		
	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	penangkar	24,00	345.259.559,62	24	113.596.388,13	0	-	0	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang terkelola	kelompok	8,00	570.051.990,16	8	187.556.999,72	8	108.437.498	8	108.418.198	100,00	99,98	
	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat pada KEE yang ditingkatkan kapasitasnya	kelompok	16,00	195.869.623,76	16	64.444.506,12	16	28.461.175	16	28.452.375	100,00	99,97	
	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah KEE dan cagar biosfer yang difasilitasi pengembangannya	kelompok/lembaga	8,00	374.182.366,40	8	123.112.493,60	8	79.976.323	8	79.965.823	100,00	99,99	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	15,93	2.125.242.316	5,49	699.241.612	5,4945055	819.625.522	0	807.175.719	-	98,48	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok	29	2.921.881.515,56	20	1.078.593.611,76	20	819.625.522	0	807.175.719	-	98,48	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	67	137.521.094,28	67	45.246.827,11	67	22.500.000	67	22.480.000	100,00	99,91	
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelasnya dari Blue ke Gold/Madya	kelompok	37	197.927.556,25	15	65.121.601,63	15	44.400.000	0	44.400.000	-	100,00	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	kelompok	90	2.464.695.865,03	30	910.255.183,02	30	752.725.522	2	740.295.719	6,67	98,35	
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	32	14.296.328.273	32	4.703.740.157	32	15.269.489.585	0	14.287.130.584	-	93,57	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS	32	82.983.248.577	32	33.205.711.287	32	15.269.489.585	0	14.287.130.584	-	93,57	
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	dokumen	3	328.328.399,48	1	108.025.742,55	0	-	0	-	-		
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah lembaga pengelolaan DAS yang dikembangkan	lembaga	6	255.442.219,51	6	84.044.924,18	6	81.237.480	1	80.976.380	16,67	99,68	
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	Unit	741	27.077.312.239,95	247	10.876.499.762,19	247	15.188.252.105	0	14.206.154.204	-	93,53	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	90,31	3.017.590.900	18,18	892.236.000	6	409.282	6	327.951	100,0	80,13	Dinas PUPR
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi		Jumlah PERDA RTR yang telah ditetapkan	Dok			1	-	0	-	1	-			
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen persetujuan substansi RTR provinsi NTB yang disetujui	Dok			0	-	0	-	0	-			
	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah PERDA RTR yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Dok			0	-	0	-	0	-			
Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		Jumlah dokumen materi teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun	Dok			1	-	1	60.396	1	-			
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Jumlah peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Orang			0	-	0	-	0	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah dokumen materi teknis dan Ranperda RTR Provinsi NTB yang tersusun	Dok			0	-	0	-	0	-			
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen ranperda RTR Kabupaten/kota yang dievaluasi	Dok			1	-	1	60.396	1	-	100,00		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah peserta Sosialisasi Penataan ruang	Orang			500	-	500	-	500	-	100,00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		Dok			1	344.000.000	1	348.886	1	327.951	100,00	94,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dilaksanakan	Dok			1	344.000.000	1	348.886	1	327.951	100,00	94,00	
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah kawasan yang tersedia informasi/database pemanfaatan ruangnya	Dok			1	-	1	-	1	-	100,00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			Dok			1	-	1	-	1	-	100,00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelanggaran Penataan Ruang yang tertangani	Dok			1	-	1	-	1	-	100,00		
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus pelanggaran penataan ruang	Kasus			1	-	1	-	1	-	100,00		
												94,73	93,92	
Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan		Neraca pengelolaan sampah (%)	%	41,71				85						
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan		Persentase Penanganan Sampah	%	70,00		60,00		60,00	16.011.650.764	70,00	15.114.859.102	70,33	94,40	
		Persentase Pengurangan Sampah	%	30,00		25,00		25,00		30,00		51,12		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengelolaan sampah	%	100	15.916.448.484	85	5.299.032.825	85	16.011.650.764	85	15.114.859.102	100,0	94,40	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Persentase penanganan sampah	%	70	3.148.514.551,19	60	4.200.871.889,62	60	16.011.650.764	39,68	15.114.859.102	66,13	94,40	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional								-		-			
	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang beroperasi dengan baik	unit	30	3.148.514.551,19	1	3.658.105.011,99	1	8.192.867.080	1	8.057.350.262	100,00	98,35	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah industri pengolahan sampah dan limbah B3 yang beroperasi	unit	100	3.148.514.551,19	1	118.294.340,81	1	1.737.373.784	1	1.728.412.332	100,00	99,48	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Persentase Pengurangan Sampah	%	30	3.148.514.551,19	25	1.098.160.935,50	25	5.648.213.900	9,34	5.067.219.508	37,36	89,71	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang operasional	Unit	70	3.148.514.551,19	1	145.189.668,00	1	433.196.000	1	261.877.000	100,00	60,45	
	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kerjasama Pengolahan Sampah	kerjasama	30	3.148.514.551,19	5	279.282.868,81	0	-	0	-	-	-	
												71,93	89,47	
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi														
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas		Indeks Daya Beli (Point)	%	72,03										
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan		Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	68201,79	14.101.520.368	15428	11.601.520.368	15428	1.297.612.955	17814	1.254.591.139	140,05	96,68	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan investor	%	10	1.099.303.769	5	596.026.769	5	398.524.955	6	379.313.703	120,0	95,18	DPMPSTP
PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI		Jumlah dokumen	Dokumen	2	311.507.601	2	256.281.711	2	380.745.775	2	362.567.331	100,00	95,23	
	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan	Dokumen	1	146.948.355	1	120.896.491	1	194.345.775	1	176.167.331	100,00	90,65	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Jumlah dokumen	Dokumen	1	164.559.246	1	135.385.220	1	186.400.000		186.400.000	-	100,00	
PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI PROVINSI		Jumlah dokumen	Dokumen	2	412.956.380	2	339.745.058	2	17.779.180	2	16.746.372	100,00	94,19	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah dokumen evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal	Dokumen	1	101.227.743	1	83.281.497	1	17.779.180	1	16.746.372	100,00	94,19	
	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi	Jumlah peta potensi	Peta	1	311.728.636	1	256.463.561	0	-	0	-			
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Calon investor yang berinvestasi	%	80	2.628.846.723	60,00	863.871.915	60	202.880.000	72	202.668.900	120	99,90	DPMPTSP
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Promosi	Dokumen	2	1.050.026.808	2	863.871.915	2	202.880.000	2	202.668.900	100,00	99,90	
	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen	Dokumen	1	507.278.116	1	417.344.885	1	202.880.000	1	202.668.900	100,00	99,90	
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah dokumen laporan event	Dokumen	1	542.748.692	1	446.527.030	0	-	0	-			
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase permohonan izin yang terlayani sesuai persyaratan	%	93	1.953.548.364	90	641.960.427	90	20.000.000	103	19.736.500	114,44	98,68	DPMPTSP
Penanaman modal yang ruang lingkungnya lintas kabupaten/ kota		Jumlah Layanan Perizinan kewenangan Provinsi lintas Kab/Kota	Izin	4	120.058.076	4	98.773.478	4	10.000.000	24	9.736.500	600,00	97,37	
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah penerbitan izin penanaman modal (NIB) yang ruang lingkungnya lintas kab/kota	Izin	4	120.058.076	4	98.773.478	4	10.000.000	4	9.736.500	100,00	97,37	
Penanaman modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi		Jumlah Dokumen Layanan Perizinan kewenangan daerah provinsi	Dokumen	3	660.237.761	3	543.186.949	3500	10.000.000	4571	10.000.000	130,60	100,00	
	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistim pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik	Jumlah permohonan dan penerbitan izin dan non perizinan yang menjadi kewenangan provinsi	Izin dan non izin	3.500	402.744.090	3000	331.343.262	3000	-	1292	-	43,07		
	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen	Dokumen	1	174.858.775	2	143.858.789	0	-	0	-			
	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah dokumen pengaduan	Dokumen	2	82.634.896	2	67.984.898	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00	100,00	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan yang taat LKPM	%	60	2.702.918.671	55	888.212.883	55	676.208.000	30	652.872.036	54,55	96,55	DPMPTSP
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	Perusahaan	500	1.079.612.988	500	888.212.883	500	676.208.000	12,9	652.872.036	2,58	96,55	
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dipantau	Dokumen	4	171.888.232	4	141.414.881	0	27.780.000	0	27.780.000		100,00	
	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dibina	Perusahaan	5	541.270.764	5	445.311.117	310	547.148.000	63	534.198.955	20,32	97,63	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang diawasi	Dokumen	20	366.453.992	20	301.486.886	14	101.280.000	14	90.893.081	100,00	89,74	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Cakupan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintegrasi	%	100	428.183.869	100	140.706.575	100	-	100	-	100,00		DPMPTSP
Urusan pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPTSP	Dokumen	2	171.027.294	2	140.706.575	1	49.457.600	0	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen rekapitulasi izin yang terbit melalui DPMPTSP secara OSS	Dokumen	2	171.027.294	2	140.706.575	1	49.457.600	0	-	-	-	
												100,25	87,76	
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,88		23,71		23,71	181.438.951.350	23,88	151.721.515.254	110,25		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pertumbuhan Populasi Ternak	%	10	135.417.101.158	9,5	44.798.298.458	9,5	29.987.084.588		21.684.102.684	-	72,31	Disnakan
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Ekor						100	943.492.500	100	938.656.500	100,00	99,49	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Ekor						100	943.492.500	85	938.656.500	85,00	99,49	
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Ha						6	471.583.969	6	440.675.739	100,00	93,45	
	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kg						5000	25.681.045	5000	25.681.045	100,00	100,00	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Kelompok						10	445.902.924	10	414.994.694	100,00	93,07	
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi		Straw						100000	1.829.370.112	100000	1.769.512.654	100,00	96,73	
	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Straw						100000	1.747.888.749	100000	1.735.029.349	100,00	99,26	
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Sample						200	72.772.712	200	29.551.152	100,00	40,61	
	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Kali						10	8.708.652	10	4.932.154	100,00	56,64	
Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor		Distributor Obat Hewan Yang Diawasi	toko/depo	20	63.125.609	15	61.261.783	10	26.052.077	10	8.683.002	100,00	33,33	
	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Sampel Obat Hewan yang diambil	sampel	10	36.586.113	10	35.505.884	10	11.051.405	10	4.282.330	100,00	38,75	
	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Laporan yang dihasilkan	laporan	1	26.539.495	1	25.755.899	1	15.000.672	1	4.400.672	100,00	29,34	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		Jumlah Bibit Ternak yang Diadakan	ekor	1000	39.526.600.117	1000	38.765.003.041	14259	26.716.585.930		18.526.574.789	-	69,34	
		Jumlah Alat Pengolah Pakan yang Diadakan	unit	45	1.500.000.000	10	1.000.000.000	10		10				
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak sapi/kerbau/kambing/unggas yang diadakan	ekor	1000	37.579.815.152	1.000	37.573.722.504	1000	26.598.485.930	1000	18.446.513.789	100,00	69,35	
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Kelompok pakan	kelompok	30	1.946.784.965	25	1.191.280.537	10	118.100.000	10	80.061.000	100,00	67,79	
		Jumlah alat pengolah pakan yang diadakan	unit	15	1.500.000.000	10	1.000.000.000	10		10				
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Cakupan Produksi Hasil Ternak Yang Dipasarkan	%	10	135.417.101.158	9,5	44.798.298.458	9,5	75.301.780		6.619.500	20,36	20,36	Disnakan
Penataan Prasarana Pertanian		Unit pelayanan yang terpelihara	unit	9	206.477.480	6	200.381.096		10.101.000		6.619.500	-		
	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Jumlah gedung RSH dipelihara	unit	1	206.477.480	1	200.381.096		-		-	-		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya								10.101.000		6.619.500			
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang dikembangkan	lokasi	2	304.792.377	2	295.977.115	2	65.200.780		-	0	-	
	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak	laporan	1	149.092.137	1	144.874.027	1	36.400.780		-	0	-	
	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Frekwensi pengawasan	kali	12	155.700.241	12	151.103.088	12	28.800.000		-	0	-	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	%	< 1	8.463.555.546	< 1	2.799.889.261	< 1	1.584.462.062	0,5	1.236.308.494	50,00	78,03	Disnakwan
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi		PHMS yang dikendalikan	penyakit	5	688.098.844	5	665.179.413	5	950.358.161	5	631.670.141	100,00	66,47	
	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Vaksin Anthrax, SE dan AI yang diadakan	dosis/ jenis	30000	211.067.826	30.000	203.968.289	15000	237.046.916	15000	225.284.816	100,00	95,04	
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pemetaan yang dihasilkan	laporan	1	216.182.805	1	208.932.245	1	54.003.753	1	48.958.753	100,00	90,66	
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Penyediaan obat-obatan dan peralatan pelayanan	jenis/ekor	20	260.848.214	15	252.278.879	15	659.307.492	15	357.426.572	100,00	54,21	
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		Jumlah Unit Usaha Produk Peternakan/RPH/RPU/TPH diawasi	unit	61	531.226.609	61	512.938.934	73	113.155.000	79	104.663.000	108,22	92,50	
	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan Hasil penilaian resiko keamanan produk hewan	laporan	1	191.801.772	1	185.271.079	1	58.508.000	1	58.408.000	100,00	99,83	
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Frekwensi Pengawasan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	kali	4	178.840.198	4	172.692.204	10	29.497.000	10	21.620.000	100,00	73,30	
	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Frekwensi pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan lintas provinsi	kali	12	160.584.639	12	154.975.652	12	25.150.000	12	24.635.000	100,00	97,95	
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		Jumlah RPH dan Kelompok Pengolah Hasil Peternakan yang Tersertifikasi		5	724.045.979	5	700.932.804	5	458.466.834	5	439.173.286	100,00	95,79	
	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah RPH/ Unit Usaha Produk Ternak Ber NKV (unit)	unit	5	218.156.134	5	210.847.311	5	17.840.594	5	17.360.574	100,00	97,31	
	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah UMKM Ber NKV/ Bersertifikat (unit)	unit	15	505.889.844	10	490.085.493	5	288.302.240	5	269.498.712	100,00	93,48	
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner								152.324.000	5	152.314.000		99,99	
Kesejahteraan Hewan		Jumlah Pemotongan Betina Produktif yang Dikendalikan Di RPH	persen	1	437.273.131	1	422.627.115	1	62.482.067	1	60.802.067	100,00	97,31	
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah peserta bimtek NKV	orang	50	217.242.515	50	209.960.667	5	31.000.667	8	30.600.667	160,00	98,71	
	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah RPH Diawasi	unit	61	220.030.616	61	212.666.447	73	31.481.400	73	30.201.400	100,00	95,93	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	100	1.278.805.431	100	423.050.759	100	236.782.455	100	174.245.215	100,0	73,59	Disnakwan
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah produk hasil peternakan yang dipamerkan	kegiatan	10	260.536.230	10	252.843.726	10	193.633.000	10	154.298.960	100,00	79,69	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah produk hasil peternakan yang dipamerkan	kegiatan	10	260.536.230	10	252.843.726	10	193.633.000	10	154.298.960	100,00	79,69	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah Kelompok Berbasis Korporasi	korporasi	3	175.485.402	3	170.207.032	3	43.149.455	3	19.946.255	100,00	46,23	
	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	jumlah koorporasi tersosialisasi	korporasi	3	93.430.599	3	90.574.952	1	26.407.985	1	6.781.891	100,00	25,68	
	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi yang dibina	lembaga	5	44.498.718	3	43.184.864	3	16.741.470	3	13.164.364	100,00	78,63	
	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi yang dievaluasi	dokumen	5	37.556.085	3	36.447.217	0	-	0	-			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Fasilitasi Sarana Pertanian	%	2,05	64.204.913.319	1,99	19.956.291.589	1153	29.235.687.219	1128,36	28.247.367.166	97,86	96,62	Distanbun
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian				75	14.375.159.070			335	14.144.206.309	335	13.932.046.470	100,00	98,50	
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian pra panen yang diadakan/ diserahkan ke kelompok tani		75	14.375.159.070			335	14.144.206.309	335	13.932.046.470	100,00	98,50	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman				4048	49.305.227.080			818	15091480910	793,36	14315320696	96,99	94,86	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Luasan bantuan benih hortikultura		148	7.006.789.800			9	906.914.591	9	893.785.500	100,00	98,55	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Luas bantuan benih tanaman pangan		2.370	6.620.607.880			97	875.519.402	72,36	548.223.475	74,60	62,62	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Luas bantuan pengembangan tanaman perkebunan		1.530	35.677.829.400			712	13.309.046.917	712	12.873.311.721	100,00	96,73	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Persentase ketersediaan benih tanaman	%	498	6.620.607.880			1	503.129.400	0	259.197.200			
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Benih Bermutu Tanaman Pangan		498	6.620.607.880			96	503.129.400	0	259.197.200			
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Persentase ketersediaan benih tanaman	%	444.885	71.355.658.800			2	117.407.700	0	16.472.000			
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikasi benih perkebunan yang terbit		273	35.677.829.400			1	73.291.700	0	11.072.000			
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah benih /bibit sumber perkebunan		444.612	35.677.829.400			91	44.116.000	0	5.400.000			
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Persentase ketersediaan benih tanaman	%	5.793	35.677.829.400			1	1.603.000	0	-			
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah kebun benih yang direhabilitasi		5.793	35.677.829.400			1	1.603.000	0	-			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	%	96,79	267.360.989.055		79.975.449.202		84.675.550.406	0	68.918.451.847		81,39	Distanbun
		Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	10	-		-							
Penataan Prasarana Pertanian				708	210.857.059.574			270	84.675.550.406	270	68.918.451.847	100,00	81,39	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani Yang Dibuat/dibangun		553	111.490.096.051			221	46.835.737.383	221	37.346.772.400	100,00	79,74	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Yang Dibuat/dibangun		153	35.937.090.995			48	11.830.923.323	48	8.711.310.000	100,00	73,63	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Unit prasarana pertanian lainnya yang diadakan		2	63.429.872.528			1	26.008.889.700	1	22.860.369.447	100,00	87,89	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96,5	1.229.042.136	96	434.192.818	1	42.385.000	1	42.385.000	100,00	100,00	Distanbun
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luasan Pengendalian OPT (Perkebunan)		1995	802.442.000			1	42.385.000	1	42.385.000	100,00	100,00	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luasan Pengendalian OPT (Perkebunan)		1995	802.442.000			1	42.385.000	0	42.385.000	-	100,00	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	100	18.894.573.000	70	6.731.344.000	861	6.309.929.600	861	3.948.860.456	100,00	62,58	Distanbun
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Persentase BPP yang meningkat klasifikasi kelas BPP nya	%	607	7.854.246.000			131	4.009.929.600	131	1.986.392.653	100,00	49,54	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah siswa SMKP Pertanian Mtrm yang difasilitasi		607	7.854.246.000			71	2997666500	71	1896774160	100,00	63,28	
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Persentase BPP yang meningkat klasifikasi kelas BPP nya	%	360	7.854.246.000			60	1012263100	60	89618493	100,00	8,85	
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah siswa SMKP Pertanian Bima yang difasilitasi		360	7.854.246.000			730	2.300.000.000	730	1.962.467.803	100,00	85,32	
	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian (ASN/THL dan Swadaya/Swasta) Yang ditingkatkan kapasitasnya		640	2.546.319.100			420	1.390.000.000	420	1.167.289.723	100,00	83,98	
	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah penyuluh ASN/THL yang ditingkatkan kapasitasnya		490	1.785.504.100			310	910.000.000	310	795.178.080	100,00	87,38	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		Cakupan wilayah laut, pesisir dan PPK yang dikelola secara berkelanjutan	%			4,51	4.909.615.839	4,51	6.151.644.500	4,56	6.076.548.206	101,11	98,78	Dislutkan
Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Luas ruang laut dan pesisir yang terkelola	Ha			126.311	429.130.000	131318	2.658.921.500	132948	2.594.759.273	101,24	97,59	
	Penyusunan dan penetapan rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					12.00	54.514,221		47.869.000		47.698.793		99,64	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luas kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri	Ha			10	3,025,201,219	126311	2.611.052.500	132157	2.547.060.480	104,63	97,55	
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		Jumlah pelaku usaha Pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi yg sudah berizin	Unit					12	13.173.000	42	13.124.000	350,00	99,63	
	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah pelaku usaha Pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi yg sudah berizin	Unit					12	13.173.000	42	13.124.000	350,00	99,63	
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		jumlah masyarakat pesisir mandiri	orang					6	3.479.550.000	6	3.468.664.933	100,00	99,69	
	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	produksi garam rakyat	Ton					185000	3.479.550.000	80000	3.468.664.933	43,24	99,69	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	Ton			249.099	8.708.211.521	249099	11.913.315.600	247015	10.778.756.047	99,16	90,48	Dislutkan
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		Produksi Perikanan tangkap Non Pelabuhan	Ton			227.099	1,667,548,153	227099	2.340.347.500	222313	2.197.467.647	97,89	93,89	
	Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	Data dan informasi statistik perikanan tangkap	dok			30	350,000,000	1	50.000.000	1	50.000.000	100,00	100,00	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil	unit			75.00	25,000,000	55	2.290.347.500	55	2.147.467.647	100,00	93,76	
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM	unit			500.00	220,000,000	1	9.570.448.100	1	8.578.768.400	100,00	89,64	
	Penentuan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan					1.00	740,000,000		4.573.100		4.573.100		100,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pelabuhan	unit			50.00	70,000,000	5	9.525.105.000	5	8.534.477.800	100,00	89,60	
Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		Jumlah izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang terbit	izin			200.00	108,494,640	50	2.520.000	212	2.520.000	424,00	100,00	
	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah penerbitan persetujuan	dokumen			500.00	250,000,000	50	2.520.000	212	2.520.000	424,00	100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (termasuk budidaya lobster, KRPL/P2L)		Produksi Perikanan Budidaya	Ton			1.219.005	3.795.727.604	1013060	8.034.716.100	954440	7.504.062.100	94,21	93,40	Dislutkan
Pengelolaan Pembudidayaan ikan di laut		Jumlah sarana dan prasarana pembudidayaan ikan d laut yang tersedia	unit			5	50,000,000		8.034.716.100		7.504.062.100		93,40	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut	Jumlah penyediaan unit prasarana budidaya ikan di laut	unit			15,00	1,668,769,576	0	2.065.000	0	1.900.000		92,01	
	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang tersedia	paket			3,00	451,214,213	15	5.471.968.000	15	5.153.062.457	100,00	94,17	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana pembudidayaan ikan di laut	Jumlah sarana pembudidayaan ikan di laut yang tersedia	unit			200.000	1,475,743,815	4	268.600.000	4	235.773.530	100,00	87,78	
	Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kab/kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan air payau dan ikan air tawar yang tersedia	unit					6	2.292.083.100	6	2.113.326.350	100,00	92,20	
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%			99,92	1.962.524.606	99,92	3.124.980.000	100	3.037.744.039	100	97,21	Dislutkan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%			99,92	151,147,779	99,92	3.124.980.000	100	3.037.744.039	100,08	97,21	
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil		Jumlah dokumen hasil pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	Dokumen					12	92.500.000	12	88.900.000	100,00	96,11	
		Jumlah pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang terawasi	unit					12		42		350,00		
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 mil		Jumlah dokumen hasil pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	unit					159	26.980.000	159	25.289.030	100,00	93,73	
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		Jumlah pokmaswas yang terbina di CDK Bidom	kelompok						3.005.500.000		2.923.555.009		97,27	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Produksi olahan hasil perikanan	Ton			214373	1.352.738.477	214373	67.112.040	172083	66.064.500	80,27	98,44	Dislutkan
Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi penerbitannya	izin			5	109.017.540	1		1		100,00		
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil yang valid dan akurat	Dokumen					2	-	2	-	100,00		
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Produksi olahan hasil perikanan dari pelaku usaha yang menerapkan GMP	ton					21313	28.590.000	21313	27.590.000	100,00	96,50	
	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah rekomendasi sertifikat keamanan pangan (good Manufacturing Procedure) yang terbit	Dokumen					5	28.377.040	17	27.590.000	340,00	97,23	
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah stok ikan yang tersedia dan tersalurkan sebagai bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	ton					348544	38.735.000	342520	38.474.500	98,27	99,33	
	Pemberian Insentif dan fasilitasi bagi pelaku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah pelaku usaha yang menerima insentif dan fasilitasi	orang					40	38.735.000	40	38.474.500	100,00	99,33	
												109,15	82,02	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Sasaran 3: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin		Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Sosial dan Kesehatan (%)	%	100,00		100,00		100,00	240.135.984.263	100,00	74.883.771.679	100,00	31,184	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	-	85	163.526.294.113	85	218.372.720.455		53.968.945.293		24,71	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	2.356.150.635	100	788.655.091	100	461.710.150	80,05	369.592.077	80	38,63	Dinas Sosial
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		Jumlah PMB,KPO dan KTK yang dipulangkan ke daerah asal	Jiwa					400	-	179	-	45	0,00	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Orang PMB,KPO dan KTK yang diberikan Fasilitas Pemulangan ke Daerah Asal	Jiwa					400	465.862.650,00	179	164.075.321,00	45	35,22	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	4,5	53.397.902.044	3,5	17.873.444.354	100	12.754.337.208	97,33	12.452.922.979	97,33	97,64	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		Jumah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani	Jiwa					500	2.104.685.000	400	2.088.735.455	80,00	99,24	
	Penyediaan Permakanaan	Jumah disabilitas mental yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanaan dasar dalam Panti	Jiwa					100	1.286.000.000	100	1.282.427.550	100,00	99,72	
	Penyediaan Sandang	Jumah disabilitas mental yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang dasar dalam Panti	Jiwa					100	70.000.000	100	69.920.000	100,00	99,89	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumah disabilitas mental yang diberikan kebutuhan pengasramaan dalam Panti	Jiwa					0	-	0	-			
	Penyediaan Alat Bantu	Jumah penyandang disabilitas yang diberikan kebutuhan alat bantu/ aksesabilitas	Jiwa					400	589.250.000	400	580.409.375	100,00	98,50	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumah disabilitas mental yang diberikan pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dalam Panti	Jiwa					100	109.875.000	100	108.224.530	100,00	98,50	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumah disabilitas mental yang diberikan bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial dalam Panti	Jiwa					100	46.560.000	100	44.880.000	100,00	96,39	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumah disabilitas mental yang diberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Panti	Jiwa					100	3.000.000	100	2.874.000	100,00	95,80	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Laporan	Laporan					0	-	0	-			
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		Jumah anak terlantar yang tertangani	Jiwa					5245	6.466.293.468	245	6.210.465.415	4,67	96,04	
	Pengasuhan	Jumah anak terlantar yang diberikan pemenuhan pengasuhan dalam Panti	Jiwa					245	90.000.000	140	87.500.000	57,14	97,22	
	Penyediaan Makanan	Jumah anak terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanaan dasar dalam Panti	Jiwa					245	1.575.180.000	140	1.549.281.000	57,14	98,36	
	Penyediaan Sandang	Jumah anak terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang dasar dalam Panti	Jiwa					245	121.000.000	140	121.000.000	57,14	100,00	
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumah anak terlantar yang diberikan kebutuhan pengasramaan dalam Panti	Jiwa					245	88.795.148	140	88.514.124	57,14	99,68	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang diberikan kebutuhan perbekalan kesehatan dalam Panti	Jiwa					245	56.895.710	140	40.238.100	57,14	70,72	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak terlantar yang diberikan bimbingan fisik, mental dan sosial dalam Panti	Jiwa					245	725.748.600	140	724.188.326	57,14	99,79	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak terlantar yang diberikan layanan pendidikan dasar dalam Pant	Jiwa					245	315.120.000	140	315.115.700	57,14	100,00	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak terlantar yang diberikan kebutuhan reunifikasi dalam Pant	Jiwa					245	35.000.000	140	35.000.000	57,14	100,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant	Jumlah anak yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan penanganan korban tindak kekerasan anak	Jiwa					5000	3.458.554.010	105	3.249.628.165	2,10	93,96	
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant		Jumah lanjut ar yang tertangani	Orang						2.351.279.280		2.336.584.824		99,38	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Lansia terlantar yang di berikan pemenuhan kebutuhan permakanan dalam Pant	Orang					130	1.719.445.000	130	1.711.549.375	100,00	99,54	
	Penyediaan Sandang	Kapasitas Lansia terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang dalam Pant	Orang					130	95.297.000	130	95.297.000	100,00	100,00	
	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Jumlah LANSIA terlantar yang mendapatkan kebutuhan pengasramaan dalam pant	Orang					130	176.001.900	130	175.701.900	100,00	99,83	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah ketersediaan alat bantu bagi Lansia dalam pant	Orang					130	-	0	-	-	-	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Sosial	Jumlah Lansia yang mendapatkan fasilitas kesehatan dalam pant	Orang					130	151.105.380	130	151.043.150	100,00	99,96	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Lansia Terlantar yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial dapan Pant	Orang					130	129.180.000	130	129.180.000	100,00	100,00	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Lansia Terlantar yang di berikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Pant	Orang					130	10.800.000	50	10.800.000	38,46	100,00	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Lansia terlantar dalam pant pemerintah yang mendapatkan reunifikasi	Orang					130	30.000.000	50	29.963.399	38,46	99,88	
	Pemulasaraan	Jumlah Lansia terlantar dalam pant pemerintah yang dapat layanan pemulaksaraan	Orang					25	39.450.000	5	33.050.000	20,00	83,78	
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant		Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Pant							985.110.760		984.295.885		99,92	
	Penyediaan Permakanan	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dalam Pant	Orang					75	475.125.000	75	474.424.375	100,00	99,85	
	Penyediaan Sandang	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan sandang dalam Pant	Orang					75	34.650.000	75	34.650.000	100,00	100,00	
	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan asrama dalam Pant	Orang					75	8.406.700	75	8.406.700	100,00	100,00	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan Kesehatan dalam Pant	Orang					75	3.591.560	75	3.591.560	100,00	100,00	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan Bimbingan dalam Pant	Orang					75	67.500.000	75	67.500.000	100,00	100,00	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumah Gepeng yang diberikan bimbingan aktivitas sehari-hari dalam Pant	Orang					75	-	0	-	-	-	
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumah Gepeng yang diberikan Bimbingan keterampilan dasar dalam Pant	Orang					75	380.837.500	75	380.723.250	100,00	99,97	
	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan permakanan dalam Pant	Orang					75	-	0	-	-	-	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Laporan	Laporan					1	15.000.000	0	15.000.000	-	100,00	
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti		Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti							846.968.700		832.841.400		98,33	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di penuhi kebutuhan permakanan di dalam panti	Orang					35	333.383.900	25	332.153.900	71,43	99,63	
	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di penuhi kebutuhan sandang di dalam panti	Orang					35	52.000.000	25	52.000.000	71,43	100,00	
	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di penuhi kebutuhan sarana prasaran asrama/wisma di dalam panti	Orang					35	9.400.000	0	9.400.000	-	100,00	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di penuhi kebutuhan kesehatan di dalam panti	Orang					35	46.456.600	25	36.734.000	71,43	79,07	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang diberikan bimbingan dalam panti	Orang					35	27.189.000	25	25.495.500	71,43	93,77	
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan bimbingan aktivitas sehari-hari dalam panti	Orang					35	-	0	-	-		
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang diberikan bimbingan keterampilan dasar dalam panti	Orang					35	289.750.000	25	288.269.000	71,43	99,49	
	Pemulangan ke Daerah Asal	Volume bagi PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang teridentifikasi dan dipulangkan ke daerah asal	Orang					35	88.789.200	25	88.789.000	71,43	100,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang di berikan pemberdayaan diluar HIV AIDS dan NAPZA	Orang					50	-	0	-	-		
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	37.283.915.612	100	12.479.741.066	100	8.547.216.450	94,78	8.092.311.330	94,78	94,68	Dinas Sosial
Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal									-		-			
	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah rekomendasi pengangkatan anak antar WNI	Rekomendasi					10	-	0	-	-		
	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah rekomendasi pengangkatan anak oleh orang tua tunggal	Rekomendasi					3	-	0	-	-		
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota									8.547.216.450		8.092.311.330		94,68	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM penerima bantuan keluarga cakupan provinsi terfasilitasi	KPM					100	-	0	-	-		
	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK Fakir Miskin yang tertangani melalui bantuan sosial kelompok	KK					2000	5.641.180.000	575	5.439.657.759	28,75	96,43	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KK Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	KK					1200	2.906.036.450	230	2.652.653.571	19,17	91,28	
												58,88	91,56	
Sasaran 4: Meningkatkan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan		Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	87,20	43.679.831.329	86,70	14.468.336.276	86,70	773.787.680	87,20	651.515.400	107,61	84,20	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		Persentase Lumbung Pangan yang dimanfaatkan	%	86,62	770.871.786	79,62	300.963.367	79,617834	-	79,6178	-	100,0		Dinas Ketahanan Pangan
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah Infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya	Persen	9	770.871.786	3	300.963.367	0	-	0	-	-		
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun	Unit	6	594.908.418	2	215.000.000	0	-	-	-	-		
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang dibangun	Unit	1	45.000.000				-		-	-		
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang dibangun	Unit	2	130.963.367	1	85.963.367	0	-		-	-		
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Persentase Ketersediaan informasi Pasokan Pangan Pokok Strategis	Persen	100,00	770.949.100	100,00	278.000.000	100	117.832.600	100	109.309.100	100,0	92,77	Dinas Ketahanan Pangan
		Tingkat ketersediaan energi	KKal/kapita/tahun	8294,57	303.393.880	8041,19	100.158.000	8041,19	29.660.000	4779,47	15.458.700	59,44	52,12	
		Persentase Ketersediaan informasi Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100,00	770.949.100	100,00	278.000.000	100	117.832.600	100	27.827.750	100,00	23,62	
		Persentase stok cadangan pangan pemerintah	%	22,69	1.018.510.000	17,70	405.000.000	6	162.814.300	6	141.118.250	100,00	86,67	
		Tingkat konsumsi energi	KKal/kapita/hari	2.640,80	9.373.297.884	2.563,50	2.995.365.930	2563,5	1.639.836.400	2442	266.352.900	95,26	16,24	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Tingkat akurasi data laporan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Persen	100,00	770.949.100	100,00	278.000.000	100	117.832.600	100	109.309.100	100,00	92,77	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Jenis Laporan Analisis Ketersediaan Pangan	Dokumen	2	303.393.880	2	100.158.000	2	29.660.000	2	29.622.370	100,00	99,87	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Tingkat akurasi data laporan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan (Persen)	Persen	100,00	770.949.100	100,00	278.000.000	100	117.832.600	100	109.309.100	100,00	92,77	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Stok Cadangan Masyarakat (CPM)	Ton	25	230.000.000	10	100.000.000	3	26.015.000	0	21.015.000	-	80,78	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Jenis Laporan Analisis Distribusi Pangan	Dokumen	6	265.000.600	2	90.000.000	2	20.229.500	2	20.104.500	100,00	99,38	
	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah LDPM/PUPM/Pasar Mintra Tani yang dibina	Unit	3	275.948.500	1	88.000.000	1	71.588.100	1	68.189.600	100,00	95,25	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Kadar air maksimal Cadangan Pangan Pemerintah (Persen)	Persen	14,00	1.018.510.000	14,00	405.000.000	14	162.814.300	14	152.826.800	100,00	93,87	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi	Ton	45	1.018.510.000	15	405.000.000	10	162.814.300	10	152.826.800	100,00	93,87	
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Rasio konsumsi sayur dan buah terhadap konsumsi ideal	Persen	90	9.373.297.884	90	2.995.365.930	90	1.399.836.400	110,855	1.377.376.000	123,17	98,40	
	Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Event Promosi yang diikuti	Event	3	242.509.084	1	75.427.930	1	37.000.000	1	29.518.000	100,00	79,78	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BSA)	Jumlah KRPL/P2L yang dikembangkan	P2L	144	9.130.788.800	40	2.919.938.000	24	1.362.836.400	24	1.347.858.000	100,00	98,90	
		Jumlah orang yang menerima informasi Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Orang	3600	-	1200	-	1200	-	1100	-	91,67		
Program Penanganan Kerawanan Pangan		Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	Persen	3,77	1.268.451.063	4,77	485.048.161	4,77	465.253.000	2,24	360.113.500	46,96	77,40	Dinas Ketahanan Pangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Persentase Penurunan Jumlah Desa Rentan Rawan Pangan	Persen	1	1.268.451.063	1	485.048.161	1	465.253.000	0	360.113.500	-	77,40	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Kelompok/sekolah yang ditumbuhkan dalam rangka penanganan kerawanan pangan	Kelompok/ Sekolah	8	540.951.063	3	235.048.161	2	-	-	-	-		
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penduduk yang difasilitasi bantuan hibah pangan	Orang	1500	727.500.000	500	250.000.000	2750	465.253.000	2750	360.113.500	100,00	77,40	
Program Pengawasan Keamanan Pangan		Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	90	1.857.153.698	85,00	679.047.614	85	190.702.080	100	182.092.800	117,6	95,49	Dinas Ketahanan Pangan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1) Tingkat akurasi informasi pangan segar berbasis data pengawasan	Persen	100	495.420.000	100	120.000.000	100	42.285.100	100	39.740.100	100,00	93,98	
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Petugas, Pelaku Usaha serta Masyarakat yang memahami Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Orang	150	495.420.000	50	120.000.000	50	42.285.100	150	39.740.100	300,00	93,98	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2) Tingkat akurasi pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Dokumen	1	-	0	-	0	-	-	-	-	-	
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang disertifikasi dan diawasi	Persen	80	828.192.667	80	316.179.691	80	77.898.780	80	76.295.300	100,00	97,94	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2) Tingkat akurasi pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Sertifikat	195	828.192.667	65	316.179.691	65	77.898.780	65	76.295.300	100,00	97,94	
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Frekwensi Bimwas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Persen	80	533.541.031	80	242.867.923	80	70.518.200	80	66.057.400	100,00	93,67	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji	Kali	100	252.737.289	4	115.046.036	4	44.418.200	4	43.797.400	100,00	98,60	
			Komoditi	100	280.803.742	20	127.821.888	20	26.100.000	20	22.260.000	82,85	84,65	
Sasaran 5: Terpuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Cakupan Air Minum	%	80,59		78,45		78,45	4168599,79	80,59	3395737,08	100,84	81,46	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Cakupan air minum	%	80,59	10.224.348.000	78,45	3.337.898.000	76	4.168.599,8	76,48	3.395.737,08	100,63	81,46	Dinas PUPR
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah SPAM yang dikelola dan dikembangkan	SR			240	3.389.577.710	240	4.168.599,8	240	3.395.737,00	100,00	81,46	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis SPAM yang tersusun	Dok			4	218.260.001	4	216.823,4	4	21.444,00	100,00	9,89	
	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah/KK terlayani SPAM Jaringan perpipaan yang dibangun	SR			240	3.171.317.709	240	3.951.776,4	240	3.181.297,00	100,00	80,50	
												100,16	63,33	
Sasaran 5: Terpuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	82,46		80,91		80,91	321.626.106.842	82,46	273.462.246.143	101,14	85,02	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100	-	97,00	163.526.294.113	97	118.684.507.592		114.132.887.681	-	96,16	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	253391,4	587.290.665.869	84.488	163.032.669.005	84487,8	202.941.599.250		159.329.358.462	-	78,51	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Luasan Prasarana dalam kondisi baik	Ha					85		94,96				
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		Tersedianya prasarana sarana utilitas Permukiman	%	100	587.290.665.869	100	163.032.669.005	100	202.941.599.250	100	159.329.358.462	100,00	78,51	
	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tersedianya Perencanaan penyediaan PSU Permukiman	dok	3	1.029.079.161	1	285.673.742	1	225.000.000	1	217.050.500	100,00	96,47	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Tersedianya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang fungsi permukiman	paket	2931	586.261.586.708	814	162.746.995.263	836	202.716.599.250	1564	159.112.307.962	187,08	78,49	
												77,42	85,63	
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Rasio Elektrifikasi	%	99,99	18.005.408.000	99,88	255.882.935	99,88	397.995.639	99,99	391.679.337	100,10	98,41	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN		Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik		19,18	1882329210	17	106633704	17	106633704	19,16	103584062	112,71	97,14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PENATAUSAHAAN IZIN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN DENGAN KAPASITAS PENYEDIAAN SAMPAI DENGAN (SEPULUH RIBU) TON PER TAHUN		Jumlah pengelola usaha niaga BBN yang dibina dan diawasi (Izin)		6	214456006	2	29837804	2	29837804	1	29266142	50,00	98,08	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Rekomendasi		6	131729920	2	18429004	2	18429004	1	18187392	50,00	98,69	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Izin		6	82726086	2	11408800	2	11408800	1	11078750	50,00	97,11	
PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI DI WILAYAH PROVINSI		Jumlah fasilitas energi baru terbarukan yang dibangun (unit)		46	1667873204	-	76795900	-	76795900	0	74317920		96,77	
	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah Dokumen		3	356100249	1	22697200	1	22697200	1	22577600	100,00	99,47	
	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah masyarakat yang paham konservasi energi (Orang)		300	268073492	75	32319100	75	32319100	25	30281020	33,33	93,69	
	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah fasilitas EBT yang dibangun		46	1043699463	-	21779600	-	21779600	0	21459300		98,53	
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		Persentase masyarakat yang mendapatkan akses listrik		99,99	5379628787	99,88	291361935	99,88	291361935	99,98	288095275	100,10	98,88	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PENATAUSAHAAN IZIN USAH PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK NON BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK SERTA PENYEWAAN JARINGAN KEPADA PENYEDIA TENAGA LISTRIK DALAM DAERAH PROVINSI		Jumlah pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang diterbitkan		90	285942199	30	35727500	30	35727500	45	34027500	150,00	95,24	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi		90	178715304	30	15010000	30	15010000	45	13310000	150,00	88,67	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin		90	107226895	17	20717500	17	20717500	18	20717500	105,88	100,00	
PENATAUSAHAAN IZIN OPERASI YANG FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI	PENATAUSAHAAN IZIN OPERASI yang FASILITAS INSTALASINYA DALAM DAERAH PROVINSI	Jumlah instalasi tenaga listrik yang diawasi dan dikendalikan		90	285885368	5	17269200	5	17269200	5	17204000	100,00	99,62	
	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan		90	178694216	2	7907600	2	7907600	2	7572500	100,00	95,76	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi		90	107191152	5	9361600	5	9361600	5	9631500	100,00	102,88	
PENGANGGARAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT TIDAK MAMPU, PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BELUM BERKEMBANG, DAERAH TERPENCIL DAN PEDESAAN		Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang terbangun		29,000	4807801220	125	238365235	125	238365235	125	236863775	100,00	99,37	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen		3	268073492	-	-	-	-	0				
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang dibangun		29,000	4539727728	125	238365235	125	238365235	125	236863775	100,00	99,37	
												93,47	97,61	
Sasaran 5: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin		Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	68,95		65,80		65,80	454.660.300	68,95	434.998.500	94,68	95,68	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	7.063.959.946	100	2.526.185.090	100	454.660.300	100	434.998.500	100	95,68	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Rumah tangga menempati hunian layak	%	98,91	-	98,86		98,86						
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			%	100	1.227.471.539	100	438.963.460	100	186.270.600	100	171.151.500	100,00	91,88	
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Terdatanya tingkat kerusakan rumah akibat bencana	dok	3	620.411.785	1	221.869.180	1	53.508.000	1	47.681.000	100,00	89,11	
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Terdatanya dan terverifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program provinsi	%	100	607.059.754	100	217.094.280	100	132.762.600	100	123.470.500	100,00	93,00	
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			%	100	997.844.228	100	356.845.060	100	25.472.300	100	23.582.600	100,00	92,58	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	ok	210	425.158.412	70	152.043.450	70	25.472.300	70	23.582.600	100,00	92,58	
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			%	100	4.838.644.180	100	1.730.376.570	100	247.917.400	100	240.264.400	100,00	96,91	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	unit	169	4.838.644.180	60	1.730.376.570	60	247.917.400	10	240.264.400	16,67	96,91	
												89,58	93,58	
Sasaran 6: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Inflasi	%	3,0 - 4,0		3,0 - 4,0		3,0 - 4,0	7.195.025.700	3,0 - 4,0	6.421.959.413	44,25	89,26	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Cakupan Pengawasan Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	Persen	80	874.409.856	70	289.831.387	70	326.118.500	60	261.394.838	85,71	80,15	Dinas Perdagangan
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)		Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-MB diterbitkan Bagi Distributor	Pertimbangan Teknis	7	90.000.000	6	88.621.300	6	78.621.300	5	73.940.720	83,33	94,05	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah SIUP - MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP - MB bagi Distributor yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	7	90.000.000	6	88.621.300	6	78.621.300	5	73.940.720	83,33	94,05	
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-Bahan Berbahaya (B2) diterbitkan Bagi Distributor	Pertimbangan Teknis	6	93.000.000	6	90.408.400	6	80.408.400	1	76.773.800	16,67	95,48	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	6	93.000.000	6	90.408.400	6	80.408.400	1	76.773.800	16,67	95,48	
Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar		Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Terkendali	Usaha	7	186.000.000	6	194.088.800	6	167.088.800	6	110.680.318	100,00	66,24	
Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya		Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen	6	93.000.000	6	92.924.600	6	82.924.600	6	56.730.318	100,00	68,41	
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya		Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Laporan	6	93.000.000	6	101.164.200	6	84.164.200	6	53.950.000	100,00	64,10	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	4	5.179.316.326	4	1.716.733.208	4	299.496.600	0,98	270.435.750	24,50	90,30	Dinas Perdagangan
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Komoditi Bapokting Terjamin Ketersediaan Stock dan Harga Di Tingkat Provinsi	Komoditi	32	80.000.000	32	69.986.300	32	69.986.300	32	54.595.750	100,00	78,01	
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	8	40.000.000	7	38.007.900	7	38.007.900	8	28.080.000	114,29	73,88	
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan	8	40.000.000	7	31.978.400	7	31.978.400	2	26.515.750	28,57	82,92	
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		Jumlah Komoditi Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi	Komoditi	32	250.000.000	32	229.510.300	32	229.510.300	32	215.840.000	100,00	94,04	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan	12	100.000.000	12	86.010.300	12	86.010.300	9	76.000.000	75,00	88,36	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan	12	150.000.000	11	143.500.000	11	143.500.000	4	139.840.000	36,36	97,45	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang Berdasarkan Surat Keterangan Asal (SKA)	Persen	7	4.070.555.572	5	1.349.224.006	3	781.344.800	683,78	698.460.020	227,93	89,39	Dinas Perdagangan
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah UKM Berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	UKM	6	1.800.000.000	5	1.709.758.500	5	781.344.800	4	698.460.020	80,00	89,39	
	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	12	850.000.000	10	811.117.500	10	225.417.500	9	194.206.920	90,00	86,15	
	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	40	200.000.000	38	183.156.100	11	231.971.800	11	226.383.400	100,00	97,59	
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	12	300.000.000	11	323.263.700	0	-	0	-			
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk	12	250.000.000	11	231.971.800	9	160.249.400	2	135.368.700	22,22	84,47	
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	10	200.000.000	10	160.249.400	38	163.706.100	38	142.501.000	100,00	87,05	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Cakupan Penyelesaian Sengketa	Persen	90	3.914.544.303	85	1.297.512.601	85	2.263.843.900	85	2.056.590.910	100,00	90,85	Dinas Perdagangan
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Sengketa Konsumen Yang Ditangani Di Seluruh di Kab/Kota	Kasus	55	2.280.000.000	50	2.047.103.300	50	2.034.906.600	53	1.911.456.920	106,00	93,93	
	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK	55	90.000.000	50	107.275.600	3	83.312.300	4	60.650.700	133,33	72,80	
	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Terjalin Kerjasama	LPKSM	4	290.000.000	4	83.312.300	3	1.846.515.400	3	1.779.601.720	100,00	96,38	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang ditangani	Pengaduan	4	1.900.000.000	3	1.856.515.400	50	105.078.900	53	71.204.500	106,00	67,76	
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Teruji	Komoditi	60	180.000.000	50	224.159.700	8	38.027.600	0	-	-	-	
	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	Komoditi	55	90.000.000	50	93.036.800	8	38.027.600	0	-	-	-	
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Toko Retail di Kab/Kota yang dilakukan Pengawasan Barang Beredar / Jasa	Toko/Retail	4	90.000.000	5	131.122.900	50	190.909.700	10	142.728.990	20,00	74,76	
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan	10	90.000.000	8	76.001.400	5	97.872.900	2	85.551.000	40,00	87,41	
	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus	10	90.000.000	10	76.001.400	54	93.036.800	40	57.177.990	74,07	61,46	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI (Termasuk : Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall)		Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	Persen	100	37.550.068.505	100	12.446.324.087	100	3.524.221.900	30	3.135.077.895	30,00	88,96	Dinas Perdagangan
	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Dalam Negeri Terpromosi	Produk	30	5.894.639.381	40	2.753.046.900	40	2.277.046.900	20	2.183.190.980	50,00	95,88	
	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri terutama Produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	UMKM	200	5.894.639.381	175	2.753.046.900	175	2.277.046.900	175	2.183.190.980	100,00	95,88	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah Jenis Produk Dalam Negeri Terpasarkan	Jenis Produk	14	2.000.000.000	12	1.083.699.900	12	1.076.353.300	10	951.886.915	83,33	88,44	
	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri terutama Produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	200	2.000.000.000	175	1.083.699.900	175	1.076.353.300	175	951.886.915	100,00	88,44	
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah UKM Terakomodir di Retail	UKM	30	370.000.000	25	258.805.600	25	170.821.700	47	-	188,00	-	
	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan	4	175.000.000	3	166.310.600	3	130.154.200	3	-	100,00	-	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	12	95.000.000	12	92.495.000	12	40.667.500	12	-	100,00	-	
												79,88	74,36	
Sasaran 7: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup		Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp0,00	11943,70		11603,52		11603,52	5.890.285.650	11944	5.639.898.850	92,05	95,75	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Cakupan Fasilitas Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	100	4.833.875.000	100	490.000.000	100	5.890.285.650	100	5.639.898.850	100,00	95,75	Dinas Perdagangan
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		Jumlah Kab/Kota Tersedia Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Kab/Kota	10	8.680.000.000	10	7.188.888.300	9	5.890.285.650	10	5.639.898.850	111,11	95,75	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit	1300	8.500.000.000	1200	7.012.582.500	1200	5.829.170.850	1065	5.639.898.850	88,75	96,75	
	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas	Kali	175	180.000.000	150	176.305.800	1	61.114.800	0	-	-	-	
												74,97	72,06	
Tujuan 2: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan		Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%	-0,08										
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata		Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Miliar	137,24	35.356.295.970	129,78	15.985.161.431	129,78	6.673.026.263	137,24	5.644.515.862	217,83	84,59	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Peningkatan Persentase Destinasi Pariwisata Yang Minimal Dikembangkan	%	100	16.580.012.830	85,86	5.503.206.408	85,86	3.102.255.128	91,92	2.177.876.093	107,06	70,20	Dinas Pariwisata
		Persentase Geosite yang tertata	%	50	-	50	-	50	-	50	-	100,00	-	
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi									100.000.000		99.930.000		99,93	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi								100.000.000		99.930.000		99,93	
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Jumlah Kawasan Pariwisata Yang Dikembangkan	Kawasan	11	2.000.408.500	11	92.741.600	3	100.000.000	2	99.418.000	66,67	99,42	
	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	2	325.955.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Pariwisata	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	1	378.843.500	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Pariwisata Yang Minimal Berkembang	Kawasan	1	750.075.000	11	92.741.600	3	100.000.000	2	99.418.000	66,67	99,42	
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang tersedia dan Terpelihara Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit	4	545.535.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Daya tarik Destinasi Pariwisata Rintisan Yang Minimal Berkembang	%	14,14	2.500.000.000	85,86	2.558.536.000	85,86	1.892.925.514	0	1.839.854.213	-	97,20	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Pariwisata Yang Minimal Berkembang	Destinasi	17	1.959.749.800	11 KSPD	2.558.536.000	20	1.771.870.214	17	1.723.186.313	85,00	97,25	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang tersedia dan Terpelihara Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Yang Tersedia dan terpelihara	Unit	3	540.250.200	-	-	-	121.055.300	-	116.667.900		96,38	
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten, Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Daya Tarik Destinasi Pariwisata Yang Minimal Berkembang	Desa Wisata	30	1.040.011.000	85,86	73.885.800	85	151.740.000	2	138.673.880	2,35	91,39	
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata Yang Terbina	Desa Wisata	3 Laporan	651.583.000	2000 Tempat Usaha	73.885.800	85	151.740.000	2	138.673.880	2,35	91,39	
	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	98	388.428.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pemasaran Pariwisata		Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang		7.391.905.747	2.000.000	2.446.751.761	2000000	3.164.453.725	1376295	3.066.792.323	68,81	96,91	Dinas Pariwisata
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%		5.036.461.400	20	1.650.413.900	30	3.164.453.725	42,76	3.066.792.323	142,53	96,91	
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Media Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Media	5	1.341.839.200	3	1.049.149.000	24	1.904.220.000	24	1.900.795.140	100,00	99,82	
	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Event Pariwisata Yang Terlaksana	Event	13	2.756.400.000	50	300.634.900	20	1.158.767.425	21	1.144.398.383	105,00	98,76	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Data Publikasi Pariwisata	Publikasi	4	300.005.000	12	150.135.000	19	3.467.500	32	1.600.000	168,42	46,14	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Yang Terjalin	Jumlah Kemitraan Pemasaran Pariwisata Yang Terjalin	Perjanjian	5	638.217.200	15	150.495.000	15	97.998.800	2	19.998.800	13,33	20,41	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Persentase HaKI Yang Telah Memberikan Kontribusi Dalam Pertambahan Nilai Ekonomi Kreatif	%		606.633.173	35,21	209.889.754	35,21	343.285.450	41,03	342.865.486	116,53	99,88	Dinas Pariwisata
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Tersertifikasi HaKI	Orang	10	5.270.345.000	12	780.300.000	20	343.285.450	45	342.865.486	225,00	99,88	
	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota kreatif Yang Tersedia	Unit	1	150.000.000	-	-	-	211.670.000	-	211.283.000		99,82	
	Perluasan Pasar Produktif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dipasarkan didalam dan luar negeri	Produk	14	2.143.212.500	10	386.600.000	10	81.615.000	315	81.585.000	3.150,0	99,96	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Ruang Kreasi dan Jumlah Orang Kreatif yang Terbina	Pelaku Ekraf	6	1.200.000.000	10	261.600.000	12	50.000.450	13	49.997.486	108,33	99,99	
	Koordinasi dan Singkronisasi Usaha kreatif Sepanjang Rantai Produksi Dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Singkronisasi Usaha kreatif Sepanjang Rantai Produksi Dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Laporan	1	277.132.500	-	-	-	-	-	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah usaha kreatif bagi pemula yang terdata	Per Sub Sektor	3	1.500.000.000	12	132.100.000	10	50.450.000	4	340.000	40,00	0,67	
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Meningkatnya Pemngelolaan kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif	%	5	200.000.000	-	-	-	-	-	-			
	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	200.000.000	-	-	-	-	-	-			
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase SDM Penunjang Layanan Pariwisata Yang Memenuhi Standar	%		3.506.228.054	70	1.160.576.170	70	63.031.960	70,08	56.981.960	100,11	90,40	Dinas Pariwisata
Pelaksanaan Peningkatan Kapastias Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Dilatih	Orang	5	2.500.000.000	50	101.100.000	60	63.031.960	60	56.981.960	100,00	90,40	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan Yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	120	1.035.093.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pokdarwis yang di Latih	Pokdarwis	240	253.661.760	30	49.600.000	30	6.540.225	30	6.090.225	100,00	93,12	
	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM pariwisata bidang Homestay dan Pemandu wisata yang dilatih	Orang	480	242.380.800	50	51.500.000	30	56.491.735	30	50.891.735	100,00	90,09	
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang Yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	50	634.431.860	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	20	266.651.860	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	67.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
												220,36	87,14	
Tujuan 3:	Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri (%)	%	4,57										
Sasaran 1:	Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	179,91		173,02	11.781.814.100	173,02	18.436.344.896	179,91	14.802.021.758	50,86	80,29	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	102.322.211.223	100	35.280.281.729	100	8.895.593.439	10,74	8.128.804.750	10,74	91,38	Dinas Perindustrian
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	IKM			100	8.415.615.800	100	8.895.593.439	20	8.128.804.750	20,00	91,38	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen			1	201.500.000	1	385.967.550	1	347.473.510	100,00	90,03	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan industri	IKM			40	405.803.000	40	405.803.000	40	401.561.644	100,00	98,95	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM Tembakau yang mendapatkan pelatihan pengembangan industri	IKM			100	2.465.028.200	100	2.118.646.600	0	1.953.833.057	0,00	92,22	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang terlatih industri kerajinan dan permesinan	IKM			80	319.554.800	80	551.889.826	20	490.999.573	25,00	88,97	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang mendapat sarana dan prasarana industri	IKM			200	4.993.819.800	200	5.404.205.633	10	4.934.936.966	12,50	91,32	
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen laporan evaluasi kineja daerah yang tersusun	dokumen			1	29.910.000	1	29.080.830	0	-	0,00	-	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%	3,55	3.018.338.892	140	1.040.710.958	140	1.109.169.725	1,42	817.117.505	1,01	73,67	Dinas Perindustrian
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah perizinan dan perluasan usaha industri NTB yang terfasilitasi	IKM			140	1.497.415.200	140	1.109.169.725	20	817.117.505	19,02	73,67	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi perizinan industri	IKM			140	852.455.200	140	315.058.875	20	247.911.235	2,14	78,69	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah masterplan kawasan industri halal NTB yang tersusun	dokumen			2	644.960.000	2	794.110.850	2	569.206.270	100,00	71,68	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	2.043.024.494	1	704.426.525	1	470.341.043	0,112	313.390.384	11,20	32,76	Dinas Perindustrian
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%			1	463.883.000	1	470.341.043	11,2283	313.390.384	11,23	66,63	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen data industri yang tersusun	dokumen			1	258.733.000	1	308.490.243	0	194.704.840	0,00	63,12	
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Ikm yang mendapat sertifikat pelatihan industri kreatif	IKM			80	140.000.000	80	120.000.000	40	118.685.544	50,00	98,90	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah IKM yang di pantau dan dievaluasi	IKM			100	65.150.000	100	41.850.800	0	-	0,00	-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	6,71	4.806.536.363	6,35	1.597.038.675	6,352459	1.725.780.000	6,35246	1.268.362.450	100,00	73,50	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan									1.725.780.000		1.268.362.450		73,50	
	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan								1.725.780.000		1.268.362.450		73,50	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	56,75	7.967.004.066	53,53	2.647.148.104	53,533191	2.527.673.979		2.264.737.692	-	89,60	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Jumlah SDM pengelola koperasi dan pelaku UKM yang dilatih	orang											
		Jumlah SDM pengelola koperasi dan pelaku UKM yang dibina	orang											
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			orang					500	2.527.673.979	849	2.264.737.692	169,80	89,60	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi								2.527.673.979		2.264.737.692		89,60	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		1. Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100		100	3.707.786.710	100	3.707.786.710	100	2.009.608.977	100	54,20	Dinas Pemuda dan Olahraga
		2. Persentase pemuda peserta pelatihan yang bersertifikat	%			100		100		100		100,00		
Kegiatan 1 : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan KewenanganProvinsi		Terlaksananya Pelatihan Kecakapan Pemuda	Orang			160	3.707.786.710	160	3.707.786.710	160	2.009.608.977	100,00	54,20	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sub kegiatan 1 : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tk. Provinsi yang terseleksi	Orang	15	15	79.715.200	15	79.715.200	21	79.715.200	140,00	100,00		
	Sub kegiatan 2 : Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Dilatih	Orang	100	100	43.257.300	100	43.257.300	100	43.257.300	100,00	100,00		
	Sub kegiatan 3 : Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	18	18	184.904.910	18	184.904.910	18	184.904.910	100,00	100,00		
	Sub kegiatan 4 :Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan	Unit	2	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	100,00	100,00		
	Sub kegiatan 5 : Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi	Lembaga	20	51	2.840.000.000	51	2.840.000.000	51	2.620.000.000	100,00	92,25		
	Sub kegiatan 6 : Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda	Orang	60	20	519.909.300	20	519.909.300	20	5.336.549	100,00	1,03		
											57,68	76,44		
Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17	79.821.458.869	3,19	26.193.022.352	20,00	3.746.368.780	3,17	3.655.658.024	109,40	97,58	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	18	3.481.991.780	17	1.232.588.784	17	1.395.498.920	17,49	1.379.052.451	102,9	98,82	Dsinakertrans
Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	orang	300	3.241.733.400	430	1.142.686.994	446	1.319.669.600	446	1.303.275.651	100,00	98,76	
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BID. LATTAS]	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	Orang	750	1.092.070.448	300	390.000.000	300	28.892.000	300	28.480.000	100,00	98,57	
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BLK]	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	orang	384	2.044.288.965	128	700.000.000	128	740.752.300	128	725.161.151	100,00	97,90	
	Sub kegiatan Koordinasi Lintas lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Persentase kejuruan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industry	%	6	105.373.987	2	52.686.994	100	550.025.300	100	549.634.500	100,00	99,93	
Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	lembaga LPK	100	147.454.000	40	58.000.000	63,29	16.636.840	48,16	16.596.800	76,09	99,76	
	Sub Kegiatan Survei Dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS].	Jumlah LPK yang di Akreditasi	lembaga LPK	100	147.454.000	40	58.000.000	63,29	16.636.840	48,16	16.596.800	76,09	99,76	
Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)	OT	55	92.804.380	20	31.901.790	20	59.192.480	20	59.180.000	100,00	99,98	
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja [BLK]	jumlah peserta monev yang telah mendapat pekerjaan (forma/ informal)	OT	55	92.804.380	20	31.901.790	20	59.192.480	25	59.180.000	125,00	99,98	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan.	%	57,48	3.391.251.944	51,09	1.115.004.981	51,09	716.196.200	71,2929	709.127.993	139,5	99,01	Dsinakertrans
Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota		jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL		480	910.699.800	160	303.566.600	30	20.186.500	109	19.826.400	363,33	98,22	
	Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal) [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.	Orang	480	910.699.800	160	303.566.600	30	20.186.500	299	19.826.400	996,67	98,22	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja			Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang	5.250	388.974.000	1.750	129.658.000	1750	13.222.000	0	13.222.000	-	100,00	
	Sub Kegiatan Job Fair /Buruh Kerja [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang	5.250	388.974.000	1.750	129.658.000	1750	13.222.000	588	13.222.000	33,60	100,00	
Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi		Jumlah PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan.	orang	26.438	1.995.499.514	23.310	649.780.382	11830	676.099.000	23291	669.390.893	196,88	99,01	
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) /pekerja migran Indonesia	Jumlah PMI bermaslah yang ditangani	orang	5.250	618.360.000	1.750	206.120.000	1750	354.116.000	2016	352.992.693	115,20	99,68	
	Penyediaan Layanan terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah PMI ke luar negeri yang dilayani di LTSA	orang	70.500	1.033.252.214	21.500	329.031.282	10000	9.703.200	21415	9.683.200	214,15	99,79	
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari kerja, PMI Purna Yang Diberdayakan	orang	260	343.887.300	60	114.629.100	80	312.279.800	80	306.715.000	100,00	98,22	
Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu)Daerah Provinsi		Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	orang	95	96.078.630	75	32.000.000	91	6.688.700	60	6.688.700	65,93	100,00	
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Lebih Dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dalam I (Satu) Daerah Provinsi [BID. PENEMPATAN]	Jumlah perpanjangan IMTA yang diterbitkan	orang	95	96.078.630	75	32.000.000	91	6.688.700	151	6.688.700	165,93	100,00	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase perusahaan yang melaksanakan peraturan perusahaan	%	23	1.025.630.908	22	337.215.751	22,017837	887.964.800	75,9641	887.674.500	345,0	99,97	Dsinakertrans
Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan	270	743.997.600	90,00	242.999.200	90	137.507.400,00	137	137.437.600	152,22	99,95	
	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi [BID. HI]	Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan	Perusahaan	270	447.631.500	90	144.210.500	90	36.997.000	129	36.997.000	143,33	100,00	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi [BID. HI]	Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan Yang Diberdayakan Melalui Perjanjian KerjasamaTripartit	Lembaga	11	296.366.100	11	98.788.700	11	100.510.400	26	100.440.600	236,36	99,93	
Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektor Kabupaten /Kota (UMSK)		Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Dokumen	11	281.633.308	11	94.216.552	11	750.457.400	25	750.236.900	227,27	99,97	
	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan UMK [BID. HI]	Jumlah jenis dokumen upah minimum yang ditetapkan	Dokumen	11	281.633.308	11	94.216.552	11	750.457.400	25	750.236.900	227,27	99,97	
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		Porsentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	23	3.466.483.656	22	1.139.740.311	22	746.708.860	46,0134	679.803.080	209,2	91,04	Dsinakertrans
Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan	3.175	3.466.483.656	1.055	1.139.740.312	797	746.708.860	1600	679.803.080	200,75	91,04	
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya	Perusahaan	225	269.601.295	75	88.641.833	25	17.088.500	42	14.738.700	168,00	86,25	
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	260	232.905.050	85	76.576.526	20	10.771.000	68	10.771.000	340,00	100,00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	Jumlah Perusahaan Yang Diperiksa Pelaksanaan Norma Kerjanya Di Pulau Lombok	Perusahaan	315	320.895.558	105	105.506.802	40	43.275.000	94	42.995.000	235,00	99,35	
	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya	Perusahaan	195	319.634.697	65	105.092.245	37	21.010.100	99	20.599.800	267,57	98,05	
	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan Yang diperiksa Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan Di Tempat Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	90	219.346.694	30	72.118.693	20	18.873.200	45	18.176.500	225,00	96,31	
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Perusahaan Yang Dibina Pelaksanaan Norma K3-nya	Perusahaan	255	350.935.019	85	115.383.434	35	47.870.000	153	47.420.000	437,14	99,06	
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Sumbawa	Perusahaan	335	231.512.223	110	76.118.580	20	12.856.100	76	10.140.000	380,00	78,87	
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	Jumlah Perusahaan dan tenaga kerja Yang diperiksa Keselamatan Dan Kesehatan Kerjanya Di Pulau Lombok	Perusahaan	1.500	1.521.653.120	500	500.302.199	600	574.964.960	1000	514.962.080	166,67	89,56	
												200,89	97,64	
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan														
Tujuan 1:	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas	Point	12,71										
Sasaran 1:	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	0,00	5.552.000.000	20,00	4.056.566.599,06	20,00	86.236.819.529	0,00	83.406.764.914	150,00	96,72	
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase pembinaan ideologi wawasan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	1.526.591.849	10	506.635.309	10	175.432.464	4	173.738.264	40,00	99,03	Bakesbangpo Idagri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Dokumen	1	562.456.540,81	1	506.635.308,62	3	175.432.464	3	173.738.264	100,00	99,03	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	1	-	1	-	1	-	1	-	100,00		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	1	383.444.004,09	1	379.783.595,42	1	69.306.364	1	67.737.064	100,00	97,74	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen	1	146.337.288,67	1	126.851.713,20	1	106.126.100	1	106.001.200	100,00	99,88	
PROGRAM Peningkatan Kelembagaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik (Termasuk Bale Mediasi)		Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	11,43	11.105.209.927	10,53	3.685.524.366	11,43	8.906.761.730	11,01	8.788.585.730	96	98,67	Bakesbangpo Idagri

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dokumen	1	3.191.596.560,53	1	2.785.524.366,40	1	8.906.761.730	1	8.788.585.730	100,00	98,67	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	1	855.085.701,90	1	680.901.494,82	1	4.851.000.000	1	4.733.000.000	100,00	97,57	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	1	303.454.831,72	1	273.338.331,35	1	1.145.000.670	1	1.144.994.670	100,00	100,00	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dokumen	1	125.732.088,37	1	113.253.755,22	1	50.000.660	1	49.830.660	100,00	99,66	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	1	1.907.323.938,74	1	1.718.030.785,02	1	2.860.760.400	1	2.860.760.400	100,00	100,00	
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	292.643.073.798	100	97.655.935.112	100	70.880.528.425	99,9972	68.541.631.639,00	100,0	96,70	Biro Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual		Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual	Kali	2375	100.348.573.728	793	28.473.459.260	789	32.744.937.985,00	799	31.446.151.054,00	101,27	96,03	
	Sub Kegiatan 1 : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Kali	2370	89.954.926.705	790	27.112.768.160	790	31.046.246.885,00	796	29.747.627.554,00	100,76	95,82	
	Sub Kegiatan 2 : Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Kelembagaan Bina Spiritual Yang Terfasilitasi	Lembaga	5	10.393.647.022	3	1.360.691.100	3	1.392.791.100	3	999.020.000	100,00	71,73	
Kegiatan 2 : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesra Pelayanan Dasar	Dokumen	27	190.236.028.124	5	33.627.332.440	5	37.993.482.440,00	5	36.953.492.985,00	100,00	97,26	
	Sub Kegiatan 1 : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	12	186.708.519.065	2	32.577.200.000	2	35.150.500.000,00	2	34.180.337.575,00	100,00	97,24	
	Sub Kegiatan 2 : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	10	3.025.514.118	2	134.154.240	2	134.154.240,00	2	129.883.800,00	100,00	96,82	
	Sub Kegiatan 3 : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sosial	Dokumen	5	501.994.941	1	915.978.200	1	2.708.828.200,00	1	2.643.271.610,00	100,00	97,58	
Kegiatan 3: Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Dokumen	3	2.058.471.946	3	542.108.000	3	142.108.000,00	3	141.987.600,00	100,00	99,92	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu			Realisasi Kinerja	Realisasi Keu	
	Sub Kegiatan 1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Dokumen	1	855.856.277	1	446.483.000	1	46.483.000	1	46.482.500,00	100,00	100,00	
	Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	1	424.296.999	1	71.659.300	1	71.659.300,00	1	71.643.200,00	100,00	99,98	
	Sub Kegiatan 3 : Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	1	778.318.670	1	23.965.700	1	23.965.700,00	1	23.861.900,00	100,00	99,57	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Bumdes Berprestasi	%	37	9.389.913.516	27	7.924.383.032	27	3.428.742.700	52,54	3.134.446.885	194,6	91,42	DPMDes Dukcapil
		Persentase Lembaga Adat Aktif	%	100		80		65		78,21		120,3		
		Persentase Pokja Posyandu aktif	%	100		80		50		85,13		170,3		
		Persentase Posyantek yang aktif	%	64,96		56,41		56,41		65,81		116,7		
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang telah berperan aktif dalam Pembangunan Desa	%	1. 70 2. 100 3. 100 4. 64.96	24.333.794.000	10	7.924.383.032	1. 27 2. 65 3. 50 4. 56,41	3.428.742.700	10	3.134.446.885	-	91,42		
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Peserta Bimtek Pengelola Lembaga Adat	orang	390	2.019.811.000	30	850.000.000	100	94.400.000	100	94.189.800	100,00	99,78		
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1) Jumlah Peserta Bimtek Aplikasi SIP 2) Posyandu Juara 3) Jumlah Peserta Rakor Pokjanel Posyandu 4) Jumlah desa yang dibina terkait pengelolaan posyandu	1) Desa 2) Posyandu 3) Orang 4) Desa	1) 1.184 2) 18 3) 120 4) 90	3.269.977.000	3	350.000.000	2) 3) 704) 1	700.000.000	1) 100 2) 100 3) 100 4) 100	595.579.235	1) 2) 3) 4)	85,08		
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1) Jumlah desa yang mendapat bantuan mesin untuk pengembangan usaha BUMDes, 2) Jumlah peserta Bimtek pengelolaan manajemen BUMDes, 3) Jumlah desa yang dibina terkait pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDes	1) Desa 2) Orang 3) Desa	1). 303 2). 174 3). 303	15.760.301.000	3	5.279.909.939	1). 12 2). 60 3). 12	955.000.000	1) 12 2) 60 3) 12	944.677.850	1) 100 2) 100 3) 100	98,92		
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	kali	5	642.415.000	4	239.175.100	4	129.499.900	4	129.119.000	100,00	99,71		
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Peserta Bimtek Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Orang	90	449.890.000	45	205.297.993	30	49.842.800	30	49.240.800	100,00	98,79		
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Hibah uang yang diserahkan	Kali	1	2.191.400.000	1	1.000.000.000	1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	100,00	100,00		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	81,82	6.405.431.759	72,73	2.173.198.075	72,73	2.632.930.000		2.580.835.300	-	98,02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									547.580.000		545.276.000		99,58	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan								-		-			
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan								547.580.000		545.276.000		99,58	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi									1.270.350.000		1.265.921.300		99,65	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya								1.270.350.000		1.265.921.300		99,65	
Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									815.000.000		769.638.000		94,43	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah Lembaga penerima hibah Uang / Barang	Lembaga					12	815.000.000		769.638.000		94,43	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	1.426.928.736	100	508.873.145	100	107.236.000		91.942.403		85,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten / Kota									107.236.000		91.942.403		85,74	
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah peserta peningkatan SDM dan Pentas seni budaya ke luar daerah	Orang					100	107.236.000		91.942.403		85,74	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Cakupan pembinaan sejarah	%	100	719.796.541	100	272.477.237	100	105.188.210		95.584.693		90,87	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi									105.188.210		95.584.693		90,87	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah peserta pembinaan SDM lembaga sejarah	Orang					500	105.188.210		95.584.693	-	90,87	
												95,30	95,79	
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah		Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	6,07		5,72		5,72	4.908.591.869	6,07	3.524.001.800	393,88	71,79	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	%	100,00	11.445.268.038	100,00	3.932.903.666	100	3.882.500.614	100	2.511.526.933	100,0	64,69	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	-	100,00	-	100		100		100,0		
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	Kasus	15	407.322.754	16	139.967.115	16	1.492.121.074	3	1.455.208.655	18,75	97,53	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibuntran	Kali	36	245.315.689	12	84.297.106	12	1.028.222.848		998.857.529		97,14	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan	
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum	Kasus	15	1.008.191.008	16	346.441.700	16	79.192.200		79.192.200		100,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Rakor Tibum yang dilaksanakan	Kali	6	147.583.899	2	50.713.817	2	11.000.000		11.000.000		100,00	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum								147.005.826		147.005.526		100,00	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia								219.700.200		219.153.400		99,75	
	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	Perjanjian Kerjasama	3	199.508.733	1	68.556.597	1	-	0	-	-	-	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia	Kali	36	207.814.021	12	71.410.518	12	7.000.000	0	-	-	-	
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Kasus	16	3.577.534.823	17	1.229.337.729	17	2.390.379.540	3	1.056.318.278	17,65	44,19	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	Kali	36	2.740.669.153	12	941.768.050	12	2.369.775.340	3	1.045.434.078	25,00	44,12	
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur	Kali	36	37.665.904	12	12.943.023	12	12.943.023			-	-	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	Kasus	16	799.199.765	17	274.626.656	17	274.626.656	3		17,65	-	
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS Yang Dibina	Orang	131	658.247.230	43	226.191.553	43		0	-	-		
		Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor	Orang	120	458.447.988	40	157.535.129	40		0	-	-		
		Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS	Orang	11		3		3		0	-	-		
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Berkas	5	199.799.242	2	68.656.424	2		0	-	-		
		Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	Kali	5		2		2		0	-	-		
		Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS	Jenis	12		4		4		0	-	-		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA (Termasuk Desa Bersinar)		Persentase Desa bersinar	%	86,21	2.436.780.947	68,96	808.702.907	68,96	283.120.955		282.909.955	-	99,93	Bakesbangpo Idagri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dokumen	1	848.629.511,12	1	764.406.924,04	1	283.120.955		282.909.955	-	99,93	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	1	-	1	-	1	108.190.705		108.190.705	-	100,00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	1	253.260.060,03	1	224.276.077,77	1	114.450.250		114.399.250	-	99,96	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen	1	241.026.358,63	1	217.105.687,99	1	60.480.000		60.320.000	-	99,74	
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi yang berkualitas	%	100	5.727.596.770	100	1.911.317.467	100	231.329.200	142,027	229.046.947	142,0	99,01	Biro Hukum
		Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang berkualitas	%	100		100		100	125.461.100	172,667	124.943.665	172,7	99,59	
		Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Pertama	%	100		100		100	196.560.000	450	193.725.300	450,0	98,56	
		Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Banding	%	100		100		100		1		1,0		
		Persentase Perkara Litigasi yang dimenangkan ditingkat Kasasi	%	100		100		100		3		3,0		
		Persentase Perkara Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan melalui mediasi	%	100		100		100	40.249.000	214,286	37.398.000	214,3	92,92	
		Persentase Produk Hukum yang dapat diakses oleh Masyarakat di JDH, Media Sosial yang berkualitas	%	100		100		100	149.371.000	784,615	144.451.000	784,6	96,71	
Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan		Persentase fasilitasi dan evaluasi Produk Hukum Daerah, MoU dan Perjanjian Kerjasama	%	100	3.900.653.457,15	100	384.747.300,00	100	506.165.300	100	498.441.612	100,00	98,47	
	Sub kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang terbentuk	Perda	50	937.240.588,17	10	119.000.000	10	156.489.000	9	154.246.747	90,00	98,57	
			Perkada	150		30		30		114		380,00		
	Sub kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang terbentuk	Kept. Gub	3500	468.619.122,53	700	60.584.200	700	74.840.200	928	74.800.200	132,57	99,95	
	Sub kegiatan : Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Terdokumentasi dan tersosialisasi kepada masyarakat	Produk Hukum/Perda/Perkada	200	1.222.824.591,97	40	109.571.000	40	149.371.000	123	144.451.000	307,50	96,71	
		Jumlah MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	Naskah	125		25		25		387		1.548		
	Sub kegiatan : Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab./Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi dan terevaluasi	Perda	250	1.271.969.154,48	50	95.592.100	50	125.461.100	75	124.943.665	150,00	99,59	
			Perbup/Perwal	500		100		100		184		184,00		
Kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum		Persentase kasus-kasus hukum yang terfasilitasi	%	100	1.826.943.312,55	100	140.009.000	100	236.809.000	100	231.123.300	100,00	97,60	
	Sub kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah penanganan masalah hukum (Litigasi)	Perkara	20	904.765.524,92	4	99.760.000	4	196.560.000	18	193.725.300	450,00	98,56	
	Sub kegiatan : Fasilitasi Penyelesaian Non Litigasi dan HAM	Jumlah Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	Perkara	20	922.177.787,63	4	40.249.000	4	40.249.000	12	37.398.000	300,00	92,92	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Rencana Aksi HAM (RANHAM)	Dokumen	15		3		3		3				
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani		Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%	82,80								152,33	83,87	
Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	1,00	4.602.682.612	0,90	6.639.046.284,28	0,90	4.741.476.105	1,00	4.729.941.505	140,00	99,76	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Politik	%	100	43.528.305.431	90	5.153.432.345	80	4.021.214.745	100	4.021.186.145	125,0	100,0	Bakesbangpo Idagri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	1	33.671.239.085,96	1	5.103.432.344,89	1	4.166.297.600	1	4.021.186.145	100,00	96,52		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	1	33.148.535.456,60	1	4.636.078.243,00	1	3.766.614.600	1	3.766.326.000	100,00	99,99		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	1	279.641.097,96	1	251.888.001,45	1	4.021.214.745	1	133.879.540	100,00	3,33		
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Dokumen	1	278.062.531,40	1	250.446.100,39	1	4.021.214.745	1	120.980.605	100,00	3,01		
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Ormas yang Aktif	%	83,01	1.631.097.489	81,35	541.317.956	65	720.261.360	58,3	708.755.360	89,69	98,40	Bakesbangpo Idagri
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	1	1.600.137.061,11	1	1.535.613.939,39	1	720.261.360	1	708.755.360	100,00	98,40		
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen	1	1.368.000.489,35	1	1.326.515.857,77	1	630.000.000	1	618.518.000	100,00	98,18		
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen	1	172.786.649,34	1	155.638.366,81	1	38.760.700	1	38.760.700	100,00	100,00		
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	Dokumen					1	51.500.660	1	51.476.660	100,00	99,95		
											102	77,54		

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan		
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu				
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	55,81											
Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	20,47		19,27		19,27	1.197.318.635	20,47	1.175.131.698	142,14	98,147		
		Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	100,00		80,00		80,00		100,00		87,50			
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	65,28	6.231.111.760	52,17	2.021.592.521	52,17	499.247.700	100	497.537.080	191,7	99,66	DP3AP2KB	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		Jumlah perencana PPRG	orang	132	6.125.756.012	43,7	1.987.411.370	66	43.857.900	0	43.585.900		99,38		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perencana PPRG pada Dinas PP Kabupaten Kota di NTB	orang	90	5.664.674.236	30	1.837.820.182	20	-	0	-				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perencana PPRG PD Di provinsi NTB	orang	135	461.081.837	45	149.591.188	46	43.857.900	0	43.585.900		99,38		
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		Proporsi kader perempuan di partai politik	%	116	105.355.914	38,2	652.087.700	36	455.389.800	29	453.951.180	80,56	99,68		
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Kader Parpol Ikut FGD	orang	80	105.355.892	25	34.181.151	36	455.389.800	0	453.951.180		99,68		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	83,07	2.837.249.127	75,52	920.503.730	75,52	156.918.526	100	148.950.380	132,4	94,92	DP3AP2KB	
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	Kasus	711	285.696.859	237	113.641.700	237	31.173.722	344	23.253.722	145,15	74,59		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jml Peserta yang mendapatkan sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	Kasus	237	111.895.897	237	92.689.988	237	31.173.722	66	23.253.722	27,85	74,59		
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								75,52	61.400.044	100	61.352.898	132,42	99,92		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							75,52	-	100	-	132,42			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi							120	61.400.044	97	61.352.898	80,83	99,92		
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		Jumlah SDM penyedia layanan yang di latih/bintek	Orang	40	1.590.842.512	15	190.332.000	15	64.344.760	30	64.343.760	200,00	100,00		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM penyedia layanan yang di latih/bintek	Orang	90	1.238.611.826	30	401.849.362	30	51.964.760	30	51.964.760	100,00	100,00		
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan Penyintas/Korban yang menerima Kebutuhan spesifik dalam situasi darurat dan kondisi khusus.	Orang	1500	352.231.722	500	114.276.075	500	12.380.000	0	12.379.000		99,99		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Index Ketahanan Keluarga	%	15	1.340.778.150	5	434.995.741	5	129.745.756	0	129.284.656		99,64	DP3AP2KB	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target Kinerja	Target Pagu	Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Keuangan
						Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu			
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		Jumlah Desa Model Ketahanan Keluarga	Desa	9	1.340.778.156	3	226.417.200	5	129.745.756	0	129.284.656		99,64	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Motekar Terlatih	Orang	180	926.871.535	60	300.709.792	60	26.650.626	0	26.582.026		99,74	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Puspaga Kewenangan Provinsi	Persen	100	413.906.835	100	134.285.950	50	103.095.130	25	102.702.630	50,00	99,62	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Dokumen Gender	Dokumen	1	200.537.840	1	75.000.000	1	0	0	0			DP3AP2KB
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		Buku Gender dan Anak	Dokumen	5	200.537.960	60	37.994.600		0	0	0			
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Buku Gender dan Anak	Dokumen	5	200.537.960	60	75.000.000	1	0	0	0			
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	42,00	1.490.733.752	80,00	512.037.084	80	138.640.750	70	133.790.141	87,50	96,50	DP3AP2KB
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		Jml Peserta Advokasi dan Temu Anak	orang	240	1.490.733.932	200	385.272.800	8	138.640.750	7	133.790.141	87,50	96,50	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jml Peserta Advokasi dan Edukasi Pembentukan Forum Anak	Orang	100	292.754.857	100	242.506.159	100	88.090.000	30	83.489.391	30,00	94,78	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi (Temu Forum Anak Tk. Provinsi)	Orang	100	325.379.312	100	269.530.924	100	50.550.750	100	50.300.750	100,00	99,51	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		2.123.868.384		727.588.084	68,15	272.765.903	100	265.569.441	146,74	97,36	DP3AP2KB
Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	10			78.550.000	8	90.636.947	8	87.086.490	100,00	96,08	
	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi	Jml Kab/Kota Layak Anak	Persen	10				8	90.636.947	7	87.086.490	87,50	96,08	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			300		100	69.555.000				-			
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	Berita	240	432.470.345		146.444.494		69.555.000		-		-	
	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi (UPTD)		Orang	300	122.860.293			100	146.444.494			-	-	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kemampuan aktivis perlindungan anak dari kekerasan	Orang	1428	1.568.537.949	472	233.448.900	100	68.528.956	0	66.678.956	-	97,30	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kemampuan aktivis PATBM dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan sebanyak 36 orang	Orang	228	1.169.139.168	72			49.751.556		47.901.556		96,28	
							74.007.300			0				

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Target Akhir Perencanaan pada Tahun 2023		Tahun 2022							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target di Dokumen Perencanaan		Target di Perjanjian Kinerja yang		Capaian Kinerja		Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Keuangan			
				Target Kinerja	Target Pagu	Target Kinerja	Target Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Keu					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pemahaman Penyalahgunaan Napza dan PMS sebanyak 300 anak	Orang	1200	399.399.869	400	159.441.600		18.777.400	0	18.777.400		100,00	
												95,63	90,03	
												97,31	86,96	